



# Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kota Mojokerto  
2018-2023



**WALIKOTA MOJOKERTO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018-2023, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 726, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
32. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 1/E);

33. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 31/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 32/D);
34. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 3/E);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO  
dan  
WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 3/E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2023 dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2024 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2024-2029 yang memuat visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
- (2) Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan dilaksanakan Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 27/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 27/D).
- (3) Dalam pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat perubahan Perangkat Daerah akan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur Perangkat Daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dihapus.

3. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal **18 Oktober 2021**

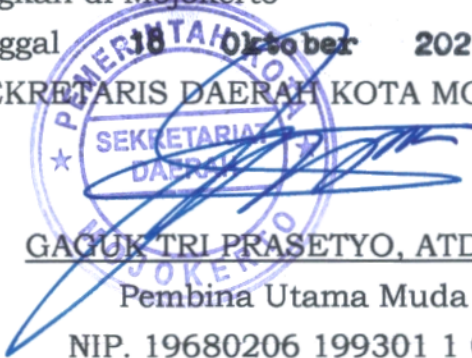
WALIKOTA MOJOKERTO,



Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal **18 Oktober 2021**

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



GAGUK TRI PRASETYO, ATD., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680206 199301 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 47/D  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR:  
190-7/2021

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018 -2023

I. UMUM

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018 -2023 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mojokerto Tahun 2005–2025 serta dengan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Provinsi dan Nasional maupun dokumen perencanaan strategis lainnya di tingkat Kota Mojokerto. Selain visi dan misi, RPJMD Tahun 2018-2023 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program beserta pagu indikatifnya yang disusun dalam rangka pencapaian visi dan misi Wakilota dan Wakil Walikota. RPJMD selanjutnya digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar dalam hal ini sebagai akibat Pandemi *Covid-19* yang secara nasional Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018 -2023, maka diidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Pelaksanaan RPJMD

Penyusunan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 belum didasarkan konstruksi kelembagaan Perangkat Daerah pada Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah.

#### 2. Evaluasi hasil RPJMD

- a. substansi dokumen RPJMD belum memuat arah kebijakan tahunan sebagai pedoman penyusunan RKPD sehingga prioritas pembangunan Kota Mojokerto perlu dilakukan penyesuaian.

- b. diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah yang mengamankan perubahan struktur organisasi perangkat daerah yang mengakibatkan restrukturisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kota Mojokerto sehingga menyebabkan berubahnya jumlah perangkat daerah serta terjadinya perubahan program-program pembangunan beserta indikatornya dikarenakan adanya perubahan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangan yang baru.
- c. bahwa dalam rangka memberikan ukuran pencapaian tujuan dalam RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 perlu ditambahkan indikator tujuan yang merupakan dasar mengukur keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota ditengah kondisi Pandemi *COVID-19* yang secara nasional Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan Perubahan RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Mojokerto untuk Tahun 2018-2023.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup Jelas.

### Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 47/D

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 10  
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH (RPJMD) KOTA MOJOKERTO TAHUN 2028-2023



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

---

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan hasil pemilihan umum kepala daerah serentak yang diselenggarakan pada 27 Juni 2018, serta telah dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto periode Tahun 2018-2023 oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 10 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5984 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Mojokerto dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.35-5985 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Mojokerto, maka Pemerintah Kota Mojokerto periode 2018-2023 dipimpin oleh Ika Puspitasari sebagai Walikota dan Achmad Rizal Zakaria sebagai Wakil Walikota. Berdasarkan pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, disusunlah suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Selain janji-janji politik yang harus diterjemahkan pada RPJMD, penyusunan RPJMD juga mendasar atas hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, isu-isu strategis serta potensi-potensi unggulan daerah. Keseluruhan hal tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Merujuk pada Pasal 342, disebutkan bahwa perubahan RPJMD dilakukan dengan memperhatikan persyaratan pada Pasal 342 Ayat 1, efektivitas waktu perubahan pada Pasal 342 Ayat 2, serta kategorisasi dari perubahan yang mendasar dalam rangka perubahan RPJMD pada Pasal 342 Ayat 3. Kota Mojokerto dalam melakukan perubahan RPJMD telah memenuhi ketentuan yang dimaksud, yaitu masa berlaku RPJMD Kota Mojokerto masih lebih dari 3 (tiga) tahun, serta berbagai alasan yang mendasar, diantaranya:

1. Penyesuaian perencanaan daerah akibat adanya bencana nasional non-alam yaitu Pandemi Covid-19, sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang untuk melakukan *realocation* dan *refocusing* penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang tentunya berimbas pada penentuan kembali target dan indikator tujuan, sasaran maupun program yang sudah ditetapkan dalam RPJMD.
2. Penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah akibat terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga perlu penyesuaian nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah serta desain kelembagaan daerah.
3. Penyelarasan tata cara penyusunan dan substansi rencana pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan mempertimbangkan isu-isu pembangunan yang aktual.

4. Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah Kota Mojokerto dengan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur, serta perencanaan pembangunan nasional dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Tahapan penyusunan RPJMD bersifat mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJMD sesuai Permendagri 86 Tahun 2017. Dengan demikian tahapan penyusunan perubahan RPJMD Kota Mojokerto tahun 2018-2023 disusun melalui tahapan berikut:

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan Rancangan Awal
3. Penyusunan Rancangan
4. Pelaksanaan Musrenbang
5. Perumusan Rancangan Akhir
6. Penetapan RPJMD

Dokumen Perubahan RPJMD sama halnya dengan dokumen RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, serta dokumen perencanaan lain yang terkait. Dengan demikian, visi dan misi serta program prioritas kepala daerah terpilih tetap harus menjiwai seluruh muatan RPJMD Kota Mojokerto 2018-2023 dan harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya.

Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 merupakan rencana pembangunan jangka menengah periode kelima dari RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2005-2025 yang memuat deskripsi tentang kondisi umum Kota Mojokerto, potensi pembangunan dan faktor strategis yang dapat dikembangkan, penyusunan visi dan misi pembangunan 2005-2025 Kota Mojokerto serta arah pembangunan jangka panjang Kota Mojokerto.

Selanjutnya, Perubahan RPJMD yang disusun akan menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di RPJMD dengan perencanaan operasional di perangkat daerah, dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kota Mojokerto.

Sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

## **1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kota Mojokerto ini, terdapat sejumlah peraturan yang berskala Nasional maupun lokal yang secara langsung terkait dengan penyusunan Ranwal dan digunakan sebagai rujukan yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);



9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6232);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225)
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

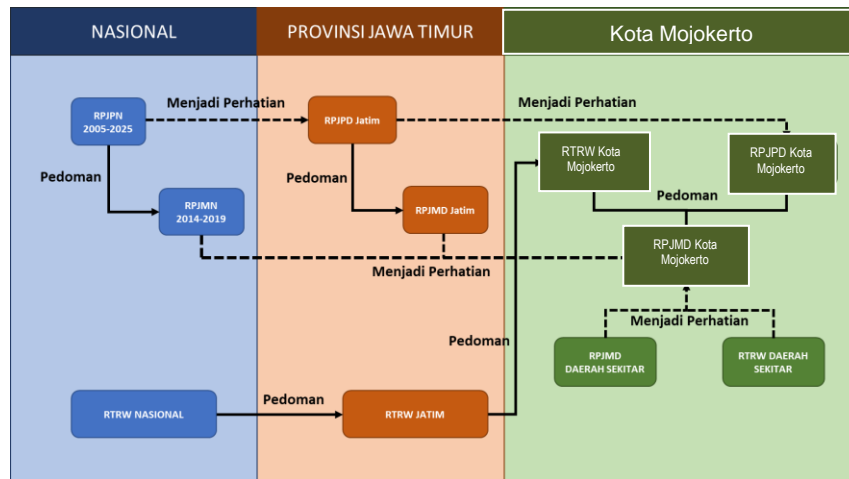
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927)
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2017 tentang pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun

- 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
  38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
  39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
  40. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 2);
  41. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 4);
  42. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 31 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 32 Seri D);
  43. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 3 Seri E);

### **1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Oleh karena itu, Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga harus memperhatikan sinkronisasi dan sinergitas antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan,

dan evaluasi. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui Gambar 1.1.



**Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan**

Sebagai konsekuensi dari landasan hukum pada penyusunan RPJMD, maka dokumen Perubahan RPJMD Kota Mojokerto tahun 2018-2023 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Adapun penjelasan keterkaitan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Perubahan RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Perubahan RPJMD Kota Mojokerto memperhatikan dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) karena pembangunan daerah adalah bagian dari pembangunan nasional. Bagaimana pun visi dan misi pembangunan nasional akan tercapai jika didukung oleh pembangunan daerah yang selaras dengan visi-misi pembangunan nasional;
3. Substansi RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJM Nasional Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 dan RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2005-2025 menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023. Secara lebih lanjut bahwa Perubahan RPJMD membentuk keterkaitan secara hirarkis dengan penyusunan RKPD setiap tahunnya.

Selain itu, penyusunan Perubahan RPJMD juga memperhatikan beberapa dokumen lainnya yaitu:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Mojokerto juga memperhatikan RTRW Kota Mojokerto Tahun 2012-2032 terutama dari sisi pola dan struktur ruang sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kota Mojokerto. Kebijakan yang tertuang dalam dokumen RTRW Kota Mojokerto Tahun 2012-2032 yang berhubungan dengan dokumen Perubahan RPJMD antara lain:
  - Kebijakan dan strategi struktur ruang Kota Mojokerto;
  - Kebijakan dan strategi pola ruang Kota Mojokerto mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya;
  - Kebijakan dan strategi kawasan strategis Kota Mojokerto.
4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 terkait dengan daya dukung dan daya tampung terhadap beberapa isu strategis yang masih menjadi kendala di Kota Mojokerto meliputi: peningkatan kapasitas dan distribusi air bersih dan sanitasi yang layak, pemenuhan kebutuhan pangan dari daerah lain, pengolahan dan pengendalian sampah, dan pengendalian terhadap limbah pencemar.
5. RPJMD dan RTRW kabupaten sekitar sebagai instrumen pembanding dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kota Mojokerto supaya mampu bersaing dengan daerah disekitarnya.
6. Selain berpedoman dan memperhatikan ketentuan yang ada, penyusunan Perubahan RPJMD juga memperhatikan: (1) Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs); (2) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); (3) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI); (4) Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan (5) RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Berikut ini disajikan keterkaitan dokumen Perubahan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana tabel di bawah ini.

### 1.3.1. Hubungan Antar Dokumen Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, dan RPJMN Tahun 2020-2024

Penelaahan hubungan antar dokumen Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 memperhatikan keselarasan dengan dokumen perencanaan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Hal ini ditunjukkan dengan keselarasan isu-isu strategis pembangunan dan perumusan visi misi pada ketiga dokumen perencanaan pembangunan tersebut, sebagaimana tertuang dalam Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1.1.**  
**Keselarasan Isu Strategis Antar Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dengan Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023**

No.	Isu Strategis		
	Perubahan RPJMD Kota Mojokerto 2018-2023	RPJMD Provinsi Jatim 2019-2024	Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024
1.	Membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mampu bersaing	Kualitas Sumber Daya Manusia berbasis keagamaan dan kebudayaan.	Agenda 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
2.	Melestarikan budaya lokal yang relevan dengan kehidupan bermasyarakat		Agenda 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
3.	Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai Kota yang tertib, aman dan stabil	Demokrasi Kewargaan	Agenda 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
4.	Mewujudkan Good Governance dan pelayanan prima	Tata kelola pemerintah dan reformasi birokrasi	
5.	Anggaran yang berbasis pelayanan pada masyarakat		
6.	Peningkatan infrastruktur untuk mendukung daya saing Kota Mojokerto dalam ekonomi kerakyatan	Pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Agenda 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan dan pelayanan dasar
			Agenda 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7.	Pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian ekonomi	Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan rakyat	Agenda 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
			Agenda 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

**Tabel 1.2.**  
**Keselarasn Visi dan Misi Antar Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD**  
**Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dengan Perubahan RPJMD Kota**  
**Mojokerto Tahun 2018-2023**

No.	Visi Misi		
	RPJMN 2020-2024	RPJMD Provinsi Jatim 2019-2024	Perubahan RPJMD Kota Mojokerto 2018-2023
	<b>VISI</b>	<b>VISI</b>	<b>VISI</b>
1.	Terwujudnya Indonesia maju yang berkedaulatan, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.	Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong.	Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat.
	<b>MISI</b>	<b>MISI</b>	<b>MISI</b>
1.	Peningkatan kualitas manusia Indonesia	Misi 2 : Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.	Misi 1: Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan
2.	Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.	Misi 1 : Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.	Misi 4: Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkeadilan Dan Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Daerah
3.	Pembangunan yang merata dan berkeadilan	Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.	Misi 6: Mewujudkan Partispasi Masyarakat Melalui Pemberian Akses Dan Kesempatan Dalam Pembangunan.
4.	Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan	Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.	Misi 4: Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkeadilan Dan Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Daerah



No.	Visi Misi		
	RPJMN 2020-2024	RPJMD Provinsi Jatim 2019-2024	Perubahan RPJMD Kota Mojokerto 2018-2023
	VISI	VISI	VISI
5.	Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa	Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.	Misi 5: Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya Dalam Kerangka Integrasi Nasional, Pada Tataan Masyarakat Yang Bermartabat, Berakhlak Mulia, Beretika, Dan Berbudaya Luhur Berlandaskan Pancasila
6.	Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.	Misi 3: Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.;	Misi 2: Mewujudkan Ketertiban, Supremasi Hukum, Dan HAM
7.	Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	Misi 3: Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.;	Misi 2: Mewujudkan Ketertiban, Supremasi Hukum, Dan HAM
8.	Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya	Misi 3: Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.;	Misi 3: Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Efektif, Demokratis, Bersih, Professional Dan Adil Dalam Melayani Masyarakat.  Misi 7: Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Yang Lebih Mengutamakan Kesejahteraan Masyarakat
9.	Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan	Misi 1 : Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.	Misi 5: Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya Dalam Kerangka Integrasi Nasional, Pada Tataan Masyarakat Yang Bermartabat, Berakhlak Mulia, Beretika, Dan Berbudaya Luhur Berlandaskan Pancasila

### 1.3.2. Hubungan Antar Dokumen Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 dengan RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2005-2025

Perencanaan jangka menengah daerah merupakan manifestasi perencanaan jangka panjang daerah, sehingga penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 merujuk dan berpedoman pada RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2005-2025. Saat ini, Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari periode kelima RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2005-2025. Keselarasan antar dokumen dapat dilihat dari visi misi yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 yang terintegrasi dan mendukung pencapaian visi misi RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2005-2025, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut:

**Tabel 1.3.**

#### **Keselarasn Visi dan Misi Antar Dokumen RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2005-2025 dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023**

No.	RPJPD Kota Mojokerto 2005-2025	Perubahan RPJMD Kota Mojokerto 2018-2023
	<b>VISI</b>	<b>VISI</b>
	Terwujudnya Kota Mojokerto yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Bersih, Asri, dan Berbudaya	Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat.
	<b>MISI</b>	<b>MISI</b>
1.	Mewujudkan masyarakat Kota Mojokerto yang adil dan sejahtera.	Misi 6: Mewujudkan Partispasi Masyarakat Melalui Pemberian Akses Dan Kesempatan Dalam Pembangunan.  Misi 7: Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Yang Lebih Mengutamakan Kesejahteraan Masyarakat.  Misi 2: Mewujudkan Ketertiban, Supremasi Hukum, Dan HAM.
2.	Mewujudkan masyarakat Kota Mojokerto yang maju dan mandiri melalui pendidikan, kesehatan, dan pengembangan teknologi.	Misi 1: Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.
3.	Mewujudkan Kota Mojokerto menjadi pusat pertumbuhan regional.	Misi 4: Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkeadilan Dan Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Daerah.
4.	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih ( <i>good and clean governance</i> ).	Misi 3: Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Efektif, Demokratis, Bersih, Professional Dan Adil Dalam Melayani Masyarakat.
5.	Mewujudkan Kota Mojokerto yang asri dan lestari.	Misi 4: Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkeadilan Dan Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Daerah.  Misi 5: Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya Dalam Kerangka Integrasi Nasional, Pada Tatanan Masyarakat Yang Bermartabat, Berakhlak Mulia, Beretika, Dan

No.	RPJPD Kota Mojokerto 2005-2025	Perubahan RPJMD Kota Mojokerto 2018-2023
	<b>VISI</b>	<b>VISI</b>
		Berbudaya Luhur Berlandaskan Pancasila.
6.	Mewujudkan masyarakat Kota Mojokerto berbudaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.	Misi 5: Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya Dalam Kerangka Integrasi Nasional, Pada Tatanan Masyarakat Yang Bermartabat, Berakhlak Mulia, Beretika, Dan Berbudaya Luhur Berlandaskan Pancasila.

### 1.3.3. Hubungan Antar Dokumen Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 dengan RTRW Kota Mojokerto Tahun 2012-2032

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Mojokerto 2018-2023 memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mojokerto 2012-2032. Adapun keselarasan visi, misi, tujuan dan strategi kebijakan dokumen RTRW Kota Mojokerto Tahun 2012-2032 dengan dokumen Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.4.**

#### **Keselarasan Dokumen RTRW Kota Mojokerto Tahun 2012-2032 dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023**

No.	RTRW Kota Mojokerto 2012-2032	Perubahan RPJMD Kota Mojokerto 2018-2023
	<b>VISI</b>	
	Terwujudnya Kota Mojokerto yang maju sebagai pusat pertumbuhan wilayah yang mandiri.	Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat.
	<b>MISI</b>	
1.	Menyediakan prasarana wilayah Kota Mojokerto yang dapat mendukung investasi produktif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Misi 4: Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkeadilan Dan Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Daerah.  Misi 7: Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Yang Lebih Mengutamakan Kesejahteraan Masyarakat.
2.	Mewujudkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.	Misi 4: Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkeadilan Dan Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Daerah.

No.	RTRW Kota Mojokerto 2012-2032	Perubahan RPJMD Kota Mojokerto 2018-2023
3.	Mewujudkan pusat-pusat perkembangan bagi sektor perdagangan dan jasa, serta pendidikan dan kesehatan.	Misi 1: Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.  Misi 6: Mewujudkan Partisipasi Masyarakat Melalui Pemberian Akses dan Kesempatan Dalam Pembangunan.
4.	Mengembangkan sentra industri kecil sebagai motor penggerak perekonomian Kota Mojokerto.	Misi 4: Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkeadilan Dan Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Daerah.
5.	Mengatasi permasalahan lingkungan di Kota Mojokerto, khususnya masalah genangan dan banjir yang terjadi di beberapa wilayah Kota Mojokerto.	Misi 4: Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkeadilan Dan Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Daerah.
	<b>TUJUAN</b>	<b>TUJUAN</b>
	Mewujudkan Kota Mojokerto yang mandiri, sejahtera, berbudaya sebagai pusat pelayanan perdagangan, jasa, dan industri kecil dalam ruang yang berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan SDM Yang Berdaya Saing Dan Berkualitas;</li> <li>2. Mewujudkan masyarakat Taat Hukum;</li> <li>3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;</li> <li>4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;</li> <li>5. Menyediakan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi dengan memperhatikan lingkungan hidup;</li> <li>6. Meningkatkan Kesalehan Sosial;</li> <li>7. Meningkatnya akses masyarakat dalam pembangunan serta kesetaraan gender;</li> <li>8. Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah.</li> </ol>
	<b>KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b>	<b>STRATEGI</b>
	<b>Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kota</b>	<b>Pembangunan dan Kewilayahan RPJMD</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan sistem hierarki pusat kota;</li> <li>2. Pembentukan dan pengembangan kawasan pusat-pusat kegiatan utama kota;</li> <li>3. Peningkatan penyediaan prasarana wilayah kota secara terpadu yang berwawasan lingkungan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan PAUD;</li> <li>2. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar sembilan tahun berkualitas;</li> <li>3. Meningkatkan aksebilitas dan kualitas Pelayanan Kesehatan, khusus-nya Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care);</li> <li>4. Meningkatkan standar pelayanan Rumah</li> </ol>
	<b>Pengembangan Pola Ruang Wilayah Kota</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan kawasan lindung;</li> <li>2. Pengembangan kawasan budi daya.</li> </ol>	
	<b>Penetapan Kawasan Strategis Kota</b>	

No.	RTRW Kota Mojokerto 2012-2032	Perubahan RPJMD Kota Mojokerto 2018-2023
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kawasan perdagangan dan jasa</li> <li>2. Penetapan kawasan industri</li> </ol>	<p>Sakit Sesuai dengan standar akreditasi Rumah Sakit;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Meningkatkan ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas, keragaman dan keamanan pangan;</li> <li>6. Meningkatkan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana;</li> <li>7. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;</li> <li>8. Meningkatkan pertumbuhan investasi;</li> <li>9. Meningkatkan kualitas kelembagaan serta produktivitas koperasi dan usaha mikro;</li> <li>10. Meningkatkan produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perikanan, dan peternakan;</li> <li>11. Meningkatkan keunggulan, daya tarik dan promosi pariwisata untuk peningkatan daya beli;</li> <li>12. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional;</li> <li>13. Meningkatkan daya saing industry;</li> <li>14. Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang;</li> <li>15. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi, pendayagunaan; sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air;</li> <li>16. meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman;</li> <li>17. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan;</li> <li>18. Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang dan barang serta mengembangkan sistem transportasi publik yang nyaman;</li> <li>19. Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing;</li> <li>20. Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana;</li> <li>21. Melestarikan warisan budaya baik bersifat benda (<i>tangible</i>) maupun tak benda (<i>intangible</i>);</li> <li>22. Mengembangkan sumber daya kebudayaan.</li> </ol>

No.	RTRW Kota Mojokerto 2012-2032	Perubahan RPJMD Kota Mojokerto 2018-2023

Merujuk pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa dokumen RTRW Kota Mojokerto Tahun 2012-2032 telah menjadi acuan dalam perumusan Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023.

#### 1.3.4. Hubungan Antar Dokumen Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 dengan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan harus memperhatikan 17 tujuan pembangunan yang telah diratifikasi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Secara umum, *Sustainable Development Goals* (SDGs) dapat dikategorisasikan menjadi 3 (tiga) tujuan besar, yaitu mengakhiri kemiskinan, mengatasi dan menekan kesenjangan, serta mengatasi perubahan iklim yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030.

KLHS merupakan kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/ atau kompensasi program dan kegiatan. KLHS Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018 memiliki beberapa isu strategis yang masih menjadi kendala di Kota Mojokerto dan termaktub dalam tujuan, kebijakan strategi dan program perencanaan pembangunan pada dokumen Perubahan RPJMD Kota Mojokerto 2018-2023. Hal ini merupakan wujud keselarasan dokumen perencanaan Kota Mojokerto dalam mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs). Keselarasan isu strategis dalam dokumen KLHS dan dokumen Perubahan RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.5.**  
**Keselarasan Isu Strategis Antar Dokumen**  
**KLHS Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 dengan**  
**Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023**

No.	Perubahan RPJMD Kota Mojokerto 2018-2023	KLHS Perubahan RPMJD Kota Mojokerto 2018-2023
	ISU STRATEGIS	ISU STRATEGIS
1.	Membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mampu bersaing	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepesertaan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan masih rendah.</li> <li>- Akses terhadap sumber air minum layak dan berkelanjutan masih terbatas.</li> <li>- Akses layanan sanitasi layak dan berkelanjutan belum merata.</li> </ul>

No.	Perubahan RPJMD Kota Mojokerto 2018-2023	KLHS Perubahan RPMJD Kota Mojokerto 2018-2023
	ISU STRATEGIS	ISU STRATEGIS
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan layanan khusus pada daerah bencana.</li> <li>- Penurunan penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.</li> <li>- Penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/ baduta.</li> <li>- Imunisasi dasar lengkap pada bayi.</li> <li>- Insiden Tuberkulosis (ITB) masih banyak.</li> <li>- Eliminasi malaria.</li> <li>- Deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.</li> <li>- Intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta) masih tinggi.</li> <li>- Eliminasi Kusta.</li> <li>- Eliminasi filariasis.</li> <li>- Penurunan penduduk umur 18 tahun yang merokok.</li> <li>- Prevalensi tekanan darah tinggi masih tinggi.</li> <li>- Prevalensi obesitas pada penduduk umur <math>\geq 18</math> tahun masih ada.</li> <li>- Penurunan kematian (<i>insidens rate</i>) akibat bunuh diri.</li> <li>- Penyediaan pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas.</li> <li>- Penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba.</li> <li>- Penurunan konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur <math>\geq 15</math> tahun.</li> <li>- Penurunan Unmet need pelayanan kesehatan.</li> <li>- Penurunan penduduk umur 15 tahun keatas yang merokok.</li> <li>- Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan belum merata.</li> <li>- Keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada remaja dan dewasa.</li> <li>- Partisipasi sekolah masyarakat belum meningkat.</li> <li>- Sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).</li> <li>- Sertifikasi Guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB semakin merata.</li> <li>- Penurunan pernikahan dini (sebelum usia 15 dan 18 tahun).</li> <li>- Median usia kawin pertama perempuan masih rendah.</li> <li>- PUS yang belum memahami dan mengetahui metode kontrasepsi modern masih tinggi.</li> <li>- Kapasitas prasarana air baku.</li> <li>- Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.</li> <li>- Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).</li> <li>- Pelaksanaan <i>Open Defecation Free</i> (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).</li> <li>- Pembangunan infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat.</li> <li>- Pelayanan sistem pengolahan air limbah terpusat.</li> <li>- Kualitas pengolahan lumpur tinja.</li> <li>- Cakupan layanan sistem pengolahan lumpur tinja.</li> </ul>

No.	Perubahan RPJMD Kota Mojokerto 2018-2023	KLHS Perubahan RPMJD Kota Mojokerto 2018-2023
ISU STRATEGIS		ISU STRATEGIS
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas air sungai.</li> <li>- Insentif penghematan air.</li> <li>- Ketersediaan tenaga kerja formal.</li> <li>- Peningkatan tenaga kerja sektor Industri Manufaktur.</li> <li>- Indeks Gini Rasio semakin tinggi.</li> </ul>
2.	Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai Kota yang tertib, aman dan stabil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Korban dampak bencana masih banyak.</li> <li>- Penguatan pengurangan risiko bencana daerah.</li> <li>- Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.</li> <li>- Pendampingan psikososial korban bencana sosial.</li> <li>- Penurunan Indeks risiko bencana.</li> <li>- Kerugian ekonomi akibat bencana masih banyak.</li> <li>- Penurunan Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>).</li> <li>- Penurunan prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat.</li> <li>- Kualitas konsumsi pangan belum tercukupi.</li> <li>- Penurunan kekerasan pada perempuan dewasa dan anak perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan.</li> <li>- Pembentukan kota tangguh bencana.</li> <li>- Sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan belum tersedia.</li> <li>- Pengelolaan limbah B3.</li> <li>- Pengelolaan sampah terpadu (3R).</li> <li>- Penerapan sertifikasi SNI ISO 14001 masih rendah.</li> <li>- Register Produk ramah lingkungan.</li> <li>- Tutupan lahan/ hutan semakin sedikit.</li> <li>- Kasus kejahatan pembunuhan masih ada.</li> <li>- Penurunan kematian disebabkan konflik.</li> <li>- Keamanan penduduk.</li> <li>- Penurunan kejadian hukuman fisik dan/ atau agresi psikologis oleh pengasuh pada anak (umur 1 - 17 tahun).</li> <li>- Penurunan kekerasan terhadap anak.</li> </ul>
3.	Mewujudkan Good Governance dan pelayanan prima.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB).</li> <li>- Ketersediaan peraturan/ kebijakan yang responsif gender belum memadai.</li> <li>- Keberadaan kantor bank dan ATM.</li> <li>- Kedekatan jarak lembaga keuangan.</li> <li>- Peningkatan layanan mobile <i>broadband</i>.</li> <li>- Peningkatan Indeks Kebebasan Sipil.</li> <li>- Penerapan SPM pada fasilitas publik masih rendah.</li> <li>- Penyediaan regulasi pemanfaatan dan peningkatan akses sumber daya genetik.</li> <li>- Penyediaan dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.</li> <li>- Penyediaan regulasi pemanfaatan dan peningkatan akses sumber daya genetik.</li> </ul>



No.	Perubahan RPJMD Kota Mojokerto 2018-2023	KLHS Perubahan RPMJD Kota Mojokerto 2018-2023
ISU STRATEGIS		ISU STRATEGIS
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).</li> <li>- Peningkatan hasil penilaian SAKIP masih rendah.</li> <li>- Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik.</li> <li>- Keterwakilan perempuan di DPRD belum meningkat.</li> <li>- Keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif masih rendah.</li> <li>- Kepemilikan akta lahir penduduk miskin dan rentan.</li> <li>- Kepemilikan sertifikat PPID masih sangat rendah.</li> <li>- Pendapatan Pemerintah terhadap PDB semakin rendah.</li> <li>- Penerimaan pajak terhadap PDB masih rendah.</li> <li>- Penyediaan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).</li> <li>- Data registrasi kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>).</li> </ul>
4.	Peningkatan infrastruktur untuk mendukung daya saing Kota Mojokerto dalam ekonomi kerakyatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akses hunian layak bagi rumah tangga berpendapatan rendah.</li> <li>- Penanganan sampah perkotaan.</li> <li>- Akses pitalebar (<i>fixed broadband</i>).</li> <li>- Peningkatan layanan <i>mobile broadband</i>.</li> </ul>
5.	Melestarikan budaya lokal yang relevan dengan kehidupan bermasyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mewujudkan Kota Pusaka.</li> </ul>
6.	Pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian ekonomi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat kemiskinan masih tinggi</li> <li>- Keluarga penerima bantuan tunai bersyarat/ PKH masih banyak.</li> <li>- Peningkatan Nilai Tambah Pertanian.</li> <li>- Laju pertumbuhan PDRB menurun.</li> <li>- Peningkatan lapangan kerja informal sektor non pertanian.</li> <li>- Akses UMKM ke layanan keuangan masih rendah.</li> <li>- Tingkat pengangguran terbuka semakin meningkat.</li> <li>- Tingkat setengah pengangguran belum menurun..</li> <li>- Keterampilan pekerja rentan.</li> <li>- Kontribusi pariwisata terhadap PDB.</li> <li>- Devisa sektor pariwisata.</li> <li>- Peningkatan pekerja pada industri pariwisata.</li> <li>- Pinjaman kredit tetap pada industri kecil menurun..</li> <li>- Penduduk yang hidup dibawah 50% median pendapatan semakin banyak.</li> <li>- Ketersediaan lembaga pembiayaan infrastruktur.</li> </ul>
7.	Anggaran yang berbasis pelayanan pada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggaran riset pemerintah semakin rendah.</li> <li>- Pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui masih rendah.</li> <li>- Penyediaan alokasi dana dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).</li> </ul>

### 1.3.5. Hubungan Antar Dokumen Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 dengan Dokumen RPJMD Daerah Sekitar Kota Mojokerto

Penyelarasan dokumen RPJMD daerah sekitar dimaksudkan sebagai pertimbangan dalam rangka sinergitas pembangunan antar daerah sehingga tercipta kolaborasi pembangunan antar wilayah. Tabel di bawah ini merupakan hasil analisis keselarasan visi misi RPJMD dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang yang merupakan daerah sekitar Kota Mojokerto:

**Tabel 1.6.**

#### **Keselarasan Visi dan Misi Antar Dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023**

No.	RPMJD Kabupaten Mojokerto 2016-2021	Perubahan RPJMD Kota Mojokerto 2018-2023
	<b>VISI</b>	<b>VISI</b>
	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan.	Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat.
	<b>MISI</b>	<b>MISI</b>
1.	Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi negara sekaligus pelayan masyarakat.	Misi 5: Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya Dalam Kerangka Integrasi Nasional, Pada Tatahan Masyarakat Yang Bermartabat, Berakhlak Mulia, Beretika, Dan Berbudaya Luhur Berlandaskan Pancasila  Misi 3: Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Efektif, Demokratis, Bersih, Professional Dan Adil Dalam Melayani Masyarakat
2.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih, dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.	Misi 3: Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Efektif, Demokratis, Bersih, Professional Dan Adil Dalam Melayani Masyarakat.  Misi 7: Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Yang Lebih Mengutamakan Kesejahteraan Masyarakat
3.	Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri, dan pariwisata.	Misi 4: Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkeadilan Dan Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Daerah
4.	Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk menumbuhkembangkan kepercayaan sosial ( <i>social trust</i> ) dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan pada etika budaya dan kearifan lokal yang lebih berkarakter.	Misi 6: Mewujudkan Partispasi Masyarakat Melalui Pemberian Akses Dan Kesempatan Dalam Pembangunan  Misi 5: Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya Dalam Kerangka Integrasi Nasional, Pada Tatahan Masyarakat Yang Bermartabat, Berakhlak Mulia, Beretika,

No.	RPMJD Kabupaten Mojokerto 2016-2021	Perubahan RPJMD Kota Mojokerto 2018-2023
	<b>VISI</b>	<b>VISI</b>
		Dan Berbudaya Luhur Berlandaskan Pancasila
5.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memperbesar peluang memperoleh akses pendidikan yang lebih baik untuk mengoptimalkan kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Misi 1: Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan
6.	Memperlebar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat	Misi 1: Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan
7.	Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima disemua sektor bagi masyarakat	Misi 2: Mewujudkan Ketertiban, Supremasi Hukum, Dan HAM

**Tabel 1.7.**  
**Keselarasn Visi dan Misi Antar Dokumen**  
**RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 dengan**  
**Dokumen Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023**

No.	RPMJD Kabupaten Jombang 2018-2023	Perubahan RPJMD Kota Mojokerto 2018-2023
	<b>VISI</b>	<b>VISI</b>
	Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing	Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat.
	<b>MISI</b>	<b>MISI</b>
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional.	Misi 2: Mewujudkan Ketertiban, Supremasi Hukum, Dan HAM  Misi 3: Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Efektif, Demokratis, Bersih, Professional Dan Adil Dalam Melayani Masyarakat.  Misi 7: Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Yang Lebih Mengutamakan Kesejahteraan Masyarakat
2.	Mewujudkan Masyarakat Jombang yang Berkualitas, Religius, dan Berbudaya.	Misi 1: Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan  Misi 5: Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya Dalam Kerangka Integrasi Nasional, Pada Tatahan Masyarakat Yang

No.	RPMJD Kabupaten Jombang 2018-2023	Perubahan RPJMD Kota Mojokerto 2018-2023
	<b>VISI</b>	<b>VISI</b>
		Bermartabat, Berakhlak Mulia, Beretika, Dan Berbudaya Luhur Berlandaskan Pancasila
3.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri.	<p>Misi 4: Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkeadilan Dan Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Daerah</p> <p>Misi 6: Mewujudkan Partispasi Masyarakat Melalui Pemberian Akses Dan Kesempatan Dalam Pembangunan</p>

## 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

### 1.4.1 MAKSUD

Maksud dari Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023, adalah dalam rangka mempertimbangkan hal-hal yang diatur dalam Pasal 342 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan menunjukkan adanya proses perumusan dan substansi yang tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Adapun perihal ketentuan perubahan RPJMD karena terjadi perubahan yang mendasar, didasari oleh adanya perubahan kebijakan nasional dengan telah ditetapkannya RPJMN Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020, dan adanya perubahan ketentuan tentang perencanaan pembangunan dan keuangan daerah melalui Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta terjadi bencana nasional non alam yaitu Pandemi Covid-19 yang tentunya membutuhkan penyesuaian dalam indikator target dan sasaran, kerangka pendanaan, desain kelembagaan Pemerintah Daerah serta hal-hal lain yang terkait. Dengan demikian RPJMD Kota Mojokerto tahun 2018-2023 perlu dilakukan perubahan.

Selain itu, maksud dari Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memberikan pedoman arah penyelenggaraan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam upaya mewujudkan cita-cita pembangunan daerah;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan APBD, Rencana Strategis (Renstra) setiap Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan

sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto ;

3. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih;
4. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Kota Mojokerto;
5. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyuarakan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

#### **1.4.2 TUJUAN**

Berdasarkan maksud tersebut, tujuan dari Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018—2023 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan;
2. Merumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
3. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kota Mojokerto dengan daerah sekitar, pemerintah provinsi, serta pemerintah pusat;
5. Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional;
6. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan;
8. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dengan demikian, semua dokumen operasional dalam perencanaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto hingga periode RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 berakhir harus mengacu pada Perubahan RPJMD ini.

## **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penyajian Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
  - 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
  - 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial
  - 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
  - 2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
  - 2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Non Dasar
  - 2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

### **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

- 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3 Kerangka Pendanaan

### **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

- 4.1 Permasalahan Pembangunan
- 4.2 Isu Strategis

### **BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Tujuan dan Sasaran

### **BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

- 6.1 Strategi Pembangunan Daerah
- 6.2 Arah Kebijakan

6.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah

**BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

**BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**BAB IX PENUTUP**

9.1 Pedoman Transisi

9.2 Kaidah Pelaksanaan

9.3 Pengembangan Pembiayaan Pembangunan

9.4 Penutup



## BAB II

# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

#### 2.1.1 Luas Wilayah dan Letak Geografi

Kota Mojokerto adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, memiliki luas wilayah 20,217 km<sup>2</sup> atau 2.021,7 Ha dengan batas-batas wilayah sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sooko dan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mojoanyar dan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, sebelah utara berbatasan dengan Sungai Brantas, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Secara geografis, Kota Mojokerto terletak antara 7° 28' Lintang Selatan serta 112° 26' Bujur Timur. Wilayah Kota Mojokerto merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata – rata 22 m diatas permukaan laut dengan kondisi permukaan tanah yang agak miring ke Timur dan Utara antara 0-3%. Secara administratif Kota Mojokerto terbagi atas 3 kecamatan dan 18 kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

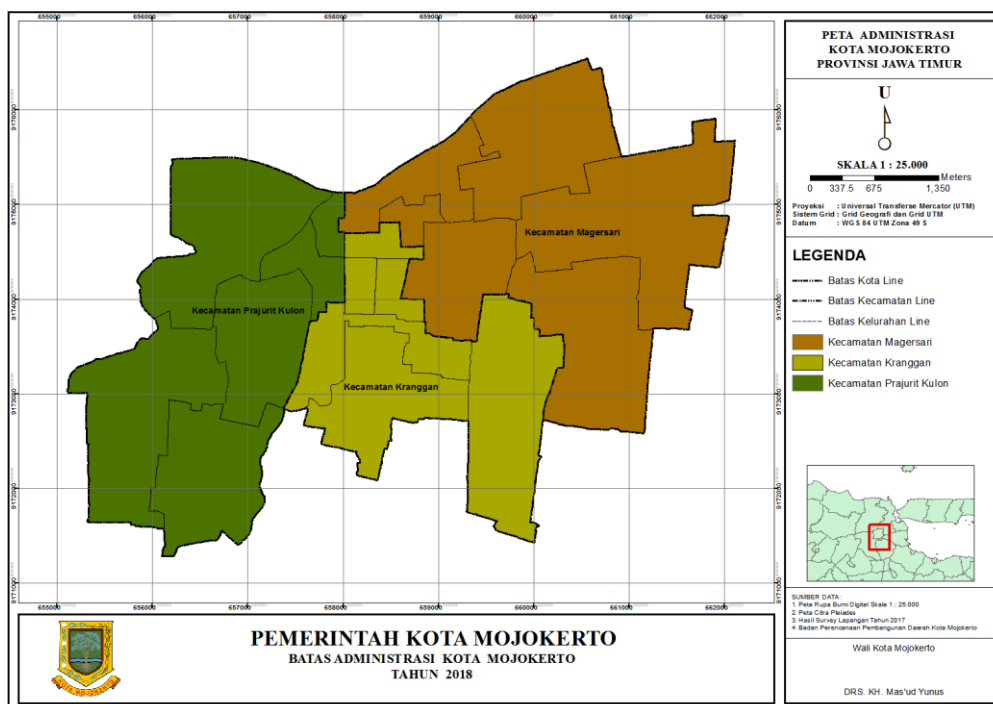
**Tabel 2. 1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan Kota Mojokerto Tahun 2020**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1.	Prajurit Kulon	7,4113	36,67
	Kelurahan:		
	Surodinawan	1,436	7,11
	Prajurit Kulon	1,377	6,81
	Blooto	2,1133	10,45
	Mentikan	0,393	1,94
	Kauman	0,257	1,27
	Pulorejo	1,835	9,08
2.	Magersari	8,083	39,98
	Kelurahan:		
	Gunung	1,875	9,28
	Gedangan		
	Kedundung	2,614	12,79
	Balongsari	0,976	4,82
	Gedongan	0,222	1,10
	Magersari	0,690	3,42
	Wates	1,706	8,59



No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
3.	Kranggan	4,7211	23,35
	Kelurahan:		
	Kranggan	1,2899	6,38
	Meri	1,9157	9,48
	Jagalan	0,256	1,27
	Miji	0,8265	4,09
	Sentanan	0,188	0,93
	Purwotengah	0,245	1,21
	Jumlah	20,217	100

Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka 2020



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Kota Mojokerto

### 2.1.2 Kondisi Topografi

Berdasarkan besarnya tingkat kemiringan tanah (kelerengan), sebagian besar wilayah di Kota Mojokerto berada pada kelerengan antara 0-20%. Oleh karena itu, beberapa wilayah Kota Mojokerto dapat digambarkan seperti Lepek (tatakan gelas/cekung) sehingga berpotensi menjadi wilayah genangan ketika terjadi hujan deras dalam jangka waktu yang lama. Peluang untuk mengurangi genangan tersebut adalah dengan dipompa karena posisi ketinggian tanahnya cekung ke bawah sesuai dengan topografi Kota Mojokerto.

Berdasarkan peta topografinya, Kota Mojokerto berada pada ketinggian antara 18,75 - 25 mdpl. Sebagian besar wilayah di Kota Mojokerto berada pada ketinggian 18,75 mdpl sedangkan sisanya di kisaran 25 mdpl.

### 2.1.3 Keadaan Geologi

Jenis tanah di wilayah Kota Mojokerto sebagian besar terdiri dari jenis alluvial seluas ± 980,36 Ha (± 59,54%) dan jenis gromosol seluas ± 666,18 Ha (± 40,46%). Jenis tanah ini cukup baik untuk usaha pertanian, namun yang menjadi persoalan adalah keterbatasan lahan pertanian. Sehingga yang menjadi prioritas adalah meningkatkan intensifikasi pengolahan tanah dari pertanian umum seiring meningkatnya alih guna lahan sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi.

Kondisi geologi Kota Mojokerto dapat dikatakan tidak memiliki Sumber Daya Alam seperti sumber daya mineral yang berarti kecuali sumber daya pasir galian C, namun posisi Kota Mojokerto tidak memungkinkan dilakukan penambangan pasir di sungai Brantas karena kondisi sungai yang sudah ditetapkan sebagai wilayah terlarang untuk penambangan pasir akibat tingkat erosi yang tinggi.

Potensi yang dimiliki dengan keterbatasan dan kondisi lahan yang ada justru berkembang dari pendayagunaan sektor jasa dan perdagangan karena Kota Mojokerto memiliki potensi sebagai daya tarik usaha bagi daerah sekitarnya.

**Tabel 2. 2 Kondisi Geologi Kota Mojokerto 2019**

No	Kecamatan/ Kelurahan	Jenis Geologi			Jumlah (Ha)
		<i>Alluvium</i>	<i>Pleistosen, Fasies Sedimen</i>	<i>Alluvium, Fasies Gunung Berapi</i>	
1.	<b>Prajurit Kulon</b>	<b>294,85</b>	-	<b>328,51</b>	<b>623,36</b>
	Surodinawan	-	-	145,88	145,88
	Prajurit Kulon	11,53	-	108,00	119,53
	Blooto	123,86	-	54,21	178,07
	Mentikan	5,67	-	13,23	18,90
	Kauman	11,44	-	7,19	18,63
	Pulorejo	142,35	-	-	142,35
2	<b>Magersari</b>	<b>431,31</b>	<b>223,40</b>	<b>6,85</b>	<b>661,56</b>
	Gunung Gedangan	104,62	65,83	-	170,45
	Kedundung	71,01	157,57	-	228,58

No	Kecamatan/ Kelurahan	Jenis Geologi			Jumlah (Ha)
		<i>Alluvium</i>	<i>Pleistosen, Fasies Sedimen</i>	<i>Alluvium, Fasies Gunung Berapi</i>	
	Balongsari	82,86	-	-	82,86
	Gedongan	14,55	-	0,13	14,68
	Magersari	26,17	-	6,72	32,89
	Wates	132,10	-	-	132,10
3	<b>Kranggan</b>	<b>254,20</b>	-	<b>107,42</b>	<b>361,62</b>
	Kranggan	51,36	-	61,95	113,31
	Miji	17,74	-	21,86	39,60
	Meri	164,84	-	-	164,84
	Jagalan	13,44	-	3,11	16,55
	Sentanan	-	-	13,85	13,85
	Purwotengah	6,82	-	6,65	13,47
	Jumlah	<b>980,36</b>	<b>223,40</b>	<b>442,78</b>	<b>1.646,54</b>

Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka 2019

#### 2.1.4 Hidrologi

Kota Mojokerto secara keseluruhan masuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang merupakan wilayah sungai strategis nasional. Wilayah Sungai Brantas terdiri dari 4 (empat) DAS yaitu DAS Brantas, DAS Tengah, DAS Ringin Bandulan dan DAS Kondang Merak, dan memiliki 9 Sub DAS yaitu Sub DAS Brantas Hulu, Sub DAS Brantas Tengah, Sub DAS Ngrowo/Ngasinan, Sub DAS Konto, Sub DAS Widias, Sub DAS Brantas Hilir, Sub DAS Kali Tengah, Sub DAS Ringin Bandulan dan Sub DAS Kondang Merak.

Kota Mojokerto masuk dalam Sub DAS Brantas Hilir meliputi wilayah sebagian Kelurahan Gunung Gedangan, sebagian Kelurahan Meri, sebagian Kelurahan Miji, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Sentanan, Kelurahan Purwotengah, sebagian Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Gedongan, Kelurahan Magersari, Kelurahan Wates dan Kelurahan Kedundung.

Konsekuensi dari wilayah yang dilewati beberapa sungai ini adalah genangan di Kota Mojokerto yang tidak hanya disebabkan oleh frekuensi hujan lokal namun juga hujan yang terjadi di wilayah *upstream* DAS yang ada.

**Tabel 2. 3 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kota Mojokerto**

No	Nama Sungai	Panjang (M)	Lebar (M)	Kedalaman (M)
1	Sungai Brantas	11.088, 66	100	12
2	Sungai Brangkal	7.616, 54	10	6
3	Sungai Sadar	7.860, 71	6	4
4	Sungai Cemporat	1.874, 85	-	-
5	Sungai Ngrayung	3.818, 79	-	-
6	Sungai Watudakon	4.211, 45	-	-
7	Sungai Ngotok	4.902, 91	-	-
8	Sungai Sinoman	6.000, 00	4	3
9	Sungai Meri	2.000, 00	5	4

*Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto*

### **2.1.5 Klimatologi**

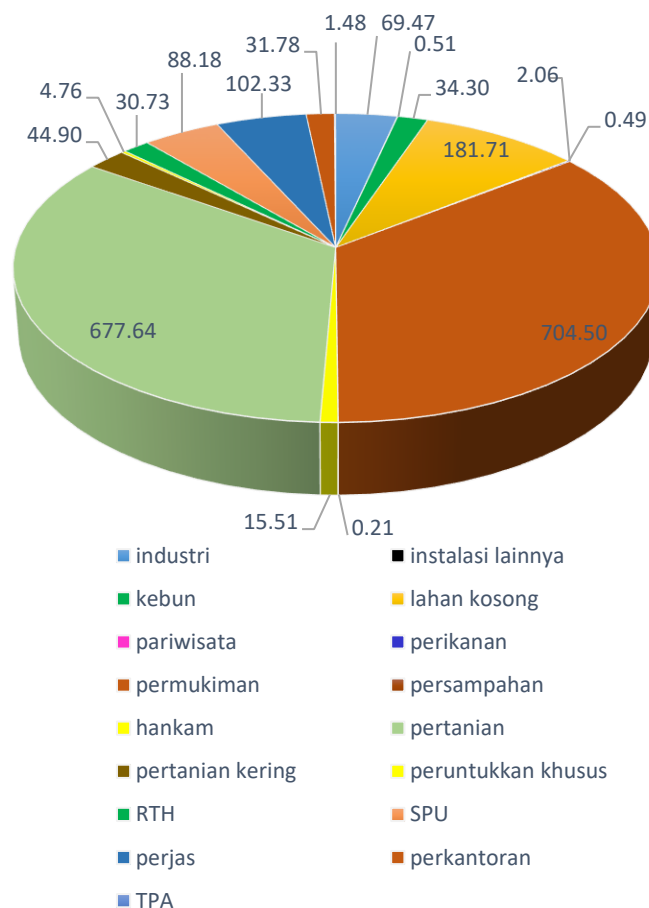
Kota Mojokerto memiliki 2 jenis perubahan iklim setiap tahunnya, yakni musim kemarau (April – September) dan musim hujan (Oktober – Maret) dengan curah hujan rata-rata sebesar 209,11 mm. Kota Mojokerto memiliki ketinggian rata-rata 22 mdpl.

1. Rata-rata curah hujan selama tahun 2019 mencapai 209,11 mm. Curah hujan terendah terjadi pada Bulan Juni, Agustus, dan September sebesar 0 mm dengan kata lain tidak terjadi turun hujan di bulan tersebut. Sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Maret sebesar 368 mm;
2. Presentase rata-rata penyinaran matahari pada tahun 2019 mencapai 74,75%, terendah pada Bulan Maret sebesar 44,00% dan tertinggi pada Bulan Oktober 93,00%;
3. Rata-rata kelembaban udara pada tahun 2019 diperkirakan 79,58%. Kelembaban terendah terjadi pada Bulan September dengan rata-rata kelembaban udara sebesar 71%. Sebaliknya kelembaban tertinggi terjadi pada Bulan Maret dengan besaran 87%;
4. Rata-rata suhu udara terendah pada tahun 2019 terjadi pada Bulan Juli sebesar 21,70° celcius. Sedangkan tertinggi pada Bulan November sebesar 25,40° celcius

### 2.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan tidak terbangun di Kota Mojokerto cukup mendominasi dengan persentase sebesar 60,67%. Penggunaan lahan tidak terbangun didominasi oleh lahan sawah sebesar 26,79%, kebun sebesar 11,70%, semak belukar 6,19%, tanah kosong sebesar 3,74%, hutan kota sebesar 0,02%, taman sebesar 1,18%, taman pemakaman umum (TPU) sebesar 1,24%, lapangan sebesar 0,33%, kolam 0,07%, tempat pemrosesan akhir sampah (TPAS) sebesar 0,16%, rawa sebesar 0,11%, perikanan 0,07%, jalan seluas 6,4% dan sungai sebesar 2,67%.

Luas lahan terbangun Kota Mojokerto sebesar 39,36%. Penggunaan lahan terbangun didominasi untuk permukiman yaitu sebesar 704,50 Ha, kemudian perdagangan dan jasa sebesar 102,33 Ha, industri sebesar 69,47 Ha, perkantoran sebesar 31,78 Ha, pertanahan dan keamanan sebesar 15,51 Ha, pariwisata 0,49 Ha dan instalasi lainnya sebesar 0,51 Ha.



**Gambar 2. 2 Penggunaan Lahan Kota Mojokerto**

*Sumber: RTRW Kota Mojokerto 2012 - 2032*

Berdasarkan penggunaan dan kondisi lahan yang ada, Kota Mojokerto mengembangkan wilayahnya dalam tiga bagian, yaitu: Barat, Timur, dan Tengah.

1. Bagian Barat merupakan wilayah yang berkarakteristik pertanian serta masih bersifat relatif rural. Pengembangan daerah ini berpusat di Kelurahan Prajuritkulon.
2. Di sebelah Timur yang berkarakteristik urban, pengembangannya terpusat di Kelurahan Kedundung.
3. Di wilayah Tengah yang merupakan jantung kota, pengembangannya dipusatkan di Kelurahan Mentikan.

### **2.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah**

Potensi pengembangan wilayah, ditentukan berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya dengan berpedoman pada RTRW. Kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan budidaya di Kota Mojokerto antara lain adalah: kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ruang terbuka non hijau, kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan ruang bagi kegiatan sektor informal, kawasan peruntukan lainnya. Kawasan peruntukan lainnya terdiri dari: kawasan pertanian, kawasan pelayanan umum (meliputi: kawasan pendidikan, kawasan kesehatan dan kawasan peribadatan), dan kawasan pertahanan dan keamanan Negara.

#### **1. Kawasan Perumahan**

##### **A. Potensi**

- a. Perkembangan pembangunan rumah oleh individu/perorangan sebagai akibat dari perkembangan jumlah penduduk
- b. Perkembangan pemukiman oleh pihak swasta atau *developer* berkembang pesat

##### **B. Prospek Pengembangan**

- a. Pemenuhan kebutuhan perumahan dengan penambahan luas kawasan permukiman perkotaan diupayakan pada lahan yang tingkat produktivitasnya rendah, yaitu lahan pertanian kering (tegalan/kebun dll).

- b. Peringatan kepada masyarakat yang bermukim di kawasan sempadan/*squatter*.
- c. Pengembangan permukiman secara vertikal seperti rumah tingkat, apartemen maupun Rusunawa guna memenuhi kebutuhan rumah.

## **2. Kawasan Perdagangan Dan Jasa**

### **A. Potensi**

- a. Memiliki banyak kawasan peta wilayah perdagangan dan jasa seperti pertokoan dan Swalayan, yang berpotensi untuk dijadikan pariwisata modern.
- b. Memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa regional yaitu sebagai pusat perdagangan dan jasa Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang.
- c. Memiliki banyak kawasan perdagangan dan jasa seperti pertokoan dan Swalayan, yang berpotensi untuk dijadikan pariwisata modern. Diantaranya Perdagangan dan Jasa Modern dan Tradisional skala regional diantaranya Perdagangan Modern berupa Swalayan, Perdagangan Modern berupa Pertokoan di sepanjang Jalan Mojopahit, Jl. Gajah Mada, Jl. PB. Sudirman, Jl. Residen Pamuji, Jl. Bayangkara, Jl. Empu Nala dan Jl. By Pass. Pasar Tradisional berupa Pasar Tanjung Anyar di Kelurahan Jagalan.
- d. Memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa regional yaitu sebagai pusat perdagangan dan jasa Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang. Memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan industri sedang, karena letaknya strategis di Jl. By Pass Kelurahan Kedundung yang merupakan jalan nasional arteri primer. Selain itu juga ditunjang dengan sudah berkembangnya beberapa industri besar/sedang yang ada di Kota Mojokerto.
- e. Selain industri sedang, di Kota Mojokerto juga terdapat beberapa industri kecil yang juga bisa membantu menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran di Kota Mojokerto.

### **B. Prospek Pengembangan**

- a. Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan perdagangan dan jasa.

- b. Adanya alokasi lahan untuk kegiatan sektor informal.
- c. Penertiban para pedagang yang masih berjualan di ruas jalan.
- d. Diperlukan pengawasan dan pengendalian perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa karena berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan.
- e. Pengembangan perdagangan dan jasa diarahkan untuk mendukung konsep kegiatan pariwisata Kota Mojokerto sebagai wisata belanja dan kuliner.

### **3. Kawasan Perkantoran**

#### **A. Potensi**

- 1) Kantor pemerintahan Kota Mojokerto tersebar di wilayah Kota Mojokerto dan sebagian terdapat di Jl. Gajah Mada, Jl, Bayangkara, Jalan Raden Wijaya, Jalan Jawa Jl. Pahlawan, Jl. By Pass Jl. Benteng Pancasila, dan di Kelurahan Surodinawan.
- 2) Perkantoran Swasta tersebar di Kota Mojokerto dan sebagian mengumpul di Jalan Mojopahit, Jalan A. Yani dan Jalan Empu Nala.

#### **B. Prospek Pengembangan**

Pengembangan kawasan perkantoran dalam satu kawasan yang terintegrasi, sehingga memudahkan dalam pelayanan kepada masyarakat.

### **4. Kawasan Industri**

#### **A. Potensi**

- 1) Terdapat kegiatan industri dan home industri yang potensial untuk dikembangkan diantaranya industri rokok Bokor Mas, Industri Sepatu Dragon/Pro ATT di jalan Pahlawan, industri pakan Ternak di jalan By Pass dan home industri sepatu dan sandal kulit, home industri kerajinan miniatur perahu, home industri logam cetakan kue, home industri batik, home industri makanan onde-onde, keciput, krupuk yang lokasinya tersebar di Kota Mojokerto.
- 2) Kegiatan industri dan home industri didukung oleh kebijakan pemerintah Kota Mojokerto sehingga semakin berkembang dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
- 3) Letak Kota Mojokerto yang strategis memudahkan distribusi hasil produksi



## B. Prospek Pengembangan

- 1) Peningkatan SDM melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pelatihan.
- 2) Adanya bantuan modal untuk pengembangan usaha kecil dan home industri oleh pemerintah setempat.
- 3) Pengembangan industri besar yang sudah ada dengan memprioritaskan penduduk lokal sebagai tenaga kerjanya.
- 4) Pengembangan *workshop*/tempat pemasaran hasil home industri sebagai usaha untuk promosi dan pemasaran.

## 5. Kawasan Pariwisata

### A. Potensi

Memiliki potensi wisata yang belum dikelola secara optimal diantaranya wisata air jogging track dan kuliner di Sungai Brantas, Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Magersari dengan luas 0,47 Ha atau 0,03%, wisata penunjang perbelanjaan, wisata pemandian, wisata kampung sepatu di Kel. Miji, wisata religi di Kel. Kauman, wisata di kawasan alun-alun, wisata kampung bunga di Kel. Kauman, wisata kampung cor di Kel. Pulorejo, wisata batik di Kel. Surodinawan dan Kel. Gunung Gedangan, wisata religi makam KH. Achyat Chalimy di Jalan. KH. Wachid Hasyim, dan wisata cagar budaya berupa sekolah Ir. Soekarno waktu kecil yang terletak di SDN Purwotengah Jl. Taman Siswa dan SMP Negeri 2 Jl. A Yani.

### B. Prospek Pengembangan

Optimalisasi pengelolaan wisata di Kota Mojokerto pada kawasan wisata kuliner dan *jogging track*, wisata sungai dan wisata sosial budaya dan ilmu pengetahuan, wisata belanja dan kuliner pada kawasan perdagangan dan jasa modern serta wisata belanja hasil kerajinan *home industry* Kota Mojokerto.

## 6. Kawasan Peruntukan Perumahan

Perkembangan kawasan perumahan di Kota Mojokerto meliputi: kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan permukiman, serta berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Kawasan ini terdiri dari rumah yang

dibangun oleh penduduk sendiri dan dibangun oleh perusahaan pembangunan perumahan (*developer*) dan/atau dibangun oleh pemerintah. Kawasan perumahan yang terdapat di Kota Mojokerto direncanakan seluas 430,85 Ha atau sekitar 26,17% dari luas seluruh Kota Mojokerto. Adapun perumahan tersebut direncanakan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu: perumahan kepadatan tinggi, perumahan kepadatan sedang, dan perumahan kepadatan rendah. Adapun distribusi dari masing-masing adalah sebagai berikut: Adapun distribusi dari masing-masing adalah sebagai berikut:

a. Perumahan Kepadatan Tinggi

Perumahan kepadatan tinggi berlokasi di Kelurahan Kranggan, Kelurahan Miji, Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Pulorejo, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Sentanan, Kelurahan Purwotengah, Kelurahan Sentanan, Kelurahan Gedongan, dan Kelurahan Magersari. Luas dari perumahan kepadatan tinggi tersebut adalah sebesar 110,40 Ha.

b. Perumahan Kepadatan Sedang

Rencana perumahan kepadatan sedang adalah seluas 212,24 Ha atau sekitar 12,89% dari luas total wilayah kota. Perumahan kepadatan sedang ini dialokasikan di wilayah Kelurahan Surodinawan, Kelurahan Kranggan, Kelurahan Miji, Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Blooto, Kelurahan Meri, Kelurahan Gunung Gedangan, Kelurahan Kedundung, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Gedongan, Kelurahan Magersari, dan Kelurahan Wates.

c. Perumahan Kepadatan Rendah

Perumahan kepadatan rendah diarahkan pada Kelurahan Surodinawan, Kelurahan Blooto, Kelurahan Kauman, Kelurahan Pulorejo, Kelurahan Gedongan, Kelurahan Magersari, dan Kelurahan Wates. Rencana dari perumahan kepadatan rendah ini adalah sebesar 108,21 Ha.

Arahan-arahan pengembangan kawasan perumahan di Kota Mojokerto antara lain:

a. Pengembangan perumahan yang telah ada dan pengembangan perumahan baru.

- b. Pembangunan perumahan baru dilakukan secara intensif (vertikal dan horizontal) dengan memanfaatkan lahan secara optimal pada kawasan di luar kawasan fungsi lindung.
- c. Peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana lingkungan perumahan meliputi pembenahan lingkungan dan perumahan.

## **7. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa**

Kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan untuk mewujudkan Kota Mojokerto sebagai sentra perdagangan dan jasa dalam skala regional (beberapa kabupaten/Kota). Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang terdapat di Kota Mojokerto direncanakan seluas 127,51 Ha atau sekitar 7,74%. Adapun rencana pengembangan berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 2, yaitu:

### **a. Pasar tradisional**

Pasar tradisional di Kota Mojokerto diantaranya adalah Pasar Tanjung Anyar, Pasar Kliwon, Pasar Kranggan, Pasar Prapanca, Pasar Prajuritkulon, Pasar Hewan, dan Pasar Burung Empunala. Pasar tradisional ini direncanakan dengan luas sebesar 6,93 Ha dan diarahkan pada: Kelurahan Kranggan, Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kedundung, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Jagalan, dan Kelurahan Purwotengah. Selain itu terdapat beberapa rencana dalam pengembangan pasar tradisional, antara lain:

- 1) Adanya rencana membangun pasar lingkungan di bagian Timur kota yaitu di Kelurahan Kedundung atau Kelurahan Gunung Gedangan.
- 2) Adanya rencana membangun pasar lingkungan di bagian Barat kota yaitu di Kelurahan Blooto atau Kelurahan Pulorejo.
- 3) Adanya relokasi atau revitalisasi pasar Kranggan.

### **b. Pusat perbelanjaan dan toko modern**

Kawasan perdagangan dan jasa yang berfungsi sebagai pusat perbelanjaan dan toko modern mempunyai luas lebih kurang 120,58 Ha. Lokasi dari pusat perbelanjaan dan toko modern diarahkan pada Jl. Mojopahit dan Mojopahit Selatan, Jl. Bhayangkara, Jl. Gajah Mada, Jl. HOS Cokroaminoto, Jl. PB Sudirman, Jl. Residen Pamuji, Jl. Letkol

Sumarjo, Jl. Ahmad Yani, Jl. Raya Prajuritkulon, Jl. Bypass, Jl. Surodinawan, Jl. Benteng Pancasila dan Jl. Ijen.

Rencana pengembangan pada kawasan perdagangan dan jasa pada subpusat pelayanan ini adalah sebagai upaya untuk bisa melayani daerah sekitarnya. Selain itu, ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan dalam hal pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, antara lain sebagai berikut:

- 1) Memperhatikan pelaku sektor informal pada perdagangan dan jasa. Menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, area untuk pedagang informal dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari keseluruhan luas lahan.
- 2) Pelaksanaan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, area untuk pedagang informal dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari keseluruhan luas lahan.
- 4) Pelaksanaan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, area untuk pedagang informal dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari keseluruhan luas lahan.

## **8. Kawasan Peruntukan Perkantoran**

Kawasan perkantoran dikembangkan dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif, cepat, dan hemat. Penyatuan dalam suatu kawasan akan relatif membantu bagi para pengguna dalam mengakses jasa pelayanan. Rencana pengembangan kawasan perkantoran di Kota Mojokerto diarahkan sebagai berikut:

- a. Pusat pemerintahan tetap dipertahankan di pusat kota, dan fasilitas pemerintahan yang tersebar dipertahankan untuk efisiensi pelayanan meliputi: Jl. Pahlawan, Jl. Gajah Mada, Jl. Bhayangkara, Jl. Raden Wijaya, Jl. Bypass, Jl. Jawa, Jl. Letkol Sumarjo, dan Jl. Raya Prajuritkulon.

- b. Peningkatan fisik pembangunan pemerintahan diarahkan pada intensifikasi lokasi, jika lahan terbatas dapat dikembangkan secara vertikal.
- c. Kawasan perkantoran swasta diarahkan pada kawasan pusat kota dan menyatu pada pusat-pusat kawasan perdagangan dan jasa, yang direncanakan di: Jl. Bypass, Jl. Pahlawan, Jl. Gajahmada, Jl. Mojopahit, Jl. Raya Prajuritkulon, dan Jl. Surodinawan
- d. Pengembangan kapasitas pemerintahan (meliputi: peningkatan kapasitas ekonomi untuk pemerintah daerah melalui kerjasama dan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan pembangunan).

#### **9. Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Sektor Informal**

Pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal akan memberikan banyak hal positif bagi perkembangan kota baik dari segi spasial maupun ekonomi antara lain adalah:

- a. Mampu sebagai wadah pengembangan dan penataan sektor informal kota, agar dapat memberikan kontribusi positif bagi kota.
- b. Mampu sebagai salah satu daya tarik kota (wisata kota) yang dapat dijangkau semua kalangan.
- c. Mampu memberikan pemasukan bagi PAD Kota Mojokerto melalui penarikan retribusi perdagangan dan parkir.
- d. Mampu menyerap tenaga kerja, sehingga secara bertahap dapat mengurangi angka pengangguran kota dan diharapkan akan dapat mengurangi permasalahan sosial kota.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal PKL yang diarahkan dilokasikan pada:

- a. Kawasan PKL di Jalan Benteng Pancasila
- b. Kawasan PKL di Jalan Surodinawan.

#### **10. Kawasan Peruntukan Lainnya**

Kawasan peruntukan lainnya ini terdiri atas: kawasan pertanian, kawasan pelayanan umum, dan kawasan pertahanan dan keamanan negara.

- a. Kawasan Pertanian

Kota Mojokerto mempunyai kawasan pertanian yang terdapat di Kelurahan Prajuritkulon, Blooto, Surodinawan, dan Pulorejo. Kawasan

pertanian tersebut ialah: kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, dan kawasan perikanan. Adapun kawasan pertanian tersebut seluas 104,25 Ha. Kawasan tersebut ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Mojokerto. Kawasan peternakan lokasinya menyatu dengan perumahan. Kawasan perikanan yang terdapat di Kota Mojokerto terdiri dari waduk, perairan umum, dan kolam. Waduk ini berlokasi di Kelurahan Mentikan, Prajuritkulon, dan Pulorejo dengan luas 1,2 Ha. Pada kawasan perikanan yang terdapat di perairan umum, tepatnya terdapat di Sungai Brantas, Pulo/Kali Ngotok, Brangkal, Sadar, Cemporat, Ngrayung, dan Watu Dakon. Kawasan perikanan yang terdapat di kolam adalah seluas 6,1 Ha. Secara umum, rencana pengembangan kawasan pertanian diarahkan sebagai berikut:

- 1) Penerapan pola disinsentif meliputi pengurusan perizinan, pembukaan akses jalan, pemasangan utilitas (listrik, telepon, air bersih, drainase, dan persampahan).
- 2) Penerapan insentif meliputi bantuan pupuk dan obat-obatan secara berkala, kemudahan pengajuan kredit tanam, suplai air irigasi yang kontinyu, dan stabilisasi harga jual hasil panen
- 3) Pengembangan prasarana pengairan.
- 4) Pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu lahan pertanian yang subur.
- 5) Mempertahankan fungsi kawasan pertanian
- 6) Membatasi kegiatan pembangunan disekitar kawasan pertanian potensial.
- 7) Mengupayakan intensifikasi pertanian meliputi daya dukung tanah, daya dukung pengairan/irigasi, dan produktivitas lahan pertanian.
- 8) Mengembangkan sentra produksi tanaman pertanian sesuai dengan jenis tanaman yang cocok dan produksi yang dominan.

Daya dukung lingkungan hidup (DDLH) digambarkan melalui perbandingan jumlah sumber daya yang dapat dikelola terhadap jumlah konsumsi penduduk (Cloud dalam Soerjani, 1987). Perbandingan ini menunjukkan bahwa daya dukung lingkungan berbanding lurus terhadap jumlah sumber daya lingkungan dan berbanding terbalik

dengan jumlah konsumsi penduduk. Status DDLH diperoleh dari pendekatan kuantitatif melalui perhitungan selisih dan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan untuk masing-masing jasa ekosistem (Norvyani, 2016).

Status DDLH yang dimodelkan adalah DDLH untuk jasa ekosistem penyediaan bahan pangan dan penyediaan air bersih. Nilai kebutuhan dihitung pangan didasarkan pada Angka Kecukupan Energi (AKE) per kapita; sedangkan nilai kebutuhan air didasarkan pada kebutuhan air domestik per kapita dan tutupan lahan untuk air bersih. Sementara itu, ketersediaan jasa ekosistem untuk pangan dihitung dengan menggunakan metode pembobotan berdasarkan Indeks Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan (IJEPBP); dan Indeks Jasa Ekosistem Penyedia dan Tata Air (IJEPPA) untuk air bersih.

Berdasarkan data KLHS RPJMD Kota Mojokerto tahun 2018, dapat diketahui persentase angka kecukupan pangan Kota Mojokerto berada pada nilai 125,7% dimana angka kecukupan pangan ideal berada pada nilai 100%. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan pangan di Kota Mojokerto telah tercukupi dan bahkan surplus. Namun jika dilihat dari persentase angka kecukupan energi Kota Mojokerto yang berada pada nilai 93,1% sedangkan nilai idealnya adalah 100%, maka angka kecukupan energi Kota Mojokerto belum ideal. Sedangkan berdasarkan nilai pola pangan harapan (PPH) Kota Mojokerto memiliki nilai sebesar 84,3 dimana hal tersebut menandakan diversifikasi atau keanekaragaman jenis pangan cukup beragam di Kota Mojokerto, hal tersebut menyumbang pada peningkatan gizi masyarakat dan tingkat kesehatan masyarakat Kota Mojokerto. Sehingga dapat disimpulkan bahwa daya dukung bahan pangan di Kota Mojokerto sangat baik.

Produksi bahan pangan hasil pertanian khususnya padi di Kota Mojokerto relatif kecil sekali, karena luas panen sangat minim. Menurunnya luas panen tanaman pangan bukan berarti produksinya juga mengalami penurunan, karena masih ada faktor lain yang mempengaruhi, misalnya produktivitas. Hal ini bisa dipahami karena keterbatasan lahan dan pergeseran status lahan dari lahan kering menjadi bangunan-bangunan perumahan dan perkantoran (alih fungsi

lahan). Sebagian besar dari lahan tersebut berasal dari lahan pertanian yang sejak 3 tahun terakhir telah bergeser menjadi lahan perumahan maupun lahan perkantoran dan ruko-ruko. Tanah yang bukan sawah tersebut yaitu seluas 1.477,55 hektar, terdiri dari 1.227,21 hektar digunakan untuk bangunan perumahan, halaman dan pekarangan. Selebihnya adalah merupakan tegal, kebun, dan lainnya dengan perkembangan kota Mojokerto yang makin membutuhkan ruang atau lahan untuk pembangunan, maka luas lahan pertanian di Kota Mojokerto terus menyusut, diperkirakan setiap tahun lahan pertanian menyusut 5 % - 10 %. Penyusutan ini semakin mengancam syarat minimal lahan pertanian abadi yang harus dipertahankan. Diperkirakan dalam waktu beberapa tahun ke depan, lahan untuk penyuplai bahan makanan pokok akan habis, sebab sampai saat ini tak ada proteksi dari Pemerintah Kota Mojokerto untuk melindungi lahan pertanian berkelanjutan di kota Mojokerto.

Identifikasi daya dukung pangan juga dapat dilakukan melalui pendekatan jasa ekosistem, yang asumsinya adalah semakin tinggi nilai jasa ekosistem semakin tinggi maka semakin tinggi pula kemampuan daya dukung pangan di daerah tersebut. Jasa ekosistem ditentukan oleh keberadaan faktor endogen dan dinamika faktor eksogen yang dicerminkan dengan dua komponen yaitu kondisi ekoregion (bentang lahan) dan penutup lahan (land cover/ land use) sebagai penaksir atau proxy. Oleh karena itu diperlukan proses transformasi data dari ekoregion dan penutup lahan menjadi nilai jasa ekosistem, yang selanjutnya digunakan dasar untuk melakukan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kota Mojokerto.

b. Kawasan Pelayanan Umum

Kawasan peruntukan lainnya yang perlu dikembangkan di Kota Mojokerto adalah kawasan pelayanan umum yang meliputi kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, dan kawasan peribadatan dengan luas sebesar 43,26 Ha.

1) Fasilitas Pendidikan

Pembangunan fasilitas pendidikan dilakukan dalam rangka peningkatan dan penyediaan sumber daya manusia yang dapat



mendukung peran dan fungsi Kota Mojokerto sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kota dan regional. Rencana pembangunan fasilitas pendidikan diarahkan sebagai berikut:

- Peningkatan kualitas pendidikan, dan pembenahan prasarana dan sarana.
- Pembangunan fasilitas pendidikan baru tingkat dasar hingga menengah dilakukan tersebar pada lokasi fasilitas umum sekitar kawasan permukiman sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanannya.

## 2) Fasilitas Kesehatan

Pembangunan fasilitas kesehatan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang ada baik dalam skala kota maupun regional. Rencana pengembangan fasilitas kesehatan di Kota Mojokerto diarahkan sebagai berikut:

- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang ada meliputi rumah sakit milik Pemerintah Daerah Dr. Wahidin Sudirohusodo, puskesmas, dan juga pembangunan fasilitas kesehatan baru.
- Penyediaan rumah sakit skala regional untuk mengantisipasi perkembangan di Mojokerto yaitu Rumah Sakit Umum yang terdapat di Kelurahan Surodinawan dengan Tipe B.

## 3) Fasilitas Peribadatan

Pembangunan tempat peribadatan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta untuk memenuhi kebutuhan tempat beribadah bagi semua golongan masyarakat warga Kota Mojokerto baik pada skala kota maupun skala lingkungan. Rencana pengembangan fasilitas peribadatan di Kota Mojokerto diarahkan sebagai berikut:

- Perbaiki fasilitas serta sarana dan prasarana yang ada.
- Kawasan peribadatan diarahkan menyebar merata di seluruh kawasan permukiman sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kawasan Pertahanan Dan Keamanan Negara

Kawasan pertahanan dan keamanan atau kawasan militer di Kota Mojokerto yang ada saat ini keberadaannya tetap dipertahankan dengan upaya pelestarian bangunan yang ada. Adapun kawasan pertahanan dan keamanan negara yang terdapat di Kota Mojokerto, antara lain, yaitu:

- 1) Komando Resort Militer (KOREM) di Jalan Veteran Kelurahan Kauman;
- 2) Komando Distrik Militer (KODIM) di Kelurahan Magersari, Kecamatan Magersari;
- 3) Komando Rayon Militer (KORAMIL) yang terdapat di seluruh Kecamatan wilayah Kota Mojokerto;
- 4) Detasemen Polisi Militer (PM) Kota Mojokerto di Kelurahan Magersari;
- 5) Perbekalan dan Angkutan Komando Distrik Militer di Jalan Pahlawan Kelurahan Miji;
- 6) Kepolisian Resort Kota Mojokerto di Jalan Bhayangkara Kelurahan Sentanan;
- 7) Kepolisian Sektor yang terdapat di Kecamatan seluruh wilayah Kota Mojokerto.

## **2.1.8 Wilayah Rawan Bencana**

### **2.1.8.1 Bencana Banjir**

Sebagian besar wilayah Kota Mojokerto mempunyai tingkat resiko bencana banjir rendah, sedang, dan tinggi. Hal ini disebabkan karena Kota Mojokerto mempunyai permukaan tanah yang relatif datar, sehingga aliran sungai/ saluran menjadi relatif lambat dan mempercepat terjadinya pendangkalan yang pada akhirnya timbul kecenderungan ada genangan pada berbagai bagian kota apabila terjadi hujan.

Banjir bandang pernah menenggelamkan separuh kota pada tahun 2004. Wilayah rawan banjir di Kota Mojokerto berdasarkan tingkat resikonya yaitu Kecamatan Prajuritkulon dengan tingkat resiko tinggi dan Kecamatan Magersari dengan resiko sedang. Banjir yang terjadi merupakan banjir kiriman yang berasal dari Kali Kromong Pacet dan Kali Pikatan. Dua sungai tersebut bertemu di Dusun

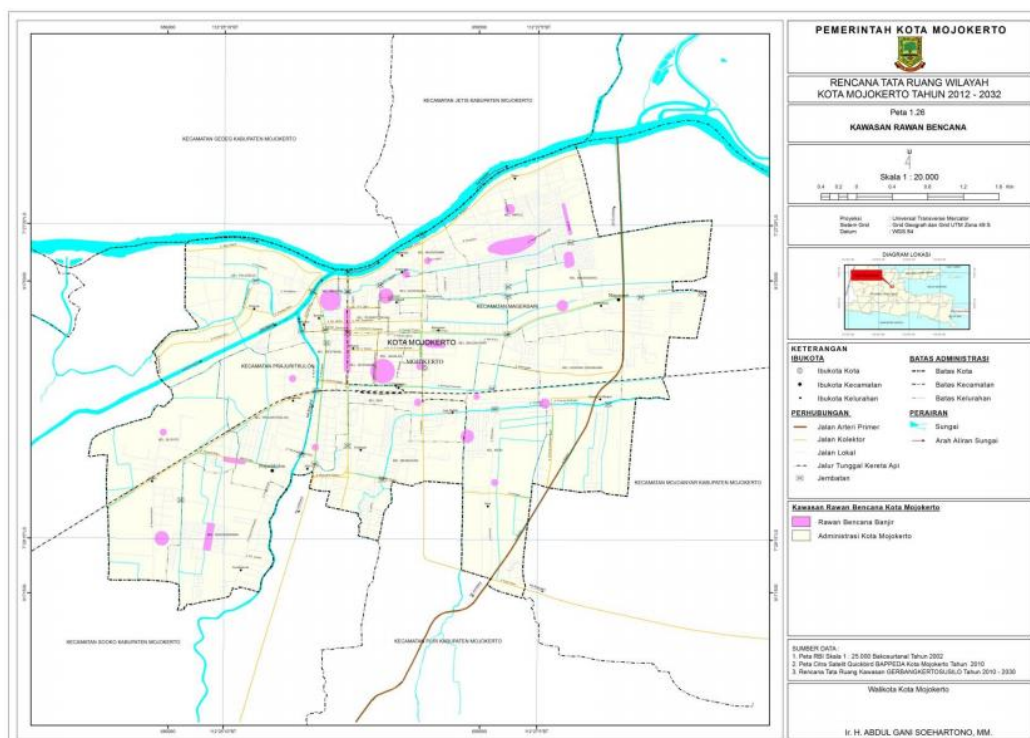
Wiyu dan menjadi satu dengan air yang berasal dari dataran tinggi Wonosalam yang selanjutnya mengalir ke Kali Brangkal. Akibat kondisi tersebut, Kali Brangkal tidak mampu menampungnya sehingga menyebabkan banjir di sekitar wilayah Kota Mojokerto yang dilewatinya terutama di bagian barat. Sedangkan Kali Sadar menyebabkan banjir di wilayah Mojokerto bagian timur. Pada saat banjir, rata-rata luas genangannya adalah sebesar 66,7 Ha, setinggi rata-rata 0,5 m dan lama genangan rata-rata 12 jam.

Selain ancaman banjir yang disebabkan oleh jebolnya tanggul sungai perbatasan Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto, Kota Mojokerto berpotensi terjadi genangan air akibat infrastruktur drainase Kota Mojokerto seperti tabel

**Tabel 2. 4 Potensi Genangan Air di Kota Mojokerto**

Kecamatan/Kelurahan	Tinggi (cm)	Luas Genangan (km <sup>2</sup> )	Lama Genangan (jam)	Luas genangan tidak memenuhi SPM (km <sup>2</sup> )*
<b>Kecamatan Prajuritkulon</b>				
Surodinawan		0	0	0
Prajuritkulon		0,1	0	0
<b>B l o o t o</b>				
Mentikan		0	0	0
Kauman		0	0	0
Pulorejo		0	0	0
<b>Kecamatan Magersari</b>				
Gunung Gedangan	10	0,1	1	0,1
Kedundung		2,155	0	0
Balongsari		0	0	0
Gedongan	-	-	-	-
Magersari	-	-	-	-
Wates	-	-	-	-
<b>Kecamatan Kranggan</b>				
Kranggan		0	0	0
Miji	10	0,1	3	0,1
Meri	10	0,1	1	0,1
Jagalan		2,36	0	0
Sentanan	-	-	-	-
Purwotengah	-	-	-	-

Sumber: RTRW Kota Mojokerto 2012 – 2032



**Gambar 2. 3 Peta Kawasan Rawan Bencana Kota Mojokerto**

### 2.1.8.2 Bencana Kebakaran

Selain banjir, Kota Mojokerto memiliki potensi resiko terjadinya bencana kebakaran. Kepadatan penduduk yang meningkat, banyaknya pembangunan gedung perkantoran, kawasan perumahan, industri yang semakin berkembang sehingga menimbulkan kerawanan dan apabila terjadi kebakaran membutuhkan penanganan secara khusus. Bencana kebakaran yang terjadi di Kota Mojokerto kebanyakan disebabkan karena kelalaian maupun korsleting listrik. Berikut jumlah bencana kebakaran di Kota Mojokerto:

**Tabel 2. 5 Jumlah bencana kebakaran di Kota Mojokerto 2016 – 2020**

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah bencana kebakaran	15	15	24	42	35

*Sumber: Satpol PP Kota Mojokerto, 2021*

Dari tabel diatas, jumlah bencana kebakaran di Kota Mojokerto tahun 2016 dan 2017 sama yakni 15 kejadian. Jumlah kejadian kembali meningkat di tahun 2018 sebanyak 24 peristiwa. Dan di tahun 2019 meningkat cukup banyak menjadi 42 kejadian. Sementara di tahun 2020 terjadi penurunan jumlah bencana kebakaran menjadi 35 peristiwa.

## 2.1.9 Demografi

### 2.1.9.1 Jumlah, Kepadatan dan Perkembangan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Mojokerto pada tahun 2020 mencapai 140.075 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 69.500 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 70.575 jiwa.

Berikut ini tabel perkembangan jumlah penduduk Kota Mojokerto tahun 2016 – 2020:

**Tabel 2. 6 Perkembangan Penduduk Kota Mojokerto 2016 – 2020**

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Wilayah	Km <sup>2</sup>	16,46	16,46	20,217	20,217	20,217
2	Penduduk Laki-Laki	Jiwa	70.879	66.374	71.271	69.063	69.500
3	Penduduk Perempuan	Jiwa	72.153	72.764	72.106	70.276	70.575
4	Jumlah penduduk	Jiwa	143.032	144.493	143.377	139.339	140.075
5	Kepadatan penduduk	Jiwa/km <sup>2</sup>	8.690	8.778	7.092	6.892	6.929
6	Pertumbuhan penduduk	%	0,85	1,02	-0,77	-2,82	0,53
7	Sex Ratio	%	98	98	98	98	98

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2020*

Jumlah penduduk di Kota Mojokerto sampai dengan Bulan Desember 2020 sebanyak 140.075, dengan kepadatan penduduk sebesar 6.929 jiwa/Km<sup>2</sup>. Dari data kependudukan tersebut maka Kota Mojokerto dapat digolongkan kepada kelas kota sedang, dimana berdasarkan kriteria BPS mengenai kelas kota, kota sedang adalah kota dengan jumlah penduduk antara 100.000 – 500.000 jiwa.

Besarnya jumlah penduduk di Kota Mojokerto dengan luas wilayah yang sangat kecil akan menyebabkan kepadatan Kota Mojokerto menjadi sangat tinggi, yaitu 6.929 penduduk per kilometer persegi (km<sup>2</sup>) di akhir tahun 2020.

### 2.1.9.2 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Pada Bulan Desember Tahun 2020, penduduk usia muda (0-15 tahun) mencapai 25,12%, penduduk usia produktif (16-64 tahun) mencapai 67,77%, sedangkan dan usia tua (65 tahun ke atas) mencapai 7,11%.

**Tabel 2. 7 Komposisi Penduduk Kota Mojokerto Menurut Kelompok Umur  
Tahun 2016 – 2020**

No	Kelompok Umur	2016			2017			2018			2019			2020		
		L (Jiwa)	P (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	L (Jiwa)	P (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	L (Jiwa)	P (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	L (Jiwa)	P (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	L (Jiwa)	P (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	0 - 4	5.241	5.101	10.342	5.142	4.942	10.084	5.162	4.844	10.006	5.142	4.833	9.975	5.085	4.776	9.861
2	5 - 6	2.334	2.236	4.570	2.353	2.278	4.631	2.307	2.285	4.592	2.261	2.245	4.506	2.260	2.150	4.410
3	7 - 12	6.974	6.835	13.809	7.030	6.895	13.925	7.072	6.974	14.046	7.208	7.054	14.262	7.110	7.043	14.153
4	13 - 15	3.683	3.386	7.069	3.693	3.372	7.065	3.599	3.288	6.887	3.469	3.346	6.815	3.428	3.335	6.763
5	16 - 18	3.554	3.292	6.846	3.540	3.281	6.821	3.586	3.310	6.896	3.571	3.265	6.836	3.563	3.229	6.792
6	19 - 24	6.182	6.273	12.455	6.315	6.339	12.654	6.285	6.285	12.570	6.156	6.080	12.236	6.337	6.101	12.438
7	25 - 29	5.160	5.202	10.362	5.210	5.251	10.461	5.220	5.231	10.451	5.050	5.169	10.219	5.086	5.226	10.312
8	30 - 34	6.308	6.238	12.546	6.093	5.980	12.073	5.727	5.621	11.348	5.274	5.178	10.452	5.225	5.102	10.327
9	35 - 39	6.050	5.965	12.015	6.307	6.185	12.492	6.275	6.226	12.501	5.993	5.944	11.937	5.926	5.823	11.749
10	40 - 44	5.700	5.424	11.124	5.644	5.443	11.087	5.690	5.382	11.072	5.393	5.207	10.600	5.420	5.340	10.760
11	45 - 49	5.085	5.143	10.228	5.262	5.300	10.562	5.155	5.205	10.360	4.790	4.898	9.688	4.914	4.873	9.787
12	50 - 54	4.255	4.697	8.952	4.342	4.643	8.985	4.359	4.640	8.999	4.338	4.567	8.905	4.276	4.457	8.733
13	55 - 59	3.633	3.937	7.570	3.663	4.104	7.767	3.633	4.137	7.770	3.417	4.019	7.436	3.507	4.125	7.632
14	60 - 64	2.822	2.947	5.769	2.967	3.082	6.049	3.035	3.210	6.245	2.960	3.231	6.191	3.008	3.385	6.393
15	65 - 69	1.667	1.835	3.502	1.848	1.950	3.798	1.912	2.003	3.915	1.971	2.068	4.039	2.076	2.236	4.312
16	70 - 74	1.067	1.423	2.490	987	1.355	2.342	1.003	1.290	2.293	969	1.296	2.265	1.056	1.322	2.378
17	75 keatas	1.164	2.219	3.383	1.333	2.364	3.697	1.251	2.175	3.426	1.147	1.914	3.061	1.223	2.052	3.275
<b>JUMLAH</b>		<b>70.879</b>	<b>72.153</b>	<b>143.032</b>	<b>71.729</b>	<b>72.764</b>	<b>144.493</b>	<b>71.271</b>	<b>72.106</b>	<b>143.377</b>	<b>69.109</b>	<b>70.314</b>	<b>139.423</b>	<b>69.500</b>	<b>70.575</b>	<b>140.075</b>

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2021*

Kondisi ini merupakan hal yang baik dalam pencapaian kualitas hidup khususnya kualitas kesehatan di Kota Mojokerto namun di sisi lain kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota untuk menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dan memihak bagi para Lansia tersebut seperti dukungan prasarana kesehatan ruang publik yang layak lansia dan berbagai kebijakan terkait lainnya.

Data dan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk usia produktif (94.923 jiwa) Kota Mojokerto jauh lebih tinggi daripada penduduk usia non produktif (45.152 Jiwa) sehingga sumber daya manusia produktif di Kota Mojokerto memiliki potensi jumlah yang besar untuk peningkatan partisipasi pembangunan.

### **2.1.9.3 Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

Berdasarkan catatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto penduduk Kota Mojokerto menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 8 Komposisi Penduduk Kota Mojokerto Menurut Tingkat Pendidikan  
Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tidak/ belum tamat SD	37.484	26,21	38.488	26,64	38.721	27,01	38.404	27,5	38.841	27,73
2	SD sederajat	23.594	16,50	23.384	16,18	22.636	15,79	21.725	15,6	21.422	15,29
3	SMP sederajat	20.188	14,11	20.234	14,00	19.950	13,91	18.981	13,6	18.815	13,43
4	SMA sederajat	46.460	32,48	46.727	32,34	46.273	32,27	44.718	32,1	45.030	32,15
5	Diploma	3.327	2,33	3.361	2,33	3.307	2,31	3.202	2,3	3.258	2,33
6	Strata 1	11.330	7,92	11.615	8,04	11.781	8,22	11.659	8,4	11.959	8,54
7	Strata 2	635	0,44	673	0,47	696	0,49	717	0,5	732	0,52
8	Strata 3	14	0,01	11	0,01	13	0,01	17	0,0	18	0,01
	<b>Jumlah</b>	<b>143.032</b>	<b>100</b>	<b>144.493</b>	<b>100</b>	<b>143.377</b>	<b>100</b>	<b>139.423</b>	<b>100</b>	<b>140.075</b>	<b>100</b>

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2021*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas penduduk Kota Mojokerto semakin membaik. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan sampai tingkat Strata. Hal ini berdampak pada kemampuan penduduk dalam menghadapi perkembangan zaman.

#### **2.1.9.4 Komposisi Penduduk Menurut Agama**

Agama merupakan salah satu hak asasi paling dasar dari manusia yang diakui oleh negara Republik Indonesia. Hak untuk memilih dan menyakini sebuah doktrin keagamaan tersebut, lahir secara otomatis ketika tiap manusia menjalani kehidupannya baik secara individu maupun sebagai bagian dari komunitas masyarakat tertentu.

Komposisi penduduk menurut agama di Kota Mojokerto dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 2. 9 Komposisi Penduduk Kota Mojokerto Menurut Agama 2016 - 2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Islam	131.394	132.896	132.166	128.794	129.543
2.	Katholik	1.991	1.972	1.903	1.827	1.821
3.	Kristen Protestan	8.149	8.142	7.913	7.519	7.449
4.	Budha	1.328	1.307	1.232	1.131	1.114
5.	Hindu	134	134	122	110	105
6.	Kong Hu Cu	36	42	41	42	43
	<b>Jumlah</b>	<b>143.032</b>	<b>144.493</b>	<b>143.377</b>	<b>139.423</b>	<b>140.075</b>

*Sumber: Satikomo Mojokerto Kota, 2021*

Berdasarkan agama yang dianut pada tahun 2020 mayoritas penduduk Kota Mojokerto beragama Islam 92,48% diikuti oleh Kristen Protestan 5,32%, Katholik 1,30%, Budha 0,80% Hindu 0,07% dan Kong Hu Cu 0,03%.

## **2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

### **2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

#### **2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Mojokerto bersama masyarakat, utamanya bidang ekonomi semakin meningkat seiring dengan dinamika pembangunan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya besaran angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Apabila dihitung atas dasar harga berlaku, total nilai PDRB Kota Mojokerto tahun 2016 sebesar Rp. 5.370.366,4 Juta, meningkat menjadi Rp. 5.828.234,7 Juta, pada tahun 2017, Rp. 6.333.226,0 Juta pada tahun 2018, dan Rp. 6.801.696,59 Juta pada tahun 2019. Sementara di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi Rp



6.588.057,71 Juta. Apabila dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010, total nilai PDRB Kota Mojokerto tahun 2016 sebesar Rp. 4.221.826,6 Juta, Rp. 4.460.444,9 Juta pada tahun 2017, Rp. 4.719.232,4 Juta pada tahun 2018, Rp. 4.985.675,85 Juta pada tahun 2019, dan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 4.801.464,04 Juta.

**Tabel 2. 10 Pertumbuhan PDRB Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016 – 2020**

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB ADHB (Juta Rupiah)	5.370.366,4	5.828.234,7	6.333.226,0	6.801.696,59	6.588.057,71
PDRB ADHK (Juta Rupiah)	4.221.826,6	4.460.444,9	4.718.943,0	4.985.675,85	4.801.464,04
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,77	5,65	5,80	5,65	-3,69
Jawa Timur (%)	5,57	5,46	5,50	5,52	-2,39
Nasional (%)	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2021*

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto dapat dilihat dari besaran nilai PDRB atas dasar harga konstan, karena pertumbuhan ekonomi ini benar-benar diakibatkan oleh perubahan jumlah barang dan jasa yang sudah bebas dari pengaruh harga (pertumbuhan riil). Pada tahun 2016 perekonomian Kota Mojokerto tumbuh 5,77 persen, dan dalam empat tahun berikutnya mengalami fluktuasi, masing-masing 5,65 persen (Tahun 2017), 5,80 persen (Tahun 2018), 5,65 persen (Tahun 2019), dan menurun secara signifikan di tahun 2020 menjadi -3,69 persen.

Ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2019 tumbuh sebesar 5,75 persen, mengalami penurunan dibanding tahun 2018 sebesar 5,80 persen. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu adanya perang dagang antara China dengan Amerika Serikat yang berdampak terhadap lesunya perekonomian dunia dan nasional, yang secara tidak langsung memberikan dampak lesunya sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan di Kota Mojokerto. Di samping itu, di tengah lesunya perekonomian nasional, perekonomian Kota

Mojokerto masih tumbuh di atas 5,5 persen. Hal ini dikarenakan selama tahun 2019 di Kota Mojokerto banyak diselenggarakan event kegiatan. Selain itu pada tahun 2019 ada pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan pasar baru, pembangunan jaringan gas, serta perbaikan jalan dan saluran di semua lingkungan.

Pertumbuhan pada besaran angka PDRB Kota Mojokerto tahun 2019 sebesar 5,75 persen mencerminkan bahwa perekonomian Kota Mojokerto tumbuh positif walaupun di tengah lesunya perekonomian global dan nasional sekaligus menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kota Mojokerto memiliki kekuatan dan semakin kokoh.

Di tahun 2020 pandemi Covid menyerang di hampir seluruh belahan bumi, begitupun di Indonesia. Sejak pemerintah mengonfirmasi infeksi korona pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, pandemic Covid-19 tak hanya menciptakan krisis kesehatan masyarakat, tetapi secara nyata juga mengganggu aktivitas ekonomi nasional.

Keputusan pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak April 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Ekonomi Indonesia 2020 tumbuh negative, begitupun dengan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terkhusus Kota Mojokerto. pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto mengalami penurunan -3,69%.

### 1. Pertumbuhan dan Distribusi Sektoral

Perekonomian Kota Mojokerto tahun 2020 mengalami kontraksi sampai dengan -3,69 persen, mengalami perlambatan yang cukup tajam dibanding tahun 2019 sebesar 5,75, sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020. Hal ini dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 11 Pertumbuhan PDRB per Sektor Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Kategori	Sektor/Sub Sektor	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,97	1,62	0,77	-1,54	8,16
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	5,70	6,16	5,79	3,03	-3,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,30	4,20	4,88	6,24	-0,33
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,01	4,98	4,23	4,87	4,39

Kategori	Sektor/Sub Sektor	2016	2017	2018	2019	2020
F	Konstruksi	4,85	6,08	5,82	5,78	-6,26
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	5,51	6,16	6,21	5,88	-9,20
H	Transportasi dan Pergudangan	5,54	6,86	6,22	7,78	-6,43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,25	7,36	7,89	7,78	-8,16
J	Informasi dan Komunikasi	7,24	6,62	6,45	7,09	7,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,12	3,14	4,64	4,45	0,02
L	Real Estate	4,99	3,74	3,97	4,04	3,27
M,N	Jasa Perusahaan	4,95	5,29	5,34	5,37	-7,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan aminan Sosial Wajib	5,13	3,36	4,42	4,27	-2,42
P	Jasa Pendidikan	5,71	3,81	4,19	6,15	2,88
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,76	5,41	5,63	5,99	8,06
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,56	3,91	4,36	5,84	- 14,50
	<b>Total</b>	<b>5,77</b>	<b>5,65</b>	<b>5,80</b>	<b>5,65</b>	<b>-3,69</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2021

Semua sektor yang sebelumnya mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Mojokerto antara lain kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, kategori transportasi dan pergudangan, kategori perdagangan besar dan eceran, kategori konstruksi, kategori jasa perusahaan mengalami kontraksi yang cukup tajam di tahun 2020 menjadi negatif, sebaliknya sektor pertanian yang sebelumnya negatif, di tahun 2020 malah meningkat cukup tajam mencapai 8,16. Sedangkan distribusi PDRB per sektor dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 12 Distribusi PDRB per Sektor Kota Mojokerto 2016 – 2020**

Kategori	Sektor/Sub Sektor	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,67	0,65	0,62	0,59	0,66
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	11,30	11,48	11,60	11,34	11,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,10	0,10	0,11
F	Konstruksi	10,99	10,90	10,67	10,46	10,21
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	29,26	29,38	29,89	30,19	28,52
H	Transportasi dan Pergudangan	2,62	2,71	2,70	2,74	2,64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,82	6,90	6,95	7,09	6,86
J	Informasi dan Komunikasi	11,81	11,88	11,64	11,65	13,01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,47	8,32	8,25	8,15	8,39

Kategori	Sektor/Sub Sektor	2016	2017	2018	2019	2020
L	Real Estate	2,82	2,76	2,76	2,73	2,94
M,N	Jasa Perusahaan	0,78	0,79	0,8	0,8	0,77
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan amanan Sosial Wajib	4,79	4,71	4,78	4,91	5,10
P	Jasa Pendidikan	4,69	4,58	4,46	4,47	4,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,15	1,19	1,16	1,16	1,32
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,64	3,57	3,55	3,53	3,18
	<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2021

Pada tahun 2020, perekonomian Kota Mojokerto ditunjang oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi yaitu sebesar 28,52%, diikuti oleh sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 13,01%, sektor Industri Pengolahan sebesar 11,38% dan sektor Konstruksi sebesar 10,21%.

## 2. Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran

Distribusi PDRB menurut pengeluaran dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 13 PDRB Atas Dasar Berlaku Kota Mojokerto Menurut Pengeluaran Tahun 2016 – 2020**

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.737.877,8	4.026.370,4	4.373.946,1	4.717.124,9	4.612.535,61
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	48.196,1	50.916,7	55.750,3	59.547,9	60.735,12
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	882.824,6	972.216,0	1.077.277,7	1.166.741,4	1.152.548,11
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.923.615,1	2.038.765,4	2.237.584,6	2.418.753,8	2.335.301,97
Perubahan Inventori	733,4	606,2	660,1	675,6	248,82
Ekspor Barang dan Jasa	1.686.138,3	1.811.130,5	2.018.865,7	2.062.504,8	(1573.311,91)
Impor Barang dan Jasa	2.909.018,8	3.071.770,5	3.430.213,6	3.616.018,4	-
<b>PDRB</b>	<b>5,370,366.4</b>	<b>5.828.234,7</b>	<b>6.333.870,7</b>	<b>6.809.330,0</b>	<b>6.588.057,72</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2021

Nilai PDRB menurut pengeluaran Kota Mojokerto selama kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 – 2019 pertumbuhan struktur per komponen tidak berbeda jauh dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Sementara di tahun 2020 terjadi penurunan PDRB akibat pandemic covid 19. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Mojokerto pada tahun 2020 dihasilkan oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencapai 70,01 persen (angka ini meningkat dari 69,41 persen di tahun 2019). Selanjutnya komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 35,45 persen (turun dari 35,61 persen di tahun 2019), disusul oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 17,49 persen (naik dari 17,15 persen di tahun 2019). Pertumbuhan ekonomi Mojokerto tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -3,69 persen. Sumber kontraksi terbesar disumbang oleh komponen Net Ekspor sebesar 0,60 persen poin, komponen Perubahan Inventori sebesar 0,00 persen poin, komponen Konsumsi LNPRT sebesar -0,03 persen poin, komponen Konsumsi Pemerintah sebesar -0,52 persen poin, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar -1,24 persen poin, dan komponen Konsumsi Rumah Tangga sebesar -2,51 persen poin. Sumber terbesar pertumbuhan minus ini adalah komponen Net-Ekspor. Artinya terjadi penurunan luar biasa permintaan dari luar wilayah (ekspor), sementara untuk mencukupi kebutuhan barang dan jasa masyarakat harus mendatangkan dari luar wilayah (impor). Hal ini tentunya menambah “defisit” neraca perdagangan serta mempertajam penurunan pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto.

Komponen lain yang juga berperan besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran yaitu: komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Konsumsi akhir pemerintah. Untuk komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dimana semakin besar kapital yang ditanamkan akan berpengaruh terhadap peningkatan nilai output yang dihasilkan. Pembentukan Modal Tetap Bruto bisa berbentuk bangunan maupun non bangunan, yang menjadi sarana dan prasarana penunjang aktivitas ekonomi pada suatu wilayah. Oleh karena itu kegiatan penanaman modal tetap (*Fix Capital*) atau sering disebut “Investasi” harus terus meningkat, baik oleh pemodal asing (PMA) maupun oleh pemodal dalam negeri (PMDN), supaya output barang/jasa terus bertambah.

### 2.2.1.2 PDRB Per kapita

PDRB per kapita merupakan sebuah indikator yang sangat dikenal, terutama oleh para birokrat yang berkecimpung dalam penanganan peningkatan kemakmuran masyarakat. PDRB Perkapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Besaran ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk pertengahan tahun dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB perkapita wilayah tersebut. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu wilayah semakin baik tingkat perekonomian wilayahnya, walaupun ukuran ini tidak dapat memperlihatkan kesenjangan pendapatan antar penduduk. Meskipun masih terdapat keterbatasan, indikator ini cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu wilayah dalam lingkup makro, paling tidak sebagai acuan memantau kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa wilayah tersebut. Berikut data PDRB Perkapita Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020.

**Tabel 2. 14 PDRB Per kapita Kota Mojokerto, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016 – 2020**

<b>Indikator</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	42,48	45,94	49,53	52,54	50,54
Jawa Timur (Juta Rupiah)	47,49	51,23	55,41	59,09	57,65
Nasional (Juta Rupiah)	47,94	51,89	55,99	59,02	56,94

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2021*

PDRB per kapita Kota Mojokerto lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020. Pada Tahun 2016 PDRB per kapita Kota Mojokerto telah mencapai sekitar 42,48 juta. Pada tahun 2020, PDRB per kapita Kota Mojokerto mencapai 50,54 juta mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2019. Hal ini menunjukkan, bahwa secara umum kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto dari tahun ke tahun semakin membaik, walaupun di tahun 2020 mengalami penurunan diakibatkan oleh pandemic Covid. Hanya saja PDRB Kota Mojokerto selalu berada di bawah angka provinsi Jawa Timur dan Nasional. Adapun yang menjadi alasan mengapa PDRB Kota Mojokerto selalu lebih rendah dari Jawa Timur dan Nasional adalah Kota Mojokerto merupakan kota terkecil se-Indonesia, dan sector industry di kota ini pun terbilang sedikit dibanding dengan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur lainnya.

### 2.2.1.3 Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan pemerintah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan terutama yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah mengendalikan harga komoditi-komoditi beredar di masyarakat. Dengan melihat data inflasi dapat diketahui apakah perencanaan program pembangunan di bidang ekonomi yang telah dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Inflasi yang tinggi menunjukkan terjadinya kenaikan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehari-hari yang cukup tinggi atau dapat juga dikatakan menurunnya kemampuan daya beli masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa tersebut (nilai riil uang menurun). Laju inflasi dalam arti sempit adalah meningkatnya harga barang/jasa kebutuhan masyarakat secara rata-rata. Hal ini berarti terjadi penurunan kemampuan/daya beli uang untuk memperoleh barang/jasa (nilai riil yang menurun), tidak hanya merugikan golongan masyarakat akan tetapi juga berdampak negatif bagi produsen dan pengusaha lainnya, prospek penanaman modal/investasi diberbagai sektor juga terhambat. Berbagai cara, daya dan upaya tetap dan terus dilakukan oleh pengambil keputusan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam menekan dan mengendalikan laju inflasi. Oleh karena itu data inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu daerah maupun nasional.

Di Jawa Timur ada 8 Kabupaten / Kota yang digunakan sebagai Kota Inflasi dari 82 Kabupaten / Kota secara Nasional, yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sumenep, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, dan Kota Surabaya. Sedangkan untuk Kota Mojokerto, penghitungan inflasi yang digunakan adalah menggunakan pendekatan *Sister City* dengan Kota Inflasi. Pendekatan *sister city* yang dimaksud adalah menggunakan diagram timbang dengan kota inflasi yang memiliki pola konsumsi yang hampir sama serta letaknya secara geografis berdekatan. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi rujukan Kota Mojokerto dalam penghitungan inflasi adalah Kota Kediri.

**Tabel 2. 15 Laju Inflasi Kota Mojokerto, Jawa Timur dan Nasional  
Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Mojokerto	1,3	3,44	1,97	1,83	1,93
Jawa Timur	2,74	4,04	2,86	2,12	1,44
Nasional	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68

*Sumber : Statistik Daerah Kota Kediri 2020, 2021*

#### 2.2.1.4 Indeks Gini

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Indeks Gini. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0–1. Semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Indeks Gini Kota Mojokerto dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 2. 16 Indeks Gini Kota Mojokerto, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2016  
– 2020**

Indeks Gini (Kondisi Maret)	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Mojokerto	0,37	0,39	0,341	0,309	0,355
Jawa Timur	0.402	0.396	0.379	0.370	0.366
Nasional	0.397	0.393	0.389	0.380	0.381

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2021*

Indeks Gini di Kota Mojokerto selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tahun 2016 Indeks Gini Kota Mojokerto sebesar 0,37, meningkat di tahun 2017 menjadi 0,39. Dan di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 0,341, disusul dengan tahun 2019 juga mengalami penurunan menjadi 0,309, dan di tahun 2020 naik menjadi 0,355 dikarenakan pandemic covid 19. Indeks Gini Kota Mojokerto angkanya lebih baik daripada Indeks Gini provinsi dan nasional. Semakin kecil nilai Indeks Gini semakin kecil tingkat ketimpangan pendapatan antara penduduk miskin dan non miskin.

#### 2.2.1.5 Persentase Penduduk Miskin

Sesuai Amanat Nasional dan Komitmen Pemerintah Kota Mojokerto bahwa perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Upaya ini telah sesuai dengan substansi pembangunan yang



bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan pemerataan. Berbagai strategi pembangunan ekonomi yang dilakukan, dengan tetap berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Adapun wujud nyata dari upaya tersebut adalah menurunnya jumlah penduduk miskin yang tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 17 Persentase Penduduk Miskin Kota Mojokerto, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2016 – 2020**

<b>Uraian (Kondisi Maret)</b>	<b>2016 (%)</b>	<b>2017 (%)</b>	<b>2018 (%)</b>	<b>2019 (%)</b>	<b>2020 (%)</b>
Kota Mojokerto	5,73	5,73	5,50	5,15	6,24
Jawa Timur	12.05	11.77	10.98	10,37	11,09
Nasional	10.86	10.64	9.82	9,41	9,78

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2021*

Angka kemiskinan di Kota Mojokerto selama empat tahun yakni tahun 2016 – 2019 mengalami tren penurunan. Berbeda dengan tahun 2020 yang secara regional mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016 angka kemiskinan di Kota Mojokerto sebesar 5,73 persen kondisi yang sama juga terjadi pada tahun 2017, selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 5,50 persen berikut di tahun 2019 kembali turun menjadi 5,15 persen. Di tahun 2020 naik menjadi 6,24 persen. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19, yang berimbas pada sektor perdagangan jasa karena adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga banyak usaha perdagangan baik yang besar sampai dengan mikro yang sepi bahkan sampai menutup usahanya, serta industri yang mengurangi produksi akibat berkurangnya permintaan pasar.

**Tabel 2. 18 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan Kota Mojokerto**

<b>Indeks Kemiskinan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0.62	0.67	0.59	0.59	0.64
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.13	0.13	0.10	0.14	0.10

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2021*

Persoalan kemiskinan tidak hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, namun juga perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman

kemiskinan (P1) yang menunjukkan seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Selain itu, juga perlu dipertimbangkan tingkat keparahan kemiskinan (P2), yakni keragaman pengeluaran antar penduduk miskin. Semakin kecil nilai indikator P1 dan P2, berarti kondisi kemiskinan relatif ringan sehingga dalam pengambilan kebijakan pengentasan kemiskinan akan tepat sasaran.

Sepanjang periode 2016 – 2020, nilai P1 dan P2 Kota Mojokerto cenderung menurun dan hal tersebut merupakan hasil kinerja dari berbagai program dalam penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2016, nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 0.62 poin dan selanjutnya berkembang fluktuatif hingga menjadi 0.64 poin pada tahun 2020. Peningkatan nilai indeks tersebut pada tahun 2020 sebagai akibat dari pandemic Covid-19 dimana penduduk miskin semakin terpuruk kondisinya. Demikian halnya dengan nilai indeks keparahan kemiskinan (P2) tahun 2016 sebesar 0.13 poin dan cenderung mengecil menjadi 0.10 pada tahun 2020. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan Kota Mojokerto relative sama levelnya pada tingkatan pengeluaran per kapita setiap bulannya.

#### **2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang dibuat lebih dari satu indeks yang digabung menjadi indeks tunggal. Indeks ini penting untuk melihat sampai seberapa jauh pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan mampu secara nyata memberikan output berupa peningkatan kebutuhan fisik dasar manusia dan perluasan kemampuan manusia untuk melakukan pilihan-pilihan. Agak berbeda dengan Indeks Mutu Hidup (IMH) yang berfungsi sebagai indikator fisik (mengukur tingkat kemajuan), maka IPM cenderung berfungsi sebagai indikator posisi (membandingkan keberhasilan pembangunan antar waktu atau wilayah).

Pembangunan Manusia diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dihitung secara komposit berdasarkan tiga indeks yang terdiri dari Indeks Pendidikan (Harapan lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), Indeks Kesehatan (Usia Harapan Hidup) dan Indeks Daya beli (Daya Beli). Dari tahun 2016 hingga 2020 IPM Kota Mojokerto memiliki kecenderungan meningkat bahkan berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Timur. Kenaikan ini dipengaruhi dari

naiknya ketiga indeks komponen IPM yang terdiri dari Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Pengeluaran Per kapita. Untuk data IPM kami sajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 19 IPM Kota Mojokerto, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Mojokerto	76,38	76,77	77,14	77,96	78,04
Jawa Timur	69,74	70,27	70,77	71,50	71,71
Nasional	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2021*

Upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kota Mojokerto telah berhasil meningkatkan angka indeks pembangunan manusia (IPM) daerah. Sejak tahun 2016-2020, IPM Kota Mojokerto cenderung mengalami peningkatan seiring dengan berbagai program peningkatan kesejahteraan warganya. Dengan menggunakan perhitungan metode baru, IPM Kota Mojokerto tahun 2020 mencapai 78,04. Peringkat IPM Kota Mojokerto tahun 2020 sama dengan peringkat IPM Kota Mojokerto tahun 2019, yakni di posisi 7. Pemerintah Kota Mojokerto tetap perlu meningkatkan kinerja pembangunan manusianya agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### **2.2.1.7 Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Salah satu pengembangan dari penghitungan IPM adalah Indeks Pembangunan Gender. Baik metodologi maupun konsep definisi yang dipakai dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender sama dengan penghitungan IPM. Perbedaannya, penghitungan ini dibedakan menurut gender. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, berimplikasi kepada pembangunan bagi perempuan. Peran perempuan dalam perekonomian suatu daerah dari waktu ke waktu semakin tinggi. Sayangnya, masih dirasakan adanya diskriminasi perlakuan terhadap perempuan dalam kancah sosial ekonomi. Upah kerja perempuan masih lebih rendah dibanding laki- laki. Selain itu, masih berlaku budaya menempatkan perempuan pada urusan dapur rumah tangga. Sehingga kesempatan pendidikan perempuan relatif rendah dan berpengaruh pada rendahnya daya saing di masyarakat. Dengan melihat angka IPG, diharapkan ada perhatian dari berbagai

pihak khususnya Pemerintah Daerah, untuk memajukan perempuan di masa mendatang. Evaluasi untuk meningkatkan pembangunan perempuan diperlukan agar posisi perempuan semakin sejajar setara dengan laki-laki. Sehingga peran perempuan dalam memberikan nilai tambah di masyarakat akan semakin nyata.

Membangun kesetaraan dan keadilan gender tidak dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Terdapat beberapa kendala yang bersumber dari legitimasi konstruksi budaya yang cenderung patriarki, ketidaktepatan interpretasi ajaran agama, dan kebijakan politik. Kesetaraan dan keadilan gender pada prakteknya merujuk pada tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki yang dijamin oleh perundang-undangan. Jaminan tidak adanya perbedaan dalam status dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi partisipasi dalam program pembangunan terutama dalam peningkatan kualitas hidup melalui program peningkatan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan kemudahan akses ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah. Dengan melihat angka IPG, diharapkan ada perhatian dari berbagai pihak khususnya Pemerintah Daerah untuk melihat disparitas capaian indeks kesehatan, pendidikan, dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan.

Penghitungan IPG ini juga memakai metodologi yang dipakai pada penghitungan IPM metode baru. Sehingga angka yang sekarang digunakan menggantikan angka IPG yang pernah di publish. Dengan berlakunya IPG menggunakan metode baru, maka angka yang disajikan tidak bisa dibandingkan dengan angka-angka sebelumnya. Membandingkannya harus sesuai metode yang digunakan atau *apple to apple*. Hasil penghitungan IPG metode baru, tercatat bahwa IPG Kota Mojokerto dari tahun 2016 ke 2018 mengalami penurunan, tetapi tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami tren kenaikan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 20 IPG Kota Mojokerto, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Mojokerto	-	93,40	93,05	93,18	93,26
Jawa Timur	90,72	90,76	90,77	90,91	91,07
Nasional	90,82	90,96	90,99	91,07	91,06

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2021*

IPG Kota Mojokerto selama empat tahun terakhir (2017-2020) mengalami fluktuasi. Tahun 2016, data IPG Kota Mojokerto tidak tersedia, dikarenakan BPS tidak menghitung IPG Kab/Kota. Pada Tahun 2017 IPG Kota Mojokerto mendapatkan angka 93,40, sedangkan pada Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 93,05. Namun di tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 93,18 dan 2020 meningkat lagi menjadi 93,26. Nilai IPG Kota Mojokerto selalu lebih tinggi dari angka Propinsi dan Nasional. Sejauh ini hasil yang dicapai dalam upaya pembangunan kualitas hidup di Kota Mojokerto masih cenderung menguntungkan kepada penduduk laki-laki. Fenomena ini dapat terlihat pada capaian IPG di Kota Mojokerto yang masih berada pada angka dibawah 100. Capaian IPG Kota Mojokerto Tahun 2020 sebesar 93,26 mengindikasikan bahwa masih terdapat ketimpangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, dimana pencapaian pembangunan penduduk laki-laki masih lebih tinggi dibanding penduduk perempuan.

### 2.2.1.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun secara terpaksa mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan. Data Tingkat Pengangguran Terbuka disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 21 TPT Kota Mojokerto, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
Kota Mojokerto	3,33	3,61	2,45	2,65	6,74
Jawa Timur	4,21	4,00	3,91	3,82	5,84
Nasional	5,61	5,50	5,30	5,23	7,07

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2021*

Dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Mojokerto pada Tahun 2016 sebesar 3,33 persen, kemudian Tahun 2017 naik sebesar 3,61 persen.

Selanjutnya pada Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar 2,45 persen dan pada Tahun 2019 naik menjadi sebesar 2,65 persen. Sedangkan di Tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 6,74 persen yang diakibatkan pandemi Covid-19. TPT Kota Mojokerto masih lebih rendah bila dibandingkan Jawa Timur yang sebesar 5,84 persen dan Nasional sebesar 7,07 persen.

### 2.2.1.9 Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek - aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan aparatur sumber daya manusia. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 22 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto dan Jawa Timur Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Mojokerto	56,43 (CC)	62,58 (CC)	58,89 (CC)	62,31 (B)	62,45 (B)
Jawa Timur	69,54	71,11	72,81	73,83	73.83

*Sumber: Bag. Organisasi Setda Kota Mojokerto 2021*

Terdapat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi di Kota Mojokerto pada Tahun 2018 sebesar 58,89 menjadi 62,31 di Tahun 2019 dan di tahun 2020 meningkat menjadi 62,45 dengan kategori B. Pada tahun 2020 berdasarkan hasil evaluasi Kepmenpan RB nomor B/33/RB.06/2021 ada beberapa komponen pengungkit yang mejadi kriteria penilaian Indeks Reformasi Birokrasi yaitu aspek pemenuhan, hasil antara area perubahan, dan *reform*. Penilaian IRB di tahun 2020 menunjukkan kualitas penerapan reformasi birokrasi di Kota Mojokerto sudah berjalan cukup baik, namun penerapan pada perangkat daerah belum merata, sehingga belum mampu memberikan dampak perubahan yang signifikan.

### 2.2.1.10 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sebagai indikator kinerja pembangunan, kualitas air sungai yang diukur berdasarkan konsentrasi BOD dan COD telah cukup menggambarkan kinerja pembangunan lingkungan hidup. Namun demikian, perlu dipertimbangkan pengukuran kinerja pembangunan lingkungan hidup dengan indikator lainnya seperti kualitas udara dan tutupan lahan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dipertimbangkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah sebagai indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Mojokerto. IKLH merupakan informasi kondisi lingkungan hidup dengan menggunakan kualitas air, udara dan lahan sebagai indikator. Untuk data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 23 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Mojokerto dan Jawa Timur Tahun 2016 - 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Mojokerto	61,5	63,02	63,10	65,24	57,72
Jawa Timur	66,81	66,29	66,36	67,10	67,04
Nasional	65,73	66,46	66,50	66,55	70,27

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, 2021*

Indeks Kualitas Hidup Kota Mojokerto dari tahun 2016 – 2019 mengalami kenaikan. Pada tahun ini perhitungan rumus IKLH meliputi Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 30% dan Indeks Tutupan Lahan (ITL) dengan bobot sebesar 40%. Klasifikasi Perhitungan IKLH adalah sebagai berikut:

1.  $IKLH > 80$  = Sangat baik
2.  $70 < IKLH < 80$  = Baik
3.  $60 < IKLH < 70$  = Cukup
4.  $50 < IKLH < 60$  = Cukup
5.  $40 < IKLH < 50$  = Cukup
6.  $IKLH < 40$  = Waspada

Berdasarkan hasil Ekspose Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Sementara tahun 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 24 – 26 November 2020, terdapat perubahan rumus perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

(IKLH). Perubahan perhitungan IKLH tingkat kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

$$\text{IKLH} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$$

Klasifikasi kategori nilai IKLH 2020 – 2024:

1. 90 – 100 = Sangat baik
2. 70 – 89,9 = Baik
3. 50 – 69,9 = Sedang
4. 25 – 49,9 = Buruk
5. 0 – 24,9 = Sangat Buruk

IKLH telah menjadi indikator kinerja pembangunan lingkungan pada RPJM Nasional 2015-2019 dengan *baseline* tahun 2015 sebesar 49,67 (klasifikasi “waspada”) pada tahun 2016 sampai dengan 2018 sebesar 58 - 66 (klasifikasi “kurang”) dan target sampai dengan 2019 naik menjadi 65,24 (klasifikasi “kurang”). Tahun 2020 perhitungan rumus IKLH berubah berikut klasifikasi kategorinya, Kota Mojokerto mendapatkan nilai 57,72 dengan klasifikasi “Sedang”. Nilai IKLH ini sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kota Mojokerto untuk kedepannya. Adapun hasil IKLH Kota Mojokerto selama tahun 2016 – 2020 berada dibawah skor Provinsi Jawa Timur.

**Tabel 2. 24 Indeks Penyusun IKLH Kota Mojokerto 2016-2020**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Indeks Kualitas Udara	55.55	86	87.64	80.57	81.45
Indeks Kualitas Air	54.17	47	47.14	50.95	50.00
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	41.87	54	56.47	64.46	27.11

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, 2021*

Turunnya indeks IKLH Kota Mojokerto pada tahun 2020, apabila dilihat dari komposisi indeks penyusun maka dikarenakan turunnya nilai indeks kualitas tutupan lahan secara signifikan. Hal itu disebabkan perbedaan metode perhitungan ILKH tahun 2020 – 2024 sesuai ketentuan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Perbedaan tersebut terletak pada komponen tutupan lahan, dimana perhitungan indeks kualitas lahan berdasarkan luasan komponen tutupan lahan, meliputi Taman, Hutan Kota, dan Tamah Kehati. Sedangkan pada tahun



sebelumnya komponen tutupan lahan juga memperhitungkan luasan kebun, lahan kosong, RTH, dan pertanian.

#### 2.2.1.11 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Untuk data Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Mojokerto disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 25 Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Mojokerto dan Jawa Timur  
Tahun 2016 - 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Mojokerto	80,26	80,41	82,75	83,87	84,35
Jawa Timur	81	81,33	83,24	83,32	84.62

*Sumber: Bag. Organisasi Setda Kota Mojokerto, 2021*

Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kota Mojokerto pada tahun 2016 - 2020 terus menunjukkan peningkatan, yaitu sebesar 80,26 (Tahun 2016); 80,41 (Tahun 2017); dan 82,75 (Tahun 2018); 83,87 (Tahun 2019) dan 84,35 (Tahun 2020). Kondisi ini mencerminkan kepuasan terhadap pelayanan kepada masyarakat di Kota Mojokerto semakin baik, efisien, dan efektif. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

#### 2.2.1.12 Indeks Kesalehan Sosial (IKS)

Indeks kesalehan sosial merupakan gabungan indeks kepedulian sosial dan indeks kepedulian lingkungan. Indeks ini terbagi menjadi 3 kelompok dimensi, yaitu dimensi solidaritas sosial, dimensi toleransi, dan dimensi ketertiban umum. Indeks kesalehan sosial merupakan indikator kinerja utama (IKU) baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kota Mojokerto. Penerapan indeks kesalehan sosial di Kota Mojokerto dimulai tahun 2019

dengan nilai 76.16 dari skala 0-100 dan nilai indeks tersebut pada tahun 2020 tidak jauh berbeda yaitu sebesar 76.20. Nilai kategori IKS Kota Mojokerto tergolong dalam kategori Baik.

**Tabel 2. 26 Indeks Kesalehan Sosial (IKS) Kota Mojokerto**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Dimensi Solidaritas Sosial	-	-	-	77.11	79.04
Dimensi Toleransi	-	-	-	81.08	76.63
Dimensi Ketertiban Umum	-	-	-	72.83	72.94
<b>IKS Kota Mojokerto</b>	-	-	-	<b>76.16</b>	<b>76.20</b>

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, 2021*

Dimensi solidaritas sosial terdiri dari 2 subdimensi, yaitu memberi dan peduli. Pada tahun 2019, angka dimensi solidaritas sosial sebesar 77.11 dan mengalami peningkatan menjadi 79.04 pada tahun 2020. Dimensi toleransi terdiri dari 3 subdimensi, yaitu menghargai perbedaan nilai-nilai kehidupan, tidak memaksakan nilai dan tidak menghina atau merusak nilai yang memaksakan nilai yang berbeda. Angka dimensi toleransi pada tahun 2019 sebesar 81.08 dan turun menjadi 76.63 pada tahun 2020. Dimensi ketertiban umum terdiri dari 5 subdimensi, yaitu keterlibatan demokrasi, keterlibatan good governance, pencegahan kekerasan fisik, budaya, struktur serta konservasi lingkungan dan restorasi lingkungan. Angka dimensi ketertiban umum tahun 2019 sebesar 72.83 dan tidak jauh berubah pada tahun 2020 menjadi 72.94.

## **2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial**

### **2.2.2.1 Angka Melek Huruf**

Angka Melek Huruf merupakan indikator digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Angka melek huruf berkisar antara 0-100. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar

penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran. Angka Melek Huruf Kota Mojokerto disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 27 Angka Melek Huruf Kota Mojokerto dan Jawa Timur  
Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Mojokerto	97,45	95,50	95,70	97,90	98,07
Jawa Timur	91,59	91,82	92,56	92,32	92,50

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Angka Melek Huruf di Kota Mojokerto pada Tahun 2016 mencapai 97,45 persen. Pada Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 kembali turun menjadi 95,5 dan 95,7, tahun 2019 kembali naik menjadi 97,90 persen. Dan di tahun 2020 angka tersebut kembali naik menjadi 98,07. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dasar di Kota Mojokerto sudah efektif, namun masih perlu ditingkatkan kedepannya.

### 2.2.2.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Tingkat pendidikan suatu masyarakat dapat juga digambarkan melalui indikator rata-rata lama sekolah masyarakat tersebut. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah tahun standar yang harus dihabiskan seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya Sekolah atau *years of schooling*, adalah suatu angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang mulai dari masuk pada jenjang sekolah dasar sampai dengan jenjang pendidikan terakhir.

Angka Rata-Rata Lama Sekolah atau *Mean Years of Schooling* (MYS) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Namun demikian, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di

usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Angka Rata-Rata lama Sekolah Kota Mojokerto disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 28 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Mojokerto dan Jawa Timur Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Mojokerto	9,93	9,98	9,99	10,24	10,25
Jawa Timur	7,23	7,34	7,39	7,59	7,78
Nasional	7,95	8,1	8,17	8,34	8,48

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2021

Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Mojokerto setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016, angka rata-rata lama sekolah di Kota Mojokerto 9,93 tahun, dan pada Tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 10,25 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan masyarakat Kota Mojokerto semakin baik. Dibanding dengan Jawa Timur dan Nasional, angka rata-rata lama sekolah Kota Mojokerto lebih tinggi. Hal ini menunjukkan warga Kota Mojokerto sudah peduli akan pentingnya pendidikan.

### 2.2.2.3 Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

**Tabel 2. 29 Angka Harapan Lama Sekolah Kota Mojokerto dan Jawa Timur Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Mojokerto	13,80	13,81	13,82	13,83	14,00
Jawa Timur	12,98	13,09	13,10	13,16	13,19
Nasional	12,72	12,85	12,91	12,95	12,98

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2021

Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Mojokerto setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, angka harapan lama sekolah di Kota

Mojokerto sebesar 13,80 tahun, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 14,00 tahun. Pada tahun 2020 angka tersebut berada di atas Jawa Timur sebesar 13,19 tahun, dan juga nasional sebesar 12,98. Semakin tinggi angka Harapan Lama Sekolah maka semakin tinggi pula jenjang pendidikan yang akan ditempuh. Hal ini menunjukkan bahwa warga Kota Mojokerto sudah banyak yang melanjutkan tingkat pendidikannya ke perguruan tinggi.

#### 2.2.2.4 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar merupakan indikator digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Angka Partisipasi Kasar disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 30 Angka Partisipasi Kasar Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
APK PAUD	63,29%	97,72%	79,16%	29,00%	25,55%
APK SD/MI/Sederajat	124,12%	123,31%	102,41%	106,52%	103,04%
APK SMP/MTs/Sederajat	132,20%	131,65%	91,89%	119,12%	107,05%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2021

APK PAUD di Kota Mojokerto bergerak fluktuatif. Pada tahun 2016 APK PAUD Kota Mojokerto mendapatkan angka 63,29 persen, di tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 97,72 persen, dan di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 79,16 persen. Sementara di tahun 2019 turun signifikan menjadi 29,00% dan turun lagi di tahun 2020 menjadi 25,55 persen. Untuk APK SD/MI terus mengalami penurunan tiap tahunnya, namun masih di atas 100 persen. Begitu pula dengan APK SMP/MTS mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. APK terendah terjadi pada tahun 2018 sementara APK tertinggi terjadi

pada tahun 2016. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi sekolah penduduk Kota Mojokerto semakin meningkat.

### 2.2.2.5 Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Salah satu indikator untuk melihat kualitas sumber daya manusia adalah dengan melihat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Intelektual seseorang pada umumnya akan semakin meningkat seiring dengan bertambah tingginya tingkat pendidikan seseorang. Demikian pula dengan kemampuan melakukan interaksi sosial. Meskipun sebetulnya pendidikan dapat diperoleh di luar jalur formal, seperti di balai pelatihan keterampilan, forum-forum diskusi, kelompok-kelompok belajar pemberdayaan masyarakat, serta pada kegiatan swadaya masyarakat lainnya.

Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, ditandai dengan sertifikat/ijazah. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kualitas pendidikan penduduk dengan menggunakan jenjang pendidikan tertentu sebagai batasan minimalnya dan juga sebagai bahan analisis pasar kerja.

Sertifikat atau Ijazah sebagai tanda seseorang telah menyelesaikan pendidikan pada suatu jenjang dapat diperoleh dengan mengikuti lembaga pendidikan formal. Dimana lembaga pendidikan tersebut sebelumnya harus mendapatkan legalitas/pengakuan terlebih dahulu dari lembaga pemerintah. Pendidikan non formal yang dilaksanakan di rumah dengan didampingi oleh orang tua atau guru pendamping dan model kegiatan belajar yang terstruktur tanpa perlu hadir ke sekolah seperti pada umumnya. Data angka pendidikan disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 31 Jumlah Penduduk menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Tidak/ belum tamat SD	37.484	38.488	38.721	38.404	38.841
SD sederajat	23.594	23.384	22.636	21.725	21.422
SMP sederajat	20.188	20.234	19.950	18.981	18.815
SMA sederajat	46.460	46.727	46.273	44.718	45.030
Diploma	3.327	3.361	3.307	3.202	3.258
Strata 1	11.330	11.615	11.781	11.659	11.959
Strata 2	635	673	696	717	732
Strata 3	14	11	13	17	18

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2021*

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kota Mojokerto pada Tahun 2016 sampai dengan pertengahan Tahun 2020 mayoritas adalah penduduk lulusan SMA sederajat dengan jumlah 45.030 jiwa. Namun lulusan Universitas (S1/S2/S3) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia di Kota Mojokerto semakin baik.

### 2.2.2.6 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni merupakan indikator digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Data Angka Partisipasi Murni disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 32 Angka Partisipasi Murni di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
APM SD/MI/Sederajat	119,64%	111,00%	112,85%	114,23%	115,00%
APM SMP/MTs/Sederajat	99,99%	100,72%	95,36%	103,2%	123,70%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, 2021

Pada Tahun 2016 – 2020 APM SD/MI mengalami fluktuasi sekitar 119,64 – 115,00 persen. Untuk APM SMP/MTs juga mengalami fluktuasi sekitar 99,99 – 123,70 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ada perubahan jumlah penduduk yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya, dan faktor penerimaan antara dalam Kota dan Luar Kota yang terkait dengan peraturan yang sudah ditetapkan, tetapi tidak signifikan. Penduduk usia sekolah di Kota Mojokerto semua tertampung di sekolah dan sesuai dengan jenjangnya, ini merupakan gambaran adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya bersekolah.

### 2.2.2.7 Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan sosial adalah angka kelangsungan hidup bayi (AKHB). Pada tahun 2016 AKHB di Kota Mojokerto sebesar 997, AKHB di Kota Mojokerto mengalami fluktuasi hingga di tahun 2020 angka tersebut sama di titik awal yakni 997 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2. 33 Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Mojokerto**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
AKHB	997	998	n/a	996	997

*Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Mojokerto, 2021*

AKHB adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi dipengaruhi oleh angka kematian bayi. Semakin tinggi AKHB dan semakin sedikitnya AKB mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat meningkat.

#### **2.2.2.8 Prevalensi Balita Gizi Buruk**

Prevalensi balita gizi buruk di Kota Mojokerto dalam waktu 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pada tahun tahun 2016 sebesar 0,47%, pada tahun 2017 turun lagi menjadi 0,3%. Tahun 2018 naik menjadi 0,75%. Sedangkan pada Tahun 2019 turun cukup signifikan menjadi 0,28%. Dan di tahun 2020 juga menunjukkan penurunan menjadi 0,13%. Data Prevalensi balita gizi buruk di Kota Mojokerto disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 34 Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Mojokerto**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Prevalensi balita gizi buruk	0,47	0,3	0,75	0,28	0,13

*Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Mojokerto, 2021*

#### **2.2.2.9 Angka Usia Harapan Hidup**

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Angka Usia Harapan Hidup disajikan dalam tabel berikut:



**Tabel 2. 35 Angka Harapan Hidup Kota di Mojokerto dan Jawa Timur Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Mojokerto	72,78	72,86	73,01	73,21	73,32
Jawa Timur	70,74	70,80	70,97	71,18	71,30
Nasional	70,9	71,06	71,20	71,34	71,47

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2021

Perkembangan angka harapan hidup penduduk Kota Mojokerto mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2016 angka harapan hidup Kota Mojokerto sebesar 72,78 tahun, setiap tahunnya terus mengalami peningkatan hingga menjadi 73,32 tahun pada Tahun 2020. Perkembangan angka harapan hidup ini menunjukkan pelayanan kesehatan dan kualitas kehidupan masyarakat di Kota Mojokerto yang semakin meningkat. Kondisi ini harus diiringi dengan dukungan masyarakat dalam memberikan dukungan suasana dan akses prasarana publik yang memihak kepada para lansia agar dapat hidup bahagia di masa tuanya.

#### 2.2.2.10 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Mojokerto disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 36 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
TPAK	-	68,65	69,19	65,09	68,21

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2021

TPAK Kota Mojokerto selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif, pada Tahun 2017 sebesar 68,65 persen, Tahun 2018 kembali naik menjadi 69,19

persen, pada tahun 2019 turun menjadi 65,09 persen. Dan di tahun 2020 naik kembali menjadi 68,21 persen. Secara umum, angka ini menunjukkan bahwa 68,21 persen penduduk Kota Mojokerto yang berusia 15 tahun ke atas memutuskan untuk ikut aktif di pasar kerja. Sedangkan 31,79 persen sisanya memutuskan untuk fokus sekolah, mengurus rumah tangga, maupun memiliki kegiatan di luar kegiatan ekonomi seperti kaum lanjut usia (lansia). Adapun data di tahun 2016 belum tersedia oleh BPS Kota Mojokerto.

### 2.2.2.11 Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2. 37 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Mojokerto dan Jawa Timur Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Mojokerto (%)	-	96,39	97,55	97,37	93,26
Jawa Timur (%)	95,79	96,00	96,01	96,18	94,15

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2021*

Rasio penduduk yang bekerja di Kota Mojokerto pada tahun 2017 sebesar 96,39 persen. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 93,26 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pandemic Covid mampu meningkatkan jumlah pengangguran terbuka sehingga rasio penduduk yang bekerja di Kota Mojokerto mengalami penurunan. Angka 93,26 persen berarti angkatan kerja yang ada telah memperoleh pekerjaan, sedangkan sisanya masih mencari kerja atau belum mendapatkan pekerjaan. Adapun data di tahun 2016 belum tersedia oleh BPS Kota Mojokerto.

### 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni dan Budaya pada dasarnya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah serta

mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global.

Data jumlah grup kesenian dan gedung kesenian di Kota Mojokerto disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 38 Jumlah Club Olahraga, Gedung Olahraga dan Organisasi Olahraga di Kota Mojokerto Tahun 2016 - 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Grup Kesenian	13	10	58	68	51
Gedung Kesenian	2	2	2	2	1

*Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2021*

Jumlah grup kesenian di Kota Mojokerto pada tahun 2016 sebanyak 13 grup, jumlah tersebut terus mengalami peningkatan menjadi 51 grup pada tahun 2020. Untuk gedung kesenian jumlah di tahun 2016 hingga 2020 mengalami penurunan yang saat ini hanya terdapat 1 gedung kesenian.

Olahraga adalah suatu aktivitas fisik yang bersifat positif yang dapat menyehatkan jasmani maupun rohani serta dapat mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Data jumlah club olahraga, gedung olahraga dan organisasi olahraga di Kota Mojokerto disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 39 Jumlah Club Olahraga, Gedung Olahraga dan Organisasi Olahraga di Kota Mojokerto Tahun 2016 - 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Club Olahraga	37	178	181	196	196
Gedung Olahraga	8	8	9	11	9
Organisasi Olahraga	23	23	23	23	25

*Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2021*

Pada tahun 2016 jumlah club olahraga di Kota Mojokerto adalah 37 club. Pada tahun 2017 jumlah club olah raga melonjak menjadi 178, hal ini dikarenakan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata meminta data ke KONI dan jumlah tersebut terus meningkat menjadi 196 pada tahun 2020. Sedangkan

untuk organisasi olahraga di Kota Mojokerto pada tahun 2016 sebanyak 23 organisasi, jumlah tersebut sedikit bertambah menjadi 25 pada tahun 2020.

## 2.3 Aspek Pelayanan Umum

### 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

#### 2.3.1.1 Pendidikan

##### a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Dalam melihat seberapa besar tingkat partisipasi penduduk usia 7-13 tahun dalam kegiatan belajar/sekolah dapat dilihat dari besaran Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS usia 7 – 13 tahun adalah jumlah penduduk kelompok usia pendidikan menengah (7-13 tahun) yang masih menempuh pendidikan per jumlah penduduk usia pendidikan 7-13 tahun. Data angka partisipasi sekolah di Kota Mojokerto disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 40 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
APS SD/MI	133,27 %	124,91 %	122,89 %	122,39%	116,16%
APS SMP/MTs	132,34%	133,02%	103,69%	101,69%	121,84%

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, 2021*

Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI di Kota Mojokerto dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Mojokerto dalam penerimaan siswa baru dalam kota dan luar kota yang diutamakan penduduk dalam Kota Mojokerto terlebih dahulu. Sedangkan yang luar Kota Mojokerto hanya 10 persen dan sisanya yang berprestasi, sehingga angka dapat berubah-ubah. Pada Tahun 2017-2018 ada perubahan kebijakan dari pemerintah tentang Penerimaan PPDB yang tertuang dalam peraturan Pemerintah Pusat yaitu Permendikbud No. 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada TK, SD, SMP dan SMA/SMK yang mengalami perubahan lagi pada Tahun 2018 Permendikbud No. 51 Tahun 2018 Tentang PPDB yang berbasis Zonasi dan Titik Koordinat, serta jumlah SD per rombel 28 siswa, sehingga terjadilah perubahan yang cukup signifikan.

## b. Angka Putus Sekolah

Gangguan belajar pada siswa sekolah, baik yang disebabkan oleh faktor internal (kurangnya motivasi sekolah, keterbatasan kemampuan belajar), maupun yang disebabkan faktor eksternal, dapat mengakibatkan siswa menjadi putus/berhenti sekolah. Kondisi ekonomi keluarga yang minim, menuntut siswa untuk bekerja membantu mencari nafkah keluarga, cara pandang yang sempit terhadap pendidikan menganggap pendidikan bukanlah yang utama, tidak ada sarana dan prasarana yang memadai merupakan beberapa alasan banyaknya siswa memutuskan untuk berhenti sekolah/putus sekolah.

Adanya urbanisasi dari luar kota juga mempengaruhi siswa sekolah berpindah-pindah bahkan putus sekolah karena mengikuti orangtuanya yang belum memahami pentingnya pendidikan. Data angka putus sekolah di Kota Mojokerto disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 41 Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Putus Sekolah SD/MI	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,00%
Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,22%	0,19%	0,09%	0,06%	0,01%

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, 2021*

Jenjang pendidikan setingkat SD/MI dan SMP/MTs, dalam lima tahun terakhir Angka Putus Sekolah (APS) secara umum mengalami penurunan. Tahun 2016 Angka Putus Sekolah SD/MI sebesar 0,02 persen kemudian Tahun 2020 sebesar 0,00 persen. Sedangkan untuk jenjang SMP/MTs, pada Tahun 2016 Angka Putus Sekolah sebesar 0,22 persen kemudian pada Tahun 2020 turun secara signifikan menjadi 0,01 persen. Hal ini menunjukkan bahwa para orang tua sudah banyak yang memahami pentingnya pendidikan dasar.

## c. Angka Kelulusan

Salah satu syarat kelulusan setiap siswa dari suatu jenjang pendidikan adalah mengikuti USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) untuk jenjang SD/MI dan UN (Ujian Nasional) untuk jenjang SMP/MTs. Namun UN bukanlah

satu satunya syarat seorang siswa dinyatakan lulus. UN disyaratkan bagi murid yang telah menduduki kelas tertinggi kelas 3 untuk SLTP sederajat, dan USBN bagi kelas 6 jenjang SD sederajat, sedangkan untuk kelas akselerasi adalah menduduki kelas akhir. Besaran angka kelulusan mencerminkan tingkat kualitas jenjang pendidikan, jika suatu sekolah banyak siswa yang lulus tentunya sekolah tersebut mempunyai kualitas yang lebih baik dibanding dengan sekolah yang siswanya sedikit lulus. Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Mojokerto disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 42 Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Mojokerto**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kelulusan SD/MI	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Angka Kelulusan SMP/MTs	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, 2021*

Angka kelulusan sekolah jenjang SD/MI maupun jenjang SMP/MTs dalam 5 (lima) tahun yaitu 100 persen. Hal ini merupakan hal yang sangat baik dan harus dipertahankan di tahun tahun mendatang. Program pemerintah dapat dilihat keberhasilannya dari tabel diatas, yang menunjukkan ketuntasan kurikulum serta pembelajarannya.

#### **d. Angka Melanjutkan Sekolah**

Dalam suatu kota/kabupaten dapat diketahui kemajuan dan perkembangannya salah satunya adalah dengan melihat Angka Melanjutkan Sekolah (AM), sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 43 Angka Melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Melanjutkan SD/MI	121,54%	116,14%	97,33%	97,53%	102,00%
Angka Melanjutkan SMP/MTs	136,52%	-	-	-	-

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, 2021*

Dari tabel diatas diketahui AM dari SD/MI ke MTs mengalami perubahan/fluktuasi. Ada kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun berikutnya. Penyebab dari hal ini adalah adanya kebijakan pemerintah yang berubah ubah yakni tentang aturan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang berbasis zonasi, berdasarkan Permendikbud No. 75 Tahun 2017 tentang PPDB TK, SD, SMA dan SMK. Adapun untuk angka melanjutkan SMP/MTs di tahun 2017 hingga 2020, Pemkot Mojokerto tidak melakukan penghitungan dikarenakan untuk menghitung angka tersebut diperlukan jumlah siswa yang melanjutkan sekolah ke jenjang SMA/MA. Dimana hal tersebut sudah bukan menjadi kewenangan pemerintah kota, melainkan pemerintah Provinsi.

#### e. Rasio Guru/Murid

Rasio guru/murid merupakan perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah sekolah yang bersangkutan. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 44 Rasio Guru/Murid Pendidikan Dasar di Kota Mojokerto  
Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI	1:19	1:19	1:18	1:17	1:17
SMP/MTs	1:14	1:15	1:15	1:15	1:15

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, 2021*

Dari data tabel diatas rasio guru/murid jenjang SD selama tahun 2016 – 2020 mengalami penurunan, dari perbandingan 1:19 pada tahun 2016 turun menjadi 1:17 pada tahun 2020 disebabkan adanya penurunan jumlah siswa SD/MI akibat aturan PPDB yang berbasis zonasi. Hal ini menunjukkan pengawasan guru semakin intens terhadap proses belajar siswa.

Dari data tabel diatas rasio guru/murid jenjang SMP selama tahun 2016 – 2020 cenderung stabil, dari perbandingan 1:14 pada tahun 2016 naik sedikit di tahun 2020 menjadi 1:15.

#### f. Guru Pendidikan Dasar berkualifikasi Min D4/S1

Keberadaan guru tidak hanya diperlukan dari sisi jumlahnya saja, tetapi juga kualitasnya. Kualitas seorang guru secara umum ditentukan dari tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan yang ditamatkan seorang guru akan sangat mempengaruhi kemampuannya dalam mengajar murid, semakin tinggi pendidikan maka dia akan mempunyai kemampuan yang lebih dibanding yang pendidikannya rendah. Dengan tingginya pendidikan seorang tenaga pendidik pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2. 45 Guru Pendidikan Dasar Berkualifikasi Min D4/S1 di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95,75%	86,64%	94,02%	94,53%	94,22%

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, 2021*

Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV pendidikan menengah selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Angka tertinggi diraih pada tahun 2016 yakni sebesar 95,75 persen. Di tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup drastis di angka 86,64 persen. Hal ini disebabkan adanya guru yang memasuki batas usia pensiun (purna tugas) dan meninggal dunia. Di tahun 2018 mengalami peningkatan hingga 94,02 persen dan Kembali meningkat di tahun 2019 menjadi 94,53 persen. Di tahun 2020 terjadi penurunan yang tidak signifikan menjadi 94,22 persen.

#### 2.3.1.2 Kesehatan

##### a. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya per 100.000 kelahiran hidup, tetapi bukan karena kecelakaan. Angka kematian ibu di Kota Mojokerto disajikan dalam tabel berikut:



**Tabel 2. 46 Angka Kematian Ibu di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	47,3	48	0	94	189

*Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Mojokerto, 2021*

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah kematian ibu yang terjadi menunjukkan tren fluktuatif, hal ini betul-betul telah diintervensi yaitu 47,3 (1 ibu tahun 2016), naik kembali 48 (1 ibu tahun 2017), pada tahun 2018 dapat diintervensi kembali mengalami penurunan hingga berhasil menjadi 0 KH (tidak ada kasus atau *Zero Death*), tahun 2019 terjadi kembali angka kematian ibu yakni 94 (2 kasus kematian Ibu), dan 2020 naik lagi menjadi 189.

Meskipun jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan mengalami peningkatan, penyebab utama kematian ibu ditahun terakhir disebabkan kondisi ibu hamil dengan faktor determinan lainnya berupa: *Suspec Autoimmune Disease*. Untuk menekan angka kematian ibu hamil saat melahirkan tersebut, berbagai upaya harus terus dilakukan diantaranya pendampingan kepada ibu hamil resiko tinggi oleh petugas kesehatan dan kader kesehatan, agar ibu hamil mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak pelatihan gerakan senam ibu hamil dan mengintensifkan koordinasi dengan bidan dan memanfaatkan sarana kesehatan yang terdekat. Pemberian tabelt penambah darah melalui puskesmas atau pada saat pendampingan kunjungan rumah.

Penanganan pada kasus kematian ibu, harus komprehensif dan bersinergis, antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan keluarga. Aspek sosial ekonomi, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, sosial budaya harus diupayakan meningkat, sehingga diharapkan akan menekan Angka Kematian Ibu (AKI). Selain itu juga melalui beberapa pendekatan program yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kota Mojokerto untuk meningkatkan derajat kesehatan reproduksi, yaitu melalui peningkatan pengembangan program kesehatan reproduksi terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (*making pregnancy safer*), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam

penanganan komplikasi kehamilan resiko tinggi dan penyiapan keluarga dan atau suami siaga dalam menyongsong kelahiran.

#### **b. Angka Kematian Bayi (AKB)**

Kematian bayi merupakan kematian yang terjadi antara saat bayi lahir sampai dengan satu hari sebelum bayi berusia satu tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate* adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 (satu) tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKB dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, karena bayi adalah kelompok yang paling rentan terkena dampak dari suatu perubahan lingkungan maupun sosial ekonomi. Angka kematian bayi di Kota Mojokerto disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 47 Angka Kematian Bayi di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Angka Kematian Bayi per 100.000 KH	5,33	3,8	2,34	3,75	4,26

*Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Mojokerto, 2021*

Dalam 5 tahun terakhir angka kematian bayi per 100.000 Kelahiran Hidup mengalami fluktuasi. Di tahun 2016 jumlah Angka Kematian Bayi mencapai 5,33. Di tahun 2017 terjadi penurunan menjadi 3,8 dan tahun 2018 mengalami penurunan lagi menjadi 2,34. Namun di tahun 2019 jumlah angka kematian bayi per 100.000 KH terjadi kenaikan menjadi 3,75, berikut di tahun 2020 juga mengalami kenaikan menjadi 4,26.

Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Penyebab kematian di tahun 2018 terdapat 5 kasus pada kelompok Neonatus (0 sd 28 hari) disebabkan oleh Kelainan Bawaan 1 kasus dan BBLR 2 kasus, ini berarti faktor kondisi ibu sebelum dan selama kehamilan amat menentukan kondisi bayinya. Hal ini merupakan tantangan ke depan untuk mempersiapkan calon ibu agar benar-benar siap untuk hamil, melahirkan dan menjaga agar terjamin kesehatan lingkungan yang mampu melindungi bayi dari infeksi, serta untuk usia diatas neonatal (29 hari sd 1 tahun). Penyebab utama kematian 1 kasus kelainan bawaan dan 1 kasus ada infeksi karena Pneumonia.

Hal ini berkaitan erat dengan perilaku hidup sehat Ibu dan Kondisi lingkungan setempat.

### c. Persentase Balita Gizi Kurang, Balita Pendek dan Balita Kurus

Pada tahun 2020, status gizi balita usia 0 – 59 bulan ditemukan sebanyak 368 balita dengan status gizi kurang (BB/U) terhadap jumlah sasaran balita yang ditimbang (D) sebanyak 3.516 atau sebesar 10,5 persen. Balita dengan status balita pendek (TB/U) sebanyak 301 apabila dibandingkan dengan balita yang diukur tinggi badannya adalah sebanyak 7,7 persen. Serta balita dengan status balita kurus (BB/TB) sebanyak 229 anak apabila dibandingkan dengan balita yang ditimbang berat badannya adalah sebanyak 5,9 persen.

**Tabel 2. 48 Status Gizi Balita Tahun 2020**

Indikator	Balita usia 0-59 bulan yang ditimbang/diukur	Jumlah kasus	Persentase
Balita Gizi Kurang (BB/U)	3.516	368	10,5
Balita Pendek (TB/U)	3.516	301	7,7
Balita Kurus (BB/TB)	3.516	229	5,9

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Mojokerto, 2021

### d. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Setiap orang terduga tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada orang terduga TBC di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang meliputi pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang dan edukasi. Dibawah ini adalah data terkait tuberkulosis di Kota Mojokerto pada tahun 2020.

**Tabel 2. 49 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Kota Mojokerto Tahun 2020**

Indikator	Jumlah/Persentase
Jumlah terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1927
Jumlah semua kasus tuberkulosis (laki-laki & perempuan)	310
Kasus tuberkulosis anak 0-14 tahun	52

Indikator	Jumlah/ Persentase
% orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	63,0%
CNR semua kasus TBC per 100.000 penduduk	221
Perkiraan insiden tuberkulosis (dalam absolut) berdasarkan modeling tahun 2020	565
Case Detection Rate (%)	54,9%
Cakupan penemuan kasus tuberkulosis anak	76,7%

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Mojokerto, 2021

#### e. Jumlah Posyandu berdasarkan Strata

Sampai dengan tahun 2020, jumlah Posyandu yang ada di Kota Mojokerto sebanyak 170 posyandu, mengalami kenaikan 3 angka dari tahun sebelumnya. Adapun rincian dan strata posyandu yang ada di Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 50 Jumlah Posyandu Berdasarkan Stratanya di Kota Mojokerto Tahun 2020**

Uraian	Jumlah	Strata			
		Pratama	Madya	Purnama	Mandiri
Posyandu	170	0	4	125	41

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Mojokerto, 2021

#### f. Jumlah Puskesmas, Klinik dan Pustu

Sampai dengan tahun 2020, jumlah puskesmas di Kota Mojokerto beserta jaringannya terus bertambah. Terdapat 2 puskesmas rawat inap di Kota Mojokerto yang berlokasi di Kecamatan Prajurit Kulon dan Kecamatan Magersari, yakni Puskesmas Blooto dan Puskesmas Blooto. Sementara terdapat 4 puskesmas yang tidak melayani fasilitas rawat inap yaitu Puskesmas Gedongan, Kranggan, Mentikan, Wates. Kota Mojokerto juga menyediakan fasilitasi puskesmas keliling sebanyak 6 unit untuk menjemput bola dalam melayani masyarakat yang membutuhkan. Selain itu terdapat puskesmas pembantu sebanyak 11 unit.

Adapun jumlah puskesmas, klinik, dan pustu terangkum dalam tabel berikut.

**Tabel 2. 51 Jumlah Puskesmas, Klinik dan Pustu di Kota Mojokerto Tahun 2020**

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas dan Jaringannya	
	Puskesmas Rawat Inap	2
	Puskesmas Non Rawat Inap	4
	Puskesmas Keliling	6
	Puskesmas Pembantu	11
2	Klinik	
	Klinik Pratama	11
	Klinik Utama	4
	Praktik Dokter Umum Perorangan	50
	Praktik Pengobatan Tradisional	103
	Bank Darah Rumah Sakit	1
	Unit Transfusi Darah	1

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Mojokerto, 2021

#### g. Jumlah Rumah Sakit

Sampai saat ini rumah sakit di Kota Mojokerto berjumlah 6 rumah sakit yang terdiri dari RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo, RS Gatoel, RSI Hasanah, RS Emma, RS Reksa Waluya dan RS Kamar Medika.

#### h. Jumlah Dokter

Jumlah dokter di Kota Mojokerto tahun 2019 sebanyak 277 dokter yang terdiri dari 96 dokter umum, 143 dokter spesialis, 29 dokter gigi dan 9 dokter gigi spesialis dengan unit kerja di puskesmas, rumah sakit serta sarana pelayanan kesehatan lainnya.

**Tabel 2. 52 Jumlah Dokter di Kota Mojokerto Tahun 2020**

No	Unit Kerja	Dokter Umum	Dokter Spesialis	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis
1	Puskesmas	25	-	12	-
2	Rumah Sakit	49	140	8	6
3	Sarana Pelayanan Kesehatan Lain	22	3	9	3
	Jumlah	96	143	29	9

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Mojokerto, 2021

### i. Perkembangan Penyintas Covid di Kota Mojokerto

Kondisi pandemic covid-19 yang terjadi saat ini juga menyerang Kota Mojokerto. Kasus pertama covid di Kota Mojokerto dimulai pada bulan April dengan jumlah 1 orang. Berlanjut mengalami kenaikan di bulan-bulan berikutnya, dan titik tertinggi jumlah positif covid di Kota Mojokerto pada tahun 2020 terjadi pada Bulan Desember sebanyak 233 orang. Adapun total warga Kota Mojokerto selama tahun 2020 yang positif covid sebanyak 1026 orang. 956 orang diantaranya terkonfirmasi sembuh dari covid, sementara jumlah orang yang meninggal akibat covid di tahun 2020 mencapai 58 orang. Di akhir Desember 2020 masih terdapat 12 orang yang menjalani karantina. Adapun persebaran kasus Covid di Kota Mojokerto bisa diamati pada tabel berikut.

**Tabel 2. 53 Perkembangan Penyintas Covid di Kota Mojokerto Tahun 2020**

Kecamatan	2020									Total
	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okto	Nov	Des	
Positif Covid	1	8	62	167	114	174	140	127	233	1026
Sembuh	0	5	40	164	109	109	175	146	208	956
Meninggal dunia	0	0	4	8	10	13	11	4	8	58
Karantina	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>106</b>	<b>339</b>	<b>233</b>	<b>296</b>	<b>326</b>	<b>277</b>	<b>461</b>	

*Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Mojokerto, 2021*

### j. Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan

Pemerintah Kota Mojokerto sangat serius dalam menangani masalah pandemic covid. Terbukti dengan dikeluarkannya Perwali Mojokerto Nomor 55 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru pada Kondisi Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 di Kota Mojokerto. Pemkot Mojokerto juga getol dalam melakukan operasi yustisi untuk menerapkan protocol Kesehatan dan memberikan sanksi kepada pelanggar prokes. Pada tahun 2020 operasi yustisi dimulai pada bulan Mei. Hingga akhir Desember 2020 jumlah pelanggar protocol Kesehatan di Kota Mojokerto sangat tinggi yakni sebesar 4.130 orang. Pelanggar prokes ini diberikan sanksi moril maupun materil, namun kesadaran warga Kota Mojokerto dalam menerapkan protocol Kesehatan di tahun 2020 masih rendah. Adapun jumlah pelanggar prokes di Kota Mojokerto selama tahun 2020 bisa dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 2. 54 Jumlah Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Tahun 2020**

Indikator	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Total
Tidak Memakai Masker, berkerumun	7	2	46	0	1000	895	1161	1019	4130

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Mojokerto, 2021

### 2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### a. Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik/Mantap

Kriterianya adalah jalan kota yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Menurut Peraturan Menteri PU Nomor 13 Tahun 2011 disebutkan bahwa kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang, sedangkan kriteria kondisi jalan tidak mantap meliputi rusak ringan dan rusak berat.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api. Sedangkan kondisi baik kawasan yang memiliki sumber daya alam atau sumber daya manusia yang dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik/mantap di Kota Mojokerto disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 55 Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik/Mantap di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik/Mantap	27%	86,77%	84,60%	86,40%	91,60%

Sumber: DPUPRPRKP Kota Mojokerto, 2021

Kewenangan penyelenggaraan jalan sesuai surat Keputusan Walikota Tentang Kewenangan Status Ruas Jalan Kota Mojokerto Nomor: 188.45/449/417.111/2018 tanggal 2 Mei 2018. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik/mantap pada tahun 2018 adalah sebesar 84,60 persen dan pada

tahun 2019 adalah sebesar 86,40 persen. Tahun 2020 mengalami kenaikan kemantapan menjadi 91,60 persen ini dikarenakan panjang jalan dalam kondisi baik mengalami kenaikan 5,2 persen.

### **b. Rasio Panjang Jalan dan Jumlah Penduduk**

Sistem jaingan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan primer dan sistem jaringan sekunder yang terjalin dalam hubungan hirarki. Jalan untuk pengembangan semua wilayah di kota dengan menghubungkan pusat-pusat kegiatan lokal sampai ke pusat lingkungan. Rasio panjang jalan dan jumlah penduduk di Kota Mojokerto disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 56 Rasio Panjang jalan dan Jumlah Penduduk di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Panjang Jalan dan Jumlah Penduduk	0,96	0,95	0,96	0,99	0,99

Sumber: DPUPRRKP Kota Mojokerto, 2021 (data diolah)

Rasio panjang dan jumlah penduduk pada tahun 2016 adalah 0,96, di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 0,95, dan di tahun 2018 kembali meningkat menjadi 0,96. Di tahun 2019 dan 2020 rasio Panjang jalan dan jumlah penduduk sama menjadi 0,99. Terjadi peningkatan sebesar 0,03 hal ini menunjukkan jalan di Kota Mojokerto tiap tahunnya mengalami peningkatan kepadatan.

### **c. Persentase Jalan Yang memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)**

Jalan yang memiliki trotoar merupakan prasarana transportasi dalam menggerakkan dan memperlancar perekonomian, pendidikan, kesehatan sosial dan kegiatan kemasyarakatan. Persentase Jalan Yang memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) di Kota Mojokerto disajikan dalam tabel berikut:



**Tabel 2. 57 Persentase Jalan Yang memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air ( Minimal 1,5 m ) di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 m)	48,3	48,3	48,3	32,79	32,79

Sumber: DPUPRPRKP Kota Mojokerto, 2021

Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan minimal 1,5 m pada tahun 2018 adalah sebesar 48,3 persen dan pada tahun 2019 berkurang menjadi 32,79 persen. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 terdapat pembangunan jalan baru namun tidak disertai dengan trotoar dan/atau drainase minimal 1,5 m. Di tahun 2020 mengalami stagnansi di angka 32,79 persen akibat adanya refocusing anggaran refocusing untuk penanganan dampak covid 19.

#### d. Penanganan Genangan/Banjir

Banjir adalah keadaan aliran air dan atau elefasi muka air dalam sungai atau kali atau kanal yang lebih besar atau lebih tinggi dari normal. Genangan yang timbul didaerah rendah akibat ditimbulkannya juga termasuk dalam pengertian banjir. Penanggulangan banjir harus dilakukan berbagai pihak antara pemerintah dan masyarakat mulai dari tata kota dan saluran air yang baik, serta perilaku masyarakat yang baik terhadap lingkungan. Persentase penanganan genangan/banjir di Kota Mojokerto disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 58 Persentase Penanganan genangan/banjir di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun	76	78	80	82	84

Sumber: DPUPRPRKP Kota Mojokerto, 2021

Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun, penanganan luas daerah genangan banjir pada tahun 2017 adalah sebesar 78 persen dan pada tahun 2018 adalah sebesar 80 persen mengalami kenaikan sebesar 2 persen

dikarenakan adanya kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul sungai, peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai. Di tahun 2019 terjadi peningkatan penanganan genangan/banjir yakni 82 persen. Pun di tahun 2020 juga terjadi kenaikan sebesar 84 persen.

#### e. Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik

Irigasi adalah usaha penyediaan atau pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah dan irigasi pompa. Pelayanan air irigasi ditujukan untuk produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal. Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik di Kota Mojokerto disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 59 Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik di Kota Mojokerto  
Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik	70	72	75	80	82

Sumber: DPUPRRKP Kota Mojokerto, 2021

Persentase irigasi kota dalam kondisi baik yaitu luas irigasi yang baik dibagi luas irigasi keseluruhan. Pada tahun 2017 adalah sebesar 72 persen dan pada tahun 2018 adalah sebesar 75 persen mengalami peningkatan 3 persen dikarenakan adanya kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi dan pemeliharaan pintu air. Di tahun 2019 terjadi peningkatan perbaikan irigasi kota sebesar 80 persen, dan di tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 82 persen.

#### f. Rasio Jaringan Irigasi

Pemeliharaan Jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar operasi dan mempertahankan kelestariaannya. Rasio jaringan irigasi di Kota Mojokerto disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 60 Rasio Jaringan Irigasi di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Jaringan Irigasi	76	78	80	82	84

Sumber: DPUPRPRKP Kota Mojokerto, 2021

Jaringan irigasi yaitu panjang saluran irigasi dibagi luas lahan budi daya pertanian. Rasio jaringan irigasi pada tahun 2017 sebesar 78 persen, tahun 2018 sebesar 80, di tahun 2019 menjadi 82 persen. Dan di tahun 2020 mengalami peningkatan secara kontinyu menjadi 84 persen.

#### g. Persentase Pemenuhan Akses Layak Sanitasi

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%). Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Adapun persentase pemenuhan akses layak sanitasi di Kota Mojokerto adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. 61 Persentase Pemenuhan Akses Layak Sanitasi**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pemenuhan Akses Layak Sanitasi	30%	94,05%	35%	95,48%	97,34%

Sumber: DPUPRPRKP Kota Mojokerto, 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase pemenuhan akses layak sanitasi di Kota Mojokerto selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Namun di tahun 2019 dan 2020 capaian Pemerintah Kota Mojokerto sangat baik yakni mencapai angka 95,48 persen di tahun 2019 dan meningkat sebesar 97,34 persen di tahun 2020.

### 2.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

#### a. Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni merupakan proporsi jumlah rumah layak huni terhadap jumlah penduduk. Capaian indeks rasio rumah layak huni selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2016 rasio rumah layak huni di Kota Mojokerto sebesar 0,40. Tahun 2017 meningkat menjadi 0,55, tahun 2018 sebesar 0,71, tahun 2019 meningkat cukup signifikan menjadi 0,99, dan tahun 2020 sudah mencapai angka optimal 1,00.

**Tabel 2. 62 Rasio Rumah Layak Huni di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Rumah Layak Huni	0,40	0,55	0,71	0,99	1,00

Sumber: DPUPRPRKP Kota Mojokerto, 2021

#### b. Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni merupakan proporsi permukiman layak huni terhadap seluruh luas wilayah permukiman. Capaian rasio permukiman layak huni di Kota Mojokerto mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2016 rasio permukiman layak huni yakni 0,40, tahun 2017 0,55, tahun 2018 naik cukup signifikan menjadi 0,86, tahun 2019 menjadi 0,97, dan tahun 2020 menjadi 0,98.

**Tabel 2. 63 Rasio Permukiman Layak Huni di Kota Mojokerto  
Tahun 2016 – 2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Permukiman Layak Huni	0,40	0,55	0,86	0,97	0,98

Sumber: DPUPRPRKP Kota Mojokerto, 2021

#### c. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni merupakan proporsi jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu terhadap jumlah seluruh rumah di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Mojokerto pada tahun 2018 sebesar 96,83 persen, Di tahun 2019 terjadi peningkatan kelayakan rumah layak huni

menjadi 97,32 persen. Dan di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 98 seperti yang disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 64 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kota Mojokerto  
Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	-	-	96,83	97,32	98

Sumber: DPUPRPRKP Kota Mojokerto, 2021

#### d. Persentase Permukiman yang Tertata

Persentase permukiman yang tertata merupakan proporsi luas area permukiman yang tertata terhadap seluruh luas area permukiman. Persentase permukiman yang tertata di Kota Mojokerto pada tahun 2018 sebesar 76,42 persen. Di tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 98 persen, dan tahun 2020 meningkat menjadi 99 persen. Sesuai dengan tabel yang tersaji dibawah ini:

**Tabel 2. 65 Persentase Permukiman yang Tertata di Kota Mojokerto  
Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Permukiman yang Tertata	-	-	76,42	98	99

Sumber: DPUPRPRKP Kota Mojokerto, 2021

#### e. Persentase Penanganan Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Persentase penanganan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan merupakan proporsi luasan permukiman kumuh yang tertangani terhadap seluruh luas permukiman kumuh. Persentase penanganan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan di Kota Mojokerto pada tahun 2018 sebesar 96,48 persen. Di tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 97 persen, dan di tahun 2020 naik lagi menjadi 98 persen. Seperti yang tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 66 Persentase Penanganan Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penanganan Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	-	-	96,48	97	98

Sumber: DPUPRRPKP Kota Mojokerto, 2021

**f. Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kota**

Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau penataan perumahan dan Kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”. Adapun penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 67 Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Uraian		2019	2020
Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		93.59 %	100 %
a.	jumlah total yang Terlayani	73	58
b.	jumlah total yang harus dilayani	78	58

Sumber: SPM Bangda Kepmendagri, 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah sudah hampir maksimal bila dilihat dari total yang harus dilayani. Namun capaiannya kurang begitu baik dikarenakan pemerintah Kota Mojokerto tidak melakukan Fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan dan Subsidi uang sewa sehingga mampu menjadi pengungkit capaian fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

### 2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

#### a. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Pengertian Satuan Perlindungan Masyarakat dapat ditemukan pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pada pasal 1 butir 1 yaitu Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pengertian satuan perlindungan berdasarkan Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 memiliki beberapa unsur kata, yaitu:

1. Warga masyarakat
2. Yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan
3. Penanganan Bencana dan mengurangi/memperkecil resiko bencana
4. Ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
5. Ikut dalam kegiatan sosial masyarakat.

Persentase cakupan petugas LINMAS di Kota Mojokerto disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 68 Persentase Cakupan Petugas Linmas Tahun 2016 – 2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	2,16	2,42	2,67	3,11	3,15

*Sumber: Satpol PP Kota Mojokerto, 2021*

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dipahami bahwa tugas dan kewajiban petugas LINMAS sangat beragam di antaranya mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi satuan Perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa, menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana maupun menyiapkan satuan perlindungan

masyarakat dalam rangka mendukung pengamanan penyelenggaraan pemilu. Di mana pada tahun 2018 turut serta dalam mensukseskan gelaran PILWALI KOTA MOJOKERTO.

#### **b. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota**

Pelayanan kebakaran merupakan pertolongan yang diberikan akibat bencana yang disebabkan oleh api atau kebakaran tidak terkawal, membahayakan nyawa manusia, bangunan atau ekologi. Ia boleh jadi sengaja atau tidak sengaja. Kebakaran lazimnya akan menyebabkan kerusakan atau kemusnahan pada binaan dan kecederaan atau kematian pada manusia. Persentase Pelayanan bencana kebakaran sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2. 69 Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%

*Sumber: Satpol PP Kota Mojokerto, 2021*

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dipahami bahwa tugas dan kewajiban petugas DAMKAR sangat beragam diantaranya mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi dari masyarakat serta pengamanan swakarsa, menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan sewaktu-waktu terjadi bencana kebakaran di lingkungan masyarakat yang disebabkan kelalaian dapat segera diatasi. Adapun cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Mojokerto dalam 5 tahun terakhir terlihat sudah optimal dan perlu dipertahankan.

#### **c. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)**

Waktu Tanggap (*Response Time*) merupakan waktu tanggap yang diberikan oleh antar muka/interfase mengirim permintaan pengguna yang dapat memberikan waktu tanggap yang sependek-pendeknya. Tetapi waktu tanggap yang baik memang tidak dapat ditentukan, karena ada beberapa aspek yang mempengaruhi antara lain ragam interaksi yang diinginkan dan kefasihan



pengguna *response time rate* sebagaimana tabel berikut merupakan indikator kinerja baru.

**Tabel 2. 70 Persentase Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)**

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Response Time Rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Satpol PP Kota Mojokerto, 2020

Perencanaan sistem proteksi kebakaran di perkotaan didasarkan kepada penentuan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Perencanaan harus dimulai dengan evaluasi terhadap tingkat resiko kebakaran dalam suatu WMK oleh instansi kebakaran setempat. Unsur utama yang penting dalam perencanaan ini adalah penentuan penyediaan air untuk pemadaman kebakaran di setiap WMK. Wilayah manajemen kebakaran ditentukan pula oleh waktu tanggap dari pos pemadam kebakaran yang terdekat. Apabila pemberitahuan kebakaran mengalami perubahan dan pos-pos pemadam kebakaran harus memberikan respon terhadap pemberitahuan tersebut dikaitkan dengan jarak atau aksesibilitas, maka perencanaan wilayah manajemen kebakaran pun harus disesuaikan dengan perubahan tersebut. Daerah layanan dalam setiap WMK tidak melebihi dari radius 7,5 km. Dari tabel diatas terlihat bahwa petugas selama lima tahun terakhir berhasil mempertahankan capaian yang memuaskan dalam menanggulangi masalah kebakaran di Kota Mojokerto dengan waktu kurang dari 15 menit.

#### **d. Persentase Pelanggaran PERDA terselesaikan**

Produk hukum daerah merupakan instrumen penegakan peraturan di daerah yang meliputi beberapa peraturan seperti peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan daerah, peraturan desa. Produk hukum daerah dapat berupa peraturan yang bersifat regulasi maupun teknis prosedural untuk

menjalankan peraturan perundang-undangan. Adapun persentase pelanggaran Perda yang terselesaikan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2. 71 Persentase Pelanggaran PERDA Terselesaikan Tahun 2016 – 2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pelanggaran Perda Terselesaikan	91,00	94,88	88,17	82,66	87,62

*Sumber: Satpol PP Kota Mojokerto, 2021*

Peraturan Daerah (Perda) adalah Peraturan Daerah Kota Mojokerto atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, ini berarti kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada unsur penyelenggara pemerintahan daerah cukup luas untuk mengatur daerah secara regulasi. Adapun persentase pelanggaran Perda terselesaikan di Kota Mojokerto mengalami fluktuasi dalam 4 tahun terakhir. Tahun 2017 persentase pelanggaran Perda yang terselesaikan sebesar 94,88 persen. Namun di tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 88,17, disusul dengan tahun selanjutnya juga mengalami penurunan menjadi 82,66. Di tahun 2020 terjadi sedikit kenaikan menjadi 87,62 persen. Artinya, bahwa dengan meningkatnya persentase pelanggaran Perda yang terselesaikan diharapkan dapat menciptakan serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

#### **e. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman**

Persentase penyelesaian pelanggaran ketertiban umum merupakan proporsi pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman yang diselesaikan terhadap seluruh pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman. Persentase penyelesaian pelanggaran ketertiban umum di Kota Mojokerto mengalami fluktuasi. Tahun 2016 sebesar 92,00 persen menurun di tahun 2017 sebesar 82,47 persen. Di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 81,76 persen, dan di tahun 2019 meningkat menjadi 83,11 persen. Sementara di tahun 2020 penyelesaian pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman mengalami sedikit penurunan menjadi 82,47 persen.

**Tabel 2. 72 Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman di Kota Mojokerto 2016 – 2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman	92,00	82,47	81,76	83,11	82,47

*Sumber: Satpol PP Kota Mojokerto, 2021*

#### **f. Partipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah**

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menentukan secara langsung siapa pemimpin daerah yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Perkembangan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Mojokerto Tahun 2013 dan 2018 disajikan dalam Tabel 2.73.

**Tabel 2. 73 Partisipasi Politik Masyarakat Kota Mojokerto dalam Pilkada 2013 dan 2018**

Uraian	Pilkada 2013	Pilkada 2018
Jumlah DPT	93.737	96.132
Jumlah Pemilih	76.304	76.469
Jumlah Suara Sah	72.842	71.986
Jumlah Suara Tidak Sah	3.462	4.483
Persentase Partisipasi Politik	81.40 %	79.55 %

*Sumber: KPU Kota Mojokerto*

Pada tabel diatas, partisipasi politik masyarakat Kota Mojokerto dalam penyelenggaraan Pilkada mengalami penurunan. Di Tahun 2013, Angka partisipasi politik sebesar 81.40% turun menjadi 79.55% pada pilkada 2018.

### 2.3.1.6 Sosial

#### a. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan juga untuk meningkatkan partisipasi PMKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Definisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan sosial atau disebut sebagai bantuan sosial dalam kurun waktu tahun berjalan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2. 74 Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Sosial di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Sosial	88%	90%	95%	82,11%	100%

*Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto, 2021*

Adapun persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial di Kota Mojokerto cenderung mengalami peningkatan kecuali tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 82,11 persen. Namun di tahun 2020 sudah menunjukkan angka yang optimal yakni 100% artinya PMKS di Kota Mojokerto sudah mendapatkan bantuan sosial dari Pemkot Mojokerto.

### b. Persentase PMKS yang tertangani

Persentase PMKS yang Tertangani adalah PMKS yang telah tercukupi kebutuhan sosialnya, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2. 75 Persentase PMKS yang tertangani di Kota Mojokerto  
Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase PMKS yang tertangani	88%	90%	95%	95%	100%

*Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto, 2021*

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan Pemerintah Kota Mojokerto telah berhasil menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan bansos yang telah diberikan. Bahkan di tahun 2020 kinerja Pemkot Mojokerto sudah optimal mencapai 100 persen.

### c. Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan kebutuhan dasar

Persentase PMKS yang meningkat kemampuannya, wawasannya, serta spiritual mentalitasnya dalam memenuhi kebutuhan dasar, serta meningkatnya kemampuan sosialnya merupakan indikator penting dalam pemaparan tren penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebuah daerah. Terpenuhinya kebutuhan dasar disertai meningkatnya kemampuan fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan indikasi meningkatnya kesejahteraan para penyandang masalah kesejahteraan sosial sebuah wilayah, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2. 76 Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh Bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	88%	90%	95%	95%	100%

*Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto, 2021*

**d. Persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lain**

Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berasal dari pemerintah dengan harapan agar PMKS mampu mengembangkan kapasitasnya melalui kelompok usaha bersama, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2. 77 Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lain di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lain	1,50%	1,02%	6%	6%	3,92%

*Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto, 2021*

Berdasarkan data tahun 2019, masih 6 persen PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lain di Kota Mojokerto. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 3,92 persen. Oleh karena itu perlu ditingkatkan program-program pemberdayaan sosial melalui KUBE.

**e. Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial**

Salah satu lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial adalah Panti Sosial yaitu lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga dan masyarakat dalam pengasuhan anak. Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Mojokerto disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 78 Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	66%	100%	100%	75%	100%

*Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto, 2021*

Dari data tahun 2017 sampai 2020 tersebut diatas, diketahui bahwa Panti Sosial yang ada di Kota Mojokerto telah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, walaupun sempat terjadi penurunan di tahun 2019 yang cukup signifikan menjadi 75 persen.

**f. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial (WKSBM) dan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Lainnya yang menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial**

Sistem kerjasama antar keperangkat pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri dari usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Wahana ini merupakan jejaring kerja pada kelembagaan sosial komunitas lokal, baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada tingkat lokal, sehingga dapat menumbuhkembangkan sinergi lokal dalam pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial.

**Tabel 2. 79 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial (WKSBM) dan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Lainnya yang menyediakan sarana prasarana di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial (WKSBM) dan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Lainnya yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	66%	100%	100%	100%	100%

*Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto, 2021*

Dari data tersebut diatas terlihat ada kenaikan tren sehingga bisa disebutkan bahwa Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial lainnya yang ada di Kota Mojokerto ini telah menyediakan sarana dan prasana pelayanan kesejahteraan sosial.

#### g. Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Bantuan

**Tabel 2. 80 Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan	100%	100%	100%	100%	100%

*Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto, 2021*

Dari data diatas terlihat persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan dari tahun 2016 – 2020 mencapai angka optimal yakni 100 persen. Pemerintah Kota Mojokerto selalu konsisten dalam memberikan bantuan kepada para korban yang mengalami bencana.

#### h. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

**Tabel 2. 81 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	10%	86%	84%	71,11%	95%

*Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto, 2021*

Dari data tersebut terlihat fluktuasi persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial yang diakibatkan dari bertambahnya jumlah penyandang cacat fisik dan mental



serta lanjut usia tidak potensial. Pada tahun 2016 persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial hanya mencapai 10 persen, kemudian di tahun 2017 meningkat signifikan menjadi 86 persen, dan tahun 2018 turun menjadi 84 persen. Tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 71,11 persen dan tahun 202 meningkat cukup signifikan menjadi 95 persen.

#### **i. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota**

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Perlindungan dan Jaminan Sosial Setelah Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana. Adapun perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana di Kota Mojokerto seperti pada table berikut:

**Tabel 2. 82 Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota**

<b>Indikator Kinerja Pembangunan Daerah</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota		40%	100%
a.	jumlah total yang Terlayani	4	1.135
b.	jumlah total yang harus dilayani	10	1.135

*Sumber: SPM Bangda Kepmendagri, 2021*

Dari data tersebut terlihat bahwa terjadi kenaikan pada presentase perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana yakni di tahun 2019 40% dan tahun 2020 mengalami peningkatan yang optimal yakni 100%. Capaian di tahun 2019 sangat minim dikarenakan banyak unsur pendukung SPM yang tidak terpenuhi.

Peningkatan di tahun 2020 juga didukung pemerintah dalam penganggaran untuk perlindungan dan jaminan sosial,

## 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Dasar

### 2.3.2.1 Tenaga Kerja

#### a. Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan

Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.

**Tabel 2. 83 Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	55,28%	25,52%	36,16%	63,31%	45,61%

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto, 2021

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa jumlah pencari kerja tahun 2020 yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan tenaga Kerja Kota Mojokerto sudah ditempatkan sebesar 45,61 persen. Dibandingkan tahun 2019, mengalami penurunan sebesar 17,7 persen. Hal ini dikarenakan dampak pandemi covid yang mana lowongan kerja juga turut mengalami penurunan.

### 2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 84 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	-	53,8%	54,3%	56%	54%

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase partisipasi perempuan di DPRD	24%	32%	32%	16%	16%

*Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto, 2021*

Pada tahun 2017 persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah hanya mencapai 53,8% persen, meningkat menjadi 54.3% pada tahun 2018. Pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi 56% namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 54%. Sedangkan persentase partisipasi perempuan di DPRD Kota Mojokerto dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi dikarenakan ada masa peralihan antar waktu pada tahun 2016 dan tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 tingkat persentase partisipasi sebesar 16 persen atau sebanyak 4 orang.

#### **b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau *Gender Empowerment Measurement* (GEM) merupakan ukuran komposit yang dapat digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta kontribusi dalam aspek ekonomi maupun sosial. Persamaan dalam peran bagi perempuan memiliki arti penting tidak hanya sekedar dalam persamaan status dan kedudukan, tetapi lebih pada pemberdayaan. Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan sudah mencakup adanya upaya peningkatan kapabilitas perempuan untuk berperan serta dalam berbagai bentuk pengambilan keputusan serta memiliki kesempatan.

IDG diukur berdasarkan 3 komponen yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, manager, administrasi dan teknisi serta sumbangan pendapatan.

**Tabel 2. 85 (IDG) Kota Mojokerto dan Jawa Timur Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Mojokerto	-	82,00	82,10	83,74	90,59
Jawa Timur	69,06	69,37	69,71	73,04	73.03

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2021*

Data IDG Kota Mojokerto tahun 2016 tidak tersedia dikarenakan BPS tidak menerbitkan data IDG Kab/Kota pada tahun 2016. IDG Kota Mojokerto selama empat tahun terakhir (2017 – 2020) mengalami peningkatan secara fluktuatif. Pada tahun 2017 IDG Kota Mojokerto sebesar 82,00, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 81.99. Apabila dibandingkan dengan Jawa Timur, IDG Kota Mojokerto masih lebih tinggi dari Jawa Timur yang sebesar 73.03 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di Kota Mojokerto semakin berperan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

### c. Kekerasan Perempuan dan Anak

Hasil pendataan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016 mengungkapkan beberapa jenis kekerasan yang dialami oleh perempuan, diantaranya bentuk kekerasan fisik, kekerasan emosional dan psikologis, kekerasan ekonomi serta kekerasan seksual. Dalam kurun waktu tahun 2016-2020 jumlah laporan pengaduan baik perempuan dan anak korban kekerasan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 terdapat 6 laporan pengaduan perempuan korban kekerasan dan 9 laporan pengaduan anak korban kekerasan. Jumlah pengaduan tersebut meningkat secara fluktuatif menjadi 14 laporan pengaduan perempuan korban kekerasan dan 13 laporan pengaduan anak korban kekerasan pada tahun 2020. Pencapaian penanganan laporan pengaduan korban kekerasan baik perempuan dan anak stabil mencapai 100%. Hal itu menunjukkan seluruh laporan pengaduan dapat ditindaklanjuti pada kurun waktu tersebut.

**Tabel 2. 86 Pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Mojokerto 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Laporan pengaduan perempuan korban kekerasan</b>					
- Ditindaklanjuti	6	8	12	14	14
- Belum ditindaklanjuti	0	0	0	0	0
<b>Laporan pengaduan anak korban kekerasan</b>					
- Ditindaklanjuti	9	8	13	17	13
- Belum ditindaklanjuti	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto, 2021

Sedangkan catatan laporan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum di Kota Mojokerto dalam kurun waktu 2016 – 2020 cenderung berfluktuatif. Jumlah perempuan berhadapan dengan hukum selama 2016-2020 lebih banyak sebagai korban daripada pelaku. Dari data tersebut menunjukkan bahwa perempuan cukup rentan sebagai korban kekerasan. Namun, jumlah kasus perempuan berhadapan dengan hukum di Kota Mojokerto menunjukkan penurunan menjadi 0 kasus pada tahun 2019 dan 2020.

**Tabel 2. 87 Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum di Kota Mojokerto 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Perempuan berhadapan dengan hukum</b>					
- Sebagai Pelaku	0	4	2	0	0
- Sebagai Korban	0	8	2	0	0
<b>Anak berhadapan dengan hukum</b>					
- Sebagai Pelaku	3	2	3	8	1
- Sebagai Korban	9	8	5	5	0

*Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto, 2021*

Kasus anak berhadapan dengan hukum di Kota Mojokerto pada rentang tahun 2016 sampai dengan 2020, baik sebagai pelaku maupun korban, juga bergerak fluktuatif. Pada tahun 2016, jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sebanyak 3 kasus dan sebagai korban sebanyak 9 kasus. Di tahun 2020, menunjukkan penurunan yang signifikan dengan jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sebanyak 1 kasus dan 0 kasus sebagai korban.

### 2.3.2.3 Pangan

#### a. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kabupaten dan tingkat masyarakat.

**Tabel 2. 88 Ketersediaan Pangan Utama Kota Mojokerto Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan Pangan Utama	-	-	49,5 Kg/Org/Th	526 Kg/Org/Th	326 Kg/Org/Th

*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto, 2021*

Dari data tersebut diatas diketahui bahwa data ketersediaan pangan utama di Kota Mojokerto baru dapat dihitung pada tahun 2018. Terjadi fluktuasi yang signifikan pada tahun 2018 – 2020.

#### **b. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita**

Ketersediaan energi Indonesia pada tahun 2020 (data sangat sementara) menunjukkan ketersediaan pangan dalam bentuk energi sebesar 2.754 Kalori/kapita/hari; protein sebesar 81,57 gram/kapita/hari (protein nabati 52,88 gram dan protein hewani 28,70 gram); dan lemak sebesar 48,91 gram/kapita/hari (lemak nabati 33,61 gram dan lemak hewani 15,29 gram). Ketersediaan energi dan protein ini lebih tinggi dibandingkan ketersediaan energi dan protein ideal sebesar 2.400 Kalori/kapita/hari dan 63 gram/kapita/hari. Ketersediaan energi protein dan lemak masih didominasi oleh kontribusi ketersediaan dari bahan pangan nabati. Kontribusi bahan pangan sumber nabati terhadap ketersediaan energi, protein dan lemak total masing-masing sebesar 90,33% (2.488 Kalori), 64,82% (52,88 gram protein), dan 68,73% (33,61 gram lemak). Ketersediaan energi per kapita per hari tahun 2020 sebesar 2.754 Kalori lebih rendah dibandingkan tahun 2019 sebesar 3.006 Kalori. Hal ini disebabkan antara lain karena menurunnya perkiraan produksi minyak goreng sawit dan produksi kedelai. Adapun ketersediaan energi dan protein di Kota Mojokerto terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 89 Ketersediaan Energi dan Protein Kota Mojokerto Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan Energi Perkapita	-	-	1861 kkal/kpt/hr	n/a	3.142 kkal/kpt/hr
Ketersediaan Protein Perkapita	-	-	65 kkal/kpt/hr	n/a	107 kka/kpt/hr

*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto, 2021*

Dari data tersebut diatas diketahui bahwa data ketersediaan energi dan protein di Kota Mojokerto baru dapat dihitung pada tahun 2018. Terjadi

peningkatan ketersediaan energi per kapita dan juga protein per kapita dari tahun 2018 ke 2020. Sama dengan kondisi energi perkapita di Indonesia, di Kota Mojokerto ketersediaan energi perkapita di Kpta Mojokerto didominasi dengan ketersediaan dari bahan pangan nabati. Adapun ketersediaan protein perkapita masih terpaut jauh walaupun sudah menunjukkan trend kenaikan.

#### 2.3.2.4 Pertanian

Persentase permasalahan pertanian yang diselesaikan adalah proporsi konflik pertanian yang diselesaikan terhadap seluruh konflik pertanian yang ada. Persentase permasalahan pertanian yang diselesaikan di Kota Mojokerto pada tahun 2018 sebesar 20%, dari 5 (lima) konflik pertanian yang terjadi, baru 1 yang sudah diselesaikan. Di tahun 2020 tidak ada permasalahan pertanian yang terselesaikan, hal ini dikarenakan adanya relokasi anggaran.

**Tabel 2. 90 Persentase Permasalahan Pertanian yang diselesaikan di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase permasalahan pertanian yang diselesaikan	-	-	20%	-	0%

Sumber: DPUPRPRKP Kota Mojokerto, 2021

#### 2.3.2.5 Lingkungan Hidup

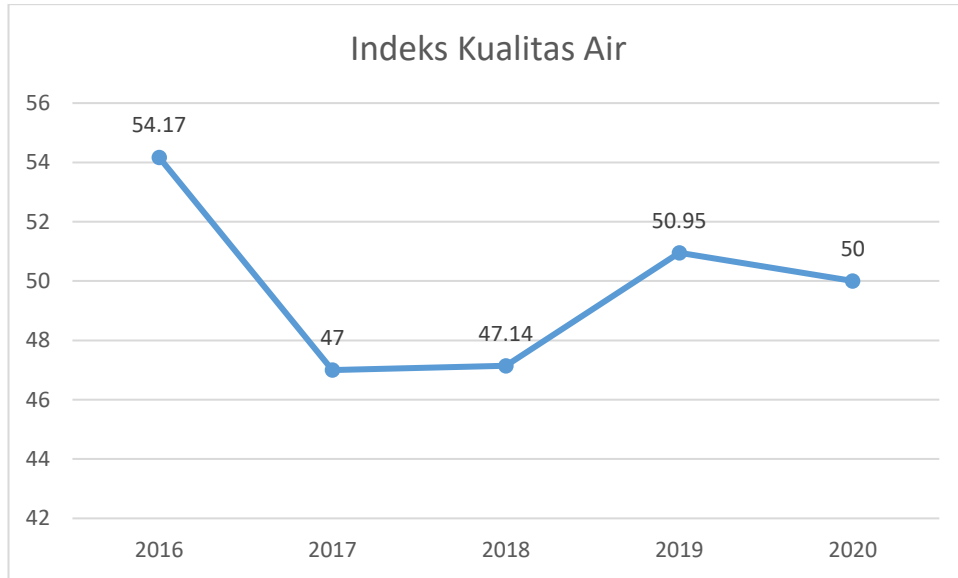
##### a. Indeks Kualitas Air

Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. Kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air relatif terhadap kebutuhan biota air dan manusia. Kualitas air seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum. Indeks kualitas air di Kota Mojokerto mengalami penurunan. Pada tahun 2016 Indeks Kualitas Air di Kota Mojokerto sebesar 54,17, sedangkan pada tahun 2019 turun menjadi 50,95 dan di tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 50.

**Tabel 2. 91 Indeks Kualitas Air di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kualitas Air	54,17	47	47,14	50,95	50

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, 2021



**Gambar 2. 4 Indeks Kualitas Air Kota Mojokerto 2016 – 2020**

Sumber: Data diolah, 2021

#### **b. Indeks Kualitas Udara**

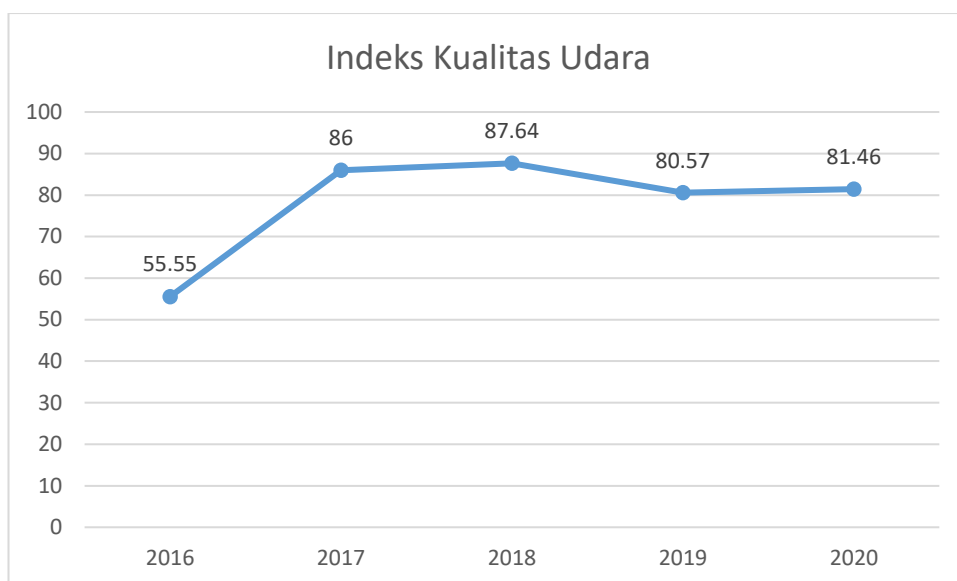
Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter(indikator) individual polusi udara yang berhu-bungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. IKU dihitung berdasarkan emisi dari dua polutan udara yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NOx). Kedua jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena pengaruh keduanya yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia.

**Tabel 2. 92 Indeks Kualitas Udara di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kualitas Udara	55,55	86	87,64	80,57	81,46

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, 2021





**Gambar 2. 5 Indeks Kualitas Udara Kota Mojokerto 2016 – 2020**

*Sumber: Data diolah*

Kondisi indeks kualitas udara di Kota Mojokerto pada tahun 2016 sebesar 55,55 dan naik menjadi 81,46 pada tahun 2020. Dengan demikian terjadi penurunan kualitas udara di Kota Mojokerto walaupun masih dalam kategori sedang.

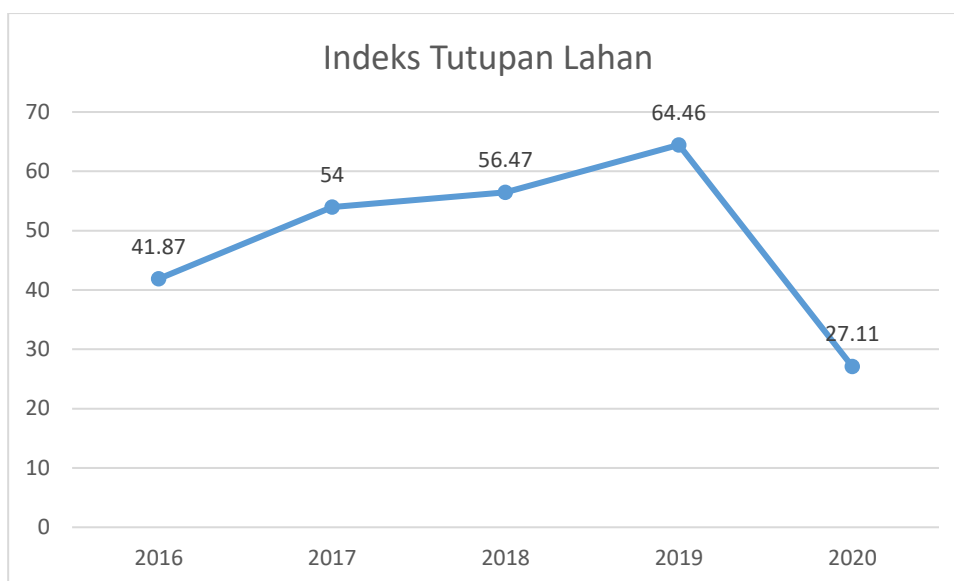
### c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Berdasarkan data dari program Menuju Indonesia Hijau (MIH), klasifikasi hutan terbagi atas hutan primer dan hutan sekunder. Hutan primer adalah hutan yang belum mendapatkan gangguan atau sedikit sekali mendapat gangguan manusia. Sedangkan hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh melalui suksesi sekunder alami pada lahan hutan yang telah mengalami gangguan berat seperti lahan bekas pertambangan, peternakan, dan pertanian menetap. Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kota Mojokerto menunjukkan peningkatan, yaitu dari 41,87 pada tahun 2016 menjadi 64,46 tahun 2019. Dan di tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 27,11.

**Tabel 2. 93 Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	41,87	54	56,47	64,46	27,11

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, 2021*



**Gambar 2. 6 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Mojokerto 2016 – 2020**

*Sumber: Data diolah*

### 2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### a. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga yang biasa disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga. Penerbitan kartu keluarga merupakan salah satu pelayanan paling mendasar dari administrasi Kependudukan, karena keseluruhan database kependudukan dimulai dari Kartu Keluarga.

**Tabel 2. 94 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga di Kota Mojokerto  
Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	100%	100%	100%	100%	100%

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2021*

Capaian indikator Penerbitan Kartu Keluarga telah sesuai dengan target yaitu 100 %. Hal ini dikarenakan setiap kepengurusan Kartu Keluarga akan dilanjutkan dengan penerbitan Kartu Keluarga. Jika terjadi ketidaksesuaian

dengan database maka akan dilakukan penyesuaian database melalui lampiran bukti pendukung.

#### **b. Cakupan Penerbitan KTP**

Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Yang wajib memiliki KTP adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun ke atas atau telah kawin/pernah kawin dan orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 tahun ke atas (UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Seiring dengan pentingnya kepemilikan identitas berupa e-KTP, maka kesadaran untuk melakukan perekaman KTP terus meningkat. Hal ini terlihat dari capaian penduduk memiliki KTP terus bertambah dari 2015 sebanyak 88% dan 2019 telah mencapai 99 %.

**Tabel 2. 95 Cakupan Penerbitan KTP elektronik di Kota Mojokerto  
Tahun 2016 – 2020**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Cakupan penerbitan KTP elektronik	89,9%	90,8%	93,4%	98,81%	98,6%

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2021*

Capaian indikator Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 menjadi 98,6 persen. Walaupun terjadi penurunan tetapi Dispenduk pencapil Kota Mojokerto telah memberikan pelayanan perekaman KTP elektronik yang intensif baik melalui perekaman di Lembaga Pemasyarakatan, pelayanan mobile untuk lansia dan keterbatasan fisik, perekaman di sekolah-sekolah. Akan tetapi perekaman KTP elektronik belum bisa 100 persen dikarenakan beberapa sebab antara lain:

1. Penduduk ganda dengan daerah lain;
2. Penduduk Kota Mojokerto tetapi tidak berdomisili di Kota Mojokerto;

3. Anomali database kependudukan sewaktu penunggalan data kependudukan.

### c. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Akte kelahiran merupakan dokumen pencatatan sipil untuk mencatatkan kelahiran penduduk kedalam dokumen resmi negara. Akte kelahiran menjadi prasyarat untuk keabsahan kelahiran penduduk. Setelah diterbitkan akte kelahiran dengan ditandai pemberian NIK maka penduduk baru sah sebagai penduduk. Cakupan penerbitan akte kelahiran yang dimaksudkan adalah bayi yang lahir di tahun berjalan dan memiliki akte kelahiran.

**Tabel 2. 96 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kota Mojokerto**

**Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan penerbitan Akta Kelahiran	92,8%	98%	98,68%	99,32%	100%

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2021*

Capaian indikator Penerbitan akte kelahiran dalam kurun waktu 5 tahun antara 2016 – 2020 terus meningkat. Bahkan Capaian untuk tahun 2018 telah melebihi target, karena tahun 2018 Dispenduk pencapil mengeluarkan program inovasi yaitu ANAKKU LAHIR GEMILANG (Anakku Lahir Segera Memiliki Identitas Langsung) dimana Dispenduk pencapil bekerjasama dengan Rumah Sakit, Bidan dan Puskesmas untuk bayi yang baru lahir langsung dapat akte kelahiran. Sehingga, hampir semua bayi yang dilahirkan memiliki akte kelahiran.

Adapun masalah utama kurang optimalnya capaian penerbitan akte kelahiran adalah:

1. Masih adanya kelahiran tak diinginkan;
2. Penduduk Kota Mojokerto dan melahirkan di wilayah kota mojokerto, tetapi tidak berdomisili di Kota Mojokerto.

### d. Cakupan Penerbitan Akta Kematian

Akte Kematian merupakan dokumen pencatatan sipil untuk mencatatkan kematian penduduk kedalam dokumen resmi negara. Akte kematian menjadi prasyarat untuk kevalidan kematian penduduk. Setelah diterbitkan akte kematian

maka database kependudukan akan di hapus, sehingga tidak akan muncul duplikasi ulang lagi. Cakupan penerbitan akte kelahiran yang dimaksudkan adalah penduduk yang meninggal dan diterbitkannya akte kematian.

**Tabel 2. 97 Cakupan Penerbitan Akta Kematian di Kota Mojokerto  
Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan penerbitan Akta Kematian	100%	100%	100%	100%	100%

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2021*

Capaian indikator Penerbitan penerbitan akte kematian telah sesuai dengan target yaitu 100 persen. Capaian tepat antara target dan realisasi dikarenakan setiap penduduk yang meninggal dunia akan otomatis diterbitkannya akte kematian. Hal ini seiring dengan inovasi yang telah dilaksanakan oleh Dispenduk Pencapil yaitu MOJOKERTO SENDU (Mojokerto Senyum Dibalik Duka), melalui program inovasi ini setiap penduduk yang meninggal langsung akan mendapatkan akte kematian, perubahan KK, perubahan KTP bagi keluarga yang ditinggalkan serta santunan duka.

#### **e. Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk**

Kepemilikan KTP pada era saat ini merupakan keniscayaan, karena semua pelayanan baik yang dilakukan oleh instansi swasta maupun pemerintah selalu menggunakan parameter KTP elektronik sebagai entry datanya. Sehingga kesadaran masyarakat akan kepemilikan KTP sudah semakin meningkat.

Hal ini terlihat dari rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk terus bertambah dari 2016 sebanyak 1: 0,89 dan 2020 telah mencapai 1: 0,986

**Tabel 2. 98 Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk di Kota Mojokerto  
Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk	0,890	0,908	0,934	0,988	0,986

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2021*

Capaian indikator rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk tahun 2016 berada di angka 0,89, di tahun 2017 mengalami sedikit kenaikan menjadi 0,908. Akan tetapi, untuk tahun lainnya realisasi rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk selalu melampaui target. Bahkan untuk tahun 2018 terjadi kenaikan sebesar 0,026. Hal ini sebagai akibat dari Pilkada Langsung yang mewajibkan penduduk memiliki KTP elektronik, dan gencarnya Dispenduk pencapil melakukan perekaman ke rumah-rumah. Terlihat di tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 0,054 menjadi 0,988. Namun di tahun 2020 terjadi sedikit penurunan di angka 0,986.

#### f. Rasio Bayi ber Akta Kelahiran

Angka Natalitas selalu sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk yang menjadi masalah demografi pembangunan jika tidak tertangani secara serius. Termasuk didalamnya kepastian hukum terhadap natalitas. Dengan kata lain, setiap kelahiran harus tercatat dan terdokumentasi secara baik melalui pencatatan sipil.

Akte kelahiran selain memuat identitas personal penduduk juga dikandung arti untuk memperhitungkan laju pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan dan arah pembangunan. Dispenduk pencapil berupaya memberikan keabsahan penduduk yang lahir dengan sesegera mungkin menerbitkan akte kelahiran penduduk. Oleh karena, rasio bayi berakte kelahiran mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

**Tabel 2. 99 Rasio Bayi ber Akta Kelahiran di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Bayi ber Akta Kelahiran	0,93	0,98	0,99	0,99	1,00

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2021*

Semua capaian indikator rasio bayi berakte kelahiran dalam kurun waktu 5 tahun antara 2016 – 2020 telah melebihi target. Bahkan capaian rasio bayi berakte kelahiran tahun 2020 telah mencapai 1:1,00 atau semua bayi memiliki akte kelahiran. Hal ini sangat dimungkinkan karena kesadaran masyarakat yang

tinggi dalam kepemilikan akte kelahiran dan juga banyak lembaga pendidikan maupun kesehatan yang mensyaratkan akte kelahiran.

#### **g. Rasio Pasangan ber Akta Nikah**

Pernikahan menjadi salah satu komponen utama identitas penduduk, karena baik dikolom KK maupun KTP dimunculkan status perkawinan. Hal inilah yang memicu Dispenduk Pencapil untuk mengajak masyarakat melangsungkan pernikahan secara resmi dan tercatat.

Untuk penduduk muslim dapat mencatatkannya melalui Kantor Urusan Agama, sedangkan penduduk non muslim bisa melalui Dispenduk Pencapil setelah adanya pemberkatan dari tempat ibadahnya.

**Tabel 2. 100 Rasio Pasangan ber Akta Nikah di Kota Mojokerto  
Tahun 2016 – 2020**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Rasio Pasangan ber Akta Nikah	0,79	0,81	0,83	0,88	0,90

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2021*

Semua capaian indikator rasio pasangan berakte nikah dalam kurun waktu 5 tahun antara 2016 – 2020 telah melebihi target. Bahkan capaian rasio pasangan berakte nikah tahun 2020 mencapai 1:0,90. Hal ini dapat optimal mencapai angka 0,90 karena adanya sinkronisasi terkait pengajuan pernikahan di KUA, maupun tempat-tempat ibadah lainnya. Kedepannya akan dibuatkan forum maupun aplikasi yang memudahkan masyarakat mendaftarkan pernikahan secara online.

#### **h. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK**

Semenjak diundangkannya UU No 23 tahun 2006 kemudian diubah dengan UU nomor 24 tahun 2013, maka yang diterapkan adalah Single Identity Number Atau NIK, sehingga keberadaan NIK lokal menjadi tidak berfungsi. Oleh karenanya, penerapan KTP Nasional menjadi wajib semua penduduk dan daerah. Indikatornya hanya sudah dan belum karena ini merupakan penerapan kebijakan penggunaan KTP nasional berbasis NIK. Dan semua daerah wajib menggunakan KTP elektronik.

**Tabel 2. 101 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kota Mojokerto  
Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2021*

### 2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat Desa

#### a. Cakupan sarana prasarana perkantoran

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan dan kelurahan meliputi Gedung Sarana Perkantoran antara lain:

1. Rumah Dinas Camat
2. Ruang Rapat
3. Gedung Pertemuan
4. Ruang Kerja Camat
5. Ruang Kerja Sekretariat
6. Ruang Kerja Seksi
7. Ruang Kerja Sub bagian
8. Ruang Pelayanan
9. Mushola
10. Kamar mandi dan WC
11. Kantor Kelurahan dan Kecamatan se Kota Mojokerto

**Tabel 2. 102 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	33%	56%	56%	90%	97%

*Sumber: Kec. Parjurit Kulon, Kec. Magersari, Kec. Kranggan, 2021*

Cakupan sarana perkantoran pemerintahan kelurahan dan kecamatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan. Tahun 2016 cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa hanya 33 persen,



tahun 2017 dan 2018 naik menjadi 56 persen. Tahun 2019 terjadi kenaikan yang cukup signifikan menjadi 90 persen dan 2020 naik kembali menjadi 97 persen.

#### **b. Rata – rata jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**

LPM di Kecamatan se-Kota Mojokerto sebanyak 18 LPM dan kelompok binaannya sejumlah 21 kelompok. Adapun rinciannya sebagai berikut masing-masing wilayah kecamatan ada 6 LPM dan 7 Kelompok binaan.

**Tabel 2. 103 Rata-rata jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Rata-rata jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	-	1,7	1,7	4,11	4,5

*Sumber: Kec. Parjurit Kulon, Kec. Magersari, Kec. Kranggan, 2021*

Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 di masing-masing Kecamatan tidak ada aktifitas dan pada tahun 2017 s/d 2018 mulai ada aktifitas binaan sebesar 1,7 yang artinya masing-masing LPM mempunyai satu kelompok binaan, namun belum ada peningkatan. Adapun di tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 4,11 yang berarti adanya peningkatan jumlah kelompok binaan. Dan di tahun 2020 mengalami sedikit kenaikan menjadi 4,5. Dengan adanya aktifitas tersebut diharapkan ada dukungan anggaran untuk peningkatan kelompok binaan lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Kelompok binaan LPM meliputi:

1. Pokja Kelurahan Sehat
2. Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB)
3. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)
4. Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB)
5. Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)
6. Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)
7. RT dan RW

### c. Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Kelompok Binaan PKK di masing-masing Kecamatan se Kota Mojokerto sebanyak 11 kelompok binaan.

**Tabel 2. 104 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK	0,52	3,1	3,1	6,67	6,67

*Sumber: Kec. Parjurit Kulon, Kec. Magersari, Kec. Kranggan, 2021*

Jumlah kelompok binaan PKK pada tahun 2016 s/d 2020 mulai ada aktifitas binaan. Pada tahun 2016 rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah 0,52. Di tahun 2017 meningkat menjadi 3,1 dan mengalami stagnansi di tahun 2018. Pada tahun 2019 kembali meningkat 6,67 dan tahun 2020 tidak ada keniakan maupun penurunan. Hal ini berarti hampir semua PKK mempunyai lebih dari satu kelompok binaan. Dengan adanya aktifitas tersebut diharapkan ada dukungan anggaran untuk peningkatan Jumlah kelompok binaan PKK.

Kelompok Binaan PKK meliputi:

1. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
2. Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB)
3. Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)
4. Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)
5. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)
6. Kampung Kelurahan Berencana (Kampung KB)
7. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
8. Karang Wreda
9. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)
10. Pra Koperasi
11. Kelompok Pendukung ASI

#### d. Persentase LPM Aktif

Masing masing Kecamatan di Wilayah Kota Mojokerto terdapat 6 (enam) Kelurahan, dan masing masing Kelurahan terbentuk Kepengurusan LPM.

**Tabel 2. 105 Persentase LPM Aktif di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase LPM Aktif	100%	100%	100%	100%	100%

*Sumber: Kec. Parjurit Kulon, Kec. Magersari, Kec. Kranggan, 2021*

Keberadaan 18 LPM di Kota Mojokerto dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 sudah aktif dan mampu membantu Kelurahan dalam pelaksanaan Alokasi Dana RW. Diharapkan adanya dukungan anggaran agar mampu memacu semangat LPM untuk mencetak prestasi di bidangnya dan apa yang sudah tercapai dengan baik untuk tetap dipertahankan.

#### e. Persentase LPM Berprestasi

Dari 18 LPM di Kota Mojokerto dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 belum mampu mencetak prestasi. Namun di tahun 2019 dan 2020 LPM Pralon dan LPM Magersari berhasil meraih dan mempertahankan prestasi. Adapun persentase LPM berprestasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 106 Persentase LPM Berprestasi di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase LPM berprestasi	0	0	0	5,89	5,89

*Sumber: Kec. Parjurit Kulon, Kec. Magersari, Kec. Kranggan, 2021*

Dari tabel diatas terlihat penorehan prestasi oleh LPM masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diharapkan adanya dukungan anggaran agar mampu memacu semangat LPM untuk mencetak prestasi di bidangnya.

#### f. Persentase PKK Aktif

PKK di Kota Mojokerto ada sebanyak 21 PKK. Adapun rinciannya 18 PKK Kelurahan dan 3 PKK Kecamatan dan semuanya aktif.

**Tabel 2. 107 Persentase PKK Aktif di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	100%

*Sumber: Kec. Parjurit Kulon, Kec. Magersari, Kec. Kranggan, 2021*

Hal ini nampak dari persentase PKK aktif di Kecamatan se Kota Mojokerto yang mencapai 100% sepanjang Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020. Anggaran memang sangat penting sebagai penggerak suatu organisasi dan PKK memang sudah mendapat dukungan anggaran sejak 2016 dan terbukti mampu tetap mempertahankan eksistensinya. Diharapkan apa yang sudah tercapai dengan baik untuk tetap dipertahankan.

#### g. Persentase Posyandu Aktif

Jumlah Posyandu di Kota Mojokerto sebanyak 160 Posyandu, dan semuanya aktif.

**Tabel 2. 108 Persentase Posyandu Aktif di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Posyandu Aktif	100%	100%	100%	99,57%	100%

*Sumber: Kec. Parjurit Kulon, Kec. Magersari, Kec. Kranggan, 2021*

Hal ini nampak dari persentase Posyandu aktif di Kota Mojokerto yang mencapai 100% selama periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018. Pada tahun 2019 terjadi sedikit penurunan tetapi tidak mengganggu kinerja Posyandu dengan signifikan. Dan di tahun 2020 kembali meningkat menjadi 100%. Anggaran memang sangat penting sebagai penggerak suatu organisasi meski Posyandu belum mendapat porsi anggaran namun swadaya masyarakat terbukti mampu menggerakkan perannya. Diharapkan adanya dukungan anggaran untuk tetap dipertahankan.

#### h. Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat

Swadaya masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat belum menunjukkan eksistensinya.

**Tabel 2. 109 Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Swadaya masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0	0,09%	11,57%

*Sumber: Kec. Parjurit Kulon, Kec. Magersari, Kec. Kranggan, 2021*

Jumlah Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat di Kota Mojokerto dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 belum ada swadaya masyarakat, mengingat masyarakat masih cenderung menggantungkan bantuan pemerintah untuk pembiayaan pembangunan. Tahun 2019 swadaya masyarakat mulai muncul di Kecamatan Kranggan walaupun dengan persentase yang kecil. Di tahun 2020 terdapat peningkatan swadaya masyarakat dari Kecamatan Pralon dan Kranggan yang cukup tinggi. Harapannya warga bisa turut aktif dalam melakukan pembangunan di daerahnya.

#### i. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemeliharaan Pasca program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan-Kecamatan Kota Mojokerto masih belum menunjukkan eksistensinya.

**Tabel 2. 110 Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
Pemeliharaan Pasca program Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0	0	0

*Sumber: Kec. Parjurit Kulon, Kec. Magersari, Kec. Kranggan, 2021*

Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat di Kota Mojokerto dari tahun 2016 – 2020 masih nihil. Belum ada intervensi maupun inisiatif dari warga atas pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat.

### 2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

#### a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk menunjukkan rata-rata penambahan penduduk pertahun pada periode/waktu tertentu dan di Kota Mojokerto angka LPP ini Fluktuatif (turun naik) karena laju pertumbuhan penduduk ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian saja, tapi juga dipengaruhi oleh faktor Migrasi baik migrasi masuk atau migrasi keluar. Oleh karena itu besar kecilnya angka LPP ini tergantung dari ke 4 faktor tersebut. Pada tahun 2019, LPP di Kota Mojokerto ini mengalami penurunan yang cukup signifikan hal ini dikarenakan adanya rekonsiliasi data waktu perekaman KTP. Adanya penyesuaian ini mengakibatkan penurunan angka pada data jumlah penduduk, bukan berarti terjadi penurunan pertumbuhan penduduk.

**Tabel 2. 111 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Laju Pertumbuhan Penduduk	0,56	0,69	0,72	-2,8	0,47

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2021

Pada tahun 2019 laju pertumbuhan penduduk Kota Mojokerto menunjukkan penurunan sebesar -2,8. Sementara di tahun 2020 kembali meningkat di angka 0,47.

#### b. Total Fertility Rate (TFR)

TFR yang merupakan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang Ibu selama masa reproduksi, yaitu sejak awal usia subur sampai akhir masa reproduksinya sehingga disini adanya pengaturan/pengendalian memegang peran penting melalui pelaksanaan program KB perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan dengan harapan angka TFR ini dapat dikendalikan.

**Tabel 2. 112 TFR di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Total Fertility Rate	1,99	1,95	1,81	1,87	1,85

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Mojokerto, 2021

Adapun perkembangan TFR di Kota Mojokerto selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi yang tidak terlalu signifikan. Adapun TFR yang diperoleh Kota Mojokerto ini sedikit lebih rendah dari angka standar capaian ideal TFR sebesar 2,1.

### c. Rata-Rata Anak per Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga merupakan angka rata-rata yang dimiliki oleh setiap keluarga, hal ini dimaksudkan untuk mengendalikan jumlah anak yang dimiliki setiap keluarga dengan harapan terbentuknya keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera serta berkualitas.

**Tabel 2. 113 Rata-rata Anak per Keluarga di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,9	1,61	1,6	1,9	2,01

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Mojokerto, 2021

### d. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB merupakan perbandingan antara jumlah peserta KB dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur yang ada. Dengan semakin besarnya jumlah peserta KB maka akan berdampak pada keberhasilan dalam program pengendalian penduduk.

**Tabel 2. 114 Rasio Akseptor KB di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Akseptor KB	75,02	75,22	75,08	80,00	73,34

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Mojokerto, 2021

Tabel diatas menunjukkan adanya kenaikan akseptor KB kecuali di tahun 2018 sempat mengalami sedikit penurunan 0,14 menjadi 75,08. Namun di tahun 2019 meningkat kembali sebanyak 15.237 orang atau dengan persentase 80 persen. Dan di tahun 2020 jumlah penerima akseptor KB mengalami penurunan sekitar 679 orang dari tahun sebelumnya atau menjadi 73,34 persen. Penurunan tersebut diakibatkan di masa pandemic covid 19, RS tidak lagi melayani akseptor Kontrasepsi Mantap (Kontap), selain itu adanya refocusing anggaran sehingga terjadi pengurangan alokasi untuk akseptor KB.

#### e. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun

Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 merupakan perbandingan antara perempuan yang menikah di usia 15 – 49 dengan memakai kontrasepsi dibandingkan dengan jumlah perempuan yang menikah di usia 15 – 49 secara keseluruhan. Dengan semakin besarnya jumlah perempuan menikah usia 15 – 49 memakai kontrasepsi maka akan berdampak pada keberhasilan dalam program pengendalian penduduk.

**Tabel 2. 115 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	75,02	75,22	75,08	80,00	73,34

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Mojokerto, 2021

#### f. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 Tahun)

Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) adalah merupakan angka kelahiran per 1000 wanita pada kelompok umur 15 – 19 tahun dimana pada usia ini merupakan usia yang mempunyai resiko tinggi jika melahirkan karena secara fisik organ – organ reproduksi belum berkembang secara sempurna dan siap untuk melahirkan dan secara mentalpun juga belum siap untuk mempunyai anak. Oleh karena itu Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) harus ditekan / diturunkan dalam rangka untuk menghasilkan generasi penerus yang sehat dan berkualitas.

**Tabel 2. 116 Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 Tahun) di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	35	34	34	80	84

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Mojokerto, 2021



Angka Kelahiran Remaja di Kota Mojokerto mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar 80 dan 84 persen. Artinya di tahun 2019 terdapat 5.247 remaja yang melahirkan, dan 5.314 remaja melahirkan di tahun 2020. Salah satu penyebabnya adalah pandemic Covid yang mana siswa lebih banyak belajar secara daring dari rumah sehingga kontrol atas perilaku siswa menjadi kurang. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Mojokerto mengingat angka tersebut sangatlah tinggi dan berdampak pada fisik dan psikis baik remaja yang melahirkan maupun bayi yang dilahirkan.

#### g. Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita

Rata-rata usia kawin pertama wanita merupakan rata-rata usia perkawinan yang ada pada penduduk wanita, dimana usia ideal untuk menikah pada wanita adalah usia 21 tahun dan laki-laki usia 25 tahun. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang berkualitas dan menghasilkan generasi yang berkualitas pula.

**Tabel 2. 117 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata usia kawin pertama wanita	22,94	21,42	21,43	21 – 25	26 – 30

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Mojokerto, 2021

Adapun rata-rata usia kawin pertama wanita di Kota Mojokerto pada tahun 2019 adalah dengan rentang usia 21 – 25 tahun, sedangkan di tahun 2020 mengalami kenaikan usia kawin dengan rentang usia 26 – 30 tahun.

### 2.3.2.9 Perhubungan

#### a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum menggambarkan tingkat mobilitas masyarakat di wilayah Kota Mojokerto. Data arus penumpang angkutan umum diperoleh dari jumlah penumpang yang masuk dan jumlah penumpang yang keluar dari Terminal Kertajaya Kota Mojokerto. Berikut ini data arus penumpang angkutan umum di wilayah Kota Mojokerto tahun 2016 – 2020.

**Tabel 2. 118 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penumpang	2.285.729	2.043.188	1.800.647	1.437.757	1.883.995

*Sumber: Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, 2021*

Berdasarkan data diatas jumlah arus penumpang angkutan umum dari tahun 2016 – 2019 mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan oleh kepemilikan kendaraan roda 2 dan kendaraan pribadi semakin banyak. Namun di tahun 2020 terjadi kenaikan jumlah penumpang angkutan umum sebesar 31 persen menjadi 1.883.995. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 pandemic covid 19 mengakibatkan ekonomi menurun dan daya beli masyarakat ikut menurun. Jumlah kepemilikan angkutan pribadi pun juga mengalami penurunan. Banyak orang memiliki preferensi angkutan umum yang lebih ekonomis.

#### **b. Rasio Ijin Trayek**

Ijin trayek di Kota Mojokerto dengan dibandingkan jumlah penduduk di Kota Mojokerto sangat kecil, karena jumlah angkutan di Kota Mojokerto hanya dengan ada dua trayek angkutan yaitu Line A dan Line B, sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2. 119 Rasio ijin Trayek di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Ijin Trayek	53	41	48	23	52
Jumlah Penduduk	143.032	144.493	143.377	139.423	140.075
Rasio Ijin Trayek	0,00042 (1:2384)	0,00032 (1:3104)	0,00037 (1:2672)	0,00016 (1:6061)	0,00037 (1:2694)

*Sumber: Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, 2021*

Dari tabel diatas terlihat bahwa rasio ijin trayek di Kota Mojokerto terbilang cukup sedikit. Hal ini berarti penggunaan moda di Kota Mojokerto masih didominasi dengan kendaraan pribadi daripada menggunakan transportasi umum seperti Line A atau B.

### c. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah uji KIR angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Adapun Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kota Mojokerto sebagai berikut:

**Tabel 2. 120 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Mojokerto  
Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	809	660	1.028	1.120	1.107

*Sumber: Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, 2021*

Berdasarkan data diatas Jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Mojokerto mengalami fluktuasi hal ini dipengaruhi oleh banyaknya mutasi angkutan umum baik mutasi masuk dan mutasi keluar. Adapun pada tahun 2020 jumlah uji KIR sedikit menurun diakibatkan PSBB sehingga angkutan yang beroperasi di luar daerah kesulitan untuk melakukan uji KIR.

### d. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Jumlah terminal di wilayah Kota Mojokerto sebanyak 1 lokasi, yaitu Terminal Kertajaya. Mulai Tahun 2017 pengelolaan Terminal Kertajaya dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Undang Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terkait Penyelenggaraan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, bahwa untuk Terminal Kertajaya merupakan terminal Tipe B yang kewenangan pengelolaannya adalah Pemerintah Provinsi dalam hal ini Provinsi Jawa Timur.

### e. Persentase Layanan Angkutan Darat

Persentase layanan angkutan darat merupakan perbandingan dari jumlah kendaraan dengan jumlah penumpang setiap tahun di Kota Mojokerto dapat ditampilkan seperti pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 121 Persentase Layanan Angkutan Darat di Kota Mojokerto Tahun  
2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Layanan Angkutan darat	3,31 %	4,69 %	5,53 %	7,10%	4,32%

*Sumber: Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, 2021*

Adapun persentase pelayanan angkutan darat di Kota Mojokerto selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 jumlah angkutan umum di kota Mojokerto stagnan dari tahun sebelumnya yakni 418 unit, sedangkan jumlah penumpang yang terangkut tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 446.238 penumpang. Peningkatan penumpang yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah angkutan umum ini menjadikan persentase layanan angkutan darat menurun.

#### f. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum dihitung dari Jumlah angkutan yang tidak memiliki KIR pada tahun –n dibagi jumlah angkutan umum pada tahun –n dikali 100 persen. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum menggambarkan jumlah angkutan umum yang tidak laik jalan. Adapun data Persentase Kepemilikan KIR angkutan Umum di wilayah Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 122 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR angkutan umum	160	165	165	160	155
Jumlah angkutan umum	969	825	1.193	1.289	1.352
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	16,51%	20,00%	13,83%	12,41%	11,46%

*Sumber: Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, 2021*

Berdasarkan data diatas persentase kepemilikan KIR angkutan umum pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Dari tabel diatas terlihat masih banyak angkutan umum yang tidak melakukan uji KIR. Semakin tinggi angka persentase kepemilikan KIR maka nilai tersebut semakin buruk, mengingat banyak sekali angkutan umum yang tidak melaksanakan kelayakan jalan.

### g. Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Rambu-rambu lalu lintas merupakan salah satu fasilitas perlengkapan jalan yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Rasio. Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas juga merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Mojokerto dalam menurunkan angka kecelakaan. Berikut ini tabel realisasi pemasangan rambu-rambu di Kota Mojokerto tahun 2016-2020

**Tabel 2. 123 Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Rambu Terpasang	1.106	1.273	1.357	1.445	1.540
Jumlah Kebutuhan Rambu	1.807	1.807	1.807	1.785	1.785
Persentase pemasangan rambu	61,21 %	70,45 %	75,10 %	80,95 %	86,27 %

*Sumber: Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, 2021*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian pemasangan rambu-rambu di Kota Mojokerto mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 61,21 % menjadi 86,27 % pada tahun 2020. Hal ini disebabkan semakin berkembangnya Kota Mojokerto ditandai dengan pembukan kawasan-kawasan perumahan, perindustrian, pendidikan, dan perdagangan sehingga menuntut adanya pemenuhan kebutuhan pemasangan rambu-rambu pada kawasan tersebut.

### 2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

#### a. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah organisasi sosial yang bersifat wirausaha, bergerak dalam bidang pengelolaan informasi dan komunikasi yang tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat. Menurut Direktorat Kelembagaan Komunikasi Sosial (2008:1) definisi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan

kebutuhannya. KIM berasaskan Pancasila, menjunjung tinggi obyektivitas, keabsahan dan keterbukaan informasi.

Indikator cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan, dihitung dengan jumlah KIM dibagi dengan jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota dikali 100 persen.

**Tabel 2. 124 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	-	700%	433%	466,67 %	466,67 %

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, 2021*

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 terdapat 21 KIM. Pada tahun 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap 21 KIM yang telah terbentuk. Dari hasil verifikasi dan validasi ini, terdapat 13 KIM yang masih menjalankan aktivitas pengelolaan informasi dan legalitas organisasi KIM telah diperkuat dengan Surat Keputusan dari Kantor Kelurahan setempat. Pada tahun 2019 cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan mengalami peningkatan menjadi 466,67% dan bertahan pada tahun 2020. Dengan kata lain terdapat 14 KIM di 3 kecamatan yang menjalankan aktivitas pengelolaan informasi.

Secara kuantitatif cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan sudah sangat tinggi yakni melebihi 100 persen. Namun, permasalahan yang muncul adalah menjaga keaktifan anggota KIM yang sudah terbentuk untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

#### **b. Cakupan Layanan Telekomunikasi**

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optik, radio, atau sistem

elektromagnetik lainnya. Termasuk kegiatan telekomunikasi adalah penyediaan pemancar suara, data, naskah, bunyi dan video menggunakan fasilitas transmisi berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi.

Guna mendukung jangkauan jaringan telekomunikasi, Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan pembangunan dan pemeliharaan terhadap sejumlah sarana jaringan komunikasi yang tersebar di berbagai lokasi. Jaringan ini melayani komunikasi data di 36 OPD dan 18 kantor Kelurahan. Jaringan komunikasi ini meliputi Tower jaringan sebanyak 23 unit yaitu 21 tower triangle dan 2 tower monopole.

**Tabel 2. 125 Jaringan Komunikasi di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Banyaknya jaringan tower (unit)	19	20	23	23	23

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, 2021*

Terkait indikator cakupan layanan telekomunikasi, rumus yang digunakan adalah luas wilayah yang tercoverage dibagi dengan luas wilayah keseluruhan. Untuk data 2017 hingga 2018 belum pernah dilakukan pengukuran terhadap indikator ini sehingga belum tersedia data capaian kinerja. Jika berdasarkan cakupan wilayah tercoverage untuk pelayanan komunikasi data antar Organisasi Perangkat Daerah, maka persentase Dinas Komunikasi dan Informatika telah melayani semua OPD, yakni sebesar 100 persen.

Dalam konteks layanan telekomunikasi yang digunakan masyarakat yaitu layanan telekomunikasi seluler, selama ini layanan telekomunikasi seluler di wilayah Kota Mojokerto sudah mencapai 100%, karena semua wilayah kecamatan dan kelurahan telah tercakup oleh operator seluler.

### **c. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon**

Perkembangan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat pesat saat ini memungkinkan hampir setiap orang untuk mendapatkan informasi dalam waktu sesaat. Salah satu teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi pilihan untuk memperoleh informasi dan menjalin komunikasi secara nirkabel adalah telepon seluler. Telepon seluler saat ini semakin kaya fungsi. Tidak hanya sebagai sarana untuk melakukan komunikasi suara dan teks jarak

jauh, berbagai layanan tambahan telah disediakan pengembang telepon seluler seperti multimedia messages, e-mail, akses internet, aplikasi bisnis, alat fotografi dan permainan.

Indikator persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon dihitung berdasarkan rumus: jumlah penduduk yang menggunakan HP/telepon dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan seratus persen. Untuk data penggunaan HP/telepon ini belum tersedia, namun di dalam buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur dari BPS Provinsi Jawa Timur, tersedia data tentang persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menguasai/memiliki telepon seluler dalam 3 bulan terakhir.

**Tabel 2. 126 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menguasai/Memiliki Telepon Seluler dalam 3 bulan terakhir di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menguasai/Memiliki Telepon Seluler dalam 3 bulan terakhir	72,56	74,16	73,53	72,64	72,71
Capaian di Jawa Timur	57,21	58,30	60,66	62,16	61,82

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021 (diolah)*

Dengan asumsi bahwa penduduk yang menguasai/memiliki telepon/HP juga menggunakan perangkat tersebut, maka pada indikator ini dapat dilihat bahwa persentase kepemilikan telepon seluler di Kota Mojokerto cenderung mengalami fluktuasi. Titik tertinggi penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menguasai/memiliki telepon seluler terjadi pada tahun 2017. Sedangkan terendah terjadi pada tahun 2016. Angka yang diperoleh oleh Kota Mojokerto ini lebih tinggi dari capaian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini membuktikan bahwa warga Kota Mojokerto melek teknologi.

#### **d. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet**

Penggunaan internet sehat oleh masyarakat (rumah tangga) perlu didorong dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih melek informasi, sehingga terbukanya akses informasi dapat menciptakan masyarakat yang lebih tanggap



dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kota Mojokerto telah memberikan sarana Internet kepada masyarakat secara gratis. Sarana internet melalui hotspot gratis ini sudah menjangkau di 18 kelurahan di Kota Mojokerto.

**Tabel 2. 127 Jumlah Internet/Hotspot Masyarakat di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Internet/Hotspot di Masyarakat (titik)	34	50	75	90	90

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, 2021*

Dengan adanya penyediaan titik hotspot di masyarakat ini, diharapkan dapat meningkatkan jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet. Untuk indikator kinerja proporsi rumah tangga dengan akses internet dihitung berdasarkan rumus: Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet dibagi dengan jumlah rumah tangga.

Di dalam laporan permintaan data Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto telah menghitung persentase rumah tangga yang anggota rumah tangganya mengakses internet dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, data rumah tangga dengan akses internet adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 128 Persentase Rumah Tangga yang Anggota Rumah Tangga Ada yang Mengakses Internet Dalam 3 Bulan Terakhir di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Rumah Tangga yang Anggota Rumah Tangga Ada yang Mengakses Internet Dalam 3 Bulan Terakhir	41,17	46,81	80,58	86,08	90,59

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2021*

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun persentase rumah tangga yang anggota rumah tangga ada yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir mengalami tren kenaikan. Pada tahun 2016 hanya berada di angka 41,17 persen sementara pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 90,59 persen.

Jika dibandingkan dengan rata – rata Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, persentase rumah tangga Kota Mojokerto dengan akses internet masih berada di atas rata – rata Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Tren pada kedua data ini selaras, dalam artian ketika data Kota Mojokerto mengalami penurunan, maka data rata – rata Provinsi Jawa Timur juga mengalami penurunan. Demikian sebaliknya, jika data Kota Mojokerto mengalami kenaikan signifikan, maka demikian pula dengan data Provinsi Jawa Timur.

#### e. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi

Dalam hal mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan, ketersediaan sarana prasarana komputer/desktop/notebook di tingkat rumah tangga menjadi suatu tuntutan. Kebutuhan akan komputer oleh anggota rumah tangga sudah dimulai dari usia yang sangat dini, tidak hanya oleh anggota keluarga yang sudah mengenyam pendidikan menengah dan tinggi.

Indikator kinerja proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi dihitung berdasarkan rumus jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi dibagi dengan jumlah rumah tangga.

**Tabel 2. 129 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Komputer (Desktop, Laptop dan Notebook) di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Komputer (Desktop, Laptop dan Notebook)	31,62	36,51	33,94	36,09	35,72
Capaian rata-rata Kabupaten/Kota di Jawa Timur	18,19	17,94	18,57	18,28	17,99

*Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2021*

Dari data di atas dapat dilihat bahwa di Kota Mojokerto, persentase rumah tangga yang memiliki komputer berada di kisaran 35 %. Dari tahun ke tahun tidak ada tren khusus terkait penurunan dan kenaikan, namun persentase tertinggi terjadi di tahun 2017, yakni sebesar 36,51 %. Data proporsi rumah tangga dengan komputer pribadi pada tahun 2018 masih lebih rendah dari data

tahun 2019. Hal ini bisa dikarenakan adanya kenaikan jumlah penduduk yang tidak dibarengi dengan kenaikan jumlah kepemilikan komputer.

Jika dibandingkan dengan rata – rata Kabupaten/Kota di Jawa Timur, maka persentase rumah tangga dengan kepemilikan komputer masih lebih tinggi. Dari tahun ke tahun dapat dilihat bahwa untuk rata – rata Kabupaten/Kota di Jawa Timur terdapat kecenderungan kenaikan proporsi rumah tangga dengan akses internet.

### 2.3.2.11 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

#### a. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (rapat anggota tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

**Tabel 2. 130 Persentase Koperasi Aktif di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Koperasi	177	177	177	181	200
Jumlah Koperasi Aktif	126	135	142	145	165
Jumlah Koperasi Tidak Aktif	51	42	35	36	35
Persentase Koperasi Aktif	71.19%	76.27%	80.23%	80.11%	82.50%
Jumlah Anggota Koperasi	11.297	11.848	12.153	12.332	12.551

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, 2021

Dari data diatas dapat diketahui persentase koperasi aktif di Kota Mojokerto pada tahun 2020 mencapai angka 82,50% apabila dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 71,19% angka ini dinilai mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan. Hal ini perlu dilakukan pemetaan apakah persoalan kelembagaan, SDM, keuangan atau persoalan lain yang menyebabkan kenaikan tersebut. Sehingga dapat dilaksanakan kebijakan yang tepat dalam menjadikan koperasi tersebut aktif dan berkembang kembali. Selain itu, jumlah koperasi dan

anggota dalam kurun waktu 2016 – 2020 menunjukkan tren kenaikan. Tahun 2016, jumlah koperasi di Kota Mojokerto mencapai 177 koperasi dengan jumlah anggota 11.297, dan pada tahun 2020 jumlah koperasi naik menjadi 200 koperasi dengan jumlah anggota 12.551

#### **b. Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif**

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Persentase UKM non BPR/LKM di Kota Mojokerto dari tahun 2016 – 2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 – 2018 persentase UKM non BPR/LKM Aktif mengalami stagnansi di angka 82,64 persen. Sementara di tahun 2019 terjadi penurunan yang signifikan menjadi 52,23 persen, tetapi di tahun 2020 sedikit mengalami kenaikan di angka 66,67 persen.

**Tabel 2. 131 Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif di Kota Mojokerto  
Tahun 2016 – 2020**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Persentase UKM non BPR/LKM Aktif	82,64	82,64	82,64	52,23	66,67

*Sumber: Dinas Koperasi, UKM, perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, 2021*

#### **2.3.2.12 Penanaman Modal**

Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur dalam Undang-Undang No 25

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan faktor yang dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto. Berikut ini merupakan tabel aspek dan indikator kinerja menurut Bidang Urusan, yang dalam hal ini adalah urusan penanaman modal.

**Tabel 2. 132 Realisasi Investasi di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	252	304	238	43	104
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	132.314.200.000	289.261.715.000	170.029.747.050	352.908.000.997	513.978.767.777
Rasio daya serap tenaga kerja	2,74	2,08	3,81	42,07	21,29
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	76,467,151,000 (Turun 37 %)	156,947,515,000 (Naik 104 %)	119,231,967,950 (Turun 41 %)	182,878,253,947 (Naik 23,44 %)	161,070,766,780 (Naik 69,20%)

*Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto, 2021*

Pada tahun 2016-2020 jumlah nilai investasi menunjukkan angka yang fluktuatif dari Rp. 132.314.200.000 (tahun 2016), naik menjadi Rp. 289.261.715.000 (tahun 2017) turun lagi menjadi Rp. 170.029.747.050 (tahun 2018), meningkat kembali menjadi Rp. 352.908.000.997 (tahun 2019) dan di tahun 2020 juga mengalami kenaikan Rp. 513.978.767.777. Tahun 2016 – 2018 rasio daya serap tenaga kerja cenderung naik, rasio tersebut didapatkan dari jumlah tenaga kerja yang terserap dibagi dengan jumlah nilai investasi. Sementara di tahun 2019 dan 2020, rasio daya serap tenaga kerja didapatkan dari jumlah tenaga kerja yang terserap dibagi dengan jumlah investor berskala nasional. Hal ini mengakibatkan angka rasio daya serap tenaga kerja menjadi

lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 rasio daya serap tenaga kerja menjadi 42,07, sedangkan di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 21,29. Namun di tahun 2020 jumlah nilai investasi berhasil naik menjadi Rp 513.978.767.777

### 2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

#### a. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Pada tahun 2014 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata belum terbentuk sedangkan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata terbentuk pada bulan Mei 2015 tetapi belum mengelola anggaran, pengelolaan Anggaran pada tahun 2015 ada pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. Persentase Organisasi Pemuda yang aktif menjadi 50% ditahun 2016 dikarenakan jumlah Organisasi Pemuda ada sebanyak 38 dan yang aktif 19 Organisasi Pemuda saja. Sedangkan di tahun 2017 Tercatat sebanyak 19 OKP yang aktif dari 40 Organisasi Kepemudaan dengan Persentase 47,50%. Organisasi Kepemudaan meningkat cukup tinggi sebanyak 54 OKP namun secara Persentase mengalami penurunan menjadi 44,4% dikarenakan Jumlah OKP yang aktif hanya 24 OKP. Di tahun 2020 terjadi stagnansi persentase organisasi pemuda yang aktif yakni 74 persen.

**Tabel 2. 133 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Mojokerto Tahun 2016 - 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase organisasi pemuda yang aktif	50%	47,50%	44,40%	74%	74%

*Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2021*

#### b. Persentase Wirausaha Muda

Di era Globalisasi wirausaha menjadi pilihan banyak orang di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kota Mojokerto. Pada tahun 2016 persentase wirausaha mandiri di Kota Mojokerto hanya 0,70% seiring berjalannya waktu hingga tahun 2018 terus mengalami pertumbuhan hingga 1,55 persen. Namun di tahun 2019 terjadi penurunan jumlah wirausaha muda menjadi 0,4 persen saja. Dan di tahun 2020 persentase wirausaha muda meningkat cukup pesat menjadi 4,32 persen. Hal ini dikarenakan masa pandemic covid 19 banyak sekali pemuda-pemuda yang mencoba membuka usaha dari segi kuliner hingga retail.

**Tabel 2. 134 Persentase Wirausaha Muda di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

<b>Indikator Kinerja Pembangunan Daerah</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Persentase wirausaha muda	0,70%	1,37%	1,55%	0,4%	4,32%

*Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2021*

### **c. Cakupan Pembinaan Olahraga**

Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga terdiri dari kegiatan Pelaksanaan identifikasi bakat dan profesi pelajar dalam olahraga agar teridentifikasinya bakat - bakat pelajar dari setiap cabang olahraga yang akan mengikuti perlombaan tingkat provinsi.

**Tabel 2. 135 Cakupan Pembinaan Olahraga di Kota Mojokerto  
Tahun 2016 – 2020**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Cakupan Pembinaan Olahraga	43,47%	47,82%	17,39%	26,00%	20,00%

*Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2021*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya fluktuasi cakupan pembinaan olahraga di Kota Mojokerto. Berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut antara lain adanya Kegiatan pertandingan cabang-cabang Olahraga di tingkat Provinsi POPDA dan POR SD. Di tahun 2020 cakupan pembinaan olahraga mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya pandemic covid sehingga beberapa pelatihan menjadi terbatas.

### **d. Cakupan Pelatih yang Bersertifikat**

Cakupan pelatih yang bersertifikat merupakan indikator untuk melihat peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga.

**Tabel 2. 136 Cakupan Pelatih yang Bersertifikat di Kota Mojokerto  
Tahun 2016 – 2020**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	-	14%	46%	48%	48%

*Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2021*

Cakupan Pelatih yang Bersertifikat pada tahun 2016 belum ada data yang bisa dilaporkan, sedangkan pada tahun 2017 sampai dengan 2020 terjadi kenaikan antar tahun yang mengindikasikan bahwa adanya peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan.

#### **e. Cakupan Pembinaan Atlet Muda**

Cakupan Pembinaan Atlet Muda di Kota Mojokerto terlihat mengalami kenaikan prestasi tiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan. Berbagai faktor yang mendukung peningkatan kinerja tersebut antara lain adanya Kegiatan pertandingan cabang- cabang Olahraga di tingkat Provinsi POPDA dan POR SD.

**Tabel 2. 137 Cakupan Pembinaan Atlet Muda di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Cakupan Pembinaan Atlet Muda	2,34%	1,67%	10.08%	19,60%	22,38%
Jumlah Atlet Berprestasi	-	99	61	53	75
Jumlah Pemuda Berprestasi	-	2	4	5	6

*Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2021*

Dari tabel diatas dapat dicermati bahwa pembinaan akan berbanding lurus dengan prestasi. Pada Tahun 2017, cakupan pembinaan atlet muda sebesar 1.67% dengan jumlah atlet berprestasi sebanyak 99 orang dan pemuda yang berprestasi 2 orang. Prestasi tersebut meningkat menjado 6 pemuda berprestasi dan 75 atlet berprestasi pada tahun 2020 dengan cakupan pembinaan sebesar 22.38%.



#### f. Perkembangan Sarana – Prasarana Pendukung Pengembangan Kepemudaan

Sarana – prasarana olahraga diperlukan untuk menunjang pengembangan kegiatan kepemudaan yang efektif dan efisien. Di Kota Mojokerto, ketersediaan prasarana ditunjukkan dengan adanya gedung olahraga sebagai aktifitas keolahragaan. Jumlah gedung olahraga meningkat secara bertahap dalam rentang waktu 2016-2020. Pada tahun 2016 jumlah gedung olahraga sebanyak 8 gedung dan naik menjadi 9 gedung pada tahun 2020. Perkembangan sarana pengembangan kepemudaan juga mengalami peningkatan secara bertahap. Jumlah klub olahraga sebanyak 37 klub pada tahun 2016 dan meningkat secara bertahap meningkat menjadi 196 klub pada tahun 2020.

**Tabel 2. 138 Sarana – Prasarana Pendukung Pengembangan Kepemudaan**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Gedung Olahraga	8	8	9	11	9
Klub Olahraga	37	178	181	196	196
Organisasi Olahraga	23	23	23	23	25

*Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2021*

#### 2.3.2.14 Statistik

##### a. Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi

Sebelum tahun 2017 Data Statistik masih ditangani oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto. Hasil dari penyusunan data statistik tersebut berupa buku statistik yang di cetak dan di distribusikan kepada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Sejak tahun 2017 data statistik diserahkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, dalam mempublikasikan data statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto melakukan inovasi hasil dari penyusunan data statistik tidak hanya berupa buku tetapi juga bisa diakses melalui website. Buku data statistik tersebut terdiri dari :

1. Buku Statistik Daerah Dalam Angka
2. Buku Indeks Kemahalan Konstruksi
3. Buku ICOR Dan ILOR

#### 4. Buku Indeks Gini

Buku data statistik tersebut juga bisa diakses melalui website [mojokertokota.go.id](http://mojokertokota.go.id) dan [ppid.mojokertokota.go.id](http://ppid.mojokertokota.go.id). Pada tahun 2019 ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto akan merencanakan membangun portal data atau website satu data yang terintegrasi dengan portal Satu Data Indonesia. Ini sebagai wujud mendukung *e-government* dan *e-database* sesuai Permendagri.

#### **b. Tersedianya Buku “Statistik Daerah Dalam Angka”**

Buku Statistik Daerah Dalam Angka merupakan publikasi yang cukup prestisius karena melibatkan data-data dari stakeholder terkait. Buku ini disusun oleh BPS tahun 2017, dan tahun 2018 ada pendampingan Jasa Konsultan dari RCCP FIA Universitas Brawijaya Malang, Buku Statistik Daerah Dalam Angka berisi sekitar 80 persen dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di tingkat provinsi maupun kab/kota. Ketersediaan data tergantung dari OPD tersebut hingga masing-masing daerah memiliki keberagaman data sesuai potensi wilayahnya. Meski hampir keseluruhan data dalam BSDDA menampilkan data OPD, tidak berarti bahwa proses pengumpulan data mudah dan cepat. Justru ketepatan waktu sering menjadi masalah. Belum lagi konsistensi dan kelengkapan data yang menyebabkan waktu yang lebih lama untuk menelaah dan *cross check* data.

Buku Statistik Daerah Dalam Angka merupakan Potret Pemerintah Kota Mojokerto, yang mana dalam hal ini telah diulas secara statistik masing-masing OPD yang ada dalam Lingkungan Pemerintahan Kota Mojokerto yang berkaitan langsung dengan aspek-aspek kependudukan, kesehatan, sosial ekonomi, pendidikan, kepegawaian, pembangunan, perencanaan, komunikasi informatika, perhubungan, ketahanan pangan dan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah telah diatur dalam serta ketertiban, keamanan, kebangsaan dan ketentuan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk kedepannya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto akan meningkatkan pelayanan agar data statistik yang telah disusun dan dipublikasikan mudah untuk diakses dan dipahami oleh masyarakat. Data yang

dipublikasikan tidak hanya berupa angka dan narasi tetapi berupa gambar visual yang menarik untuk meningkatkan minat bagi pengguna/user.

### **c. Tersedianya Buku PDRB**

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bisa dilihat dari tiga sisi yaitu produksi, pendapatan dan pengeluaran. Penghitungan PDRB dengan pendekatan pendapatan maupun pendekatan pengeluaran belum tersedia, juga ditambah dengan pendapatan factor netto dari luar, sedangkan Produk Regional Neto adalah Produk Regional Bruto dikurangi penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan selama setahun dan Pendapatan Regional per capital adalah Produk Regional Neto atas biaya faktor produksi dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Pada periode tahun 2016 – 2020 PDRB Kota Mojokerto atas dasar harga berlaku cenderung meningkat, yakni sebesar 5.370.366,4 juta rupiah (2016); 5.828.234,7 juta rupiah (2017); 6.333.226,0 juta rupiah (2018); 6.801.696,6 juta rupiah (2019); dan menurun menjadi 6.588.057,7 juta rupiah (2020). Penurunan ini bisa dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Terjadinya penurunan nilai tambah PDRB sisi produksi berarti terjadi juga penurunan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran.

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, memberikan gambaran tentang perubahan nilai PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan atau penurunan volume permintaan atau konsumsi akhir.

Nilai PDRB atas dasar harga konstan di Kota Mojokerto yaitu sebesar 4.221.826,6 juta rupiah (2016); 4.460.444,9 juta rupiah (2017); 4.718.943,0 juta rupiah (2018); 4.985.675,9 juta rupiah (2019); dan menurun menjadi 4.801.464,0 juta rupiah (2020). Dari nilai PDRB atas dasar harga konstan terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto tahun 2020 terkontraksi hingga tumbuh minus cukup dalam, yakni dari 5,65 persen pada tahun 2019 menjadi -3,69 persen pada tahun 2020.

### 2.3.2.15 Kebudayaan

#### a. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Disporabudpar sebagai wadah pelestarian budaya Kota Mojokerto khususnya dalam agenda kegiatannya mempunyai target dan capaian, data yang dihimpun dari tahun 2016 – 2020 terdapat beberapa indikator budaya adapun indikator tersebut terdiri dari pembinaan kelompok seni, penyelenggaraan festival, benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi dan jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu.

Pembinaan kelompok (group) kesenian di Kota Mojokerto tahun 2016 sebanyak 13 kelompok, jumlah tersebut mengalami peningkatan secara fluktuatif menjadi 68 kelompok seni pada tahun 2019. Tahun 2020 jumlah kelompok seni yang dibina mengalami penurunan menjadi 56 kelompok. Hal itu tidak terlepas dari situasi dan kondisi di tahun 2020 dimana terjadi pandemic covid-19.

**Tabel 2. 139Pembinaan Kelompok Seni di Kota Mojokerto 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kelompok Seni	13	10	58	68	56

*Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2021*

Indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya terselenggaranya tiga kegiatan festival ditahun 2017, 2018, dan 2019 festival tari, festival keroncong dan festival makanan khas, dalam kegiatan tersebut berdampak pada pelestarian budaya dimana seniman dan masyarakat pada umumnya bisa menyaksikan seni dan budaya yang selama ini kurang dapat mendapatkan perhatian. Namun di tahun 2020 akibat pandemic covid, kegiatan festival seni dan budaya tidak diselenggarakan. Hal ini untuk mengantisipasi agar tidak ada cluster baru akibat diselenggarakannya festival yang mampu menarik perhatian wisatawan. Selain itu terimbas adanya refocusing anggaran untuk menanggulangi pandemi covid 19.

**Tabel 2. 140 Penyelenggaraan Festival di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	21	16	11	27	0

*Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2021*

## **b. Karya Budaya, Situs, dan Cagar Budaya yang Direvitalisasi dan Diinventarisasi**

Indikator jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi dari pendataan tahun 2016 – 2020 didapatkan 16 karya batik terdiri cipta karya motif Awan Inggek, Nam Kloso, Mahkota Mojopahit, Mrico Bolong, Lerek Kali, Koro Renteng, Bunga Matahari, Daun Bunga Sepatu, Alas Majapahit, Daun Talas, Gerbang Mahkota Raja, Sisik Gringsing, Satrio Manah, Surya Majapahit, Terang Bulan, Teratai Surya Majapahit, 2 cipta tari karya cipta didapatkan dari dua kali lomba cipta tari yang di tahun 2016 dan 2017 di ikutkan lomba cipta tari di Kedung Kesenian Surabaya, 1 seni musik karya cipta musik Mbah Jigong, 2 cipta lagu karya lagu Onde – Onde Mojokerto dan Kuto Mojokerto. Di tahun 2020, terjadi refocusing anggaran sehingga kegiatan revitalisasi dan inventarisasi karya budaya tidak dilaksanakan.

**Tabel 2. 141 Karya Budaya, Situs, dan Cagar Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	21	22	22	22	0
Sanggar Kesenian	4	4	5	8	8
Situs	0	0	0	1	1
Cagar Budaya	0	0	0	7	7

*Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2021*

Perkembangan situs dan cagar budaya Kota Mojokerto baru ditetapkan berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TABC) pada tahun 2019, yaitu berupa 1 situs ( yang terdiri dari 3 bangunan) dan 7 bangunan cagar budaya. Pelaksanaan pelastarian situs dan cagar budaya ditahun selanjutnya (tahun 2020) terkendala covid-19 sehingga jumlah situs dan cagar budaya tidak berubah.

### 2.3.2.16 Perpustakaan

#### a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun

Minat baca masyarakat adalah suatu cermin sikap dari masyarakat terhadap kemauan untuk mengetahui segala sesuatu informasi melalui media baca. Ditinjau dari segi pengamatan global tentang minat baca masyarakat, secara kasar sebenarnya minat baca masyarakat Jawa Timur minat bacanya cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pengunjung perpustakaan yang terus meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah pengunjung perpustakaan di Kota Mojokerto sebanyak 87.258 orang, kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 117.631 orang. Namun di tahun 2020 jumlah pengunjung Perpustakaan Kota Mojokerto mengalami penurunan yang signifikan sebesar 34.731 pengunjung, hal ini diakibatkan karena pandemic covid sehingga penduduk terbatas untuk berkegiatan. Adapun jumlah pengunjung tertinggi berasal dari swasta diikuti pelajar dan umum.

**Tabel 2. 142 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun di Kota Mojokerto  
Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pengunjung Perpustakaan	87.258	92.981	102.288	117.631	34.731

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto, 2021*

#### b. Rasio Perpustakaan per satuan penduduk

Rasio perpustakaan persatuan penduduk untuk menentukan rasio perpustakaan yaitu jumlah perpustakaan yang ada dibagi dengan jumlah penduduk setiap tahunnya juga menunjukkan kenaikan walaupun kenaikannya tidak setiap tahun. Pada tahun 2016 Rasio Perpustakaan di Kota Mojokerto sebesar 1,24 per 1.000 penduduk. Pada tahun 2019 turun menjadi 1,16 per 1.000 penduduk, dan di tahun 2020 mengalami stagnansi di angka 1,16.

**Tabel 2. 143 Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk di Kota Mojokerto  
Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Perpustakaan per 1.000 penduduk	1,24	1,30	1,30	1,16	1,16

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto, 2021*

### c. Jumlah Pustakawan

Pustakawan merupakan salah satu sumber daya yang menggerakkan sumber daya lain dalam organisasi perpustakaan yang memungkinkan perpustakaan dapat berperan secara optimal didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Fenomena saat ini adalah pustakawan tidak hanya bertugas sebatas menyusun dan mendata buku. Pustakawan juga harus mampu menerapkan suasana senyaman mungkin, bukan hanya dari segi fasilitas serta kelengkapan buku, namun memperlakukan pengunjung dan khususnya anggota perpustakaan sebagai aset penting perpustakaan untuk meningkatkan kemajuan perpustakaan. Di Kota Mojokerto, pada tahun 2016-2020 belum terdapat pustakawan.

**Tabel 2. 144 Jumlah Pustakawan Kota Mojokerto 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pustakawan	0	0	0	0	0

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto, 2021*

### 2.3.2.17 Kearsipan

#### a. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku

Pengelolaan arsip merupakan salah satu usaha dalam melestarikan menjaga dan memelihara Arsip mengingat pentingnya makna arsip maka segala upaya dilaksanakan untuk menyelamatkannya. Ketercapaian pengelolaan arsip secara baku pada Pemerintah Kota Mojokerto masih terbilang rendah, namun secara fluktuatif mengalami kenaikan dari 45 % tahun 2016 menjadi 56% pada tahun 2020. Salah satu alasannya adalah berlakunya sistem kearsipan dengan menggunakan kartu kendali sebagai ganti dari sistem buku agenda tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia yang bertugas mengelola kearsipan. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Mojokerto untuk melakukan perbaikan kedepannya.

**Tabel 2. 145 Persentase PD yang Mengelola Arsip secara Baku di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase PD yang Mengelola Arsip secara Baku	45,00	50,00	56,00	56,00	56,00

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto, 2021*

#### **b. Unit Pencipta Arsip yang Dibina**

Arsip merupakan bukti otentik dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, baik tingkat pusat sampai tingkat daerah. Seperti halnya organisasi berjalan pasti menghasilkan arsip sebagai bukti otentik guna mendukung proses kegiatan administrasi pemerintah daerah dan manajemen birokrasi serta sebagai bahan pertanggungjawaban pemerintah. Pencapaian pembinaan pada lembaga unit pencipta arsip pada lingkup pemerintahan Kota Mojokerto dalam rentang waktu 2016 sampai dengan 2020 konstan sejumlah 62 unit.

**Tabel 2. 146 Jumlah Unit Pencipta Arsip Yang Dibina di Kota Mojokerto**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Unit Pencipta Arsip Yang Dibina	62	62	62	62	62

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto, 2021*

#### **c. Sumber Daya Pengelola Arsip**

Kompetensi SDM kearsipan menjadi kunci penting untuk mewujudkan tata kelola kearsipan yang handal. Peningkatan kompetensi dapat dilakukan dengan mengikutsertakan SDM pengelola arsip dalam pendidikan dan pelatihan arsiparis. SDM pengelola arsip Kota Mojokerto yang ditingkatkan sebesar 5 pada tahun 2016 dan pada tahun 2020 pencapaiannya konsisten 5 tenaga pengelola.

**Tabel 2. 147 SDM Pengelola Arsip Yang Ditingkatkan Kompetensinya**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Tenaga Arsiparis	0	0	0	0	0
Tenaga Teknis Pengelola Kearsipan	3	3	5	5	5



Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
SDM Pengelola yang ditingkatkan kompetensinya	3	3	5	5	5

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto, 2021

### 2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

#### 2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

##### a. Produksi Perikanan

Produksi perikanan air tawar di Kota Mojokerto pada tahun 2019 sebanyak 342.979 kg/tahun mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 229.518 kg/tahun. Pandemi covid 19 sedikit banyaknya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang lesu sehingga sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

**Tabel 2. 148 Produksi Perikanan di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi perikanan (kg/th)	182.958	182.958	182.958	342.979	229.518

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto, 2021

##### b. Konsumsi Ikan

Jumlah konsumsi ikan di Kota Mojokerto selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan kecuali tahun 2020. Jumlah konsumsi ikan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebanyak 20,0 kg/tahun. Tetapi konsumsi ikan di Kota Mojokerto mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 17,7 kg/tahun. Daya beli masyarakat di masa pandemi covid 19 cenderung turun termasuk dalam mengonsumsi ikan.

**Tabel 2. 149 Jumlah Konsumsi Ikan di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Konsumsi ikan (kg/th)	17,8	17,8	19,9	20,0	17,7

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto, 2021

### 2.3.3.2 Pariwisata

#### a. Pengembangan Destinasi Wisata

Berdasarkan rencana pengembangan pariwisata yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 204 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kota Mojokerto 2019-2034, pengembangan daya tarik wisata kota dapat dikategorikan dalam 4 kawasan strategis, yaitu pariwisata taman rekreasi dan ekowisata; pariwisata kreatif; wisata edukasi; dan wisata bahari. Implementasi dari perda tersebut adalah adanya beberapa destinasi wisata yang telah dikembangkan oleh pemerintah Kota Mojokerto. Pada tahun 2018, terdapat 5 destinasi wisata yang dikembangkan, dan jumlah tersebut sama dengan destinasi yang dikembangkan di tahun 2019. Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan turun menjadi 4 lokasi, karena 1 destinasi wisata telah ditutup.

**Tabel 2. 150 Destinasi Wisata yang Dikembangkan Kota Mojokerto Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Destinasi wisata yang dikembangkan	-	-	5	5	4

*Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2021*

#### b. Kunjungan Wisatawan

Indikator kunjungan wisata menjadi prioritas dalam pencapaian target peningkatan pariwisata Kota Mojokerto. Perkembangan kunjungan wisata Kota Mojokerto dalam kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2016 dan 2017, kunjungan wisatawan di Kota Mojokerto, baik wisatawan domestik maupun mancanegara, sebanyak 31.904 wisatawan dan meningkat menjadi 259.732 wisatawan pada tahun 2018. Jumlah kunjungan wisatawan naik menjadi 262.682 pada tahun 2019 dan tahun 2020, kunjungan wisatawan meningkat menjadi 500.993 wisatawan.

Adanya fluktuatif kunjungan jumlah wisatawan dikarenakan perbedaan metode perhitungan jumlah kunjungan. Pada tahun 2016 dan 2017, kunjungan wisatawan menggunakan data wisatawan yang menginap di hotel dan beberapa penginapan di Kota Mojokerto. Mulai tahun 2018, jumlah kunjungan wisatawan memperhitungkan kunjungan pada destinasi wisata. Sehingga terjadi kenaikan cukup signifikan dari tahun sebelumnya.

Kenaikan jumlah wisatawan pada 2020 di Kota Mojokerto, disebabkan adanya revitalisasi di Pasar Benteng dan sekitarnya, menjadi epicentrum wisata baru yang mampu menarik banyak pengunjung. Di tempat tersebut tidak hanya pariwisata yang menginap di hotel, tetapi pariwisata di sektor kuliner dan ritel. Banyak sekali pedagang jajanan yang tersebar di sepanjang Jalan Benteng. Hal ini mampu menarik pengunjung dengan jumlah yang sangat signifikan. Persentase kunjungan wisatawan pada tahun 2016-2018 dibawah target kunjungan yang ditetapkan instansi terkait. Pada tahun 2019, pencapaian kunjungan wisatawan sebesar 100% dan mengalami kenaikan menjadi 500% pada tahun 2020. Kenaikan tersebut dikarenakan target wisatawan yang ditetapkan sebesar 100.000 pengunjung namun jumlah kunjungan wisatawan mencapai 500.000 orang. Hal itu tidak terlepas dari selesainya revitalisasi Kompleks Benteng, yang dalam kawasan tersebut terdapat pasar modern, hotel, mall, dan kawasan sentra umkm di sepanjang Jalan Benteng.

**Tabel 2. 151 Persentase Kunjungan Wisata di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah wisatawan	31.904	31.094	259.732	262.862	500.993
- Wisatawan Domestik	31.645	31.645	259.454	259.665	499.911
- Wisatawan Mancanegara	259	259	169	3.197	1.082
Persentase Kunjungan Wisata	41%	62%	75.24%	100.02%	500%

*Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2021*

### **c. Lama Kunjungan Wisata**

Indikator lama kunjungan wisata di Kota Mojokerto untuk mengetahui berapa lama wisatawan menginap di Kota Mojokerto. Dari tabel di bawah rata-rata lama kunjungan menginap di Kota Mojokerto dari tahun 2016 sampai 2020 adalah 1 hari, sempat meningkat di tahun 2019 menjadi 2 hari, namun di tahun 2020 turun kembali menjadi 1 hari. Hal ini sedikit banyak dipengaruhi adanya pandemi covid.

**Tabel 2. 152 Lama Kunjungan Wisata di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Lama kunjungan wisata	1 hari	1 hari	1 hari	2 hari	1 hari

*Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2021*

### 2.3.3.3 Pertanian

Sektor pertanian/perkebunan di Kota Mojokerto bukan merupakan penyumbang utama terhadap total PDRB Kota Mojokerto, hal ini dikarenakan Kota Mojokerto merupakan wilayah perkotaan dan luas wilayah Kota Mojokerto yang kecil.

**Tabel 2. 153 Produktivitas pertanian/perkebunan di Kota Mojokerto  
Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi sektor pertanian (ton/ha)	5,61	5,49	6,6	6,4	6,5
Produksi sektor perkebunan (kw/ha)	750	790	790	775	917
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	0,61	0,57	0,56	0	0
Cakupan Bina Kelompok Petani	100%	100%	100%	25%	25%

*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto, 2021*

### 2.3.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

#### a. Ketersediaan Listrik

Keberhasilan pembangunan di Kota Mojokerto tentu tidak terlepas dari peran Ketersediaan pasokan daya listrik. Ketersediaan listrik bisa menjadi angin segar bagi Rumah Tangga di Kota Mojokerto, karena dengan kondisi kelistrikan yang ada saat ini, bisa memberikan ruang gerak tanpa rasa khawatir kekurangan atau defisit listrik. Kebutuhan daya listrik dari waktu ke waktu terus menunjukkan peningkatan yang pesat, sehingga diperlukan perhitungan yang matang mengenai perencanaan untuk memenuhi kebutuhan listrik khususnya di Kota Mojokerto. Pengelolaan kelistrikan di Kota Mojokerto dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Selanjutnya PLN yang mendistribusikannya kepada masyarakat/ instansi/ perusahaan/ lembaga swasta untuk berbagai keperluan.

**Tabel 2. 154 Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik dan Rasio Ketersediaan Listrik di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah rumah tangga pengguna listrik	35.141	37.643	-	24.690	186.376
Rasio ketersediaan daya listrik	1,17	1,17	-	23,57	62,48

*Sumber: Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Mojokerto, 2021*

Rasio Ketersediaan listrik juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jenis dan kapasitas pembangkit listrik dapat mempengaruhi besarnya listrik yang diproduksi baik pada waktu siang maupun malam. Faktor yang berpengaruh terhadap produksi listrik per jenis pembangkit adalah faktor kapasitas pembebanan baik sebagai beban dasar maupun beban puncak, karakteristik pembebanannya sendiri termasuk daya mampu, dan waktu operasi unit pembangkit listrik. Waktu operasi adalah jam operasi maksimum dalam 1 tahun dikurangi dengan penghentian terjadwal dan perkiraan penghentian tak terjadwal. Faktor tersebut dapat menyebabkan total produksi listrik per jenis pembangkit listrik pada waktu siang dan malam hari berbeda. Besarnya produksi listrik selama kurun waktu yang telah ditentukan dapat memberi gambaran besarnya pasokan listrik dalam pemenuhan kebutuhan listrik nasional. Walaupun demikian tidak semua kebutuhan listrik dapat dipenuhi, oleh karena itu masih ada kebutuhan listrik yang tertahan dan tidak dapat dipenuhi oleh pembangkit listrik PLN. Kondisi ini merupakan gambaran umum dari Kota Mojokerto yang sedang berkembang, dimana penyediaan listrik bukan merupakan pemenuhan kebutuhan riil seluruhnya tetapi lebih merupakan kemampuan untuk membangkitkan dan mendistribusikan listrik ke masyarakat Kota Mojokerto.

#### **b. Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga**

Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kota Mojokerto ada sejak Tahun 2004 di Daerah Jalan Raya Ijen Wates, Kelurahan Wates terdapat 200 sambungan Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga namun dikarenakan banyak kendala akhirnya terhenti pengembangan Jaringan Gas

Bumi untuk Rumah Tangga. Salah Satu Kendala tersebut misalnya ketakutan masyarakat akan bahaya meledaknya Jaringan Gas Bumi. Pada Tahun 2015 Bagian Perekonomian dimana ada salah satu Sub Bagian Energi Sumber Daya Mineral mencari informasi kembali tentang Pengembangan Potensi Jaringan Gas Bumi di Kota Mojokerto Ke Perusahaan Gas Negara (Persero) Sidoarjo. Ternyata hasilnya sangat baik Perusahaan Gas Negara (Persero) Sidoarjo menyatakan siap memfasilitasi dan membantu untuk pengembangan kembali Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga. Dengan melalui Negosiasi yang sulit dilalui Bagian Perekonomian namun pada akhirnya bisa tercapai juga pengembangan Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga. Pada Tahun 2016 terpasang lagi di daerah Kelurahan Wates sebanyak 523 Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga, sehingga terdapat 723 Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kota Mojokerto atau sekitar 2,2 % dari Total Rumah sejumlah 32.999. Pada Tahun 2017 terpasang lagi di daerah Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Surodinawan dan Kelurahan Miji sebanyak 5.000 Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga, sehingga bertambah lagi menjadi 5.723 Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kota Mojokerto atau sekitar 17,34 % dari Total Rumah sejumlah 35.055. Pada tahun 2018, tidak ada pembangunan jaringan gas bumi untuk wilayah Kota Mojokerto dikarenakan Kementrian ESDM masih melaksanakan *Front End Engineering Design* (FEED) dan *Detai Engineering Design Contruction* (DEDC) untuk pengembangan jaringan gas bumi di Kota Mojokerto. Dari tahun ke tahun jumlah pengguna jaringan gas bumi meningkat. Namun di tahun 2019 ke 2020 terjadi sedikit penurunan sebesar 0,39 persen.

**Tabel 2. 155 Persentase Rumah Tangga Pengguna Jaringan Gas Bumi di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase rumah tangga pengguna jaringan gas bumi	2,2%	17,34%	17.34%	21,74%	21,35%

Sumber: Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Mojokerto, 2021

### 2.3.3.5 Perdagangan

#### a. Nilai Ekspor

Nilai ekspor produk perdagangan yang dilakukan beberapa perusahaan di kota Mojokerto pada tahun 2016 sebesar Rp. 8.871.868.975,38 naik sekitar 1,83 % pada tahun 2017 menjadi Rp. 9.635.282.159,0, dan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 8,60 % nilai ekspor mencapai Rp. 9.895.282.159,01. Sementara di tahun 2019 terjadi penurunan nilai ekspor produk Kota Mojokerto sebesar 5.926.214.782,13 dan turun lagi secara signifikan pada tahun 2020 sebesar 1.456.568. Pandemic covid 19 memberikan dampak yang besar terhadap laju pertumbuhan ekspor baik secara global, regional, maupun lokal.

**Tabel 2. 156 Nilai Ekspor Produk Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Ekspor Produk Kota Mojokerto	8.871.868.975,38	9.635.282.159,07	9.895.282.159,01	5.926.214.782,13	1.456.568.580,90

*Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, 2021*

#### b. Pedagang Informal Mendapat Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap kelompok usaha pedagang informal yang ada di Jalan Benteng Pancasila pada tahun 2016 sebanyak 145 orang dari jumlah pedagang sebanyak 362 orang atau sebesar 40,06 %. Pada tahun 2017 jumlah pedagang informal yang mendapat pembinaan sebanyak 150 orang dari 362 orang total pedagang atau sebesar 41,44 %, sementara pada tahun 2018 sebanyak 155 orang dari 362 total pedagang atau sebesar 42,82 %. Sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 150 orang dari 977 total pedagang atau sebesar 15,35%. Dan di tahun 2020 jumlah pedagang informal yang mendapat pembinaan sebanyak 112 orang dari total pedagang sebanyak 1067 orang atau sebesar 10,50%. Apabila diamati jumlah pembinaan yang didapat oleh pedagang informal di Kota Mojokerto mengalami fluktuasi di tiap tahunnya. Jumlah pembinaan tertinggi selama kurun waktu 5 tahun terjadi pada tahun 2017. Di tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan dari

tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah pedagang informal yang sangat signifikan. Sementara di tahun 2020, jumlah pedagang informal juga terus naik namun pembinaan dari Pemkot Mojokerto mengalami penurunan diakibatkan adanya refocusing anggaran akibat pandemic covid. Dan salah satu sector yang terimbas adalah pembinaan pedagang informal dikurangi.

**Tabel 2. 157 Pedagang Informal mendapat Pembinaan di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Pedagang Informal mendapat pembinaan	145	150	155	150	112
Jumlah pedagang informal	362	362	362	977	1067

*Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, 2021*

#### **2.3.3.6 Perindustrian**

Kepedulian pemerintah Kota Mojokerto dalam melakukan pembinaan terhadap industri kecil dan menengah melalui dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dengan memberikan Pelatihan Manajemen Produk, Pelatihan ketrampilan Proses Produksi dan Peningkatan Penggunaan Teknologi serta memfasilitasi pemasaran dengan menyelenggarakan pameran lokar maupun mengikuti pameran tingkat provinsi maupun pameran tingkat nasional serta pembinaan melalui misi dagang bagi produk yang berkualitas ekspor.

Pembinaan industri diarahkan pada sasaran semua jenis industri seperti industri Batik tulis, industri Alas kaki, Industri Kerajinan, Industri cetakan kue dari aluminium dan industri makanan dan minuman yang keberadaannya tersebar di wilayah Kelurahan di Kota Mojokerto.

Jumlah pengrajin yang telah dibina pada tahun 2016 adalah 500 pengrajin dari 1.497 jumlah IKM atau sebesar 33,4 persen. Di tahun 2017 dan 2018 seiring dengan meningkatnya jumlah IKM, jumlah pengrajin yang dibina pun juga semakin bertambah yakni sebesar 35,29 persen dan 36,42 persen secara berturut-turut. Di tahun 2019, jumlah pengrajin yang dibina mengalami penurunan yakni sebesar 19,45 persen. Namun di tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan pembinaan



pengrajin IKM yakni sebesar 43,71% dari jumlah IKM yang semakin meningkat sebesar 1144.

**Tabel 2. 158 IKM di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Pengrajin IKM yang dibina	500	530	550	318	500
Jumlah IKM	1.497	1.502	1.510	1.635	1.144

*Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, 2021*

### **2.3.4 Fokus Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan**

#### **2.3.4.1 Perencanaan Pembangunan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi, misi, dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Pada tahun 2020, capaian persentase jumlah program RKPD yang sesuai dengan RPJMD adalah 100%

**Tabel 2. 159 Tersedianya dokumen perencanaan di Kota Mojokerto  
Tahun 2016 – 2020**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	90%	90%	100%	100%	100%
Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	90%	90%	100%	100%	100%
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bappedalitbang Kota Mojokerto, 2021

### **2.3.4.2 Keuangan**

#### **a. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah**

Indeks Kapasitas Fiskal merupakan gambaran dari kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja pegawai. Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah, penilaian atas usulan pinjaman daerah, penentuan besaran dana pendamping, jika dipersyaratkan, dan/atau hal lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Tabel 2. 160 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	2,28	0,73	0,83	0,787	0,78

Sumber: BPKPD Kota Mojokerto, 2021

### b. Penilaian Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Selama tahun 2016 – 2020, Kota Mojokerto berhasil memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ini menjadi tugas semua OPD di Kota Mojokerto untuk mempertahankan dan meningkatkan sistem pengelolaan keuangan.

**Tabel 2. 161 Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKPD Kota Mojokerto, 2021

### c. Persentase SiLPA terhadap APBD

Persentase SiLPA terhadap APBD merupakan proporsi SiLPA terhadap total APBD Kota Mojokerto. Persentase SiLPA terhadap APBD Kota Mojokerto selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Pada tahun 2016 sebesar 16,93 persen, tahun 2017 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 3,77 persen. Tahun 2018 kembali meningkat sebesar 15,72 persen, berikut di tahun 2019 juga mengalami peningkatan menjadi 19,92 persen. Dan di tahun 2020 persentase SiLPA terhadap APBD turun menjadi 18,91 persen.

**Tabel 2. 162 Persentase SiLPA terhadap APBD di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase SiLPA terhadap APBD	16,93	3,77	15,72	19,92	18,91

Sumber: BPKPD Kota Mojokerto, 2021

### d. Pendapatan dan Belanja Daerah

Realisasi pendapatan Kota Mojokerto pada 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. 2017 dan 2019 sempat mengalami penurunan pendapatan, sementara pada tahun 2016, 2018, dan 2020 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah mengalami trend kenaikan dari tahun ke tahun. Sementara pajak daerah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan menjadi penyumbang terbesar dalam PAD, hanya pada tahun 2020 yang mengalami penurunan cukup signifikan dikarenakan adanya pandemic covid sehingga

pemerintah melakukan relaksasi pajak untuk beberapa sector. Adapun retribusi daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi. Berikut rincian dari pendapatan daerah Kota Mojokerto

**Tabel 2. 163 Realisasi Pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata pertumbuhan (%)
<b>PENDAPATAN</b>	806.772.000.827,56	782.331.264.434,20	887.592.875.418,26	885.966.038.008,44	886.026.211.545,94	0,01
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	152.462.202.064,56	178.295.062.136,20	182.508.304.195,27	192.695.566.219,26	231.875.337.605,94	20,33
Pajak Daerah	35.333.988.082,55	47.423.790.376,20	47.920.074.429,73	51.615.256.646,20	49.932.201.609,64	-3,26
Retribusi Daerah	13.006.473.471,46	7.661.594.955,54	9.989.500.314,07	9.897.775.510,59	10.894.179.924,50	10,07

Sumber: BPKPD Kota Mojokerto, 2021

Sumber pendapatan terbanyak Kota Mojokerto berasal dari Dana Perimbangan dengan proporsi rata-rata tahun 2016 – 2020 mencapai lebih dari 60 persen dari total pendapatan daerah. Namun, jika melihat tren proporsi Pendapatan Asli Daerah yang cenderung meningkat setiap tahunnya kecuali tahun 2018 menggambarkan bahwa Kota Mojokerto telah berusaha meningkatkan penghasilan daerah melalui pajak dan retribusi. Rincian proporsi realisasi pendapatan Kota Mojokerto dapat tersaji pada tabel di bawah ini

**Tabel 2. 164 Proporsi Pendapatan di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	Tahun				
	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
<b>PENDAPATAN</b>					
Pendapatan Asli Daerah	18,90	22,79	20,56	21,75	26,17
Dana Perimbangan	68,91	66,38	62,32	62,89	61,39
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	12,19	10,83	17,12	15,36	12,44
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: BPKPD Kota Mojokerto, 2021

Sedangkan realisasi belanja daerah Kota Mojokerto tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan fluktuasi. Di tahun 2016 realisasi Belanja Kota Mojokerto dalam 5 tahun terakhir menempati posisi tertinggi. Sedangkan tahun

2017 turun secara signifikan menjadi 739.086.252.867,78. Hal ini dikarenakan dana perimbangan dari pusat mengalami pengurangan. Di tahun 2018 jumlah belanja kota Mojokerto Kembali naik berikut di tahun 2019. Namun di tahun 2020 jumlah belanja Kembali mengalami penurunan akibat pandemic covid banyak sekali melakukan refocusing anggaran. Proporsi belanja langsung lebih besar dibandingkan dengan proporsi belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung didominasi pengeluaran oleh belanja pegawai, untuk belanja langsung di dominasi pengeluaran oleh belanja barang dan jasa.

**Tabel 2. 165 Realisasi Belanja Daerah di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata pertumbuhan (%)
<b>BELANJA</b>	944.717.143.505,53	739.086.252.867,78	808.163.334.616,20	852.084.096.739,42	804.407.047.101,88	-5,60
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	277.418.352.958,00	256.687.836.674,00	334.128.804.692,00	331.175.686.534,98	357.683.371.805,60	8,00
<b>Belanja Langsung</b>	667.298.790.547,53	482.398.416.193,78	474.034.529.924,20	520.908.410.204,44	446.723.675.296,28	-14,24

Sumber: BPKPD Kota Mojokerto, 2021

**Tabel 2. 166 Perbandingan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap APBD di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	Tahun				
	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
Belanja Langsung	71,90%	67,59%	58,66%	61,13%	55,53%
Belanja Tidak Langsung	28,10%	32,41%	41,34%	38,87%	44,47%

Sumber: BPKPD Kota Mojokerto, 2021

### 2.3.4.3 Pengawasan

Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang di antaranya berisi beragam temuan dan rekomendasi kepada entitas pengelola keuangan negara yang diantaranya pada Pemerintah Daerah. Pada tahun 2016 total temuan BPK sejumlah 11 dan rekomendasi BPK sebanyak 40, Tahun 2017 total temuan BPK sejumlah 13 dan rekomendasi BPK sebanyak 33, Tahun 2018 total temuan BPK sejumlah 15 dan

rekomendasi BPK sebanyak 50. Pada Tahun 2019 terdapat 661 temuan dan rekomendasi sebanyak 563. Sementara di tahun 2020 persentase temuan BPK meningkat menjadi 720 dan rekomendasi sebesar 611.

Sedangkan untuk APIP Inspektorat Kota Mojokerto pada tahun 2016 total temuan Inspektorat sejumlah 11 dan rekomendasi Inspektorat sebanyak 12, Tahun 2017 total temuan Inspektorat sejumlah 46 dan rekomendasi Inspektorat sebanyak 77 dan Tahun 2018 total temuan Inspektorat sejumlah 8 dan rekomendasi Inspektorat sebanyak 23. Pada tahun 2019 terdapat temuan sejumlah 215 dan rekomendasi sebanyak 209. Sedangkan tahun 2020 terdapat temuan sejumlah 242 dan rekomendasi sebesar 225.

Berikut ini adalah tabel dari capaian tidak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari BPK dan APIP Inspektorat Kota Mojokerto:

**Tabel 2. 167 Temuan dan rekomendasi BPK dan APIP di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020**

Uraian	CAPAIAN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase tindak lanjut temuan					
BPK	84,49%	85,02%	81,06%	85%	85%
APIP	100,00%	95,65%	75,00%	94%	89%
Jumlah temuan / Jumlah Rekomendasi					
BPK	11 / 40	13 / 33	15 / 50	661/563	720/611
APIP	11 / 12	46 / 77	8 / 23	215/209	242/225

Sumber : Inspektorat Kota Mojokerto, 2021

Persentase tindak lanjut BPK yang telah sesuai dengan rekomendasi pada tahun 2016 sebanyak 84,49%, tahun 2017 sebanyak 85,02%, tahun 2018 sebanyak 81,06% sedangkan tahun 2019 dan 2020 memiliki persentase yang sama yakni 85 persen. Sedangkan persentase tindak lanjut dari APIP Inspektorat Kota Mojokerto yang telah sesuai dengan rekomendasi pada tahun 2016 sebanyak 100%, tahun 2017 sebanyak 95,65%, tahun 2018 sebanyak 75%, tahun 2019 sebesar 94%, dan tahun 2020 sebesar 89%.

#### 2.3.4.4 Kepegawaian

##### a. Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi, dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan. Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Bentuk-bentuk pengembangan kompetensi yang dilaksanakan antara lain berupa pendidikan dan pelatihan baik struktural, teknis maupun fungsional. Adapun data yang menunjukkan Rata - Rata Lama Pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. 168 Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rata - Rata Lama Pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	60 -70 JP	60 -70 JP	60 -70 JP	70 JP	70 JP

Sumber: BKPSDM Kota Mojokerto, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Rata - Rata Lama Pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan adalah selama 60 sampai dengan 70 jam pelajaran. Hal ini berlaku pada setiap kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan baik struktural, teknis maupun fungsional. Maka dapat disimpulkan bahwa Rata - Rata Lama Pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

### **b. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**

Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan selama tahun 2013 sampai dengan 2018 belum didasarkan pada analisa gap kompetensi dan rencana pengembangan kompetensi. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan didasarkan pada rencana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan melalui metode pengumpulan data kebutuhan diklat yang diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Adapun perkembangan data cakupan Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional pada tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. 169 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12,67%	9,41%	2,8%	0,06%	0,14%

*Sumber: BKPSDM Kota Mojokerto, 2021*

Tabel diatas menunjukkan cakupan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang mengikuti kegiatan pendidikan pelatihan baik teknis maupun fungsional terhadap jumlah ASN yang ada. Tampak bahwa persentase tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan persentase sebesar 12,67%.

### **c. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa seorang ASN dapat menduduki jabatan-jabatan struktural yang meliputi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan pengawas apabila telah memenuhi standar kompetensi jabatan. Adapun standar kompetensi jabatan disini terdiri atas kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural. Kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Pendidikan dan pelatihan struktural (diklat kepemimpinan)



sangat menunjang seorang ASN untuk dapat meningkatkan kompetensi manajerialnya. Adapun data ASN di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural pada tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. 170 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	94,22%	0%	86,90%	0%	0,59%

Sumber: BKPSDM Kota Mojokerto, 2021

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 – 2020 terdapat fluktuasi jumlah pejabat ASN yang mengikuti diklat struktural. Perkembangan ini disebabkan karena adanya promosi jabatan yang terjadi selama kurun waktu tersebut. Untuk tahun 2017 dan 2019 jumlah pejabat ASN yang mengikuti diklat struktural adalah 0 persen dikarenakan pada tahun tersebut tidak dilaksanakan Pendidikan dan pelatihan struktural untuk pimpinan. Sementara di tahun 2020 terjadi refocusing anggaran sehingga pelaksanaan diklat struktural untuk pejabat ASN pun juga sangat terbatas.

#### **d. Jumlah Pemangku Jabatan - Jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah**

Selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 terdapat perubahan jumlah pemangku jabatan-jabatan peminanan tinggi pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Adapun data tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. 171 Jumlah Pemangku Jabatan - Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pemangku Jabatan - Jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	28	28	29	26	21

Sumber: BKPSDM Kota Mojokerto, 2021

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa terdapat kecenderungan peningkatan jumlah pejabat pimpinan tinggi antara tahun 2016 sampai dengan 2018. Hal ini disebabkan karena adanya pengisian jabatan-jabatan pimpinan tinggi yang kosong yang dilaksanakan melalui seleksi terbuka. Sementara di tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan pemangku jabatan pimpinan tinggi secara berturut-turut yakni 26 dan 21.

#### **e. Jumlah Pemangku Jabatan administrasi pada instansi pemerintah**

Selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2019 terdapat perubahan Jumlah Pemangku Jabatan administrasi pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Jabatan administrasi sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan administrasi terdiri atas Jabatan Administrator dan pengawas. Adapun data tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. 172 Jumlah Pemangku Jabatan administrasi pada instansi pemerintah di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Jumlah Pemangku Jabatan administrasi pada instansi pemerintah	112	105	99	104	103

*Sumber: BKPSDM Kota Mojokerto, 2021*

Dari data tersebut dapat diketahui adanya fluktuasi perubahan jumlah pejabat pimpinan tinggi antara tahun 2016 sampai dengan 2020. Dan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 terjadi penurunan, karena adanya pejabat yang telah memasuki usia pensiun pada tahun tersebut. Akan tetapi mengalami peningkatan di tahun 2019, dan sedikit mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 103 orang.

#### **f. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah**

Selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 terdapat perubahan Jumlah Pemangku Jabatan fungsional tertentu pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Jabatan fungsional tersebut

terdiri dari jabatan fungsional di bidang pendidikan, kesehatan pertanian, keluarga berencana dan lain sebagainya. Adapun data tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. 173 Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	1.342	1.333	1.279	1.046	1.397

*Sumber: BKPSDM Kota Mojokerto, 2021*

#### **g. Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)**

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan kelembagaan, ketatalaksanaan, profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalitas ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Pengukuran indek profesionalitas diperlukan guna mengetahui tingkat kesesuaian antara kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan. Indeks profesionalitas ASN adalah salah satu cara mendekati kualitas ASN dengan menggunakan indeks komposit dari beberapa indikator output yang bersifat independen. Pengukuran indikator outcome dengan menggunakan *composite index* sangat umum digunakan oleh para perencana dan evaluator.

Indikator yang digunakan untuk mengukur indek profesionalitas ASN adalah kompetensi, kinerja, kompensasi, dan disiplin.

- Kompetensi dapat didekati dengan data potensi dalam e-PUPNS dari unsur pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan teknis, dan pelatihan administratif.
- Kinerja didekati dengan data SKP yang dibuat secara daring (online) per tahun.
- Kompensasi (gaji dan tunjangan kinerja) didekati dengan daftar gaji dan tunjangan kinerja sesuai level jabatan dari hasil evaluasi jabatan.
- Disiplin pegawai didekati dengan data-data instansi pemerintah yang telah menerapkan organisasi modern (*e-government*).

Pada tahun 2017 Badan Kepegawaian Kota Mojokerto telah melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas PNS di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. PNS yang menjadi obyek pengukuran adalah pejabat struktural mulai eselon II, III, IV dan V. Adapun hasil IPP Pemkot Mojokerto tahun 2017 adalah 83,93 yang didapatkan dari data BKD Kota Mojokerto. Sementara di tahun 2020 IPP Kota Mojokerto sebesar 63 yang didapat dari hasil perhitungan Badan Kepegawaian Negara

**Tabel 2. 174 Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) di Kota Mojokerto  
Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)	-	83,93	n/a	n/a	63

*Sumber: Badan Kepegawaian Negara, 2021*

#### 2.3.4.5 Adminisrasi Pemerintahan

##### a. Persentase Pelayanan Keprotokolan

Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan di dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.

**Tabel 2. 175 Persentase Pelayanan Keprotokolan di Kota Mojokerto  
Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pelayanan Keprotokolan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

*Sumber: Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Mojokerto, 2021*

Selama lima tahun terakhir persentase pelayanan keprotokolan menunjukkan capaian 100 persen. Hal ini dilihat dari pelayanan Protokoler pada setiap kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan daerah yaitu Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa penyelenggaraan suatu acara berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai

dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional.

### **b. Nilai SAKIP**

LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 nilai SAKIP konsisten mendapat B. Hal ini menandakan akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kota Mojokerto sudah semakin baik.

**Tabel 2. 176 Nilai SAKIP Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Nilai SAKIP	B	B	B	B	B

*Sumber: Bag. Organisasi Setda Kota Mojokerto, 2021*

### **c. Peringkat LPPD**

LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Kinerja yang terbaik bukan ditetapkan berdasarkan standard, melainkan melalui proses perbandingan antara Pemerintah Daerah, jadi bisa saja terjadi yang terbaik diantara yang terjelek dalam pengisian realisasi capaian masing-masing. Selama tiga tahun yakni tahun 2016-2018, nilai LPPD Kota Mojokerto adalah sangat tinggi artinya pembangunan di Kota Mojokerto benar-benar dirasakan

oleh masyarakat. Nilai LPPD tahun 2018 baru diterbitkan pada tanggal 25 April 2020, sementara nilai LPPD tahun 2019 dan 2020 belum muncul.

**Tabel 2. 177 Peringkat LPPD Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Peringkat / Ranking LPPD Tingkat Nasional Kategori Kota	Sangat Tinggi Ranking 10 Nilai 3,0931	Sangat Tinggi Ranking 4 Nilai 3,3407	Sangat Tinggi Ranking 34 Nilai 3,1683	n/a	n/a

*Sumber: Bag. Pemerintahan Setda Kota Mojokerto, 2021*

#### **d. Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Baik Litigasi dan Non Litigasi serta Perkara Perdata maupun PTUN**

Persentase penyelesaian permasalahan hukum baik litigasi dan non litigasi serta perkara perdata maupun PTUN merupakan proporsi permasalahan hukum baik litigasi dan non litigasi serta perkara perdata maupun PTUN yang diselesaikan terhadap seluruh permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Mojokerto.

**Tabel 2. 178 Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Baik Litigasi dan Non Litigasi serta Perkara Perdata maupun PTUN Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Baik Litigasi dan Non Litigasi serta Perkara Perdata maupun PTUN	120%	80%	60%	80%	233%

*Sumber: Bag. Organisasi Setda Kota Mojokerto, 2019*

#### **e. Kinerja BUMD**

##### **1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Maja Tirta**

- Bergerak di bidang penyediaan air bersih
- Didirikan berdasarkan berdasarkan Peraturan Kotamadya No. 5 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Air Minum
- Memiliki total pegawai sebanyak 35 orang dengan tingkat Pendidikan S2 sebanyak 1 orang, SMA 32 orang, dan SMP 2 orang.

4. Memiliki total cakupan daerah pelayanan Perumdam Majatirta yaitu seluruh wilayah Kota Mojokerto dengan jumlah pelanggan sebesar 5.361 SR per Agustus 2020

**Tabel 2. 179 Daerah Pelayanan Perumdam Majatirta**

<b>Golongan</b>	<b>Jumlah</b>
NA-V	100
NA-VA	5
NA-VI	23
NI-VIIA	1
NI-VIII	2
NN-IIIA	681
NN-IIIB	3353
NN-IIIC	1110
NN-IIID	13
NN-IVA	9
NN-IVB	45
NN-IVC	4
NN-IX	1
SS-I	3
SS-II	11
<b>Total</b>	<b>5361</b>

5. Jumlah Pendapatan usaha per 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp. 1.056.166.520,00. Dan Laba-(Rugi) Triwulan I Tahun 2020 sebesar Rp. 892.239.710.

## **II. PT. BPRS Bank Syariah Kota Mojokerto**

1. Bergerak di bidang perbankan
2. Legalitas PT. BPRS Kota Mojokerto

<b>Nama</b>	<b>PT. BPRS Kota Mojokerto</b>
Bidang Usaha	Perbankan
Akta Pendirian	No. 1 Tanggal 11 Februari Tahun 2011, Notaris Ermawati, SH.
Dasar Hukum Pendirian	- PERDA Kota Mojokerto No. 6 Tahun 2009 - Akta Notaris Ermawati No. 1 tanggal 11 Februari 2011, Kemenkumham Nomor AHU-21075.AH.01.01 Tahun 2011
Anggaran Dasar Terakhir	Akta No. 24 Tanggal 29 Juli 2019, Notaris Peni Nuswantari S.H., M.Kn. Kemenkumham Nomor AHU-0044328.AH.01.02 Tahun 2019
Nomor Induk Berusaha (NIB)	9120402703319
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	31.286.385.5-602.000

3. Memiliki jaringan Kantor Pusat dan Cabang yang berada di Jl. Mojopahit No. 382 Kota Mojokerto
4. Pemegang Saham dari PT. BPRS Kota Mojokerto adalah Pemerintah Kota Mojokerto (Pemegang Saham Pengendali) dan KPRI Trimadya.
5. Laporan Perkembangan Kinerja PT. BPRS Kota Mojokerto

Akun	2015	2016	2017	2018	2019
Asset	65.660.693.800	76.010.020.277	92.742.887.181	135.736.091.124	163.589.153.983
Pembiayaan	40.655.174.606	47.113.629.234	72.722.423.680	115.003.599.931	135.759.597.328
DPK	18.332.752.696	23.651.334.435	39.040.467.900	53.149.334.027	73.280.294.080
Modal	10.272.462.999	13.772.462.999	13.772.462.999	13.772.462.999	13.772.462.999
Pendapatan	8.825.190.532	10.633.106.268	14.407.107.849	20.573.000.699	22.655.671.529
Biaya	8.127.473.618	9.692.983.902	13.091.563.995	18.059.130.902	20.114.172.495
Laba	697.716.914	940.122.367	1.315.543.854	2.513.869.796	2.541.499.034
NPF	2.02	5.64	3.98	2.85	3.98



## 6. Laporan Permodalan PT. BPRS Kota Mojokerto

NO	TAHUN	MODAL			NOMINAL	KETERANGAN
		PEMERINTAH KOTA (99%)		KPRI Trimadya (1%)		
		TUNAI	BARANG	TUNAI		
1	2011	2,000,000,000		20,000,000	2,020,000,000	Sesuai dengan surat BI No. 13/111/Dpbs/Sb
2	2011	2,144,350,000		21,443,500	2,165,793,500	Sesuai dengan surat BI No. 13/183/Dpbs/Sb
3	2012	2,000,000,000		20,000,000	2,020,000,000	Sesuai dengan surat BI Bo. 14/81/Dpbs/sb
4	2012	500,000,000		17,709,599	517,709,599	Sesuai dengan surat OJK No: S-81/KR,312/2014
5	2012	48,959,900			48,959,900	Belanja Konsultasi
6	2013		1,222,000,000		1,222,000,000	Penyertaan modal berupa tanah dan bangunan yang masih dalam proses (Imbreg gedung)
7	2014	3,465,000,000		35,000,000	3,500,000,000	Sesuai dengan surat OJK No: S-21/KR,312/2015
8	2015	3,465,000,000			3,465,000,000	Sesuai dengan surat OJK No: S-24/KR,0412/2016
9	2016			35,000,000	35,000,000	Sesuai dengan surat OJK No: S-24/KR,0412/2016
Total Keseluruhan		13,623,309,900	1,222,000,000	149,153,099	14,994,462,999	
Total yang disetujui Ojk			13,623,309,900	149,153,099	13,772,462,999	Total Modal yang Telah di Catat Ojk Tahun 2016

### f. Sekretariat DPRD

Salah satu fungsi dari Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi anggota DPRD Kota Mojokerto untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat. Pada tahun 2016, indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD mencapai 85, mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 87 dan di tahun 2018 menjadi 90. Sedangkan pada tahun 2019 turun menjadi 80 persen. Namun di tahun 2020, IKM DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD meningkat cukup signifikan menjadi 94. Hal ini menandakan bahwa kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi Anggota DPRD sudah baik.

**Tabel 2. 180 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	85	87	90	80	94

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Mojokerto, 2021

Alat – alat kelengkapan DPRD Kota Mojokerto terdiri dari Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Komisi, Badan Kehormatan dan Pimpinan. Alat Kelengkapan DPRD mengatur tata kerjanya sendiri dengan persetujuan pimpinan DPRD. Dalam melaksanakan

tugas dan wewenangnya alat kelengkapan DPRD menyusun rencana Kerja dan anggaran yang di tindaklanjuti dalam badan anggaran. Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat DPRD. Pada tahun 2016 sampai dengan 2020 rencana kerja tahunan setiap alat kelengkapan DPRD Kota Mojokerto sudah tersedia atau sudah ada. Hal ini dapat di lihat dari jumlah rencana kerja tahunan setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kota Mojokerto yang sudah terlaksana.

**Tabel 2. 181 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

*Sumber: Sekretariat DPRD Kota Mojokerto, 2021*

Dalam melaksanakan progam-progam kerja DPRD agar dapat tersusun dan terintegrasi sesuai dengan fungsi DPRD yang memiliki tiga Fungsi yaitu Fungsi Pembentukan Perda, Fungsi Anggaran berkaitan dengan kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) dan Fungsi Pengawasan berkaitan dengan kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Dalam hal ini sekretariat DPRD membantu memfasilitasi anggaran progam-progam kerja DPRD dapat tersusun dan terintegrasi melalui rapat dengar pendapat umum dan sidak yang sudah terlaksana dengan baik dari tahun 2016 sampai dengan 2020.

**Tabel 2. 182 Tersusun dan terintegrasinya Progam-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Tersusun dan terintegrasinya Progam-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

*Sumber: Sekretariat DPRD Kota Mojokerto, 2021*

Dalam terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi DPRD yang meliputi Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran sekretariat DPRD. Dalam Hal ini dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sudah terintegrasi.

**Tabel 2. 183 Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Mojokerto, 2021

#### 2.3.4.6 Penelitian dan Pengembangan

Bahwa dikaitkan dengan berbagai persoalan dan perkembangan isu strategis, maka keberadaan dan peran penelitian dan pengembangan, semestinya dapat menjadi sangat penting dan strategis. Adapun hasil-hasil penelitian dan pengembangan kiranya dapat dijadikan rekomendasi kebijakan atas dasar research policy yang akan ditetapkan oleh para penyelenggara pemerintahan serta sebagai kebijakan strategis yang secara tepat mampu mengakomodir kepentingan dan aspirasi masyarakat berdasarkan penelitian kebijakan. Adapun terkait dengan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di Kota Mojokerto, berikut disajikan data tahun 2016-2020:

**Tabel 2. 184 Penyelenggaraan LITBANG Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Up Dating Penelitian	48 Judul	72 Judul	53 Judul	60 Judul	41 Judul
2	Implementasi rencana kelitbangan	9	9	4	13	4

Sumber: Bappedalitbang Kota Mojokerto, 2021

Berdasarkan tabel data diatas terlihat bahwa permasalahan dan kepentingan yang dimajukan untuk penelaahan melalui kegiatan penelitian mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat animo dan perhatian dari Pemerintah Kota Mojokerto untuk menuntaskan permasalahan berdasarkan analisis yang terencana dan terukur, dalam melayani kepentingan publik. cukup baik. Adapun untuk jumlah implementasi rencana kelitbangan terbaca statis, hal tersebut dikarenakan kemampuan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penelitian hanya cukup untuk jumlah sebagaimana tabel data diatas.

Adapun capaian urusan kelitbangan Pemerintah Kota Mojokerto tahun 2019 – 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 185 Capaian Urusan LITBANG Tahun 2019 – 2020**

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Target 2019	Capaian 2019	Target 2020	Capaian 2020
1	Penelitian	Tersedianya hasil penelitian yang komprehensif	13	13	4	4
2	Diseminasi	Hasil Penelitian yang tersosialisasikan	13	10	3	3
3	Pengembangan	Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Daerah	-	-	-	-

*Sumber: Bappedalitbang Kota Mojokerto, 2021*

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian urusan litbang berupa tersedia hasil penelitian yang komprehensif dari tahun 2019 dan 2020 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Tahun 2019 penelitian yang tersedia sebanyak 13, namun di tahun 2020 terjadi penurunan target dan capaian yakni hanya terdapat 4 jumlah penelitian. Hal ini disebabkan karena adanya refocusing anggaran sehingga jumlah penelitian menjadi berkurang cukup signifikan. Adapun pelaksanaan desiminasi di tahun 2020 juga terdampak refocusing anggaran sehingga yang tersosialisasikan hanya 3 penelitian saja.

Tidak semua hasil dari up dating rencana penelitian dapat diwujudkan, dan hal ini perlu menjadi perhatian bersama. Adapun perlu disampaikan pula bahwa hasil daripada penelitian adalah bersifat informasi yang diperoleh dari analisa dan penelitian, sehingga dengan demikian:

1. Bahwa apabila dari rekomendasi hasil penelitian menyatakan perlu untuk ditindaklanjuti dengan suatu program kegiatan, maka kiranya akan nampak hasil penelitian secara positif aktif;
2. Bahwa apabila dari rekomendasi hasil penelitian menyatakan tidak perlu untuk ditindaklanjuti dengan suatu program kegiatan, maka kiranya nampak hasil penelitian secara positif negatif;

Adapun terkait dengan kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah, Pemerintah Kota Mojokerto dalam kurun waktu terakhir melaksanakan sebuah inovasi program yang digagas oleh OPD sesuai kebutuhan masing-masing. Pada tahun 2019 jumlah inovasi yang dibuat oleh OPD di Kota Mojokerto ada sebanyak 133 inovasi, sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan akibat refocusing anggaran menjadi 55 inovasi. Pemerintah Kota Mojokerto saat ini melalui Bappedalitbang masih Menyusun roadmap sebuah penelitian terintegrasi untuk bisa dijadikan sebuah inovasi dan diterapkan kepada masing-masing OPD.

## 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

### 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

#### 2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Kesejahteraan rakyat secara ekonomi salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendapatannya. Masyarakat yang pendapatannya lebih besar secara umum dapat diartikan lebih sejahtera dibanding mereka yang pendapatannya rendah. Sejalan dengan pendapatan, pengeluaran penduduk juga mencerminkan kesejahteraannya, dengan asumsi pengeluaran yang besar tentunya mereka juga mempunyai pendapatan yang besar pula.

**Tabel 2. 186 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita di Kota Mojokerto dan Jawa Timur Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Mojokerto	1.090.676	1.168.780	1.240.028	1.308.790	1.406.880
Jawa Timur	870 412	938 801	1.006.078	1.036.177	1.064.381

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2021*

Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), rata rata pengeluaran perkapita penduduk Kota Mojokerto tahun 2016 – 2020 terus mengalami peningkatan. Yang mana di tahun 2016 angka tersebut mencapai 1.090.676 di tahun 2020 menjadi 1.406.880. Peningkatan pengeluaran konsumsi penduduk ini salah satunya juga dikarenakan adanya peningkatan upah gaji yang mereka terima, seperti adanya kenaikan gaji pegawai, upah buruh dan lain lain. Hal lain yang juga mendorong peningkatan konsumsi adalah adanya peningkatan inflasi atas barang dan jasa, yang pada akhirnya memaksa penduduk untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rata rata pengeluaran perkapita penduduk Kota Mojokerto terus berada di atas Jawa Timur setiap tahunnya.

#### 2.4.1.2 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Secara umum manusia selalu akan memenuhi kebutuhan hidupnya akan barang dan jasa. Kebutuhan untuk kelangsungan hidup tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu, kelompok makanan dan non makanan. Dalam memenuhi kebutuhan makan terdapat batas tertentu kebutuhan manusia, namun sebaliknya untuk kebutuhan manusia akan barang non makanan tidak ada batasnya. Semakin tinggi tingkat pendapatan/ kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk kebutuhan makanan akan menurun, sebaliknya proporsi untuk non makanan semakin meningkat.

**Tabel 2. 187 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita di Kota Mojokerto dan Jawa Timur Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Mojokerto	58,31	55,85	54,90	55,36	55,70
Jawa Timur	50,92	49,21	n/a	51,47	51,00

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2021*

Kalau diperhatikan komposisi persentase antara makanan dan non makanan penduduk Kota Mojokerto dalam kurun waktu lima tahun (2016 - 2020) sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan. Kondisi ini memberikan gambaran adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena dengan semakin meningkatnya perbaikan ekonomi, maka

pengeluaran untuk bukan makanan akan semakin tinggi dibanding pengeluaran untuk makanan.

Pada tahun 2020 proporsi pengeluaran penduduk Kota Mojokerto untuk non pangan sebesar 55,70 persen, relatif lebih besar dibanding untuk kebutuhan makanan. Terjadi fluktuasi pertumbuhan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kota Mojokerto, tahun 2016 - 2018 mengalami tren penurunan tetapi di tahun 2019 mengalami kenaikan, disusul tahun 2020 juga mengalami kenaikan yang tidak signifikan. Apabila dibandingkan dengan Jawa Timur, Kota Mojokerto masih berada di atas.

#### 2.4.1.3 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibanding dengan barang/jasa yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

**Tabel 2. 188 Nilai Tukar Petani di Kota Mojokerto dan Jawa Timur  
Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Mojokerto	101,10	101,25	101,50	n/a	n/a
Jawa Timur	104,62	104,10	100,00	101,17	100,77

*Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2021*

NTP Kota Mojokerto dalam kurun waktu 2016 – 2018 secara umum mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, NTP Kota Mojokerto sebesar 101,10 kemudian pada tahun 2018 sebesar 101,50. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tukar produk pertanian terhadap barang konsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi tahun 2018 secara umum masih lebih baik dibanding kondisi tahun 2016. Adapun NTP Kota Mojokerto pada tahun 2019 dan 2020 sudah tidak dihitung lagi oleh BPS Kota Mojokerto

## 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

### 2.4.2.1 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan adalah rasio antara panjang ruas jalan Kota yang diaspal dengan jumlah kendaraan di wilayah Kota Mojokerto. Semakin tinggi rasio menunjukkan kepadatan ruas jalan Kota. Berikut merupakan data yang dimaksud:

**Tabel 2. 189 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	0,0018 (1:549)	0,0015 (1:669)	0,0014 (1:695)	0,0014 (1:736)	0,0017 (1:566)

*Sumber: Dinas Perhubungan Kota Mojokerto (data diolah), 2021*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio perbandingan antara panjang jalan dan jumlah kendaraan di Kota Mojokerto paling rendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 1:549 atau sebesar 0,0018. Sedangkan rasio paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 1:736 atau 0,004. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2019 kepadatan jalan di Kota Mojokerto mengalami kondisi paling tinggi pada lima tahun terakhir. Tingginya kepadatan jalan pada tahun 2019 tersebut disebabkan karena pesatnya pertumbuhan kendaraan, terutama kendaraan roda dua, dibandingkan pertumbuhan panjang jalan di Kota Mojokerto. Kondisi yang diharapkan adalah adanya penambahan panjang jalan di Kota Mojokerto yang dapat mengimbangi pertumbuhan kendaraan sehingga kepadatan jalan dapat berkurang. Di tahun 2020 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan mengalami penurunan. Penurunan ini diakibatkan oleh jumlah kepemilikan kendaraan pribadi berkurang, sehingga kepadatan jalan menjadi berkurang

### 2.4.2.2 Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum adalah jumlah orang/penumpang yang berada di Terminal Kertajaya.

**Tabel 2. 190 Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum	2.285.729	2.043.188	1.800.647	1.437.757	1.883.995

*Sumber: Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, 2021*



Dari tabel diatas jumlah orang yang terangkut angkutan umum selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tahun 2016 – 2019 cenderung mengalami penurunan, namun di tahun 2020 ada kenaikan sebesar 31 persen menjadi 1.883.995.

#### 2.4.2.3 Jumlah Orang yang Melalui Terminal

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum adalah jumlah orang/penumpang yang berada di Terminal Kertajaya.

**Tabel 2. 191 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum	2.285.729	2.043.188	1.800.647	1.437.757	1.883.995

*Sumber: Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, 2021*

Dari tabel diatas jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tahun 2016 – 2019 cenderung mengalami penurunan, namun di tahun 2020 ada kenaikan sebesar 31 persen menjadi 1.883.995.

#### 2.4.2.4 Pemenuhan Akses Layak Air Mnum/Air Bersih

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Adapun persentase pemenuhan akses layak air minum di Kota Mojokerto adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. 192 Persentase Pemenuhan Akses Layak Air Minum**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pemenuhan Akses Layak Air Minum	63%	94,50%	93%	93,69%	94,58%

*Sumber: DPUPRRKP Kota Mojokerto, 2021*

Dari tabel diatas terlihat bahwa pemenuhan akses layak air minum di Kota Mojokerto mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Data capaian dalam 2 tahun terakhir menunjukkan angka yang bagus yakni 93,69 persen pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 94,58 persen di tahun 2020. Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit

#### **2.4.2.5 Rasio Ketersediaan Listrik**

Rasio Ketersediaan listrik juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2016 ketersediaan listrik 1.17 dan meningkat menjadi 62.48 pada tahun 2020. Jenis dan kapasitas pembangkit listrik dapat mempengaruhi besarnya listrik yang diproduksi baik pada waktu siang maupun malam. Faktor yang berpengaruh terhadap produksi listrik per jenis pembangkit adalah faktor kapasitas pembebanan baik sebagai beban dasar maupun beban puncak, karakteristik pembebanannya sendiri termasuk daya mampu, dan waktu operasi unit pembangkit listrik. Waktu operasi adalah jam operasi maksimum dalam 1 tahun dikurangi dengan penghentian terjadwal dan perkiraan penghentian tak terjadwal. Faktor tersebut dapat menyebabkan total produksi listrik per jenis pembangkit listrik pada waktu siang dan malam hari berbeda. Besarnya produksi listrik selama kurun waktu yang telah ditentukan dapat memberi gambaran besarnya pasokan listrik dalam pemenuhan kebutuhan listrik nasional. Walaupun demikian tidak semua kebutuhan listrik dapat dipenuhi, oleh karena itu masih ada kebutuhan listrik yang tertahan dan tidak dapat dipenuhi oleh pembangkit listrik PLN. Kondisi ini merupakan gambaran umum dari Kota Mojokerto yang sedang berkembang, dimana penyediaan listrik bukan

merupakan pemenuhan kebutuhan riil seluruhnya tetapi lebih merupakan kemampuan untuk membangkitkan dan mendistribusikan listrik ke masyarakat Kota Mojokerto.

**Tabel 2. 193 Ketersediaan Daya Listrik Kota Mojokerto 2016-2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio ketersediaan daya listrik	1,17	1,17	-	23,57	62,48

*Sumber: Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Mojokerto, 2021*

#### 2.4.2.6 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Energi listrik menjadi kebutuhan utama atau primer dalam kehidupan masyarakat sehari – hari. Akses terhadap kebutuhan energy listrik menjadi salah satu tolak ukur pembangunan daerah. Nilai persentase rumah tangga yang menggunakan atau akses listrik PLN di Kota Mojokerto pada tahun 2016 sebesar 99.63% dan bergerak meningkat secara bertahap menjadi 100 % pada tahun 2020. Hal itu menunjukkan seluruh rumah tangga/penduduk Kota Mojokerto pada tahun 2020 telah mendapatkan akses listrik dari PLN.

**Tabel 2. 194 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kota Mojokerto 2016-2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik	99.63	99.69	99.81	99.82	100

*Sumber: BPS Jawa Timur, 2021*

### 2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

#### 2.4.3.1. Angka Kriminalitas

Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku serta norma-norma sosial dan agama. Angka kriminalitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kejadian kriminalitas yang terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu. Tindak kejahatan/kriminalitas dapat terjadi karena adanya kepincangan sosial, tekanan mental, dan kebencian. Selain itu juga karena adanya perubahan masyarakat dan kebudayaan yang cepat tetapi tidak dapat

diikuti oleh seluruh anggota masyarakat, sehingga tidak terjadi penyesuaian yang sempurna.

**Tabel 2. 195 Angka Kriminalitas Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Angka kriminalitas	18,9	24,3	28,1	20,2	16,2

*Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka (data diolah)*

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Timur, angka kriminalitas ditunjukkan melalui jumlah tindak kriminal yang terjadi selama satu tahun per 10.000 penduduk. Dalam rentang tahun 2016-2020 angka kriminalitas cenderung fluktuatif yaitu dari 18,9 di tahun 2016, naik menjadi 24,3 di tahun 2017, dan naik lagi menjadi 28,1 dan di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 20,2. Ini berarti selama satu tahun terakhir terjadi penurunan angka kriminalitas. Angka kriminalitas sebesar 20,2 menunjukkan bahwa terjadi sekitar 20 tindak kriminal di antara 10.000 penduduk per tahunnya. Pada tahun 2020 angka kriminalitas menurun menjadi 16,2, artinya dalam kurun waktu tahun 2020 jumlah kriminalitas yang ada di Kota Mojokerto sebanyak 210 kasus. Dari lima tahun terakhir angka kriminalitas tertinggi terjadi pada tahun 2018, yang mana kasus yang mendominasi adalah perkara pencurian yang terdiri dari curanmor sebanyak 41 perkara, curas 1 perkara, curat 30 perkara, dan curbis 23 perkara. Dari total perkara sebanyak 189 yang baru terselesaikan hanya 120 perkara. Hal ini disebabkan banyaknya jumlah kasus perkara yang muncul di tahun 2018 tetapi tidak diimbangi dengan jumlah aparaturnya yang ada.

#### **2.4.3.2. Jumlah Demontrasi**

Jumlah demonstrasi/unjuk rasa adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun. Semakin sedikit jumlah demonstrasi yang terjadi dalam suatu daerah, maka menunjukkan stabilitas politik yang terjaga. Jumlah demonstrasi di Kota Mojokerto selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 Jumlah demonstrasi di Kota Mojokerto sebanyak 11 aksi, kemudian tahun 2017 naik sedikit menjadi 12 aksi. Sementara di tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 6 aksi, dan 2019 turun Kembali menjadi 5 aksi. Sementara di tahun 2020 naik sedikit menjadi 7 aksi. Stabilitas keamanan di Kota

Mojokerto cenderung stabil dan aman. Mengingat jumlah unjuk rasa di Kota ini cukup terkendali.

**Tabel 2. 196 Jumlah Demonstrasi di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah demonstrasi	11	12	6	5	7

*Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, 2021*

#### 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

##### 2.4.3.1 Kualitas Tenaga Kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Tahun 2015 merupakan awal diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Ada beberapa dampak dari konsekuensi MEA, yakni dampak aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal. Dalam menghadapi tantangan ini tentunya Sumber Daya Manusia (SDM) harus disiapkan supaya tidak kalah dengan SDM dari negara Asean lainnya. Begitu juga Provinsi Jawa Timur tentunya juga tidak mau kalah dalam menyiapkan SDM yang ada. Salah satu mengukur potensi SDM di suatu wilayah adalah melihat dengan tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas SDM yang ada. Tingkat pendidikan penduduk yang digunakan sebagai ukuran adalah Sarjana (D4/S1 keatas), hal ini dikarenakan tingkat pendidikan D4/S1 keatas merupakan tingkatan tertinggi dari jenjang pendidikan.

**Tabel 2. 197 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio lulusan S1/S2/S3	838	851	871	887	907

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2021 (diolah)*

Dalam lima tahun terakhir (2016-2020) proporsi penduduk di Kota Mojokerto yang berpendidikan D4/S1 keatas semakin meningkat dari 838 per 10.000 penduduk pada tahun 2016 menjadi 907 per 10.000 penduduk di tahun 2020. Bila dilihat dari data tersebut, maka kualitas SDM di Kota Mojokerto semakin baik.

### 2.4.3.2 Tingkat Ketergantungan (rasio ketergantungan)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun karena umumnya sudah melewati masa pensiun. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan dapat dihitung dengan perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

**Tabel 2. 198 Rasio Ketergantungan Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio ketergantungan	42,79	42,69	42,54	43,98	44,29

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2021 (diolah)

Pada tahun 2019, angka *dependency ratio* untuk Kota Mojokerto sebesar 43,98 yang artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 43-44 orang penduduk usia non produktif. Di tahun 2020, angka rasio ketergantungan kembali meningkat menjadi 44,29. Yang artinya 100 penduduk usia produktif menanggung 44 orang non produktif. Idealnya angka *dependency ratio* menunjukkan penurunan, yang berarti bahwa semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

**Tabel 2. 199 Hasil Analisis Gambaran Umum Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
<b>A</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>							
	<b>1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>							
	1.1. Pertumbuhan Ekonomi	5,77	5,65	5,80	5,65	-3,69	5,6-6,0	Belum tercapai
	1.2. Laju Inflasi	1,3	3,44	1,97	1,83	1,93	2,5	Melampaui
	1.3. Indeks Gini	0,37	0,39	0,341	0,309	0,355	0,36	Melampaui
	1.4. Persentase Penduduk Miskin	5,73	5,73	5,50	5,15	6,24	5,25-5,70	Belum tercapai
	1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,33	3,61	2,45	2,65	6,74	2,4-3,5	Belum tercapai
	1.6. Indeks Pengeluaran Per Kapita	-	-	0,797	0,797	0,793	0,80	Belum tercapai
	<b>2. Fokus Kesejahteraan Sosial</b>							
	2.1. Indeks Pendidikan	-	-	0,72	0,725	0,730	0,732	Belum tercapai
	2.2. Indeks Kesehatan	-	-	0,81	0,818	0,820	0,818	Malampaui
	2.3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	93,40	93,05	93,18	93,26	93,50	Belum tercapai
	2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,38	76,77	77,14	77,96	78,04	78,00	Melampaui
	2.5. Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	-	-	-	76.16	76.20	63	Melampaui

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
	<b>3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga</b>							
	3.1. Jumlah apresiasi seni dan budaya	-	-	-	8	0	13	Belum tercapai
<b>B</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>							
	<b>1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Dasar</b>							
	<b>1.1. Pendidikan</b>							
	1.1.1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9,93	9,98	9,99	10,24	10,25	10,25	Sesuai
	1.1.2. Angka Harapan Lama Sekolah	13,80	13,81	13,82	13,83	14,00	14,00	Sesuai
	<b>1.2. Kesehatan</b>							
	1.2.1. Angka Harapan Hidup	72,78	72,86	73,01	73,21	73,32	73,12	Melampaui
	1.2.2. Angka Kematian Ibu	47,3	48	0	94	189	189,39	Sesuai
	1.2.3. Angka Kematian Bayi	5,33	3,8	2,34	3,75	4,26	4,26	Sesuai
	<b>1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>							
	1.3.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik/mantap	27%	86,77%	84,60%	86,40%	91,60%	80%	Melampaui
	1.3.2. Persentase penurunan luas wilayah rawan genangan (genangan tidak lebih dari 2 jam)	-	-	80%	80%	82%	80%	Melampaui
	1.3.3. Persentase fasilitas publik dalam kondisi baik	-	-	80%	80%	86,67	80%	Melampaui
	<b>1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>							



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
	1.4.1. Persentase Pemenuhan Akses Layak Sanitasi	30%	94,05%	35%	95,48%	97,34%	96,84%	Melampaui
	1.4.2. Persentase Pemenuhan Akses Layak Air Minum	63%	94,50%	63%	93,69%	94,58%	94,74%	Belum tercapai
	1.4.3. Prosentase penurunan kawasan kumuh	-	-	-	100%	100%	100%	Sesuai
	1.4.4. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	93,59%	100%	100%	Sesuai
	<b>1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>							
	1.5.1. Persentase Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai
	1.5.2. Persentase Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai
	1.5.3. Persentase menurunnya gangguan kamtibmas	91,00	94,88	88,17	82,66	21%	20%	Sesuai
	<b>1.6. Sosial</b>							
	1.6.1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	88%	90%	95%	82,11%	100%	100%	Sesuai
	1.6.2. Persentase PMKS yang tertangani	88%	90%	95%	95%	100%	100%	Sesuai
	1.6.3. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	88%	90%	95%	95%	100%	100%	Sesuai
	1.6.4. Persentase korban bencana yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
	mendapatkan bantuan							
	1.6.5. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	10%	86%	84%	71,11%	95%	95%	Sesuai
	1.6.6. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	40%	100%	100%	Sesuai
<b>2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Dasar</b>								
<b>2.1. Tenaga Kerja</b>								
	2.1.1. Persentase Ppenyerapan tenaga kerja	-	-	-	97,35%	93,26%	97,15%	Belum tercapai
<b>2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>								
	2.2.1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	82,00	82,10	83,74	90,59	83	Melampaui
<b>2.3. Pangan</b>								
	2.3.1. Skor Pola Pangan harapan (PPH)	-	-	84,3	89,9	91,4	89,9	Melampaui
<b>2.4. Lingkungan Hidup</b>								
	2.4.1. Indeks kualitas Air	54,17	47	47,14	50,95	50	50-52	Sesuai
	2.4.2. Indeks kualitas Udara	55,55	86	87,64	80,57	81,45	80,57-80,64	Melampaui
	2.4.3. Indeks kualitas Tutupan Lahan	41,87	54	56,47	64,46	27,11	64,46	Belum tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
	2.4.4. Persentase pengelolaan sampah	-	-	-	96,02%	97,04%	68%	Melampaui
	<b>2.5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>							
	2.5.1. Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk	0,890	0,908	0,934	0,988	0,986	0,98	Sesuai
	2.5.2. Rasio bayi berakte kelahiran	0,93	0,98	0,99	0,99	1,00	1	Sesuai
	2.5.3. Rasio pasangan berakte nikah	0,79	0,81	0,83	0,88	0,90	0,89	Melampaui
	<b>2.6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>							
	2.6.1. Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,56	0,69	0,72	-2,8	0,47	0,79	Melampaui
	2.6.2. Total Fertility Rate (TFR)	1,99	1,95	1,81	1,87	1,85	2,01	Melampaui
	<b>2.7. Perhubungan</b>							
	2.7.1. Rasio ijin trayek	0,00042 (1:2384)	0,00032 (1:3104)	0,00037 (1:2672)	0,00016 (1:6061)	0,00037 (1:2694)	0,00037 (1:2694)	Sesuai
	2.7.2. Jumlah uji KIR angkutan umum	809	660	1.028	1.120	1.107	1197	Belum tercapai
	2.7.3. Persentase layanan angkutan darat	3,31 %	4,69 %	5,53 %	7,10%	4,32%	6,23%	Belum tercapai
	2.7.4. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	16,51%	20,00%	13,83%	12,41%	11,46%	11,70%	Belum tercapai
	2.7.5. Persentase Pemasangan Rambu-rambu	61,21 %	70,45 %	75,10 %	80,95 %	86,27 %	80,63%	Melampaui
	2.7.6. Persentase penurunan angka pelanggaran lalu lintas dan angkutan	-	-	-	26,17%	29,29%	28%	Melampaui

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
	jalan (LLAJ)							
	2.7.7. Persentase angkutan orang/barang yang laik jalan	-	-	-	89,20%	88,02%	88%	Melampaui
	<b>2.8. Komunikasi dan Informatika</b>							
	2.8.1. Indeks SPBE	-	-	-	3,22	n/a	2,5	Melampaui
	<b>2.9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>							
	2.9.1. Persentase koperasi berkualitas	-	-	-	51,96	58,27%	55,5%	Melampaui
	2.9.2. Persentase pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil	-	-	-	40,32%	30,54%	28%	Melampaui
	<b>2.10. Penanaman Modal</b>							
	2.10.1. Persentas peningkatan investasi di kabupaten/kota	-	-	-	503,47%	-4,99%		Belum tercapai
	2.10.2. Persentase kenaikan jumlah investor	-	-	-	103,30%	-14,17%		Belum tercapai
	<b>2.11. Kepemudaan dan Olahraga</b>							
	2.11.1. Jumlah atlet berprestasi	-	99	61	53	75	64	Melampaui
	2.11.2. Persentase pemuda yang berprestasi	-	-	-	83,33%	71%	71%	Sesuai
	<b>2.12. Kebudayaan</b>							
	2.12.1. Jumlah Kelompok Seni	13	10	58	68	56	49	Melampaui
	2.12.2. Jumlah cagar budaya yang lestari	-	-	-	10	10	10	Sesuai
	<b>2.13. Perpustakaan</b>							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
	2.13.1. Indeks Minat Baca	-	-	-	59,9	60,28	60	Sesuai
	<b>2.14. Kearsipan</b>							
	2.14.1. Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE)	-	-	63,97	63,04	n/a	65	Belum tercapai
	<b>3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan</b>							
	<b>3.1. Kelautan dan Perikanan</b>							
	3.1.1. Produksi perikanan	182.958	182.958	182.958	342.979	229.518	348.000	Belum tercapai
	<b>3.2. Pariwisata</b>							
	3.2.1. Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	7,25	7,36	7,89	7,78	-8,16	1%	Belum tercapai
	3.2.2. Jumlah kunjungan wisatawan domestik	31.904	31.094	259.732	262.862	500.993	260.000	Melampaui
	3.2.3. Lama kunjungan wisata	1 hari	1 hari	1 hari	2 hari	1 hari	2 hari	Belum tercapai
	3.2.4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	-	-	-	6,7%	3,88%	3,88%	Sesuai
	<b>3.3. Pertanian</b>							
	3.3.1. Jumlah produktivitas padi (Ton/Ha)	5,61	5,49	6,6	6,4	6,5	6,6	Belum tercapai
	3.3.2. Jumlah produktivitas tebu (Kw/Ha)	750	790	790	775	917	770	Melampaui
	<b>3.4. Perdagangan</b>							
	3.4.1. Pertumbuhan PDRB sektor	5,51	6,16	6,21	5,88	-9,20	5,8-6,5	Belum

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
	Perdagangan							tercapai
	<b>3.5. Perindustrian</b>							
	3.5.1. Pertumbuhan PDRB sektor industri	5,70	6,16	5,79	3,03	-3,55	5,7-6,1	Belum tercapai
	<b>4. Fokus Layanan Fungsi Penunjang</b>							
	<b>4.1. Perencanaan Pembangunan</b>							
	4.1.1. Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	90%	90%	100%	100%	100%	100%	Sesuai
	4.1.2. Persentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	90%	90%	100%	100%	100%	100%	Sesuai
	4.1.3. Persentase keselarasan Renja PD terhadap RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai
	4.1.4. Persentase Indikator program pembangunan yang tercapai	-	-	-	90%	82%	90%	Belum tercapai
	<b>4.2. Pengawasan</b>							
	4.2.1. Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	84,49%	85,02%	81,06%	85%	85%	95%	Belum tercapai
	4.2.2. Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	100,00%	95,65%	75,00%	94%	89%	100%	Belum tercapai
	4.2.3. Maturitas SPIP	-	-	-	-	Level 3	Level 3	Sesuai
	4.2.4. Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori BB	-	-	-	68,97%	93,10%	95%	Belum tercapai
	4.2.5. Jumlah unit yang mendapat predikat	-	-	-	1	1	2	Belum

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
	WBK/WBBM							tercapai
	<b>4.3. Keuangan</b>							
	4.3.1. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sesuai
	4.3.2. Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	5,58%	20,33%	8%	Melampaui
	4.3.3. Persentase tanah aset yang bersertifikat	-	-	-	11,26%	32,75%	20%	Malampaui
	4.3.4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah						25,898	Melampaui
	4.3.5. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	2,28	0,73	0,83	0,787	0,78		Belum tercapai
	<b>4.4. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan</b>							
	4.4.1. Sistem Merit	-	-	-	-	163	71-80	Belum tercapai
	4.4.2. Indeks Profesionalitas ASN	-	83,93	n/a	n/a	63	175-249	Belum tercapai
	<b>4.5. Penelitian dan Pengembangan</b>							
	4.5.1. Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam kebijakan pemerintah daerah	-	-	-	28%	100%	100%	Sesuai
	<b>4.6. Sekretariat Daerah</b>							
	4.6.1. Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	B	Sesuai
	4.6.2. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	56,43	62,58	58,89 (CC)	62,31 (B)	62,45 (B)	BB	Belum

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
								tercapai
	4.6.3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,26	80,41	82,75	83,87	84,35	76,61- 88,30	Melampaui
	<b>4.7. Sekretariat DPRD</b>							
	4.7.1. Persentase anggota Dewan yang puas terhadap layanan Sekretariat DPRD	85	87	90	80	94	92	Malampaui
<b>C</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>							
	<b>1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>							
	1.1. Nilai realisasi investasi (PMDN/PMA)	132.314.20 0.000	289.261.71 5.000	170.029.747 .050	352.908.00 0.997	513.978.7 67.777	381.145. 000.000	Melampaui
	<b>2. Fokus Iklim Berinvestasi</b>							
	2.1. Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	-	-	75%	77,93%	85,56%	80%	Melampaui
	2.2. Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman	-	-	75%	94,61%	95,96%	81%	Melampaui
	2.3. Indeks LLAJ	-	-	59,92%	87,32%	91,60%	76,99%	Melampaui
	2.4. Persentase pelanggaran Perda yang terselesaikan	-	-	-	82,66%	87,62%	85%	Melampaui
	2.5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,5	63,02	63,10	65,24	57,72	66,45	Belum tercapai





## BAB III

# GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

---

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Tingkat kemampuan keuangan daerah dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

### 3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Kinerja keuangan adalah suatu analisis dilakukan untuk melihat sejauh mana organisasi telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dalam membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar atau ketentuan dalam SAK (standar akuntansi keuangan) atau GAAP (generally accepted accounting principle) dan lainnya.

Secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2015-2019 telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang menggembirakan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik dan diharapkan mampu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Kondisi ini ditandai dengan semakin meningkatnya Penerimaan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terjadinya penghematan dari sisi belanja. Guna memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, yakni kinerja keuangan masa lalu serta kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

### 3.1.1 KINERJA PELAKSANAAN APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006, meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah, Aspek Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dan Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Perkembangan pendapatan daerah Kota Mojokerto dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan rata-rata kenaikan sebesar 5,67%, dimana pendapatan pada tahun 2015 sebesar Rp 717.544.079.472,41 menjadi Rp 885.966.038.008,44 pada tahun 2019. Komponen pendapatan yang mengalami kenaikan paling tinggi dalam kurun waktu 5 tahun ini adalah pendapatan asli daerah, yaitu sebesar 10,71%. Dana perimbangan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,55% serta lain-lain pendapatan daerah yang sah naik sebesar 7,55%. Kontribusi PAD terbesar adalah pada komponen pajak daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,94%.

Atas pertumbuhan pendapatan asli daerah di Kota Mojokerto, upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Program bayar pajak pakai sampah berhadiah umroh. Bekerja sama dengan Bank Sampah di masing-masing kelurahan untuk membayar PBB bagi anggota Bank Sampah;
2. Pelayanan jemput bola pembayaran pajak dengan menggunakan *mobile android*;
3. Bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto untuk menindak Wajib Pajak yang menunggak pajak;
4. Melakukan pendataan obyek pajak PBB di 18 kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Kranggan, Kecamatan Magersari dan Kecamatan Prajuritkulon;
5. Pelayanan satu atap dengan membuka *Payment Point* Bank Jatim di BPPKA Kota Mojokerto, untuk memberi kemudahan kepada masyarakat;
6. Melakukan pendataan obyek dan subyek pajak daerah, baik yang baru maupun yang lama sudah mengalami perubahan;
7. Pengadaan aplikasi Pelayanan SIMPATDA, aplikasi SMS Center, aplikasi SMS gateway, dan aplikasi converter SIMPATDA ke SIMDA Pendapatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
8. Melaksanakan Sosialisasi Pajak Daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama generasi muda serta sosialisasi program-program pembangunan Pemerintah Kota Mojokerto yang dibiayai dari sektor pajak, seperti Lomba Poster untuk pelajar SD/MI dan SAMPE PD (Semarak Arek

- Mojokerto Peduli Pajak Daerah) untuk pelajar SMP/MTs dan SMA/MA/SMK;
9. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan Perangkat Daerah penghasil;
  10. Melakukan rekonsiliasi data retribusi parkir berlangganan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
  11. Melaksanakan operasi penertiban terhadap reklame-reklame yang tidak membayar pajak reklame;
  12. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak (WP) daerah, khususnya WP-PBB dengan melaksanakan pelayanan langsung pembayaran PBB keliling kelurahan;
  13. Melaksanakan kegiatan lomba pencapaian target PBB tingkat kelurahan dan Lomba Pencapaian PBB terbaik Tingkat Bank Sampah agar target PBB dapat tercapai;
  14. Melaksanakan kegiatan Gebyar Hadiah PBB sebagai wujud pemberian penghargaan kepada wajib pajak;
  15. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan daerah khususnya dari piutang pajak daerah;
  16. Melaksanakan kegiatan monitoring, validasi dan kompilasi kegiatan BPHTB;
  17. Pemusatan pembayaran BPHTB di *Payment Point* Bank Jatim yang ada di BPPKA Kota Mojokerto. Hal ini dilakukan untuk pemeriksaan data BPHTB dan tunggakan BPHTB;
  18. Memberikan pembebasan denda PBB, untuk meningkatkan penerimaan dari piutang/tunggakan PBB.

Walaupun secara keseluruhan pendapatan daerah mengalami kenaikan, namun terdapat komponen yang realisasinya turun, terutama dari komponen pajak daerah turun sebesar 3,26%, transfer dana perimbangan (DAU) turun sebesar 9,77% dan dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya turun sebesar 33,13%. Penyebab belum optimalnya pendapatan dari komponen pajak disebabkan oleh sejumlah hal, antara lain adanya penurunan kemampuan ekonomi Wajib Pajak (WP) dikarenakan pandemi Covid-19 sehingga sulit untuk melakukan pemenuhan pembayaran. Sedangkan penurunan DAU merupakan kebijakan rasionalisasi transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat. Penurunan kemampuan keuangan daerah tersebut, tentu saja berdampak terhadap berkurangnya jumlah anggaran yang dapat digunakan untuk belanja.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan

Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Mojokerto. Urusan pemerintahan itu terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dilaksanakan dengan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

Perkembangan belanja daerah Kota Mojokerto selama kurun waktu lima tahun menunjukkan penurunan dengan rata-rata sebesar -3,15%. Realisasi belanja tidak langsung mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp 277.418.352.958,00 menjadi sebesar Rp 357,683,371,805.60 pada tahun 2020 atau rata-rata sebesar 7,45%. Realisasi belanja langsung mengalami penurunan dari Rp 667.298.790.547,53 pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp 446,723,645,296.28 pada tahun 2020 atau dengan rata-rata -8,45%. Pada belanja langsung Pemerintah Kota Mojokerto, komponen terbesar alokasi anggaran adalah digunakan untuk belanja barang dan jasa.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan umum penerimaan pembiayaan diarahkan pada perhitungan perkiraan sisa lebih (SiLPA) baik berupa pelampauan pendapatan atas dasar peningkatan kinerja maupun sisa belanja atas asumsi terjadinya efisiensi belanja. Kebijakan umum pengeluaran pembiayaan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan pengeluaran pembiayaan dalam rangka tambahan modal BUMD serta defisit APBD direncanakan akan diatasi melalui selisih antara proyeksi penerimaan pembiayaan dengan rencana pengeluaran pembiayaan.

Selama kurun waktu 2016 sampai 2020, pembiayaan tampaknya masih fluktuatif perkembangannya, namun mengalami pertumbuhan dengan angka rata-rata tahun sebesar 46,48%. Selama lima tahun tersebut, lebih besar penerimaan pembiayaan yang didominasi oleh penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA). Untuk pengeluaran pembiayaan, dialokasikan pada Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pemberian Pinjaman Daerah. Gambaran tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kota Mojokerto, disajikan dalam tabel rata-rata pertumbuhan anggaran pendapatan dan belanja Kota Mojokerto Tahun 2016-2020 berikut ini :

**Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Mojokerto Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020* (Rp)	Rata-rata pertumbuhan (%)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>806.772.000.827,56</b>	<b>782.331.264.434,20</b>	<b>887.435.609.342,79</b>	<b>885.966.038.008,44</b>	<b>886.026.211.545,94</b>	<b>2.56</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>152.462.202.064,56</b>	<b>178.295.062.136,20</b>	<b>182.453.404.145,27</b>	<b>192.695.566.219,26</b>	<b>231.875.337.605,94</b>	<b>11.31</b>
1.1.1	Pajak Daerah	35.333.988.082,55	47.423.790.376,20	47.920.074.429,73	51.615.256.646,20	49.932.201.609,64	9.93
1.1.2	Retribusi Daerah	13.006.473.471,46	7.661.594.955,54	9.989.500.314,07	9.897.775.510,59	10.894.179.924,50	(0.39)
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	3.448.803.749,90	3.616.145.197,93	3.895.559.847,10	4.656.906.866,76	3.474.822.398,20	1.68
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	100.672.936.760,65	119.593.531.606,53	120.648.269.554,37	126.525.627.195,71	167.574.133.673,60	14.25
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>555.962.488.047,00</b>	<b>519.341.294.299,00</b>	<b>553.125.341.841,00</b>	<b>557.178.261.665,00</b>	<b>543.918.164.967,00</b>	<b>-0.43</b>
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak	55.436.957.047,00	50.450.522.033,00	99.934.360.176,00	81.383.740.128,00	83.303.578.942,00	18.22
1.2.2	Dana alokasi umum	397.094.498.000,00	390.118.825.000,00	378.916.109.000,00	414.394.006.000,00	373.898.704.000,00	-1.26
1.2.3	Dana alokasi khusus	103.431.033.000,00	78.771.947.266,00	74.274.872.665,00	61.400.515.537,00	86.715.882.025,00	5.97
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>98.347.310.716,00</b>	<b>84.694.907.999,00</b>	<b>151.856.863.356,52</b>	<b>136.092.210.124,18</b>	<b>110.232.708.973,00</b>	<b>9.01</b>
1.3.1	Hibah	0,00	0,00	14.942.909.385,52	15.159.179.997,18	16.716.470.000,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah daerah lainnya	57.047.057.716,00	71.619.577.999,00	69.159.423.971,00	85.361.257.127,00	64.119.416.073,00	5.16
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	39.955.923.000,00	7.500.000.000,00	66.750.000.000,00	34.465.714.000,00	28.495.701.000,00	(24.64)
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	1.344.330.000,00	5.575.330.000,00	1.004.530.000,00	1.106.059.000,00	901.121.900,00	47.57
1.3.6	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>944.717.143.505,53</b>	<b>739.086.252.867,78</b>	<b>808.162.232.891,34</b>	<b>852.084.096.739,42</b>	<b>804.407.017.101,88</b>	<b>-3.15</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>277.418.352.958,00</b>	<b>256.687.836.674,00</b>	<b>334.128.804.692,00</b>	<b>331.175.686.534,98</b>	<b>357.683.371.805,60</b>	<b>7.45</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	261.869.356.126,00	226.764.524.318,00	300.995.454.840,00	307.155.602.748,50	296.976.545.966,05	4.52
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020* (Rp)	Rata-rata pertumbuh an (%)
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	13.201.042.100,00	26.154.104.500,00	28.039.269.496,00	16.407.290.936,48	14.260.497.894,09	12,69
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.829.303.500,00	3.191.760.000,00	4.079.950.000,00	6.658.100.000,00	3.620.330.000,00	29,97
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	376.129.350,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	518.651.232,00	562.049.856,00	762.049.856,00	578.563.500,00	0,00	-20,03
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	15.398.000,00	252.080.500,00	0,00	42.825.997.945,46	0,00
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>667.298.790.547,53</b>	<b>482.398.416.193,78</b>	<b>474.033.428.199,34</b>	<b>520.908.410.204,44</b>	<b>446.723.645.296,28</b>	<b>-8,45</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	49.435.202.231,00	52.714.978.486,00	34.657.283.702,00	37.341.968.797,00	31.127.036.658,00	-9,13
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	314.126.484.985,39	308.538.520.978,68	319.941.872.050,48	348.949.820.235,02	302.158.828.038,07	-0,61
2.2.3	Belanja Modal	303.737.103.331,14	121.144.916.729,10	119.434.272.446,86	134.616.621.172,42	113.437.780.600,21	-16,14
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>169.060.076.673,58</b>	<b>31.165.353.995,61</b>	<b>74.428.815.562,03</b>	<b>153.761.967.864,09</b>	<b>187.689.074.133,11</b>	<b>46,48</b>
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>172.525.076.673,58</b>	<b>31.165.353.995,61</b>	<b>74.428.815.562,03</b>	<b>153.761.967.864,09</b>	<b>187.689.074.133,11</b>	<b>46,38</b>
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>3.465.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sumber : BPKPD Kota Mojokerto, 2021

\*) belum audit BPK

### **3.1.2 NERACA DAERAH**

Neraca Daerah adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi: aset, kewajiban dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut ditunjukkan dalam sub-sub rekening yang lebih rinci.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, aset dapat didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Berdasarkan peraturan (PP) tersebut kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah, sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Sedangkan aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Keberadaan neraca daerah Kota Mojokerto dari sisi nilai aset, kewajiban dan ekuitas mengalami perkembangan dalam setiap tahunnya. Untuk mengetahui rata-rata pertumbuhan nilai aset, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Kota Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Kota Mojokerto**

NO	URAIAN	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
<b>1</b>	<b>ASET</b>	<b>5,13</b>
<b>1,1</b>	<b>Aset Lancar</b>	<b>25,04</b>
	Kas	46,41
	Investasi Jangka Pendek	0,00
	Piutang	43,35
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	9,49
	Beban Dibayar Dimuka	621,67
	Persediaan	2,05
<b>1,2</b>	<b>Investasi Jangka Panjang</b>	<b>3,54</b>
	Investasi Non Permanen	0,00
	Investasi Permanen	3,54
<b>1,3</b>	<b>Aset Tetap</b>	<b>5,61</b>
	Tanah	1,10
	Peralatan dan Mesin	10,38
	Gedung dan Bangunan	6,56
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	19,56
	Aset Tetap Lainnya	10,52
	Konstruksi dalam Pengerjaan	52,72
	Akumulasi Penyusutan	19,30
<b>1,4</b>	<b>Dana Cadangan</b>	<b>0,00</b>
	Dana Cadangan	0,00
<b>1,5</b>	<b>Aset Lainnya</b>	<b>-8,10</b>
	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	-46,00
	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-48,02
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-24,33
	Aset Tidak Berwujud	-12,67
	Aset Lain-lain	151,93
	Akumulasi Amortisasi	0,00
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>44,29</b>
<b>2,1</b>	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>44,29</b>
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00
	Utang Bunga	0,00
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00
	Pendapatan Diterima Dimuka	-28,36
	Utang Beban	34,50
	Utang Jangka Pendek Lainnya	1146,12
<b>2,2</b>	<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>EKUITAS DANA</b>	<b>4,82</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>5,13</b>

Sumber : BPPKA Kota Mojokerto, 2020 (diolah)



Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa aset Pemerintah Kota Mojokerto mengalami kenaikan sebesar 5,13%. Komponen aset yang menyumbang kenaikan terbesar adalah aset lancar yaitu sebesar 25,04%. Di sisi lain, komponen aset lainnya mengalami penurunan sebesar 8,10%. Kewajiban Kota Mojokerto juga mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 44,29% dan secara keseluruhan merupakan kewajiban jangka pendek. Komponen kewajiban yang mengalami rata-rata penurunan adalah pendapatan diterima dimuka yaitu sebesar 28,36%. Sedangkan ekuitas dana mengalami rata-rata kenaikan sebesar 4,82%.

Tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Sedangkan rasio solvabilitas terdiri dari rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal. Rasio keuangan Kota Mojokerto Tahun 2015-2019 dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

**Tabel 3.3 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
<b>I</b>	<b>Rasio Likuiditas</b>					
1	Rasio Lancar ( <i>Current Ratio</i> )	20.3000	10.3066	10.9458	9.3595	7.9773
2	Rasio Cepat ( <i>Quick Ratio</i> )	18.6582	7.8189	9.6685	8.3662	7.5039
<b>II</b>	<b>Rasio Solvabilitas</b>					
1	Rasio Total Hutang terhadap Total Aset	0,0067	0,0042	0,0067	0,0115	0.0187
2	Rasio Utang terhadap Modal ( <i>Total Debt to Equity Ratio</i> )	0,0067	0,0042	0,0067	0,0116	0.0191

Sumber : BPKPD Kota Mojokerto, 2020 (diolah)

Pada tahun 2015 nilai rasio lancar tercatat sebesar 20,3000 atau berada pada posisi tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2016 nilai rasio lancar mengalami penurunan hingga menjadi 10,3066, dan pada tahun 2017 kembali mengalami kenaikan menjadi 10,9458 namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 9,3595. Pergerakan nilai rasio lancar pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya perubahan nilai kewajiban dan nilai aktiva lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Keberadaan nilai rasio lancar Pemerintah Kota Mojokerto secara umum dalam 5 tahun terakhir berada di atas angka 1, hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto untuk

memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar memiliki kategori yang baik.

Kondisi rasio *quick* menunjukkan pola fluktuasi yang sama, dimana pada tahun 2015 nilai rasio *quick* yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Mojokerto sebesar 18,6582 dan merupakan nilai tertinggi selama kurun waktu lima tahun. Pada rasio *quick*, pergerakan besar kecilnya rasio selain dipengaruhi oleh perubahan aktiva lancar dan kewajiban juga dipengaruhi oleh besarnya persediaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Mojokerto, semakin besar persediaan dengan jumlah aktiva lancar dan kewajiban yang sama akan mampu menurunkan nilai rasionya. Rasio *quick* yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Mojokerto selama 5 tahun terakhir (2015 - 2019) juga menunjukkan kondisi yang baik, dimana nilainya masih berada di atas 1.

Rasio total hutang terhadap total aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Mojokerto secara umum masih sangat kecil, yaitu jauh berada di bawah 0,5. Pada tahun 2015 tercatat sebesar 0,0167 hingga pada tahun 2019 menjadi 0,0187. Rendahnya rasio total hutang terhadap total aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Mojokerto memberikan makna bahwa kondisi solvabilitas keuangan Pemerintah Kota Mojokerto dalam keadaan yang sehat, dimana persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor untuk membiayai pembangunan di Kota Mojokerto pada tahun 2019 masih sebesar 0,0187.

Pada tahun 2015 hingga 2016 nilai rasio hutang terhadap modal mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2017 kembali mengalami kenaikan dengan jumlah yang relatif kecil, yaitu sebesar 0,0067 dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 0,0187. Adapun kenaikan dan penurunan tersebut dipengaruhi oleh perubahan nilai kewajiban dan ekuitas. Bila melihat pada nilai rasio antara tahun 2013 hingga 2018 dapat terlihat bahwa nilai yang dimiliki masih sangat kecil, bahkan masih jauh berada di bawah 0,5, walaupun pada tahun 2019 terjadi kenaikan. Rendahnya nilai rasio hutang terhadap modal menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangannya, Pemerintah Kota Mojokerto hingga saat ini tidak bergantung pada hutang.

### **3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU**

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan

efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama pada masyarakat miskin dan kurang beruntung, pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.

Analisis belanja dilakukan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis belanja yang dilakukan mencakup :

1. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
2. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama;
3. Analisis proyeksi belanja.

### **3.2.1 PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN**

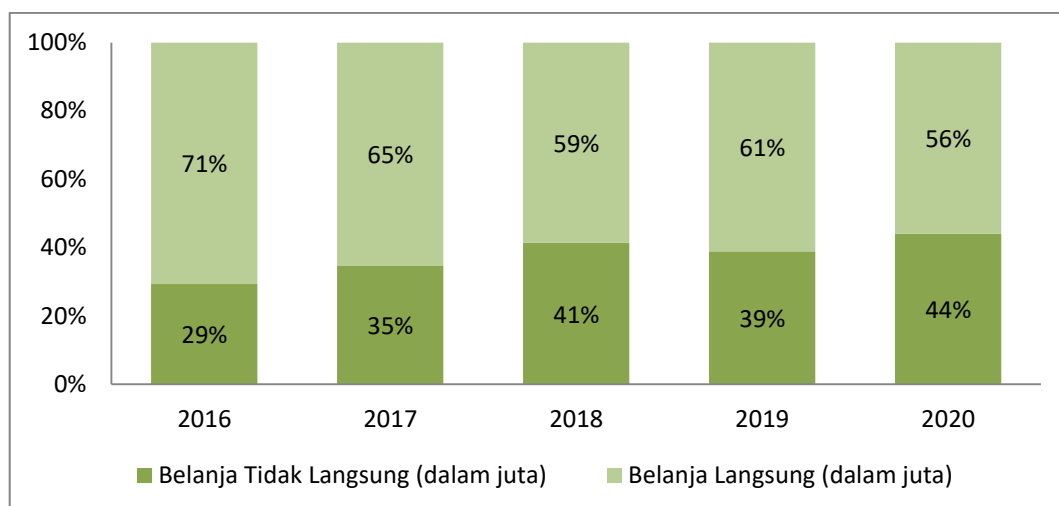
Sumber pendapatan terbanyak Kota Mojokerto berasal dari Dana Perimbangan dengan proporsi rata-rata tahun 2015-2019 mencapai 64,85% dari total pendapatan daerah. Secara spesifik, pendapatan terbesar bersumber dari Dana Alokasi Umum dengan proporsi rata-rata mencapai 48,36% dari total pendapatan daerah. Artinya, Kota Mojokerto masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat sebagai sumber pendapatan terbesar untuk membiayai kebutuhan daerah. Namun, jika melihat tren proporsi Pendapatan Asli Daerah yang cenderung meningkat setiap tahunnya menggambarkan bahwa Kota Mojokerto telah berusaha meningkatkan penghasilan daerah melalui pajak.

Belanja daerah merupakan kewajiban Pemerintah Kota Mojokerto sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja.

Sebagaimana disampaikan pada tabel 3.1, proporsi rata-rata realisasi belanja terhadap anggaran belanja Kota Mojokerto tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif. Dibandingkan belanja tidak langsung, belanja langsung masih mendominasi proporsi belanja secara keseluruhan dengan rata-rata proporsi sebesar 63,18%. Proporsi realisasi belanja terbesar pada belanja langsung adalah belanja barang dan jasa dengan rata-rata proporsi sebesar 38,25% diikuti komponen belanja pegawai pada belanja tidak langsung

dengan rata-rata proporsi sebesar 33,48%. Proporsi belanja langsung dan tidak langsung dapat dilihat pada gambar berikut ini :

**Gambar 3.1 Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Kota Mojokerto Tahun 2016-2020**



Sumber : BPKPD Kota Mojokerto, 2021 (diolah)

\*) belum audit BPK

Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi belanja dan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2016-2020 dirinci pada tabel berikut :

**Tabel 3.4 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2016-2020 Kota Mojokerto**

No	Uraian	Total Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2016	408.323.465.206,94	948.182.143.505,53	43,06%
2	Tahun Anggaran 2017	346.970.585.767,24	739.086.252.867,78	46,95%
3	Tahun Anggaran 2018	391.322.926.513,33	808,162,232,891.34	48,39%
4	Tahun Anggaran 2019	401.456.153.063,15	852.084.096.739,42	47,11%
5	Tahun Anggaran 2020*	399,043,747,498.15	804,407,017,101.88	49,61%
Rata-rata				47,08%

Sumber : BPKPD Kota Mojokerto, 2021 (diolah)

\*) belum audit BPK

Rata-rata proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran di Kota Mojokerto adalah sebesar 47,08%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir separuh dari APBD Kota Mojokerto digunakan untuk belanja pemenuhan kebutuhan pegawai.

### **3.2.2. ANALISIS PEMBIAYAAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sama seperti pendapatan dan belanja, pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan ini mencakup (pasal 60):

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA),
2. Pencairan dana cadangan,
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
4. Penerimaan pinjaman daerah,
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan
6. Penerimaan piutang daerah.

Sementara, pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan juga digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran ini terdiri dari:

1. Pembentukan dana cadangan,
2. Penanaman modal (investasi) pemerintah daerah,
3. Pembayaran pokok utang, dan
4. Pemberian pinjaman daerah.

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah, sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.5 Defisit Riil Anggaran Tahun 2016-2020 Kota Mojokerto**

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020* (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	806.772.000.827,56	782.331.264.434,20	887,435,609,342.79	885.966.038.008,44	886,026,211,545.94
	Dikurangi realisasi :					
2	Belanja Daerah	944.717.143.505,53	739.086.252.867,78	808,162,232,891.34	852.084.096.739,42	804,407,017,101.88
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.465.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	<b>Surplus/ (Defisit) riil</b>	<b>(141.410.142.677,97)</b>	<b>43.245.011.566,42</b>	<b>79,273,376,451.45</b>	<b>33.881.941.269,02</b>	<b>81,619,194,444.06</b>

Sumber : BPKPD Kota Mojokerto, 2021 (diolah)

\*) belum audit BPK

Dari tabel di atas, tampak bahwa pada tahun 2016 Kota Mojokerto mengalami defisit anggaran, namun pada tahun 2017 sampai 2020 mengalami surplus anggaran. Dalam keuangan daerah, pembiayaan daerah dilakukan untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pada tahun 2017 sampai dengan 2020 menunjukkan bahwa realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan Kota Mojokerto masih di lebih rendah daripada realisasi pendapatan sehingga pada periode tersebut Kota Mojokerto mengalami surplus realisasi. Penutup defisit riil anggaran Kota Mojokerto tersaji pada Tabel 3.6 berikut:

**Tabel 3.6 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2016-2020 Kota Mojokerto**

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020* (Rp)
1	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya	172.373.021.673,58	31.114.933.995,61	74.410.365.562,03	153.760.267.864,09	187.643.909.133,11
2	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan piutang daerah	152.055.000,00	50.420.000,00	18.450.000,00	1.700.000,00	45.165.000,00
7	Penerimaan kembali Deposito Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-

Sumber : BPKPD Kota Mojokerto, 2021 (diolah)

\*) belum audit BPK



Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kota Mojokerto selama periode 2016-2020 diantaranya bersumber dari efisiensi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Gambaran realisasi sisa lebih perhitungan anggaran daerah selama lima tahun terakhir (2016-2020) tampak pada tabel berikut :

**Tabel 3.7 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2017-2020 Kota Mojokerto**

No	Uraian	2017		2018		2019		2020*	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
	<b>Jumlah SiLPA</b>	<b>31,114,933,995.61</b>		<b>74,410,365,562.03</b>		<b>153,760,267,864.09</b>		<b>187,643,909,133.11</b>	
1	Pelampauan penerimaan PAD	10,834,577,664.56	34.82%	(15,900,749,163.80)	-21.37%	21,068,537,542.84	13.70%	(16,361,810,621.74)	-8.72%
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	(42,487,037,953.00)	-136.55%	(32,360,895,701.00)	-43.49%	7,852,744,745.00	5.11%	(51,263,181,848.00)	-27.32%
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	(8,331,034,284.00)	-26.78%	(4,367,774,851.00)	-5.87%	12,918,062,881.99	8.40%	11,107,965,124.18	5.92%
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	73,624,873,568.05	236.62%	128,605,236,477.83	172.83%	49,331,127,066.26	32.08%	244,557,324,978.67	130.33%
5	Koreksi SiLPA	-	0.00%	(1,115,871,200.00)	-1.50%	(98,088,500.00)	-0.06%	(98,088,500.00)	-0.05%
6	Sisa belanja DAK	-	0.00%	-	0.00%	62,687,884,128.00	40.77%	-	0.00%
7	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	(2,526,445,000.00)	-8.12%	(449,580,000.00)	-2.10%	-	0.00%	(298,300,000.00)	-0.16%

Sumber : BPKPD Kota Mojokerto, 2021 (diolah)

\*) belum audit BPK

### **3.3. KERANGKA PENDANAAN**

Kerangka pendanaan keuangan daerah meliputi penerimaan/ pendapatan daerah, pengeluaran/ belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas, tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan kerangka pendanaan keuangan daerah dapat dilihat berdasarkan hasil proyeksi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah berjalan. Keuangan daerah Kota Mojokerto nantinya dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Mojokerto yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan yang diperkirakan pada tahun-tahun mendatang akan terus berkembang.

#### **3.3.1. PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA**

Proyeksi pendapatan menggambarkan perkiraan/ estimasi pendapatan yang diperoleh Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2019 sampai 2023. Proyeksi dilakukan dengan memperhatikan *trend* yang dimiliki oleh masing-masing jenis pendapatan, disamping mempertimbangkan kecenderungan pencapaian dan pertumbuhan pendapatan daerah, kebijakan terkait dengan pendapatan daerah, serta kondisi ekonomi makro. Analisis proyeksi difokuskan pada objek dan rincian objek sumber-sumber pendapatan daerah, mengingat masing-masing rincian objek memiliki perilaku atau karakteristik yang berbeda.

Berdasarkan pada proyeksi pendapatan daerah Kota Mojokerto yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh hasil bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan Kota Mojokerto pada tahun 2019 sampai 2023 secara keseluruhan mengalami penurunan 0,37%. Bila dilihat secara lebih rinci pada masing-masing jenis pendapatan, Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan rata-rata memiliki pertumbuhan sebesar 6,25%, mengingat potensi pajak daerah dalam setiap tahun semakin bertambah dan masih bisa dimaksimalkan dalam pemungutannya, selain adanya sumber PAD berasal dari lain-lain PAD yang sah yang juga turut dapat dimaksimalkan. Keberadaan dana perimbangan yang diperoleh Kota Mojokerto pada tahun 2019 sampai 2021 diproyeksikan memiliki pertumbuhan sebesar -1,49%. Sedangkan pada tahun 2022 sampai 2023 diproyeksikan mengalami pertumbuhan 0,79%. Rendahnya tingkat

pertumbuhan memang lebih banyak mempertimbangkan penurunan realisasi pada tahun terakhir dan kebijakan politik anggaran Pemerintah Pusat, terutama pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kondisi pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan pada tahun 2019 sampai 2023 rata-rata memiliki pertumbuhan sebesar 3,90% yang ditunjang oleh pertumbuhan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan jenis pendapatan lainnya dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, mengingat potensi pajak dari kendaraan bermotor diperkirakan semakin meningkat dalam setiap tahunnya.

Hasil proyeksi pendapatan Kota Mojokerto selama tahun 2019 sampai 2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.8 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019-2023 Kota Mojokerto**

NO	URAIAN	2019*	2020*	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>885,966,038,008.44</b>	<b>886,026,211,545.94</b>	<b>869,686,791,131.00</b>	<b>804,075,137,367.74</b>	<b>811,434,852,090.19</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>192,695,566,219.26</b>	<b>231,875,337,605.94</b>	<b>202,826,397,207.00</b>	<b>221,993,797,207.74</b>	<b>224,939,843,028.19</b>
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	51,615,256,646.20	49,932,201,609.64	48,604,500,000.00	50,932,201,609.64	51,441,523,625.74
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9,897,775,510.59	10,894,179,924.50	10,160,971,925.00	11,394,179,924.50	11,508,121,723.75
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,656,906,866.76	3,474,822,398.20	4,815,282,000.00	4,815,282,000.00	4,815,282,000.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	126,525,627,195.71	167,574,133,673.60	139,245,643,282.00	154,852,133,673.60	157,174,915,678.70
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>678,111,291,792.00</b>	<b>637,434,403,940.00</b>	<b>646,814,493,974.00</b>	<b>562,035,440,210.00</b>	<b>566,449,109,112.00</b>
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	591,643,975,665.00	572,413,865,967.00	580,062,799,974.00	495,283,746,210.00	499,697,415,112.00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	86,467,316,127.00	65,020,537,973.00	66,751,694,000.00	66,751,694,000.00	66,751,694,000.00
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>15,159,179,997.18</b>	<b>16,716,470,000.00</b>	<b>20,045,899,950.00</b>	<b>20,045,899,950.00</b>	<b>20,045,899,950.00</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	15,159,179,997.18	16,716,470,000.00	-	20,045,899,950.00	20,045,899,950.00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	-	-	-
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	20,045,899,950.00	-	-
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>852,084,096,739.42</b>	<b>804,407,017,101.88</b>	<b>1,042,653,590,968.00</b>	<b>935,180,122,502.14</b>	<b>943,765,919,396.19</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>716,512,782,717.00</b>	<b>648,143,238,556.21</b>	<b>828,305,871,191.00</b>	<b>740,063,304,775.69</b>	<b>748,660,664,206.61</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	315,490,327,345.50	298,618,767,966.05	339,587,796,709.00	331,384,076,451.97	335,081,877,700.07
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	365,598,513,871.50	331,643,642,696.07	419,850,734,035.00	379,148,003,973.72	383,378,786,506.54
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	28,765,841,500.00	14,260,497,894.09	36,184,356,750.00	14,500,000,000.00	15,200,000,000.00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	6,658,100,000.00	3,620,330,000.00	32,682,983,697.00	15,031,224,350.00	15,000,000,000.00
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>134,616,621,172.42</b>	<b>113,437,780,600.21</b>	<b>212,194,291,777.00</b>	<b>194,616,817,726.45</b>	<b>194,605,255,189.58</b>
<b>2.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>0,00</b>	<b>42,825,997,945.46</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>500,000,000.00</b>
<b>2.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>954,692,850.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,153,428,000.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NO	URAIAN	2019*	2020*	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>153,761,967,864.09</b>	<b>187,689,074,133.11</b>	<b>168,177,406,868.00</b>	<b>142,090,475,234.40</b>	<b>134,331,067,306.01</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	153,761,167,864.09	187,643,909,133.11	168,127,406,868.00	142,040,475,234.40	134,281,067,306.01
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	800,000.00	45,165,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,000,000,000.00</b>	<b>10,985,490,100.00</b>	<b>2,000,000,000.00</b>
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	0,00	0,00	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	5,000,000,000.00	10,985,490,100.00	2,000,000,000.00
3.2.3	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pembiayaan Netto</b>	<b>153,761,967,864.09</b>	<b>187,947,189,828.97</b>	<b>163,177,406,868.00</b>	<b>131,104,985,134.40</b>	<b>132,331,067,306.01</b>

Sumber : BPPKA Kota Mojokerto, 2020 (diolah)

Keterangan :

\* : Data realisasi

Pada tahun 2022 sampai tahun 2023, proyeksi pendapatan Kota Mojokerto mengalami pertumbuhan sebesar 1,06%. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan mengalami kenaikan 1,80%. Pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar 0,79%.

Belanja Daerah diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 1,25%. Belanja pegawai diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 2,10%, belanja barang dan jasa diproyeksikan mengalami kenaikan 2,02% dan komponen belanja belanja modal diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 1,95%.

Kenaikan realisasi belanja Pemerintah Kota Mojokerto pada kurun waktu 2019-2023 diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan belanja sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023;
2. Pemanfaatan belanja menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
4. Pemanfaatan belanja program khusus dan penanganan isu-isu strategis yang difokuskan pada fungsi-fungsi pelayanan dasar, stimulasi ekonomi, pelayanan publik dan dukungan penyelenggaraan pemerintahan lainnya dalam rangka mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023;

### **3.3.2 PENGHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN**

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah membutuhkan hasil proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah, yang masing-masing telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

Adapun nilai kapasitas riil kemampuan keuangan Kota Mojokerto untuk tahun 2019 hingga 2023 secara lebih jelas dapat disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.9 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah**

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	885,966,038,008.44	886,026,211,545.94	869,686,791,131.00	804,075,137,367.74	811,434,852,090.19
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	(33,881,941,269.02)	(81,619,194,444.06)	177,922,826,835.00	142,090,475,234.40	134,331,067,306.01
	Total Penerimaan	852,084,096,739.42	804,407,017,101.88	1,047,609,617,966.00	946,165,612,602.14	945,765,919,396.19
	Dikurangi:					
4	Belanja Tidak Langsung	331,175,686,534.98	357,683,371,805.60	-	-	-
5	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	5,000,000,000.00	10,985,490,100.00	2,000,000,000.00
	<b>Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan</b>	<b>520,908,410,204.44</b>	<b>446,723,645,296.28</b>	<b>1,042,609,617,966.00</b>	<b>935,180,122,502.14</b>	<b>943,765,919,396.19</b>

Sumber : BPPKA Kota Mojokerto, 2021 (diolah)

Keterangan : untuk kolom 2019 dan 2020 berisi data realisasi

Berdasarkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah agar dalam mengalokasikan anggaran benar-benar sesuai dengan prioritas daerah. Kapasitas keuangan daerah yang telah diproyeksikan selama kurun waktu 2019-2023 akan dipergunakan untuk mendanai program pembangunan menengah daerah tahun 2019-2023 berdasarkan prioritas daerah.



**Tabel 3.10 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kota Mojokerto Tahun 2019 – 2023**

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		2019*	2020*	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	<b>Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan</b>	<b>520,908,410,204</b>	<b>446,723,645,296.28</b>	<b>1,042,609,617,966</b>	<b>935,180,122,502.14</b>	<b>943,765,919,396.19</b>
	Prioritas I	301,211,229,219	277,669,867,307.64	647,032,385,916	561,334,919,730.45	573,341,232,165.90
	Prioritas II	124,415,040,667.40	92,757,720,114.74	395,577,232,050.00	373,845,202,771.69	372,883,779,732.30
	Prioritas III	95,282,140,317.72	76,296,057,873.90	0.00	0.00	0.0

Keterangan :

\* : Data realisasi

Keterangan Berdasarkan Pasal 158, Permendagri No.86 Tahun 2017:

PRIORITAS I : Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar

PRIORITAS II : Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah

PRIORITAS III : Dialokasikan untuk membiayai Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya



## BAB IV

# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

### 4.1 Permasalahan Pembangunan

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi gambaran umum kondisi di Kota Mojokerto sebagaimana telah disajikan pada bab 2 (dua), terdapat berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

**Tabel 4 . 1 Permasalahan Pembangunan Kota Mojokerto**

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
1	Pendidikan	- guru yang belum memiliki kualifikasi S1/D4;
2	Kesehatan	- kasus kematian ibu dan kematian bayi - kasus balita gizi buruk - kasus balita stunting - kasus TB - sarana dan prasarana kesehatan - kesadaran masyarakat tentang protokol kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase dibawah 50%; - Terdapat saluran drainase yang kurang baik, sehingga terjadi genangan sesaat di beberapa titik; - Masih ada jalan yang kondisinya kurang baik;
4	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	- kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni;
5	Ketentraman, Ketertiban	- penyelesaian pelanggaran K3;

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
	dan Perlindungan Masyarakat	- Belum optimalnya penegakan Perda dan Perwali
6	Sosial	- Makin meningkatnya penduduk miskin akibat pandemi Covid-19; - Keakuratan database PMKS dalam menunjang perencanaan kebijakan yang tepat sasaran
7	Tenaga Kerja	- kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan; - Masih adanya pengupahan pegawai yang belum sesuai UMR; - Peningkatan kompetensi, kreativitas, kemandirian, dan kewirausahaan untuk mengurangi jumlah pencari kerja - Semakin tingginya TPT akibat pandemi covid-19
8	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	- Meningkatnya kasus kekerasan perempuan dan anak
9	Pangan	- Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya pangan lokal
10	Pertanahan	- konflik pertanahan yang belum terselesaikan; - Pengamanan aset milik pemerintah kota untuk kepentingan pembangunan - Masih perlunya pengadaan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum
11	Lingkungan Hidup	- Rendahnya kualitas air yang ditunjukkan dengan turunnya indeks kualitas air dari tahun 2016 sampai tahun 2020;
12	Administrasi Penduduk dan pencatatan sipil	- Masih adanya penduduk yang belum memiliki KTP elektronik - Masih adanya pasangan nikah yg belum memiliki akta nikah
13	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	- Masih banyaknya penduduk usia subur yang belum menjadi peserta KB; - Masih adanya angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun)
14	Perhubungan	- Masih adanya angkutan umum yang tidak memiliki KIR angkutan umum; - Masih adanya rambu-rambu lalu lintas dan yang belum terpasang - Masih adanya jalan yang belum terpasang PJU
15	Komunikasi dan Informatika	- Belum semua OPD memiliki website; - Belum terintegrasinya sistem informasi antar OPD
16	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	- Masih adanya koperasi, UKM non BPR/ LKM yang tidak aktif;
17	Penanaman Modal	- Jumlah investor cenderung turun dari tahun 2016 sampai tahun 2020 akibat ketidaksinkronan antar regulasi sehingga menyulitkan investor untuk berinvestasi - Perlunya peningkatan pelayanan dan integrasi sistem

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
		perizinan dan non perizinan
18	Kepemudaan dan olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya kewirausahaan pemuda</li> <li>- Masih rendahnya cakupan pembinaan atlet muda;</li> <li>- Masih adanya pelatih yang tidak bersertifikat;</li> <li>- Kurangnya apresiasi bagi atlet, pelatih dan wasit yang berprestasi</li> <li>- Masih minimnya sarana prasarana olahraga</li> </ul>
19	Statistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum teraturnya penerbitan publikasi data statistik;</li> <li>- belum optimalnya pengelolaan dan integrasi data statistik di lingkup pemerintah kota</li> </ul>
20	Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Turunnya penyelenggaraan festival seni dan budaya akibat pandemi Covid-19;</li> <li>- Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya lokal</li> </ul>
21	Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya pengunjung perpustakaan akibat pandemi Covid-19.</li> </ul>
22	Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya penataan tertib arsip</li> <li>- Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola kearsipan</li> </ul>
23	Pariwisata	Kurangnya ekosistem digital dalam mendukung pembangunan kepariwisataan
24	Pertanian	Tingginya alih fungsi lahan pertanian
25	Energi dan Sumber Daya Mineral	Masih adanya rumah tangga yang belum memiliki akses jaringan gas bumi
26	Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase jumlah pedagang informal yang mendapat pembinaan turun pada tahun 2019 dan tahun 2020 karena keterbatasan anggaran, sedangkan jumlah pedagang informal semakin bertambah;</li> <li>- Penurunnya nilai ekspor akibat pandemi Covid-19</li> </ul>
27	Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Turunnya jumlah IKM akibat pandemi Covid-19;</li> </ul>
28	Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi</li> <li>- Pertumbuhan ekonomi yang menurun akibat Covid-19</li> </ul>
28	Perencanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal.</li> <li>- Implementasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal</li> </ul>
29	Keuangan	Belum mengoptimalkan kinerja pendapatan asli daerah terutama pajak dan retribusi;
30	Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyaknya ASN yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional</li> <li>- Adanya JPT yang kosong</li> <li>- Banyaknya penempatan ASN yang kompetensinya tidak sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diduduki</li> </ul>
31	Penelitian dan Pengembangan	Implementasi hasil kelitbangan
32	Kesatuan Bangsa dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Turunnya tingkat partisipasi politik di pilkada Kota Mojokerto tahun 2018 dibanding pilkada Kota</li> </ul>

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
		Mojokerto tahun 2013 - Potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi

## 4.2 Isu Strategis

### 4.2.1. Isu Internasional

#### 1. Sustainable Development Goals (SDG's)

*Melenium Development Goals* atau biasa kita kenal dengan MDG's merupakan komitmen dari 189 negara untuk tujuan pembangunan yang lebih baik, yang dicanangkan mulai September 2000 hingga 2015 telah dianggap gagal. Melalui deklarasi MDGs isu yang dibangun dan harus dicapai pada tahun 2015 adalah kesejahteraan masyarakat dan pembangunan masyarakat. Menindak lanjuti hal tersebut, munculah *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang merupakan komitmen baru oleh berbagai negara dengan menargetkan 3 tujuan mulia yang dicapai ditahun 2030 yakni mengakhiri kemiskinan, mengatasi dan menekan kesenjangan, serta mengatasi perubahan iklim.

- a) **Tanpa Kemiskinan:** Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat
- b) **Tanpa Kelaparan:** Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan
- c) **Kehidupan sehat dan sejahtera:** Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia
- d) **Pendidikan Berkualitas:** Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang
- e) **Kesetaraan Gender:** Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan
- f) **Air Bersih dan Sanitasi Layak:** Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua
- g) **Energi Bersih dan Terjangkau:** Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua
- h) **Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi:** Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua
- i) **Industri, Inoveasi, dan Infrastruktur:** Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi

- j) **Berkurangnya Kesenjangan:** Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi
- k) **Kota dan Komunitas Berkelanjutan:** Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan
- l) **Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab:** Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
- m) **Penanganan Perubahan Iklim:** Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya
- n) **Ekosistem Laut:** Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan
- o) **Ekosistem Darat:** Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan
- p) keanekaragaman hayati.
- q) **Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh:** Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif
- r) **Kemitraan untuk Mencapai Tujuan:** Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan

Sebagai upaya dalam mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, maka selayaknya DNA SDGs harus diintegrasikan terhadap setiap arah pembangunan baik Kabupaten / Kota, Provinsi, dan Nasional. Untuk itu diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa sebagai upaya untuk memastikan SDGs telah menjadi dasar dan isu yang harus diperhatikan dalam pembangunan, maka penelaahan KLHS Perubahan RPJMD sebagai bagian penting dalam tahapan penyusunan isu-isu strategis.

Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 memiliki beberapa isu strategis yang masih menjadi kendala di Kota Mojokerto meliputi: peningkatan kapasitas dan distribusi air bersih dan sanitasi yang layak, pemenuhan kebutuhan pangan dari daerah lain, pengolahan dan pengendalian sampah, dan pengendalian terhadap limbah pencemar telah termaktub dalam tujuan, kebijakan strategi dan program perencanaan pembangunan pada dokumen Perubahan RPJMD Kota Mojokerto 2018-2023. Hal ini merupakan wujud keselarasan dokumen perencanaan Kota Mojokerto dalam mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs).

## 2. Isu Perekonomian Global

Isu strategis internasional lain yang mewarnai dunia lainnya adalah terkait perekonomian global yang ditandai 4 hal sebagai berikut :

1) *Perlambatan ekonomi Tiongkok dan Terjadinya perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok*

Pertumbuhan Tiongkok yang menurun setelah kombinasi pengetatan regulasi yang diperlukan untuk mengendalikan shadow banking dan peningkatan ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat. Selain itu, kebijakan perdagangan yang semakin protektif dan berujung pada perang dagang menjadi salah satu risiko terbesar yang dihadapi oleh perekonomian dunia. Kebijakan tersebut dapat mengganggu prospek pertumbuhan perdagangan dunia yang baru saja pulih pasca krisis keuangan global, serta menciptakan ketidakpastian terhadap aktivitas investasi yang memiliki keterkaitan erat dengan perdagangan.

2) *Kebijakan perdagangan negara perekonomian besar yang semakin protektif*

Kebijakan perdagangan yang semakin protektif dan berujung pada perang dagang menjadi salah satu risiko terbesar yang dihadapi oleh perekonomian dunia. Kebijakan tersebut dapat mengganggu prospek pertumbuhan perdagangan dunia yang baru saja pulih pasca krisis keuangan global, serta menciptakan ketidakpastian terhadap aktivitas investasi yang memiliki keterkaitan erat dengan perdagangan. Kebijakan proteksionisme perdagangan ini dapat memberikan sentiment negatif terhadap perdagangan dunia maupun pasar keuangan global.

3) *Harga komoditas dunia yang fluktuatif*

Laju pertumbuhan harga komoditas yang berakselerasi cukup cepat di tahun 2017-2018 diperkirakan melambat di tahun 2019 seiring dengan tingkat pertumbuhan ekonomi global yang cenderung melambat. Di sektor pertanian atau pangan, perbaikan produktivitas dan teknologi diharapkan dapat meningkatkan produksi yang mendorong stabilitas harga. Sementara itu, pergerakan harga komoditas batu bara dan logam di tahun 2019 diperkirakan sedikit mengalami penurunan terutama dipengaruhi oleh moderasi permintaan Tiongkok seiring dengan perubahan struktur ekonomi dari basis investasi ke konsumsi serta implementasi aktivitas ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Pada sisi komoditas logam, kebijakan protektif AS dapat menyebabkan kelebihan pasokan pasar di luar AS, sementara di dalam negeri AS sendiri akan terjadi kenaikan harga. Sejalan dengan pergerakan harga komoditas dunia lainnya, harga minyak dunia yang mengalami tren penurunan sejak pertengahan 2014 dan mencapai titik terendah di awal tahun 2016, berbalik menunjukkan tren meningkat. Peningkatan harga ini utamanya didorong oleh kenaikan permintaan minyak mentah

dari negara-negara berkembang khususnya Tiongkok dan India, serta mulai menguatnya permintaan negara-negara maju. Selain itu, adanya ketidakpastian geopolitik di berbagai kawasan, antara lain di Timur Tengah yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga komoditas di tahun 2019, khususnya minyak mentah.

#### 4) *Krisis Ekonomi Global*

Pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian seluruh negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Untuk wilayah Asia Pasifik, misalnya, Bank Dunia memprediksi terjadi kontraksi yang dalam, yaitu sebesar 6% dibandingkan pertumbuhan 2019. Sedangkan ekonomi global diperkirakan akan kontraksi hingga 5,2 persen di tahun 2020. Kontraksi tersebut menjadi resesi terdalam sejak Perang Dunia II dengan sebagian besar ekonomi mengalami penurunan output per kapita yang dalam sejak 1870. Tekanan pandemi menghantam paling keras di negara-negara dengan penyebaran covid-19 paling parah. Mereka yang memiliki ketergantungan besar terhadap perdagangan global, pariwisata, ekspor komoditas dan pembiayaan eksternal juga terdampak signifikan.

### **3.2.2. Isu Nasional**

#### **1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mutu pelayanan dasar yang merupakan pelayanan wajib yang berhak diperoleh masyarakat secara minimal. Sesuai dengan undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Standar Pelayanan Minimal meliputi :

1. SPM Bidang Pendidikan;
2. SPM Bidang Kesehatan;
3. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
6. SPM Bidang Sosial.

Setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan



standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh Kementerian terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 79 Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan rencana pencapaian standar pelayanan minimal yang mengatur penerapan standar pelayanan minimal di daerah melalui 4 tahapan, yaitu: Persiapan rencana pencapaian SPM, Pengintegrasian rencana SPM dalam dokumen perencanaan, Mempersiapkan mekanisme pembelanjaan penerapan SPM dan perencanaan pembiayaan SPM serta Penyampaian informasi rencana dan realisasi pencapaian target tahunan SPM.

## **2. RPJMN 2020-2024**

Kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 yaitu “TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”, yang dilakukan melalui 9 misi pembangunan yang juga dikenal sebagai Nawacita Kedua, antara lain :

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Implementasi Misi tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita. Kelima arahan tersebut antara lain :

- 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia  
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global, dengan prioritas pada peningkatan Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial, Produktivitas, dan Pembangunan Karakter.

- 2) **Pembangunan Infrastruktur**  
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat, dengan prioritas pada Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, Infrastruktur Perkotaan, Energi dan Ketenagalistrikan, dan TIK untuk Transformasi Digital.
- 3) **Penyederhanaan Regulasi**  
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
- 4) **Penyederhanaan Birokrasi**  
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi, dengan prioritas pada Penyederhanaan Prosedur, Penyelenggaraan e-Government, dan Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik untuk kegiatan Ekspor/Impor, Kepabeanaan, dan Kepelabuhan.
- 5) **Transformasi Ekonomi**  
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan prioritas pada Industrialisasi, Pengembangan Destinasi Unggulan, dan Penguatan Ekonomi Kreatif dan ekonomi Digital

Sedangkan isu penting dalam RPJMN 2020-2024 yang dikenal sebagai 7 Agenda Pembangunan adalah sebagai berikut :

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

### **3. Pandemi Covid-19**

Pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian seluruh negara, baik negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia. Pertumbuhan

ekonomi Nasional tahun 2020 mengalami kontraksi hingga -2,07, yang menyebabkan Indonesia mengalami resesi ekonomi. Selain dampak ekonomi, Covid-19 juga menyebabkan permasalahan kesehatan dan sosial. Kasus terkonfirmasi positif dan kasus kematian covid-19 terus meningkat, meskipun banyak juga yang sembuh. Selain itu, Covid-19 juga memberikan dampak sosial, yaitu semakin meningkatnya pengangguran dan penduduk miskin. TPT nasional di tahun 2020 mencapai 7,07, naik sebesar 1,84 dibanding tahun 2019, dan persentase penduduk miskin nasional di tahun 2020 mencapai 9,78 persen atau naik sebesar 0,37 persen dari tahun 2019. Hal ini disebabkan banyak sektor, antara lain perdagangan, industri, dan pariwisata yang menutup usahanya karena adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19.

### **3.2.2. Isu Regional Jawa Timur**

#### **1. RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024**

Isu strategis dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Keagamaan dan Kebudayaan;
- 2) Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat;
- 3) Tata kelola Pemerintah dan Reformasi Birokrasi;
- 4) Demokrasi Kewargaan;
- 5) Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.

### **3.2.3. Isu Strategis Kota Mojokerto**

Perumusan isu strategis didapatkan berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang disinkronkan dengan visi-misi dan program unggulan Kepala Daerah terpilih. Adapun isu strategis yang telah ditentukan sebagai isu strategis pembangunan Kota Mojokerto selama lima tahun kedepan antara lain:

#### **1. Membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mampu bersaing**

Isu ini berkaitan dengan peningkatan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Masih adanya pendidik yang belum memenuhi kualifikasi, kurang meratanya fasilitas dan mutu layanan pendidikan, dan masih adanya siswa putus sekolah. Sedangkan di bidang Kesehatan, permasalahan yang dihadapi antara lain masih adanya kematian bayi, masih adanya kematian ibu, masih ada balita gizi buruk, dan masih adanya kasus buang air besar sembarangan.

Membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas dimulai dengan pemenuhan kebutuhan dasar yang merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis

maupun psikologis, yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan yang pada akhirnya dapat mencapai derajat kesejahteraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Hal ini berarti kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari terpenuhinya berbagai kebutuhan hidupnya, baik itu secara materi (sandang, pangan, dan papan), secara fisik (kesehatan, lingkungan yang bersih, termasuk air bersih), secara mental (seperti rasa aman dan pendidikan), serta secara spiritual (terpenuhinya kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri dan hidup bersosial).

## **2. Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai Kota yang tertib, aman dan stabil**

Di Kota Mojokerto masih banyak kasus pelanggaran PERDA, seperti banyaknya PKL yang berjualan di tempat yang bukan seharusnya, semakin banyaknya pembangunan toko modern yang tidak sesuai dengan ketentuan dan pelanggaran lainnya yang terkait dengan perijinan. Pada tahun 2018 penegakan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto sebesar 19,80%, sehingga masih ada sebagian besar atau 80,20% pelanggaran peraturan daerah yang ditindak.

## **3. Mewujudkan *Good Governance* dan pelayanan prima.**

Pemerintah yang belum mampu menunjukkan kinerja yang optimal dalam peningkatan sektor ekonomi maupun sosial, menimbulkan adanya isu tuntutan reformasi birokrasi yang mampu melakukan perubahan sosial ekonomi, dan pemerintahan yang belum mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, sehingga menimbulkan isu tuntutan penciptaan pemerintahan yang dipercaya masyarakat. Masih adanya ASN yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan, baik fungsional maupun struktural, masih banyaknya jabatan yang kosong, serta adanya ASN yang ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensinya merupakan faktor penyebab masih belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat.

## **4. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung daya saing Kota Mojokerto dalam ekonomi kerakyatan.**

Lambatnya pertumbuhan investasi, belum meratanya akses masyarakat terhadap pasar tradisional, belum optimalnya produksi dan

pemasaran produk unggulan daerah, serta belum berkembangnya industri pariwisata merupakan permasalahan-permasalahan yang perlu diselesaikan dengan optimalisasi peran pasar tradisional, pengembangan ekonomi kreatif, penguatan pasar lokal dan ekspansi pasar regional maupun nasional bagi produk hasil industri dan produk unggulan daerah lainnya, pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, pembangunan industri pariwisata serta pembangunan kelembagaan pariwisata.

Di sektor infrastruktur sebagai pendukung untuk perekonomian, juga masih terdapat beberapa permasalahan, antara lain masih adanya genangan di beberapa titik, masih adanya jalan yang kondisinya kurang baik, masih adanya bangunan fasilitas publik yang kondisinya kurang baik, masih adanya rumah tangga yang belum memiliki akses air minum dan sanitasi layak, serta masih adanya kawasan kumuh dan rumah yang tidak layak huni. Khusus untuk banjir atau genangan perlu mendapat perhatian khusus, karena topografi Kota Mojokerto merupakan cekungan yang sangat berpotensi menyebabkan banjir ataupun genangan. Pembangunan kolam retensi di beberapa titik yang berpotensi banjir diperlukan sebagai upaya untuk mencegah bencana banjir. Dengan adanya pembangunan infrastruktur di segala bidang, timbul permasalahan terkait lingkungan hidup. Tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kota Mojokerto terus mengalami penurunan, yang artinya kondisi udara dan air di Kota Mojokerto semakin tercemar setiap tahunnya. Pembangunan RTH dan peningkatan sarana prasarana pengelolaan sampah diperlukan untuk dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Selain itu untuk menunjang daya saing perekonomian Kota Mojokerto, diperlukan pembentukan BUMD baru yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi peningkatan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karaktersitik, dan kondisi daerah, serta memperoleh laba bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemerintah Kota Mojokerto telah memiliki 2 (dua) BUMD, yaitu PDAM Maja Tirta dan PT BPRS Kota Mojokerto. Namun, kedua BUMD ini dirasa belum cukup untuk memenuhi berbagai aspek kebutuhan masyarakat yang ada sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas di Kota Mojokerto. Berdasarkan pengkajian kelayakan pendirian BUMD baik secara ekonomi, teknis, sosial, hukum, dan lingkungan, serta mempertimbangkan aspek pelayanan umum dan aspek kebutuhan daerah (masyarakat) Kota Mojokerto, maka urgensi pendirian BUMD baru oleh Pemerintah Kota Mojokerto sebagai bentuk pemenuhan aspek kebutuhan masyarakat meliputi prioritas usaha diantaranya mencakup 10 sektor

usaha, yaitu sektor perhubungan dan transportasi, sektor fasilitasi pariwisata, sektor komunikasi dan informasi, sektor pelayanan kesehatan, sektor pengelolaan pasar rakyat, dan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah.

#### **5. Melestarikan budaya lokal yang relevan dengan kehidupan bermasyarakat.**

Tidak berkembangnya budaya lokal Kota Mojokerto akibat kurangnya apresiasi keragaman seni dan kreatifitas karya budaya, masuknya budaya asing dan modern, serta masih kurangnya penyelenggaraan even dan festival yang dapat mengangkat budaya lokal menyebabkan pelestarian budaya lokal di Kota Mojokerto perlu mendapat perhatian lebih serius. Pemajuan kebudayaan sebagai amanat konstitusi dengan berbekal identitas budaya bertajuk "*Spirit of Majapahit*" perlu digulirkan sebagai pendekatan pembangunan kebudayaan di wilayah Kota Mojokerto. Dengan demikian, penguatan pembangunan kebudayaan perlu dioptimalkan selaras dengan pembangunan pariwisata dan akhirnya akan berdampak pada perbaikan kualitas hidup bermasyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, identifikasi dan pengembangan unsur-unsur budaya yang bersifat "*intangible*" maupun yang "*tangible*" dari warisan budaya Majapahit harus didorong agar upaya peningkatan ketahanan budaya dan kontribusi budaya melalui perlindungan cagar budaya, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya dengan cara pelestarian dan pengenalan budaya melalui festival budaya dari warisan budaya Majapahit, serta pembinaan kebudayaan melalui penguatan kelembagaan kebudayaan dapat terus terjaga. Pada akhirnya, kontribusi budaya dapat selaras dengan pengembangan pariwisata daerah dan peningkatan ekonomi daerah.

#### **6. Pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian ekonomi.**

Pembangunan Kota Mojokerto yang masih terpusat pada sisi timur, mengakibatkan kesenjangan antar wilayah di Kota Mojokerto. Semakin tingginya indeks gini pada tahun 2018 yang sebesar 0,39 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Mojokerto semakin tinggi serta masih banyaknya penduduk miskin yang pada tahun 2018 sebesar 5,50 persen. Untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat miskin dibutuhkan pemberian modal usaha kecil. Sehingga perlunya meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap modal dan lembaga keuangan serta untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dalam hal pengelolaan potensi daerah diperlukan sebuah pemberdayaan lingkungan untuk mengelola potensinya secara berdikari.

**7. Anggaran yang berbasis pelayanan pada masyarakat.**

Terbatasnya sumber pendanaan dan kurang optimalnya penggunaan anggaran pada sektor prioritas yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Selain itu, perlu meningkatkan pendapatan asli daerah dan menguatkan kemampuan belanja non-pegawai pada APBD.



## BAB V

# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

---

### 5.1. VISI

Visi merupakan rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang di dalamnya berisi suatu gambaran yang terkait masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan serta dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder*.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kota Mojokerto untuk periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO YANG BERDAYA SAING, MANDIRI,  
DEMOKRATIS, ADIL, MAKMUR, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”**

Adapun penjabaran terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Berdaya Saing, bermakna:**

Kota Mojokerto mampu memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan daerah lain dalam segala aspek pembangunan. Berdaya saing ini tercermin dalam pelayanan public, iklim usaha dan investasi, profesionalisme aparatur, peraturan-peraturan yang dihasilkan serta daya saing pada produk-produk local Kota Mojokerto.

#### **2. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Mandiri, bermakna:**

Kemandirian adalah hakikat perjuangan sampai dengan arti kemerdekaan, yaitu hak setiap individual/masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya.

Selanjutnya, kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasi, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari atau mempengaruhinya.

Kemandirian suatu daerah tercermin antara lain pada:

- a. ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya;



- b. kemandirian aparaturn pemerintah dan aparaturn penegak hukum dalam menjalankan tugasnya;
- c. kemampuan pembiayaan yang bersumber dari daerah yang makin kokoh sehingga ketergantungan sumber dari luar daerah menjadi kecil;
- d. kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok.

Apabila karena sumberdaya alam tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu diimbangi dengan keunggulan sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi.

### **3. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Demokratis, bermakna:**

Dalam proses pembangunan jangka menengah daerah Kota Mojokerto semua anggota masyarakat Kota Mojokerto dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan memaksimalkan potensi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transportasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan wujud sebagai berikut:

- a. Terwujudnya masyarakat yang demokratis, berbudaya, bermartabat, menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggungjawab serta HAM;
- b. Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif;
- c. Terwujudnya kehidupan berpolitik yang demokratis;
- d. Terwujudnya penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan; dan
- e. Terwujudnya pelayanan public yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

### **4. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Adil, bermakna:**

Dalam proses pembangunan jangka menengah Kota Mojokerto, masyarakat Kota Mojokerto mempunyai kesempatan dan mendapat perlakuan yang sama dalam segala bidang pembangunan sesuai dengan tingkat kemampuannya dan perlakuan perundang-undang yang berlaku dalam bidang pembangunan ekonomi, social, dan budaya, politik, hukum dan keamanan dengan wujud sebagai berikut:

Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati seluruh masyarakat itu sendiri.

### **5. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Makmur – Sejahtera, bermakna:**

Dalam proses pembangunan jangka menengah Kota Mojokerto, semua anggota masyarakat Kota Mojokerto mamu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak sehingga terwujud kebutuhan dasar masyarakat berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dalam lingkungan masyarakat yang aman, nyaman dan tentram secara lahir dan batin.

## **6. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Bermartabat, bermakna:**

Memantapkan peran agama dan nilai-nilai spiritual sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, budi pekerti, etos kerja dan menghargai kemajemukan agama, sosial dan budaya.

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Mojokerto dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global.

### **5.2. MISI**

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kota Mojokerto yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Mojokerto 2018-2023 sebagai berikut:

- Misi 1.** Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- Misi 2.** Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM;
- Misi 3.** Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat;
- Misi 4.** Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah;
- Misi 5.** Mewujudkan ketahanan social budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila;
- Misi 6.** Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan;
- Misi 7.** Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Tujuh butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah di temakan dalam bentuk Visi pembangunan daerah. Jika dirumpukan, maka perumpunan fokus pembangunan pada misi Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:



**Gambar 5. 1 Gambar Misi Kota Mojokerto Tahun 2018-2023**

**Misi 1.** Mewujudkan SDM Berkualitas Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan;  
Misi ini menekankan pada pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas. Pelayanan tersebut kami yakini mampu meningkatkan akses sekaligus kualitas pendidikan dan kesehatan sehingga secara langsung mampu memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan SDM yang berkualitas. Pada aspek fisik seperti sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan berkualitas juga menjadi perhatian. Selain itu, penguatan terhadap kualitas tenaga pengajar dan tenaga paramedic juga menjadi fokus yang diperhatikan pada misi ini.

**Misi 2.** Mewujudkan Ketertiban, Supremasi Hukum Dan HAM;

Misi ini merepresentasikan upaya dalam penegakan hukum secara adil, konsekuen dan tidak diskriminatif. Disamping itu, keamanan dan ketertiban menjadi perhatian khusus pula.

Diharapkan, dengan dilaksanakannya misi ini, kesadaran hukum menjadi terbina serta terciptanya situasi aman, tertib dan terkendali.

**Misi 3.** Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Efektif, Demokratis, Bersih, Professional Dan Adil Dalam Melayani Masyarakat;

Pelayanan public yang efektif, optimal dan berkualitas diwujudkan melalui pendekatan *computer-based system* sehingga pelayanan menjadi lebih akurat dan lebih cepat. Oleh karena itu, reformasi birokrasi yang tidak hanya pada level kelembagaan, namun juga sampai kelevel system menjadi keniscayaan dalam perwujudan misi ini. Dengan demikian, diharapkan profesionalitas aparatur, pelayanan prima, transparansi dan melibatkan peran serta masyarakat dapat terwujud melalui misi ini.

**Misi 4.** Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkeadilan Dan Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Daerah;

Pada Misi ini, pemerataan pertumbuhan ekonomi menjadi tekanan utama. Sehingga kesenjangan ekonomi menjadi isu utama yang ingin di selesaikan pada misi ini. Adapun upaya pemerataan tersebut dilakukan dengan memperhatikan potensi daerah seperti layanan barang dan jasa seagai wilayah perkotaan. Untuk mendukung upaya tersbut maka perlu membangun infrastruktur perekonomian dan lingkungan sosial yang mantap dalam rangka menciptakn kondusifitas perkonomian. Melalui upaya ini, diharapkan usaha perdagangan dan lapangan kerja dapat bertumbuh dengan baik dan optimal.

**Misi 5.** Mewujudkan Ketahanan Social Budaya Dalam Kerangka Integrasi Nasional, Pada Tatanan Masyarakat Yag Bermartabat, Berakhlak Mulia, Beretika, Dan Berbudaya Luhur Berlandaskan Pancasila;

Misi ini mengupayakan penguatan modal sosial masyarakat Kota Mojokerto. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial.

Adapun upaya untuk meningkatkan kesalehan sosial tersebut diwujudkan melalui pendidikan imtaq dan iptek yang seimbang, mengharmoniskan relasi antar kelompok dan organisasi kemasyarakat serta memelihara nilai luhur budaya bangsa yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

**Misi 6.** Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan;

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat dibutuhkan untuk menjamin terwujudnya pembangunan secara *bottom-up* sehingga pembangunan menjadi tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk mewujudkan misi ini perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga dapat ditempuh secara tidak langsung dengan menurunnya pengangguran dan meningkatnya kualitas sumber daya tenaga kerja.

**Misi 7.** Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Lebih Mengutamakan Kesejahteraan Masyarakat

Mengingat keterbatasan dalam sumber pendanaan, maka efisiensi anggaran menjadi keabsahan yang tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu, menekankan penggunaan anggaran pada sektor prioritas yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat perlu dimaksimalkan. Selain itu, untuk menguatkan struktur keuangan daerah, perlu meningkatkan pendapatan asli daerah dan menguatkan kemampuan belanja non-pegawai pada APBD.

### **5.3. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki titik kritis dalam penyusunan RPJMD mengingat tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut baik dalam jangka pendek (tahunan) maupun 5 (lima) tahunan:

#### **5.3.1. Tujuan dan Sasaran Misi 1**

Sebagai upaya pencapaian Misi 1 yaitu **Mewujudkan SDM Berkualitas Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan** maka tujuan pembangunan, yaitu : Mewujudkan SDM Yang Berdaya Saing Dan Berkualitas, dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan: dengan indikator : Indeks pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan  
Indikator : Indeks Kesehatan;
3. Meningkatnya daya beli masyarakat;  
Indikator : Indeks Pengeluaran per kapita

### 5.3.2. Tujuan dan Sasaran Misi 2

Dalam rangka pencapaian misi **Mewujudkan Ketertiban, Supremasi Hukum, Dan HAM** maka tujuan pembangunan ditetapkan, yaitu Mewujudkan Masyarakat Taat Hukum, dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dengan indikator Persentase pelanggaran Perda yang terselesaikan.
- b. Terciptanya kerukunan sosial di masyarakat, dengan indikator Persentase konflik sosial yang terselesaikan

### 5.3.3. Tujuan dan Sasaran Misi 3

Dalam rangka pencapaian misi **Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Efektif, Demokratis, Bersih, Professional Dan Adil Dalam Melayani Masyarakat** maka tujuan pembangunan ditetapkan, yaitu : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani. Adapun indikator sasaran yang ditetapkan, sebagai berikut:

1. Nilai SAKIP;
2. Opini BPK;
3. IKM
4. Jumlah unit yang mendapatkan predikat WBK/WBBM;

Selain 4 indikator sasaran tersebut, pada tahun 2021-2023 ada tambahan 3 indikator, antara lain :

1. Indeks SPBE
2. Indeks Manajemen Resiko;
3. Sistem Merit

### 5.3.4. Tujuan dan Sasaran Misi 4

Dalam rangka pencapaian misi **Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkeadilan Dan Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Daerah** maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, dengan sasaran sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan Pertumbuhan PDRB sector-sector unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan indikator :
    - 1) Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN);
    - 2) Pertumbuhan PDRB sektor Industri;
    - 3) Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan;
    - 4) Pertumbuhan sektor lainnya.
  - b. Meningkatnya industri pariwisata, dengan indikator:
    - 1) Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata;
  - c. Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, dengan indikator:
    - 1) Laju Inflasi

2. Menyediakan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi dengan memperhatikan lingkungan hidup, dengan sasaran sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan Aksesibilitas Ekonomi Masyarakat Yang Berkelanjutan, dengan indikator:
    - 1) Indeks infrastruktur pekerjaan umum;
  - b. Meningkatkan akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi layak, dengan indikator :
    - 1) Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman
  - c. Meningkatkan infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan indikator:
    - 1) Indeks infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
  - c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dengan indikator:
    - 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)

#### **5.3.5. Tujuan dan Sasaran Misi 5**

Dalam rangka pencapaian misi **Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya Dalam Kerangka Integrasi Nasional, Pada Tatanan Masyarakat Yang Bermartabat, Berakhlak Mulia, Beretika, Dan Berbudaya Luhur Berlandaskan Pancasila**, maka tujuan pembangunan ditetapkan, yaitu : Meningkatkan Kesalehan Sosial, dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas seni budaya lokal, dengan indikator:
  - 1) Jumlah apresiasi seni dan budaya
- b. Meningkatkan kerukunan antar-umat beragama
  - 1) Jumlah konflik SARA, untuk tahun 2021 sampai dengan 2023 diubah menjadi Persentase konflik SARA yang terselesaikan

#### **5.3.6. Tujuan dan Sasaran Misi 6**

Dalam rangka pencapaian misi **Mewujudkan Partispasi Masyarakat Melalui Pemberian Akses Dan Kesempatan Dalam Pembangunan** maka tujuan pembangunan ditetapkan, yaitu : Meningkatkan akses masyarakat dalam pembangunan serta kesetaraan gender. Adapun indikator sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kesempatan Kerja Masyarakat, dengan indikator:
  - 1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
- b. Menurunnya angka kemiskinan, dengan indikator:
  - 1) Angka Kemiskinan
- c. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, dengan indikator:
  - 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

### **5.3.7. Tujuan dan Sasaran Misi 7**

Dalam rangka pencapaian misi **Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Yang Lebih Mengutamakan Kesejahteraan Masyarakat** maka tujuan pembangunan ditetapkan adalah : Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah, dengan sasaran : Meningkatnya kemandirian keuangan daerah. Adapun indikatornya, yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.



**Tabel 5. 1**  
**Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Mojokerto Tahun 2018-2023**

**VISI: TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO YANG BERDAYA SAING, MANDIRI, DEMOKRATIS, ADIL, MAKMUR, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT**

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target								Sasaran	Indikator Sasaran	Target							
			Kondisi Awal	RPJMD	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	RPJMD	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Kondisi Akhir
			2018		2019	2020	2021	2022	2023	2023			2018		2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19
Misi 1: Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan	Mewujudkan SDM yang berdaya saing dan berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	77,14	Awal	77,50	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00	Meningkatnya Kualitas Dan Akses Pendidikan	Indeks pendidikan	0,717	Awal	0,727	0,732	0,738	0,744	0,749	0,749
			Meningkatnya Kualitas Dan Akses Kesehatan								Indeks kesehatan	0,816	Awal		0,816	0,818	0,819	0,821	0,822	0,822
														Perubahan	0,725	0,730	0,732	0,735	0,737	0,737
			Perubahan								0,818	0,820	0,821		0,822	0,823	0,823			
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Indeks Pengeluaran per kapita	0,78		Awal	0,79	0,80	0,81	0,82	0,83	0,83										
			Perubahan		0,797	0,793	0,794	0,796	0,797	0,797										
Misi 2: Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM	Mewujudkan masyarakat Taat Hukum	Persentase pelanggaran perda yang terselesaikan		1.617	Awal	30%	30%	30%	30%	30%	30%	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah	Persentase pelanggaran Perda yang terselesaikan	1617	Awal	30%	30%	30%	30%	30%
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	n/a	Perubahan		-	-	94	94,5	95	95	Terciptanya kerukunan sosial di masyarakat	Persentase konflik sosial yang terselesaikan	n/a		Awal	-	-	-	-
					Perubahan	82,66%	87,62%	88%	89%	90%	90%									
		Perubahan	-	-		100%	100%	100%	100%											
Misi 3: Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik		INDEKS REFORMASI BIROKRASI	CC	Awal	B	BB	A	A	A	A	Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani	Nilai SAKIP	B	Awal	B	BB	BB	BB	A
		Perubahan				66,50 (B)	67,42 (B)	70-75 (BB)	76-80 (BB)	80-85 (A)	80-85 (A)									
						Perubahan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP			WTP						
		Perubahan					WTP	WTP	WTP	WTP	WTP			WTP						
Perubahan	62,31 (B)		62,45 (B)	63-70 (B)	>70-80 (BB)	>80-90 (A)	>80-90 (A)													
	Perubahan	76,61 - 88,30	Awal	76,61- 88,30	76,61- 88,30	76,61- 88,30	76,61- 88,30	76,61- 88,30												

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target								Sasaran	Indikator Sasaran	Target							
			Kondisi Awal	RPJMD	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	RPJMD	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Kondisi Akhir
			2018		2019	2020	2021	2022	2023	2023			2018		2019	2020	2021	2022	2023	2023
masyarakat													Perubahan	83,87	84,85	81,26-88,30	81,26-88,30	81,26-88,30	81,26-88,30	
											Jumlah unit yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	0	Awal	1	1	1	1	1	5	
													Perubahan	1	1	2	3	4	4	
											Indeks SPBE	3,22	Awal	-	-	-	-	-	-	
													Perubahan	-	-	3,30	3,40	3,50	3,50	
											Indeks Manajemen Resiko	1	Awal	-	-	-	-	-	-	
													Perubahan	-	-	1	2	2	2	
											Sistem Merit	Buruk	Awal	-	-	-	-	-	-	
													Perubahan	-	163 (Buruk)	175-249 (Kurang)	250-285 (Baik)	286-324 (Baik)	286-324 (Baik)	
Misi 4: Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,49	Awal	5,6% – 6%	5,6% – 6%	5,6% – 6%	5,6% – 6%	5,6% – 6%	5,6% – 6%	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	285.898.021.000	Awal	333.521.000	381.145.000	428.769.000	476.393.000	524.017.000	524.017.000
													Perubahan	333.521.000	352.530.000	360.000.000	365.000.000	370.000.000	370.000.000	
												Pertumbuhan PDRB sektor Industri	6,16	Awal	5,7-6,1	5,7-6,1	5,7-6,1	5,7-6,1	5,7-6,1	
													Perubahan	3,72	-3,55	0,7-1,4	1,5-1,9	2,0-2,5	2,0-2,5	
												Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	6,16	Awal	5,8-6,5	5,8-6,5	5,8-6,5	5,8-6,5	5,8-6,5	
													Perubahan	5,89	-9,20	1,5-2,4	2,5-3,4	3,5-4,4	3,5-4,4	
												Pertumbuhan PDRB sektor lainnya	4,3	Awal	5,3-5,4	5,3-5,4	5,3-5,4	5,3-5,4	5,3-5,4	
													Perubahan	5,29	-0,27	1,6-2,5	2,6-3,2	3,2-3,7	3,2-3,7	
											Meningkatnya industri	Pertumbuhan PDRB	n.a	Awal	0,5%	1%	1,5%	2%	2,5%	2,5%

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target								Sasaran	Indikator Sasaran	Target							
			Kondisi Awal	RPJMD	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	RPJMD	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Kondisi Akhir
			2018		2019	2020	2021	2022	2023	2023			2018		2019	2020	2021	2022	2023	2023
											pariwisata	sektor pariwisata		Perubahan	7,78%	-8,16%	1,5%	2,0%	2,5%	2,5%
											Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Laju Inflasi	1,97	Awal	2,5-4,5	2,5-4,5	2,5-4,5	2,5-4,5	2,5-4,5	2,5-4,5
													Perubahan	1.83	1.93	1,9-2,1	1,9-2,1	1,9-2,1	1,9-2,1	
	Menyediakan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi dengan memperhatikan lingkungan hidup	Indeks Infrastruktur	68,81	Awal	74,12	78,80	82,24	86,92	91,60	91,60	Meningkatnya Aksesibilitas Ekonomi Masyarakat Yang Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur pekerjaan umum	75%	Awal	75%	80%	82%	84%	86%	86%
			Perubahan	80,96	84,56	85,19	86,06	86,93	86,93		Perubahan	77,93%	85,56%	87,56%	89,56%	91,56%	91,56%			
											Meningkatnya akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi layak	Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman	75%	Awal	76%	81%	84%	86%	88%	88%
													Perubahan	94,61%	95,96%	96,46%	96,96%	97,46%	97,46%	
											Meningkatkan infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	59,52	Awal	72,81	76,99	82,61	91,30	100	100
													Perubahan	87,32	91,60	92,10	92,60	93,10	93,10	
											Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	63,10	Awal	65,23	66,45	67,37	68,59	68,59	68,59
													Perubahan	65,24	57,72	57,79	57,86	57,92	57,92	
Misi 5: Mewujudkan ketahanan social budaya dalam kerangka integrasi	Meningkatkan Kesalehan Sosial	Indeks Kesalehan Sosial	n.a.	Awal	> 60	63	65	68	70	70	Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya lokal	Jumlah apresiasi seni dan budaya	13	Awal	13	13	13	13	13	13
													Perubahan	8	0	6	8	10	10	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target								Sasaran	Indikator Sasaran	Target							
			Kondisi Awal	RPJMD	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	RPJMD	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Kondisi Akhir
			2018		2019	2020	2021	2022	2023	2023			2018		2019	2020	2021	2022	2023	2023
nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila				Perubahan	76,16	76,20	76,23	76,25	76,27	76,27	Menguatkan Ketahanan Sosial Masyarakat	Jumlah konflik sosial	0	Awal	0	0	0	0	0	0
					Perubahan	3	5	-	-	-			-	-						
				Meningkatnya kerukunan antar-umat beragama	Jumlah konflik SARA	0	Awal	0	0	0	0	0	0	0						
						Perubahan	0	0	-	-	-	-	-							
						n/a	Awal	-	-	-	-	-	-							
						Perubahan	-	-	100%	100%	100%	100%								
Misi 6: Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pemanfaatan	Meningkatkan Akses Masyarakat Dalam Pembangunan serta kesetaraan gender	Indeks Gini	0,341	Awal	0,36	0,36	0,34	0,32	0,29	0,29	Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,45	Awal	2,4-3,5	2,4-3,5	2,4-3,5	2,4-3,5	2,4-3,5	2,4-3,5
				Perubahan	0,309	0,355	0,353	0,350	0,348	0,348			Perubahan	2,65	6,74	6,1-6,4	5,6-6,0	5,0-5,5	5,0-5,5	
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,40	Awal	93,45	93,50	93,55	93,60	93,65	93,65	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	5,379	Awal	5,25 – 5,70	5,25 – 5,70	5,25 – 5,70	5,25 – 5,70	5,25 – 5,70	5,25 – 5,70
				Perubahan	93,18	93,26	93,28	93,30	93,32	93,32				Perubahan	5,15	6,24	5,84 - 6,04	5,63 - 5,83	5,42 - 5,62	5,42 - 5,62
		Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	82,00	Awal	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50	84,50									
					Perubahan	83,74	90,59	91,00	91,50	92,00	92,00									
Misi 7: Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,824	Awal	0,918	1,20	1,60	2,00	2,40	2,40	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	23,72	Awal	24,999	25,898	26,797	27,8	27,9	27,9
				Perubahan	0,787	0,780	-	-	-	-				Perubahan	27,795	35,610	30,415	30,777	31,145	31,145
		Kapasitas Fiskal Daerah	n/a	Awal	-	-	-	-	-	-										

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target								Sasaran	Indikator Sasaran	Target							
			Kondisi Awal	RPJMD	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Kondisi Akhir			Kondisi Awal	RPJMD	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Kondisi Akhir
			2018		2019	2020	2021	2022	2023	2023			2018		2019	2020	2021	2022	2023	2023
				Perubahan	-	-	384.00 0.000. 000	386.00 0.000. 000	389.00 0.000. 000	389.000 .000.00 0										



## BAB VI

# STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Guna mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2018-2023. Strategi Pembangunan merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana bagaimana Visi dan Misi pembangunan serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD akan dicapai. Berikut analisis terkait kondisi *existing*, peluang dan ancaman yang ada di Kota Mojokerto :

	<b><u>Kekuatan</u></b> <b><i>Strengths (S)</i></b>	<b><u>Kelemahan</u></b> <b><i>Weaknesses (W)</i></b>
<b>Faktor Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas dan akses masyarakat terhadap pendidikan semakin baik.</li> <li>2. Menguatnya kinerja cakupan layanan kesehatan Kota Mojokerto</li> <li>3. Infrastruktur perkotaan yang semakin memadai dan mendukung dalam penguatan pergerakan orang dan logistik yang didukung dengan akses tol yang dekat.</li> <li>4. Kota Mojokerto mewarisi "Spirit of Majapahit" sehingga kaya akan sumber daya kebudayaan.</li> <li>5. Komitmen Pemerintah Kota Mojokerto dalam pengembangan kawasan peruntukkan perdagangan dan industri</li> <li>6. Pengembangan 39 Daya Tarik Wisata Kota (DTWK) di Kota Mojokerto untuk menumbuhkan ekonomi daerah</li> <li>7. Masyarakat Kota Mojokerto memiliki kerukunan umat beragama, nilai demokrasi serta kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi.</li> <li>8. Komitmen Pemerintah Kota Mojokerto dalam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan.</li> <li>2. Masih adanya kasus kematian ibu dan bayi, balita gizi buruk, balita stunting, kasus TB, serta kurangnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan.</li> <li>3. Terdapat saluran drainase, kondisi jalan, bangunan fasilitas publik yang masih kurang baik</li> <li>4. Adanya ketidaksinkronan RTRW dan RDTR</li> <li>5. Belum optimalnya akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas</li> <li>6. Kualitas konsumsi pangan yang diindikasi oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih dibawah 92,5% (SDG's)</li> <li>7. Belum optimalnya penegakan Perda dan Perwali</li> <li>8. Masih terdapat PMKS yang belum menerima bantuan.</li> <li>9. Masih rendahnya minat kewirausahaan pemuda</li> <li>10. Masih rendahnya kualitas</li> </ol>
<b>Eksternal</b>		

	<p>pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat</p> <p>9. Penguatan reformasi birokrasi melalui penyesuaian nomenklatur perangkat daerah dan penguatan profesionalisme ASN.</p> <p>10. Komitmen Pemerintah Kota Mojokerto dalam pengendalian bencana banjir.</p> <p>11. Komitmen Pemerintah Kota Mojokerto dalam optimalisasi kinerja pengentasan PMKS dan mengurangi kesenjangan.</p> <p>12. Penguatan sistem e-government yang dimiliki</p>	<p>atlit dan minimnya pelatih yang berkualitas</p> <p>11. Rendahnya kualitas tenaga kerja</p> <p>12. Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak</p> <p>13. Masih adanya permasalahan agraria yang belum terselesaikan</p> <p>14. Kurangnya keberadaan RTH di Kota Mojokerto</p> <p>15. Kurang optimalnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</p> <p>16. Kurang optimalnya pengendalian penduduk dan keluarga berencana</p> <p>17. Belum terintegrasinya sistem informasi antar OPD</p> <p>18. Belum efisiennya proses pelayanan perizinan</p> <p>19. Kurangnya destinasi wisata dan potensi pariwisata yang sudah ada belum dioptimalkan dari segi pemanfaatan, pengelolaan maupun nilai jual kepada masyarakat</p> <p>20. Belum optimalnya pengembangan sektor unggulan berpotensi ekspor</p> <p>21. Belum optimalnya kinerja pendapatan asli daerah terutama pajak dan retribusi sehingga masih bergantung pada dana perimbangan dari Pemerintah pusat.</p> <p>22. Implementasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal</p>
<b>Kesempatan Opportunities (O)</b>	<b>Strategi SO</b>	<b>Strategi WO</b>
<p>1. Dekat dengan akses tol sehingga memudahkan pergerakan orang dan barang.</p> <p>2. Memiliki potensi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa regional.</p> <p>3. Kebijakan pemerintah pusat dalam mendorong daya saing industri berbasis</p>	<p>1. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar sembilan tahun berkualitas</p> <p>2. Meningkatkan status</p>	<p>1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan PAUD</p> <p>2. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, dan akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan</p> <p>3. Meningkatkan standar pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan standar akreditasi Rumah Sakit</p> <p>4. Meningkatkan pelayanan</p>

<p>revolusi industri 4.0</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Dukungan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendorong pariwisata</li> <li>5. Potensi warisan budaya baik bersifat benda (<i>tangible</i>) maupun tak benda (<i>intangible</i>)</li> <li>6. Kesadaran masyarakat akan pendidikan dan perilaku hidup sehat meningkat</li> <li>7. Tingginya perhatian Pemerintah Pusat dalam mendukung perkembangan ekonomi kreatif dan UMKM.</li> <li>8. Dukungan besar dari Pemerintah Pusat dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi</li> <li>9. Potensi pengembangan wilayah bagi kawasan perdagangan, industri, dan perkantoran.</li> </ol>	<p>derajat kesehatan dengan Pendekatan Keluarga untuk setiap golongan umur dan mengikuti siklus hidup manusia</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Intervensi kesehatan berbasis risiko</li> <li>4. Meningkatkan pemenuhan sumber daya kesehatan dengan pendekatan pelayanan keberlanjutan (<i>continuum of care</i>)</li> <li>5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesahatan, khususnya Pelayanan Kesehatan Primer (<i>Primary Health Care</i>)</li> <li>6. Melestarikan warisan budaya baik bersifat benda (<i>tangible</i>) maupun tak benda (<i>intangible</i>)</li> <li>7. Mengembangkan sumber daya kebudayaan</li> </ol>	<p>Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik</li> <li>6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif</li> <li>7. Menata sistem hukum di daerah</li> <li>8. Meningkatkan profesionalitas Aparatur Pemerintah Daerah</li> <li>9. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</li> <li>10. Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang</li> <li>11. Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman</li> <li>12. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan</li> <li>13. Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang dan barang serta mengembangkan sistem transportasi publik yang nyaman</li> <li>14. Meningkatkan kesempatan kerja terutama di sektor formal serta mendorong produktivitas tenaga kerja yang berkualitas, produktif serta berjiwa wira usaha</li> <li>15. Meningkatkan PAD melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak daerah secara strategis, akurat, dan tertib dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi (IT)</li> <li>16. Meningkatkan pengelolaan sistem keuangan daerah yang bersih dan transparan</li> </ol>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<b>Ancaman Threats (T)</b>	<b>Strategi ST</b>	<b>Strategi WT</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya budaya literasi masyarakat</li> <li>2. Masih adanya konflik sosial</li> <li>3. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban umum</li> <li>4. Makin meningkatnya penduduk miskin akibat Pandemi Covid-19</li> <li>5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya pangan lokal</li> <li>6. Adanya kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan.</li> <li>7. Belum optimalnya akses permodalan dan pemasaran bagi UMKM</li> <li>8. Masih terdapat koperasi yang tidak aktif</li> <li>9. Turunnya minat generasi muda terhadap budaya lokal</li> <li>10. Rendahnya ekosistem digital dalam mendukung pembangunan pariwisata</li> <li>11. Tingginya alih fungsi lahan pertanian</li> <li>12. Rendahnya daya saing industri</li> <li>13. Rawan bencana banjir</li> <li>14. Meningkatnya pengangguran akibat adanya krisis ekonomi di masa Pandemi Covid-19</li> <li>15. Tuntutan revolusi Industri 4.0</li> <li>16. Krisis ekonomi akibat Pandemi Covid-19</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan budaya gemar membaca</li> <li>2. Meningkatkan ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas, keragaman dan keamanan pangan</li> <li>3. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan.</li> <li>4. Meningkatkan produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perikanan, dan peternakan</li> <li>5. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional</li> <li>6. Meningkatkan kerukunan antar agama dan pemahaman pengamalan agama</li> <li>7. Peningkatan peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan</li> <li>8. Memantapkan semangat kebangsaan dan bernegara</li> <li>9. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban politik sebagai warga Negara</li> <li>10. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan</li> <li>11. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat</li> <li>12. Meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya</li> </ol>	<p>melalui pemanfaatan teknologi informasi pengelolaan keuangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga</li> <li>2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan hukum melalui penegakan peraturan daerah dan pencegahan pelanggaran peraturan daerah</li> <li>3. Meningkatkan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana</li> <li>4. Meningkatkan pertumbuhan investasi</li> <li>5. Meningkatkan kualitas kelembagaan serta produktivitas koperasi dan usaha mikro</li> <li>6. Meningkatkan daya saing industri</li> <li>7. Meningkatkan keunggulan, daya tarik dan promosi pariwisata untuk peningkatan daya beli</li> <li>8. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air</li> <li>9. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan</li> <li>10. Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing</li> <li>11. Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana</li> <li>12. Meningkatkan peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan</li> </ol>

		<p>PMKS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>13. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin</li> <li>14. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin</li> <li>15. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil</li> <li>16. Meningkatkan keterampilan dalam berwirausaha bagi perempuan</li> <li>17. Mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan</li> <li>18. Mencegah dan menangani perdagangan perempuan dan anak (<i>trafficking</i>)</li> <li>19. Mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA) dan mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan mandiri</li> </ol>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hasil analisis SWOT di atas dapat memberi gambaran bagi pemangku kepentingan dalam memahami kondisi *existing*, peluang dan ancaman yang ada di Kota Mojokerto. Sehingga, berbagai isu strategis daerah dan permasalahan yang masih terjadi memudahkan Pemerintah Kota Mojokerto dalam merumuskan langkah strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah.

### 6.1. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Berikut rumusan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang diselaraskan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023.

**Tabel 6.1**  
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Mojokerto 2019-2023**

**Visi : Terwujudnya Kota Mojokerto Yang Berdaya Saing, Mandiri, Demokratis, Adil, Makmur, Sejahtera Dan Bermartabat**

Tujuan	Sasaran	Strategi
<b>MISI 1 : Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan</b>		
1. Mewujudkan SDM Yang Berdaya Saing Dan Berkualitas	1. Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan	1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan PAUD 2. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar sembilan tahun berkualitas 3. Percepatan penyesuaian pelayanan pendidikan di era normal baru 4. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, dan akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan 5. Meningkatkan budaya gemar membaca 6. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan 7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga

Tujuan	Sasaran	Strategi
	2. Meningkatnya Kualitas Dan Akses Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan status derajat kesehatan dengan Pendekatan Keluarga untuk setiap golongan umur dan mengikuti siklus hidup manusia.</li> <li>2. Intervensi Kesehatan Berbasis Risiko</li> <li>3. Meningkatkan pemenuhan sumber daya kesehatan dengan Pendekatan Pelayanan Keberlanjutan (Continuum of Care)</li> <li>4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Pelayanan Kesehatan, khusus-nya Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care)</li> <li>5. Meningkatkan standar pelayanan Rumah Sakit Sesuai dengan standar akreditasi Rumah Sakit</li> <li>6. Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi</li> </ol>
	3. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas, keragaman dan keamanan pangan</li> </ol>
<b>MISI 2 : Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM</b>		
1. Mewujudkan masyarakat Taat Hukum	1. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan hukum melalui penegakan peraturan daerah dan pencegahan pelanggaran peraturan daerah</li> <li>2. Meningkatkan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana</li> </ol>
<b>Misi 3 : Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat</b>		
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1. Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik</li> <li>2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif</li> <li>3. Menata sistem hukum di daerah</li> </ol>

Tujuan	Sasaran	Strategi
		4. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban politik sebagai warga Negara 5. Meningkatkan profesionalitas Aparatur Pemerintah Daerah 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
<b>Misi 4 : Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah</b>		
1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	1. Meningkatkan kontribusi sektor-sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	1. Meningkatkan pertumbuhan investasi 2. Meningkatkan kualitas kelembagaan serta produktivitas koperasi dan usaha mikro 3. Meningkatkan produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perikanan, dan peternakan
	2. Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	1. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional 2. Meningkatkan daya saing industri
	3. Meningkatnya industri pariwisata	1. Meningkatkan keunggulan, daya tarik dan promosi pariwisata untuk peningkatan daya beli
2. Menyediakan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi dengan memperhatikan lingkungan hidup	1. Meningkatnya Aksesibilitas Ekonomi Masyarakat Yang Berkelanjutan	1. Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang 2. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air
	2. Meningkatnya akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi layak	1. meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman 2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan
	3. Meningkatkan kualitas pelayanan Lalu Lintas dan	4. Mengembangkan infrastruktur transportasi

Tujuan	Sasaran	Strategi
	Angkutan Jalan (LLAJ)	perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang dan barang serta mengembangkan sistem transportasi publik yang nyaman
	4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan</li> <li>2. Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing</li> <li>3. Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana</li> </ol>
<b>Misi V Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila</b>		
1. Meningkatkan Kesalehan Sosial	1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya lokal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya</li> <li>2. Melestarikan warisan budaya baik bersifat benda (tangible) maupun tak benda (intangible)</li> <li>3. Mengembangkan sumber daya kebudayaan</li> </ol>
	2. Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat	1. Meningkatkan kerukunan antar agama dan pemahaman pengamalan agama
	3. Meningkatnya kerukunan antar-umat beragama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan</li> <li>2. meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Hak dan kewajiban politik sebagai warga Negara</li> <li>3. Memantapkan semangat kebangsaan dan bernegara</li> </ol>

Tujuan	Sasaran	Strategi
<b>Misi 6 : Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan</b>		
1. Meningkatkan akses masyarakat dalam pembangunan serta kesetaraan gender	1. Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat	1. Meningkatkan kesempatan kerja terutama di sektor formal serta mendorong produktivitas tenaga kerja yang berkualitas, produktif serta berjiwa wira usaha  1. Meningkatkan peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS 2. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin 3. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin 4. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil 5. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan 6. Meningkatkan keterampilan dalam berwirausaha bagi perempuan 7. Mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan 8. Mencegah dan menangani perdagangan perempuan dan anak (trafficking) 9. mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA) dan mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan mandiri 10. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat
	2. Menurunnya angka kemiskinan	
	3. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	
<b>Misi 7 : Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat</b>		
1. Meningkatkan Kemandirian Fiskal	1. Meningkatnya kemandirian keuangan	1. Meningkatkan PAD melalui Intensifikasi dan

Tujuan	Sasaran	Strategi
Daerah	daerah	<p>ekstensifikasi potensi pajak daerah secara strategis, akurat, dan tertib dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi (IT)</p> <p>2. Meningkatkan pengelolaan sistem keuangan daerah yang bersih dan transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi pengelolaan keuangan.</p>

**Tabel 6.2**  
**Arah Kebijakan Pembangunan Kota Mojokerto 2019-2023**

Arah Kebijakan				
2019	2020	2021	2022	2023
Penguatan pertumbuhan ekonomi melalui penurunan tingkat pengangguran dan disparitas	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) meningkatkan kemandirian dan daya saing perekonomian daerah dan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui reformasi birokrasi	Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus pada Kesehatan, UMKM, Infrastruktur, Pariwisata, dan Investasi di Kota Mojokerto	Penguatan Sumber Daya Manusia dan penyediaan infrastruktur untuk mendukung investasi dan pemerataan pembangunan yang berorientasi pada pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat	Memantapkan pembangunan Kota Mojokerto yang berdaya saing dengan Tata Kelola Pemerintahan yang partisipatoris dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk ketahanan sosial yang tangguh

## 6.2. Strategi Pengembangan BUMD Pemerintah Kota Mojokerto

1. Melakukan restrukturisasi BUMD untuk menguatkan struktur permodalan, struktur SDM, dan struktur bisnis;

Perwujudan pengembangan BUMD dimulai dari proses konsolidasi yang efektif untuk memperkuat struktur permodalan, SDM, dan bisnis. Restrukturisasi BUMD tersebut perlu dilakukan melalui proses internal dan eksternal. Di lingkup internal, proses restrukturisasi dilakukan melalui pembinaan aksi korporasi dengan melihat potensi BUMD yang bersangkutan, meliputi kondisi keuangan, SDM, dan manajemen. Terkait dengan hal ini, Pemerintah Kota Mojokerto telah melakukan proses seleksi terhadap calon Komisaris, Dewan Pengawas, dan Direksi BUMD. Kedepan, proses seleksi ini



diharapkan dapat terlaksana lebih baik lagi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Pemerintah Kota Mojokerto juga berupaya melakukan optimalisasi kinerja BUMD dengan melakukan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan secara rutin melakukan evaluasi laporan realisasi RKAP dimaksud, baik laporan keuangan triwulanan, semesteran, maupun tahunan. Di tingkat eksternal, proses restrukturisasi perlu didukung dengan kebijakan serta regulasi yang jelas, sehingga dapat meminimalkan terjadinya benturan maupun komplikasi dalam pelaksanaan restrukturisasi dimaksud.

2. Meningkatkan sinergitas dan kemitraan BUMD;

Mempertimbangkan keterbatasan permodalan serta kualitas SDM yang ada, maka penting bagi BUMD untuk melakukan sinergitas dan kemitraan antar BUMD atau dengan institusi lain dalam rangka memperluas pasar dan memperkuat bisnisnya. Melalui kemitraan, nantinya akan dapat dikembangkan berbagai bentuk kerjasama yang saling mengisi dan saling memperkuat semua pihak. Namun demikian, kemitraan tersebut hanya dapat berjalan apabila dilandasi dengan kepercayaan diantara semua pihak. Terkait dengan hal ini, maka perlu dikembangkan proses komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan dan merawat kepercayaan tersebut.

3. Melakukan ekspansi dan diversifikasi usaha;

Ekspansi merupakan strategi memperbesar dan memperluas bisnis, yang ditandai dengan penciptaan pasar baru, perluasan fasilitas, dan rekrutmen SDM. Dalam pengembangan BUMD 5 (lima) tahun mendatang, ekspansi merupakan salah satu langkah strategis untuk menjawab tantangan bisnis. Selain itu, ekspansi juga dapat membantu mencapai sasaran Pemerintah Kota Mojokerto dalam hal perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat. Diversifikasi merupakan usaha penganekaragaman produk atau lokasi usaha yang dilakukan untuk memanfaatkan ruang-ruang baru dalam pasar, dan juga untuk mempertahankan keberlanjutan eksistensi produk di pasar. Diversifikasi tersebut sangat penting sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat posisi BUMD atau produk BUMD di pasar.

Ekspansi dan diversifikasi tersebut perlu dilakukan dengan berlandaskan pada kompetensi yang kuat pada *core business*-nya. Oleh sebab itu perlu dipastikan agar ekspansi dan diversifikasi yang dilakukan BUMD sejalan dengan peningkatan kompetensi dalam *core business*.

Salah satu upaya ekspansi dan diversifikasi BUMD juga bisa dilakukan melalui **pembentukan BUMD baru** sebagai salah satu respon Pemerintah Kota Mojokerto dalam penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan karakteristik, kondisi, potensi serta kebutuhan daerah (permasalahan pangan, penanganan limbah, kebutuhan farmasi

daerah, urgensi keuangan Syariah serta isu-isu serta permasalahan daerah lainnya) dengan tetap mengacu kepada mekanisme pembentukan sesuai aturan yang berlaku.

4. Menerapkan prinsip-prinsip GCG;

Penerapan GCG dapat mendorong pengurus BUMD untuk mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan laba yang lebih optimal. Selain itu, penerapan GCG juga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan sebagai sarana untuk mengukur kinerja BUMD juga ikut meningkat. Meningkatnya profitabilitas dan kepercayaan publik akan meningkatkan nilai perusahaan. Dengan demikian, penerapan GCG tidak hanya dapat meningkatkan kinerja, tetapi juga nilai perusahaan.

Terkait dengan hal tersebut diatas, langkah yang akan dilakukan dari sisi internal adalah melakukan penguatan sumber daya BUMD, melakukan evaluasi terhadap potensi dan tantangan kelembagaan BUMD, serta menyehatkan BUMD dari sisi keuangan, manajemen, dan sebagainya. Adapun dari sisi eksternal adalah melakukan *benchmark* kelembagaan BUMD, baik di dalam maupun luar negeri, serta melakukan kerjasama dengan lembaga atau institusi bisnis lain, baik sesama BUMD maupun non BUMD.

5. Memperluas sumber permodalan BUMD;

Perluasan sumber permodalan dilakukan melalui pemupukan cadangan modal serta mencari investor strategis. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan terkait dengan hal ini antara lain dengan melakukan konsolidasi BUMD agar dapat memanfaatkan permodalan secara efektif, fokus dan terarah, melakukan evaluasi pengelolaan seluruh aset BUMD sehingga bisa dilihat kekuatan permodalan yang ada, memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan efisiensi dan pemasaran produk, serta meningkatkan kualitas kelembagaan BUMD sehingga bisa diminati investor.

6. Meningkatkan pemberdayaan BUMD;

Pemberdayaan BUMD dimaksudkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BUMD. Kualitas tersebut akan meningkat apabila didukung oleh SDM dan sistem yang berkualitas. Strategi yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan meningkatkan literasi manajemen resiko BUMD, memperkuat sistem dan manajemen mutu internal BUMD, melakukan *benchmarking* BUMD, membangun kompetisi yang sehat antar BUMD dengan *Key Performance Indicator* (KPI) yang rasional, terukur dan handal, serta menyusun regulasi yang pro BUMD.

### 7. *Reinventing* BUMD;

Dilakukan melalui upaya-upaya terstruktur didukung studi kelayakan bahkan jika harus melakukan penjualan aset anak perusahaan jika itu dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD..

Secara lebih lebih spesifik apabila dalam perencanaan sebagai akibat dari tuntutan dinamika pembangunan memerlukan pembentukan BUMD baru maka :

- Sangat dimungkinkan, mengingat tujuan pembentukan BUMD adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi dan kebutuhan daerah (seperti : isu pangan, penanganan limbah, farmasi, keuangan Syariah dan lain sebagainya);
- Mengacu karakteristik dan potensi daerah;
- Mengacu ke mekanisme pembentukan BUMD sebagaimana diatur di peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- Pembentukan BUMD baru merupakan salah satu bentuk ekspansi dan diversifikasi usaha khususnya dalam rangka perkuatan posisi BUMD atau produk BUMD di pasar.

### 6.3. Program Pembangunan Daerah

Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD merupakan Visi Politik Kepala Daerah sebagai komitmen kepada rakyat Kota Mojokerto. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu diidentifikasi Program Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan Janji Politik pada saat kampanye.

Ada 6 Agenda Prioritas merupakan komitmen dan sekaligus rencana aksi untuk mewujudkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang selanjutnya menjadi Visi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023. Keenam agenda prioritas tersebut selanjutnya menjadi pijakan dalam menyusun Program Prioritas pembangunan daerah sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatan di tingkat Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penjelasan lebih detail mengenai 6 Agenda Prioritas tersebut sebagaimana berikut:

1. Pengendalian Banjir
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
4. Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Lokal
5. Pembangunan Sumber Daya Manusia
6. Reformasi Birokrasi

Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan program perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih sebagaimana dituangkan dalam RPJMD. 6 Agenda Prioritas

merupakan intisari dari semangat dan substansi RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023. Dengan demikian Program Prioritas Pembangunan meliputi Program Perangkat Daerah yang mendukung Visi, Misi, dan Agenda Prioritas Kepala Daerah sebagaimana disajikan dalam Tabel di bawah ini.

**Tabel 6.3**  
**Integrasi 6 Agenda Prioritas ke dalam Program Perangkat Daerah**

No	Agenda Prioritas	Nomenklatur Program	Perangkat Daerah
1	Pengendalian Banjir	Program Pengendalian Banjir	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Pembangunan Infrastruktur	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Pengembangan Wilayah Strateis dan Cepat Tumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Pembangunan serta Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Pengembangan wilayah dan fasilitas publik strategis	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Agenda Prioritas	Nomenklatur Program	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengembangan Usaha Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan tenaga Kerja
		Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan tenaga Kerja
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

No	Agenda Prioritas	Nomenklatur Program	Perangkat Daerah
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Peningkatan Produksi Peternakan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan tenaga Kerja
		Program Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan tenaga Kerja
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		Program pengembangan industri kecil dan menengah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Peningkatan Daya Saing Produk IKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Kecamatan
		Program pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat	Kecamatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan

No	Agenda Prioritas	Nomenklatur Program	Perangkat Daerah
4	Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan Lokal	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Program pengembangan Kemitraan	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Program pengembangan nilai budaya	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan
		Program Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Penguatan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan

No	Agenda Prioritas	Nomenklatur Program	Perangkat Daerah
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dinas Kesehatan
		Program Pengelolaan/ Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan; RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo
		Program Pembinaan Mutu Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB; RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
6	Reformasi Birokrasi	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Seluruh PD
		Program peningkatan disiplin aparatur	Seluruh PD
		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Seluruh PD
		Program Pelayanan Kesekretariatan	Seluruh PD
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Seluruh PD
		Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan; RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Dinas Pelayanan Modal dan PTSP
		Program Optimalisasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Dinas Pelayanan Modal dan PTSP
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



No	Agenda Prioritas	Nomenklatur Program	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Dinas Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah
		Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Sekretariat Daerah
		Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Sekretariat Daerah
		Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Keagamaan	Sekretariat Daerah
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah
		Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Sekretariat Daerah
		Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Program Koordinasi, Fasilitasi, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Perekonomian	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD
		Program penataan peraturan perundang-undangan	Sekretariat Daerah
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan
		Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan

No	Agenda Prioritas	Nomenklatur Program	Perangkat Daerah
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
		Program Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Program Pengelolaan Aset Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Program Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
		Program Penyusunan APBD dan P-APBD Kota Mojokerto	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Inspektorat; Sekretariat Daerah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat

**Tabel 6.4**  
**Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Mojokerto 2019-2023**

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja										PD Penanggung Jawab		
			2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi kinerja akhir periode	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
<b>MISI 1 : Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan</b>															
T.1. Mewujudkan SDM Yang Berdaya Saing Dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	77,14	77,96		78,04		78,20		78,40		78,60		78,60		
S.1. Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,717	0,725		0,730		0,732		0,735		0,737		0,737		
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase APM peserta wajib belajar sembilan tahun	122.05 %	121.55 %	28,244,846,823	--	--	--	--	--	--	--	--	121.55 %	28,244,846,823	Dinas Pendidikan
	APK SD/MI/Paket A	122.05 %	-		121%	29,212,289,940	-	-	-	-	-	-	121%	29,212,289,940	
	APK SMP/MTs/Paket B	127.51 %	125.51 %		126%		-		-		-		127%		
	APM SD/MI/Paket A	112.85 %	113.35 %		114%		-		-		-		114%		
	APM SMP/Mts/Paket B	95.36%	95.66 %		95.96 %		-		-		-		96%		
	APS SD/MI/Paket A	122.89 %	122.39 %		122%		-		-		-		121%		
	APS SMP/MTs/Paket B	103.69 %	103.89 %		104%		-		-		-		104%		
	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%		100%		-		-		-		100%		
	Angka Kelulusan SMP/MTs	100%	100%		100%		-		-		-		100%		
	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	97.33%	97.53 %		97.73 %		-		-		-		98%		

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	122.89 %	122.39 %		122%		-		-		-		121%		
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	103.69 %	103.89 %		104%		-		-		-		104%		
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.01%	0.01%		0.01		-		-		-		0.01		
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.09%	0.08%		0.07%		-		-		-		0.06%		
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%		100%		-		-		-		100%		
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	100%		100%		-		-		-		100%		
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	97.33%	97.53 %		97.73 %		-		-		-		98%		
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	31.88%	36.00 %		45.00 %		-		-		-		54%		
	Sekolah pendidikan SMP/MTs	63.00%	65.00 %		70.00 %		-		-		-		75%		
	Rasio ketersediaan sekolah/pendudu k usia sekolah pendidikan dasar	50/10.0 00	50/10. 000		50/10. 000		-		-		-		50/10. 000		

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	27/10.000	30/10.000		30/10.000		-		-		-		30/10.000		
	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	118.81%	118.83%		119%		-		-		-		119%		
	Persentase Capaian SPM Pendidikan Dasar	100%	100%		100%		-		-		-		100%		
Program Pendidikan Anak Usia Dini	% APK PAUD	97%	97%	3,059,186,446	--	--	--	--	--	--	--	--	97%	3,059,186,446	Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Non Formal	Persentase pendidikan non formal yang berkualitas untuk semua jenjang pendidikan	80%	80%	1,344,044,070	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	1,344,044,070	Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai standart kualifikasi	5%	20%	758,779,546	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	758,779,546	Dinas Pendidikan
	Persentase Pendidik lulus UKG nilai diatas 60/80	5%	-	-	20%	15,525,480,000	-	-	-	-	-	-	20%	15,525,480,000	
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	94.02%	94.52%		95.0%				-		-		95.0%		

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
	Rasio guru/murid sekolah dasar ( SD )	1 : 18	1 : 18		1 : 17				-		-		1 : 17		
	Rasio guru/murid sekolah menengah pertama ( SMP )	1 : 15	1 : 15		1 : 15				-		-		1 : 15		
	Rasio guru/murid per kelas rata- rata sekolah dasar ( SD )	1.01	1.01		1.01				-		-		1.01		
	Rasio guru/murid per kelas rata- rata sekolah dasar (SMP)	2.29	2.29		2.28				-		-		2.28		
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	APK PAUD	97%	-	-	95.28 %	1,263,320,828	-	-	-	-	-	-	96.28 %	1,263,320,828	Dinas Pendidikan
	Angka Kelulusan PNF	100%	-		100%		-		-		-		100%		
	Persentase lembaga PAUD & PNF yang terakreditasi	21%	-		24%		-		-		-		27%		
	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	0%	-		0%		-		-		-		0%		
	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	97.76%	-		98.06 %		-		-		-		98%		

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI/Paket A	118.91 %	-	-	-	-	100.00 %	89,867,706,098.0 0	100.00 %	61,740,430,209	100.00 %	62,357,834,511.2 9	100.00 %	213,965,970,818	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	APK SMP/MTs/Paket B	133.00 %	-	-	-	-	100.00 %		100.00 %		100.00 %		100.00 %		
	APM SD/MI/Paket A	115.25 %	-	-	-	-	100.00 %		100.00 %		100.00 %		100.00 %		
	APM SMP/MTs/Paket B	123.70 %	-	-	-	-	96.26 %		96.56 %		96.86 %		96.86 %		
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	116.16 %	-	-	-	-	100%		100%		100%		100%		
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	121.84 %	-	-	-	-	100%		100%		100%		100%		
	Angka Kelulusan SD/MI	100.00 %	-	-	-	-	100.00 %		100.00 %		100.00 %		100.00 %		
	Angka Kelulusan SMP/MTs	100.00 %	-	-	-	-	100.00 %		100.00 %		100.00 %		100.00 %		
	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	102.00 %	-	-	-	-	97.93 %		98.13 %		98.33 %		98.33 %		
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.00%	-	-	-	-	0.01%		0.01%		0.01%		0.01%		
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.01%	-	-	-	-	0.06%		0.05%		0.04%		0.04%		
	Prosentase capaian SPM pendidikan dasar	100.00 %	-	-	-	-	100%		100%		100%		100%		

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	60.56%	-		-		54%		66.56%		71%		71%		
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	72.73%	-		-		75%		80%		85%		85%		
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	50/10.000	-		-		50/10.000		50/10.000		50/10.000		50/10.000		
	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	33/10.000	-		-		30/10.000		30/10.000		30/10.000		30/10.000		
	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	122.36%	-		-		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
	Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A	60.56%	-		-		55.00%		60.00%		65.00%		65.00%		
	Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A	71.43%	-		-		71.43%		76.19%		76.19%		76.19%		
	APK PAUD	84.25%	-		-		84%		84%		84%		84%		
	Angka kelulusan PNF	100.00%	-		-		100%		100%		100%		100%		



Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
	Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini	100.00 %	-		-		100%		100%		100%		100%		
	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	100.00 %	-		-		100%		100%		100%		100%		
	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	98.31%	-		-		98.36 %		98.66 %		98.96 %		98.96 %		
	Persentase capaian SPM pendidikan kesetaraan	49.57%	-		-		50%		50%		50%		50%		
	Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A	26.47%	-		-		26%		29%		29%		29%		
	Persentase PAUD yang terakreditasi	70.59%	-		-		71%		73%		73%		73%		
	Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	4.00%	-		-		4%		4%		0.04		0.04		
	Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D- IV	73.00%	-		-		75%		75%		0.76		0.76		
	Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D- IV	94.25%	-		-		94.50 %		94.51 %		0.95		0.95		

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab			
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
	Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	98.50%	-		-			98.60				98.60 %			98.60 %		
Program Pengembangan Budaya Baca masyarakat dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan (%)	15	15	1,039,195,468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1,039,195,468	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
Program Peningkatan minat Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan	167			167	863,298,415	-	-	-	-	-	-	-	167	863,298,415	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	102.288			34,731			-				-		34,731			
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	43.921			45,438							-		45,438			
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah perpustakaan (unit)	167	-	-	-	-	167	832,699,271.00	167	774,748,772.98	167	842,858,555	167	2,450,306,599	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	34,731					40000		45000		50000		50000				
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eksemplar)	45,438					46438		47438		48438		42				
	Jumlah Pustakawan	4							4		4		4				

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase Tingkat keaktifan pemuda (%)	5%	100%	483,248,500	15%	174,191,200	-	-	-	-	-	-	15%	657,439,700	DISPORABUDPAR
Program Pembinaan dan Permayarakatan Olahraga	Persentase sarana dan prasarana olah raga yang memadai	14%	100%	550,954,600	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	550,954,600	DISPORABUDPAR
	Persentase atlit/cabor yang berprestasi (%)	14%	-	-	20%	509,231,100	-	-	-	-	-	-	20%	509,231,100	DISPORABUDPAR
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase sarana dan prasarana olah raga yang memadai	100%	100%	564,602,202.62	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	564,602,202.62	DISPORABUDPAR
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase OKP yang aktif	44%	-	-	-	-	75%	1,309,374,283.00	77%	1,319,318,000.00	79%	1,454,400,000	79%	4,083,092,283	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAH RAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga	17%	-	-	-	-	88%	10,102,944,584.00	92%	8,763,300,000.00	100%	8,842,500,000	100%	27,708,744,584	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
<b>S.2. Meningkatkan Kualitas Dan Akses Kesehatan</b>	<b>Indeks Kesehatan</b>	<b>0,816</b>	<b>0,818</b>		<b>0,820</b>		<b>0,821</b>		<b>0,822</b>		<b>0,823</b>		<b>0,823</b>		
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Perentase Puskesmas dan jaringannya sesuai standar SPM	100%	100%	1,316,089,690	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1,316,089,690	Dinas Kesehatan
Program Penguatan Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	93.8	-	-	Kurang dari 47,3 (1 Ibu)	6,160,049,630	-	-	-	-	-	-	Kurang dari 47,3 (1 Ibu)	6,160,049,630	Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
	Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	3.75	-		Kuran g dari 10		-		-		-		Kuran g dari 9		
	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0.76	-		Kuran g dari 1,65		-		-		-		Kuran g dari 1,6		
	Prevalensi Stunting Balita	Kurang dari 20%	-		Kuran g dari 19,5%		-		-		-		Kuran g dari 19%		
	Persentase Lansia usia 60 thn keatas mendapat Skrening Kesehatan sesuai Standart	0.6	-		65%		-		-		-		70%		
	Presentase kelurahan memenuhi tatanan Kota Sehat ke 8 (Kawasan dengan tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri)	77% (14 Kel)	-		83% (15 Kel)		-		-		-		88% (16 Kel)		
	Cakupan kelurahan siaga aktif PURI (Pumama Mandiri)	80%	-		85%		-		-		-		85%		
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	1,169,222,902	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1,169,222,902	Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	90%	90%	1,189,418,360	-	-	-	-	-	-	-	-	90%	1,189,418,360	Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
	Persentase orang beresiko HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	80%	80%										80%		
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4))	98%	98%	3,186,952,087	-	-	-	-	-	-	-	-	98%	824,480,377	Dinas Kesehatan
Program Pengelolaan/ Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Jumlah penduduk yang dapat mengakses layanan kesehatan gratis (total coverage) dan terlindungi asuransi kesehatan (jiwa)	60.000 orang	60.000 orang	2,964,631,868	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000 orang	2,964,631,868	Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	-	-	100%	2,159,753,074	-	-	-	-	-	-	100%	2,159,753,074	Dinas Kesehatan
	Cakupan desa/ kelurahan UCI	83,33%	-		100%		-		-		-		100%		
	Persentase penderita hipertensi mendapatkan yankes sesuai standart	51,05%	-		100%		-		-		-		100%		

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan	Persentase kompetensi Tenaga Kesehatan JFU/JFT pada Jajaran Dinas Kesehatan	50%		0	64%	11,031,368,798	-	-	-	-	-	-	71%	11,031,368,798	Dinas Kesehatan
	Presentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 20 item obat Esensial	97,3%			87%		-		-		-		90%		
	Persentase puskesmas melaksanakan Kalibrasi Alat Kesehatan	0%			80%		-		-		-		100%		
Program Pembinaan Mutu Pelayanan Kesehatan	Presentase penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan saat dibutuhkan	97%	-		97,2%	8,456,027,517	-	-	-	-	-	-	97,3%	8,456,027,517	Dinas Kesehatan
	Persentase kesehatan Tradisional (HATTRA) yang berijin/terdaftar STPT (Surat Terdaftar Pengobat Tradisional)	13%	14%		16%		-		-		-		18%		
	Jumlah dokumen Evaluasi Program Indonesia Sehat dgn Pendekatan Keluarga (PIS- PK)	5	5		5		-		-		-		5		

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	AKI per 100.000 KH (target : kurang dari)	189.39 per 100.000 KH		-	-	-	94.6	52,927,688,555.0 0	94.6	34,910,001,202.4 4	94.6	36,006,711,649.6 1	94.6	123,844,401,407	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari)	4.26 per 1.000 KH					4.22		4.22		4.22		4.22		
	Prevalensi stunting balita	7.71%		-	-		19.5		18.4		16		16		
	Persentase kelurahan memenuhi tatanan Kota Sehat ke 8 (Kawasan dengan tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri)	88.53%		-	-		88		-		-		88		
	Jumlah indikator Tatanan Kota Sehat yang terverifikasi	2		-	-		-		3		4		4		
	Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk	238.66 per 100.000 pendud uk		-	-		183.5		183.5		183.5		183.5		
	Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Mellitus per 1.000 penduduk ≥ 15 tahun	-		-	-		-		183.5		183.5		183.5		

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
	Persentase kelurahan UCI	0.7222		-	-	-	95		≥ 95		≥ 96		≥ 96		
	Persentase penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan saat dibutuhkan	0.989		-	-	-	97.3		-		-		97.3		
	Persentase kesehatan Tradisional (HATTRA) yang berijin/terdaftar STPT (Surat Terdaftar Pengobat Tradisional)	9.09%		-	-	-	18		-		-		18		
	Persentase Fasilitas Kesehatan dan Penunjang sesuai standar atau terakreditasi minimal Madya dan berkelanjutan	100%		-	-	-	100		-		-		100		
	Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	-		-	-	-	-		6		6		6		
	Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	-		-	-	-	-		6		6		6		



Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
	Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	100.00 %					90		90		90		90		
	Persentase puskesmas melaksanakan Kalibrasi Alat Kesehatan	100.00 %					100						100		
Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung BLUD	100	100	136,513,525,000	100	127,348,494,000	-	-					100	263,862,019,000	RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100%	-	-	-	-	100%	153,937,678,522.00	100%	152,509,477,389.36	100%	155,825,589,359.90	100%	462,272,745,271	RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo
Program Keluarga Berencana	Jumlah paket pelayanan KB pada masyarakat	18 paket	18 paket	984,315,729.92	-	-	-	-	-	-	-	-	18 paket	984,315,729.92	DP3AKB
Program PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	LPP, TFR	80%			85%	1,055,392,200	-	-	-	-	-	-	85%	1,055,392,200	DP3AKB

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	25	25		40		-		-		-		40		
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	10	10		25		-		-		-		25		
	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1	1		1		-		-		-		1		
	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	2	2		2		-		-		-		2		

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	3	3		3		-		-		-		3		
	Rata-rata jumlah anak per keluarga Ratio Akseptor KB	2	2		2		-		-		-		2		
	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	69.81	69.81		69.88		-		-		-		69.88		
	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	21.47	21.47		21.25		-		-		-		21.25		
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	15.96	15.96		15.71		-		-		-		15.71		
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	10.14	10.14		9.99		-		-		-		9.99		
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	38.56	38.56		38.75		-		-		-		38.75		

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	8.74	8.74		8.52		-		-		-		8.52		
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	89.05	89.05		89.36		-		-		-		89.36		
	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	88.59	88.59		89.05		-		-		-		89.05		
	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	77.45	77.45		79.52		-		-		-		79.52		
	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	1	1		1		-		-		-		1		
	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	5,25	5,25		6.75		-		-		-		6.75		
	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100	100		100		-		-		-		100		

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	78.65	78.65		80.53		-		-		-		80.53		
	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100		100		-		-		-		100		
	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100	100		100		-		-		-		100		
	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100	100		100		-		-		-		100		
	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100	100		100		-		-		-		100		

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)							-		-						
	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100	100		100			-		-				100		
	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	60.47	60.47		63.45			-		-				63.45		
	Rata-rata usia kawin pertama wanita	20	20		20			-		-				20		
	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	0.40	0.40		0.38			-		-				0.38		
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fatality Rate (TFR)	1.86%	-	-	-	-		1.86%	313,833,313.00					1.86%	313,833,313	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Jumlah implementasi pendidikan kependudukan baik formal, non formal, maupun informal untuk membangun kesadaran tentang kependudukan	5 sekolah							5 sekolah	145,567,615	8 sekolah	294,208,773.02	8 sekolah	439,776,388	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan peserta KB aktif	70%	-	-	-	-	70.56 %	2,225,444,636.00					70.56 %	2,225,444,636	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Prosentase Peningkatan Akses dan kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana	75%							50%	768,763,702.98	50%	782,598,296.83	50%		
<b>S.3. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat</b>	<b>Indeks Pengeluaran Perkapita</b>	<b>0,78</b>	<b>0,797</b>		<b>0,793</b>		<b>0,794</b>		<b>0,796</b>		<b>0,797</b>		<b>0,797</b>		
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase mutu dan keamanan pangan yang diawasi	100%	100%	526,940,650	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	526,940,650	Dinas KP & Pertanian
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Persentase mutu dan keamanan pangan yang diawasi dan dipantau	40%	40%	1,537,688,900	-	-	-	-	-	-	-	-	40%	1,537,688,900	Dinas KP & Pertanian
Program pengembangan dan pengendalian ketahanan pangan	Ketersediaan pangan utama	49 Kg/Th	-	-	55 Kg/Th	268,179,499	-	-	-	-	-	-	55 Kg/Th	268,179,499	Dinas KP & Pertanian

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
	Ketersediaan energi dan protein perkapita	90%			90%		-		-		-		90%		
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan konsumsi pangan yang beragam (B2SA)	80%	-	-	-	-	80%	1,008,280,028.00	80%	222,950,000.00	80%	222,950,000.00	80%	1,454,180,028	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
<b>MISI 2 : Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM</b>															
T.1. Mewujudkan masyarakat Taat Hukum	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	n/a	-		-		94		94,5		95		90%		
S.1. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah	Persentase pelanggaran Perda yang terselesaikan	30%	82.66 %		87.62 %		88%		89%		90%		90%		
Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Penegakan Perda dan Perwali yang ditangani	16%	35%	2,968,175,500	-	-	-	-	-	-	-	-	16%	2,968,175,500	SATPOL PP
Program pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Permasalahan Ketertiban dan Keamanan yang ditangani	100%	100%	1,613,655,500	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1,613,655,500	SATPOL PP
Program Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Per-UU Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	-	-	100	4,711,202,000	-	-	-	-	-	-	100	4,711,202,000	SATPOL PP



Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Penegakan Perda/Perkada yang ditangani	100%	-	-	-	-	100%	1,132,008,182.00	100%	1,156,643,000.00	100%	1,179,775,860.00	100%	3,468,427,042	SATPOL PP
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	-	-	-	-	100%	279,861,034.00	100%	130,061,377.81	100%	131,204,774.54	100%	541,127,186	KECAMATAN PRAJURIT KULON
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	-	-	-	-	100%	120,674,301.00	100%	182,532,350	100%	198,579,150	100%	501,785,801	KECAMATAN MAGERSARI
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	-	-	-	-	100%	55,304,001	100%	132,292,656.86	100%	152,955,000	100%	340,551,658	KECAMATAN KRANGGAN
<b>S.2. Terciptanya kerukunan sosial di masyarakat</b>	<b>Persentase konflik sosial yang terselesaikan</b>	n/a	-	-	-	-	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		
Program Pembinaan dan pengembangan kewaspadaan nasional	Persentase Meningkatnya Peserta Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional	100%	100%	845,202,700	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	845,202,700.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Persentase masyarakat yg telah menerima pembinaan serta	100%	-	-	100%	1,015,813,575	-	-	-	-	-	-	100%	1,015,813,575	

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
	keamanan & ketentraman.														
Program Pendidikan politik masyarakat	Presentase Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	100%	100%	452,852,900	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	452,852,900.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Persentase ORMAS/LSM/PA RPOL yang telah memenuhi persyaratan	100%	-	-	100%	103,614,400	-	-	-	-	-	-	100%	103,614,400	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik lpoleksosbud yang ditangani	100%	-	-	-	-	100%	2,581,154,801.00	100%	1,890,062,174.00	100%	1,890,062,174.00	100%	6,361,279,149	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase LSM/Ormas/Parpol yang aktif	68.55%	-	-	-	-	68.55 %	880,967,526.00	69.49 %	772,173,685.36	70.44 %	772,173,685.36	70.44 %	2,425,314,897	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase LSM/Ormas yang aktif	68.55%	-	-	-	-	68.55 %	304,124,292.00	69.49 %	264,720,581.84	70.44 %	284,769,822.06	70.44 %	853,614,696	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
<b>MISI 3 : Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat</b>															
T.1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	62,31 (B)		62,45 (B)		63-70 (B)		>70-80 (BB)		>80-90 (A)		>80-90 (A)		
S.1. Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani	Nilai SAKIP	B	66,50 (B)		67,42 (B)		70-75 (BB)		76-80 (BB)		80-85 (A)		80-85 (A)		
	Opini BPK	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,61-88,30	83,87		84,85		81,26-88,30		81,26-88,30		81,26-88,30		81,26-88,30		
	Jumlah unit yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	0	1		1		2		3		4		4		
	Indeks SPBE	3,38	-		-		3,40		3,42		3,44		3,44		
	Sistem Merit	163 (Buruk)	-		163 (Buruk)		175-249 (Kurang)		250-285 (Baik)		286-324 (Baik)		286-324 (Baik)		
	Indeks Manajemen Resiko	1	-		-		1		2		3		3		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	95%	100%	73,230,887,125.87	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	73,230,887,125.87	Seluruh Perangkat Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	95%	100%	19,075,294,250.85	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	19,075,294,250.85	Seluruh Perangkat Daerah
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Pegawai yang memakai seragam sesuai dengan aturan	100%	100%	1,405,668,028.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1,405,668,028.00	Seluruh Perangkat Daerah

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Fasilitas peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	572,426,599.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	572,426,599.00	Seluruh Perangkat Daerah
Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	100%	-	-	100%	76,296,057,873.90	-	-	-	-	-	-	100%	76,296,057,874.90	Seluruh Perangkat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100	-	-	-	-	100	388,708,449,281.00	100	399,093,021,095	100	393,586,314,597	100	1,181,387,784,973	Seluruh Perangkat Daerah
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Presentase tindak lanjut temuan, persentase pelanggaran pegawai dan jumlah temuan BPK	100%	100%	947,680,350	100%	439,270,686	-	-	-	-	-	-	100%	1,386,951,036	Inspektorat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase pengawasan internal yang sesuai standar audit dan tepat waktu (%)	100%	-	-	-	-	100%	303,867,273.00	-	-	-	-	100%	303,867,273	INSPEKTORAT

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab		
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
	Persentase PD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal BB	68,97%	-		-					88%	275,150,894	100%	275,326,661	100%	550,477,555	
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	84,22%	-		-					88%		89%		89%		
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	75%	-		-					95%		95%		95%		
	Maturitas SPIP	level 2								level 3		level 3		level 3		
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah unit kerja yang mendapatkan WBK	1	-	-	-	-	2	322,563,636.00	3	264,179,634	4	264,179,634	4	850,922,904	INSPEKTORAT	
Program Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	--	--	WTP	745,365,650	-	-	-	-	-	-	-	WTP	745,365,650	BPPKA
	Persentase LKPD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP	100			100		-		-		-			100		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	-	-	-	-	WTP	2,841,610,295.00	WTP	2,444,458,453.71	WTP	2,595,818,889	WTP	7,881,887,638	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN PENDAPATAN DAERAH	

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan rencana pembangunan jangka panjang, menengah,dan tahunan	90%	100%	1,655,060,768	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1,655,060,768	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Persentase ketersediaan data dan dokumen rencana pembangunan jangka panjang, menengah,dan tahunan	90%	-	-	90%	1,082,653,438	-	-	-	-	-	-	90%	1,082,653,438	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	100%	-	-	-	-	100%	1,351,109,750.00	100%	540,000,000	100%	640,300,000	100%	2,531,409,750	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Persentase ketersediaan data pembangunan	100%	-	-	-	-	-	-	100%	360,000,000	100%	370,000,000	100%	730,000,000	
	Persentase Perangkat Daerah yang tertib pelaporan kegiatan	100%	-	-	-	-	-	-	100%	387,583,500	100%	390,462,675	100%	778,046,175	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Persentase PNS yang memperoleh Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi	4%	4%	1,541,725,552	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	1,541,725,552	Badan Kepegawaian

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
Program Penyelenggaraan Penataan Aparatur	Indeks Penerapan Sistem Merit	n/a	--	--	63	1,040,037,445	-	-	-	-	-	-	15%	1,040,037,445	Badan Kepegawaian
Program Pengembangan, Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	60%	--	--	60%	3,195,332,887	-	-	-	-	-	-	19.50 %	3,195,332,887	Badan Kepegawaian
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Penerapan Sistem Merit	Penerapan Sistem Merit Kategori II (buruk)	-	-	-	-	Penerapan Sistem Merit Kategori II (kurang)	2,666,766,914.00	Penerapan Sistem Merit Kategori III (baik)	2,422,192,500.00	Penerapan Sistem Merit Kategori III (baik)	2,478,840,000.00	Penerapan Sistem Merit Kategori III (baik)	7,567,799,414	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal	10%	-	-	-	-	10%	2,444,229,234.00	-	-	-	-	10%	2,444,229,234	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Persentase PNS yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi minimal 20 JP dalam satu tahun	10%	-	-	-	-	-	-	10%	2,017,389,530.52	10%	2,056,500,000.00	10%	4,073,889,531	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Kualitas Layanan Fasilitas Peningkatan Lembaga Perwakilan Rakyat sesuai dengan Fungsinya	90%	90%	16,794,428,846.00	90%	13,731,696,335.00	-	-	-	-	-	-	80 %	30,526,125,181	Sekretariat DPRD

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terpenuhi	90%	-	-	-	-	90%	17,351,443,816	100%	20,564,265,116	100%	20,638,137,116	100%	58,553,846,048	Sekretariat DPRD
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rangking prestasi Pemerintah Daerah dalam (LPPD dan LKPJ)	Nilai sangat tinggi (ranking 34 Nasiona l)	Nilai sangat tinggi (rankin g 30 besar Nasion al)	313,466,992	-	-	-	-	-	-	-	-	Nilai sangat tinggi (rankin g 30 besar Nasion al)	313,466,992	Sekretariat Daerah
Program penataan peraturan perundang- undangan	Persentase produk hukum daerah yang harmonis tidak tumpang tindih, penyelesaian permasalahn hukum dan pemahaman peraturan perundang- undangan di masyarakat	80%	100%	1,081,211,965	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1,081,211,965	Sekretariat Daerah
	Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi	80%	--	--	100%	696,990,206	-	-	-	-	-	-	100%	696,990,206	
	Persentase penanganan permasalahan hukum yang difasilitasi	100%	100%		100%		-		-	-	-	-	100%		



Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Presentase OPD yang tepat ukuran (rightsizing), % OPD pelanana yang mempunyai SKM dengan nilai baik dan % LKJP yang tepat waktu dan sesuai aturan	37%	37%	992,165,124	40%	709,126,580	-	-	-	-	-	-	45%	1,701,291,704	Sekretariat Daerah
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Presentase pelayanan kehumasan, dokumentasi, dan keprotokolan.	90%	90%	4,104,638,141	-	-	-	-	-	-	-	-	90%	4,104,638,141	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Keagamaan	Presentase meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan agama	80%	80%	3,282,038,575	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	3,282,038,575	Sekretariat Daerah
	Presentase kegiatan hari besar keagamaan difasilitasi	90%		--	90%	3,433,258,950	-	-	-	-	-	-	90%	3,433,258,950	Sekretariat Daerah
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rumusan kebijakan terkait bidang perekonomian	4 dok	4 dok	827,873,252	-	-	-	-	-	-	-	-	4 dokum en	827,873,252	Sekretariat Daerah
Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Persentase Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (LPPD dan LKPJ) yang disusun tepat waktu	100%			100%	314,058,272	-	-	-	-	-	-	100%	314,058,272	Sekretariat Daerah

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan	Presentase Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD dan LKPJ) yang disusun tepat waktu	100%			100%	374,953,981	-	-	-	-	-	-	100%	1,212,806,150	Sekretariat Daerah
	Persentase kerjasama antar Pemerintah, lembaga pemerintah dan Non pemerintah yang difasilitasi	100%			100%								100%		
Program Koordinasi, Fasilitasi, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Perekonomian	Tingkat kepatuhan BUMD terhadap regulasi Good Corporate Governance Kota Mojokerto	100%			100%	691,383,640	-	-	-	-	-	-	100%	1,298,764,200	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,16	-	-	-	-	3,45	1,066,833,495.00	3,5	891,211,366	3,55	899,046,192	3,55	2,857,091,052	Bagian Pemerintahan
	Persentase Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	100%	-	-	-	-	100%	599,427,363	100%	434,352,924	100%	429,579,815	100%	1,463,360,101	Bagian Hukum
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase kebijakan perekonomian yang dilaksanakan	100%	-	-	-	-	100%	1,176,395,860.00	100%	2,393,752,135	100%	2,393,752,135	100%	5,963,900,130	Bagian Perekonomian

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang diproses secara tender	100%	-	-	-	-	100%	612,152,205.00	100%	619,710,000	100%	612,900,000	100%	1,844,762,205	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pembangunan
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Cakupan Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	100%	100%	406,952,690	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	406,952,690	DPMPSTP
Program Optimalisasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase indeks kepuasan masyarakat	80,50	-	-	83	194,734,020	-	-	-	-	-	-	83	194,734,020	DPMPSTP
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,37%	-	-	-	-	83	493,168,400.00	84.5	499,708,591.20	85	514,699,849	85	1,507,576,840	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Cakupan layanan komunikasi dan informatika kepada masyarakat	80%	100%	2,795,528,939	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	2,795,528,939	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1. Persentase ketersediaan layanan TIK sesuai kebutuhan, 2. Persentase layanan TIK yang berfungsi baik	n/a	-	-	80%	2,084,404,430	-	-	-	-	-	-	80%	2,084,404,430	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,6	-	-	-	-	85	4,241,788,216	87.00	4,424,588,152.53	89.00	4,705,220,631.76	89.00	13,371,597,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE )	3,36	-	-	-	-	3,3	3,116,458,033.00	3,4	3,119,574,491.67	3,5	3,318,128,000.00	3,5	9,554,160,525	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi	100%	100%	1,855,996,050	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1,855,996,050	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	0,98	-	-	0,98	992,390,582	-	-	-	-	-	-	0,98	992,390,582	
	Rasio Bayi berakte kelahiran	0,98	0,99		1		-		-		-		1		
	Rasio pasangan berakte nikah	0,83	0,85		0,89		-		-		-		0,89		
	Penerapan KTP nasional berbasis NIK	sudah	sudah		sudah		-		-		-		sudah		
	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98%	98%		98%		-		-		-		98%		
	Cakupan penerbitan akte kelahiran	99%	99%		100%		-		-		-		100%		
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	0,98	-	-	-	-	0,98	1,445,431,487	0,98	556,606,510	0,98	605,538,950	0,98	2,607,576,947	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98%					98%		98%		98%		98%	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio Bayi berakte kelahiran	1	-	-	-	-	1	213,330,636	1	178,212,147	1	199,754,274	1	591,297,057	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Rasio pasangan berakte nikah	0.9					0.9		0.91		0.91		0.91		
	Cakupan penerbitan akte kelahiran	100%					100%		100%		100%		100%		
Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas mendukung BLUD dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat	5 Puskes mas	5 Puske smas	11,895,569,004	5 Puskes mas	12,691,719,545	-	-	-	-	-	-	5 Puskes mas	24,587,288,549	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah puskesmas / UPT mendukung BLUD dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat	5 puskes mas	-	-	-	-	5 puskes mas	10,604,771,737	5 puskes mas	7,814,244,255	5 puskes mas	7,814,244,255	5 puskes mas	26,233,260,247	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
<b>MISI 4 : Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah</b>															
T.1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,49	5.75		-3.69		2,5-3,5		3,6-4,4		4,5-5,0		4,5-5,0		
S.1. Meningkatnya kontribusi sektor- sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	285.898 .021.00 0	333.52 1.000. 000		381.14 5.000. 000		360.00 0.000. 000		365.00 0.000. 000		370.00 0.000. 000		370.00 0.000. 000		
	Pertumbuhan PDRB sektor	6.16	3.72		-3.55		1,5-2,4		2,5-3,4		3,5-4,4		3,5-4,4		

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
	Industri														
	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	6.16	5.89		-9.2		0,7-1,4		1.5-1,9		2,0-2,5		2,0-2,5		
	Pertumbuhan PDRB sektor lainnya	4,3	5.29		-0.27		1,6-2,5		2,6-3,2		3,2-3,7		3,2-3,7		
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Cakupan Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	100%	100%	416,698,176	50%	82,732,765	-	-	-	-	-	-	50%	499,430,941	DPMPTSP
	Persentase perusahaan yang tertib melaporkan LKPM		50%	--	--	--			-		-		50%		
Program Optimalisasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase indek kepuasan masyarakat	80,50	-	-	83	194,734,020	-	-	-	-	-	-	83	194,734,020	DPMPTSP
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal	n/a	-	-	-	-	2	96,843,216.00	2	153,700,885.52	2	293,912,221	2	544,456,322	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Persentase UMKM yang mandiri dan berdaya saing	59%	59%	123,729,680	-	-	-	-	-	-	-	-	59%	123,729,680	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan wira usaha baru	80%	80%	327,231,850	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	327,231,850	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase Terwujudnya Profesionalisme dan Pertumbuhan Koperasi yang Didukung Pengelolaan Kelembagaan dan Usaha Serta Partisipasi Anggota yang Berkualitas	78%	78%	405,436,500	-	-	-	-	-	-	-	-	78%	405,436,500	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kapasitas Usaha koperasi	% pertumbuhan omzet koperasi	12,38%	-	-	13,65 %	394,587,850	-	-	-	-	-	-	13,65 %	394,587,850	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro	% Pertumbuhan omzet usaha mikro	7,25%	-	-	8,15%	129,145,171	-	-	-	-	-	-	8,15%	129,145,171	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan omzet koperasi	17.5%	-	-	-	-	17.5%	917,358,890.00	17.5%	894,570,950.00	17.5%	951,456,000.00	17.5%	2,763,385,840	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan produktivitas usaha mikro	3%	-	-	-	-	-	-	3%	935,000,000.00	3%	1,028,500,000.00	3%	1,963,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan omzet usaha mikro	12%	-	-	-	-	12%	405,321,708.00	12%	1,350,000,000.00	12%	1,485,000,000.00	12%	3,240,321,708	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Persentase Hasil Produksi sektor perikanan budidaya	5%	5%	862,558,850	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	862,558,850	Dinas KP & Pertanian
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi ikan	3%	-	-	-	-	3%	319,302,136.00	3%	145,600,000	3%	180,000,000	9%	644,902,136	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase peningkatan jumlah anggota Pokdakan	3%	-	-	-	-	3%	-	3%	-	3%	-	9%	-	
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Persentase luas lahan yang teraliri irigasi	100%	100%	386,497,800	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	386,497,800	Dinas KP & Pertanian
	Persentase kelompok tani menggunakan bibit unggul	100%	100%	--	100%	218,712,650	-	-	-	-	-	-	100%	218,712,650	
	Persentase kelompok tani yang menggunakan pupuk tepat ukur	100%	100%		100%		-	-	-	-	-	-	100%		
	Jumlah Poktan yang menggunakan cara bertani metode intensifikasi	26 Poktan	26 Poktan		26 Poktan		-	-	-	-	-	-	26 Poktan		
	Jumlah penyuluh yang berkompeten	13 Penyuluh	13 Penyuluh		13 Penyuluh		-	-	-	-	-	-	13 Penyuluh		



Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase luas lahan yang teraliri irigasi	100%	-	-	-	-	100%	424,999,908.00	-	-	-	-	100%	424,999,908	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase kelompok tani menggunakan bibit unggul	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	
	Persentase kelompok tani yang menggunakan pupuk tepat ukur	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	
	Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	90%	-	-	-	-	-	-	90%	503,685,000	90%	498,150,000	90%	1,001,835,000	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah gapoktan yang menggunakan cara bertani metode intensifikasi	26 Poktan	-	-	-	-	26 Poktan	1,392,492,637.00	-	-	-	-	26 Poktan	1,392,492,637	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Jumlah penyuluh yang berkompeten	13 Penyuluh	-	-	-	-	13 Penyuluh	-	-	-	-	-	13 Penyuluh	-	
	Persentase prasarana yang digunakan	90%	-	-	-	-	-	-	90%	46,410,000	90%	45,000,000	90%	91,410,000	

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Cakupan efisiensi mekanisme perdagangan daerah	5%	5%	5,850,271,615	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	5,850,271,615	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Prosentase Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Dapat Terlaksana	5%	5%	171,501,900	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	171,501,900	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Program Pengembangan Usaha Perdagangan	Persentase tingkat Inflasi tahun berjalan	4.00%	-	-	4.00%	6,112,429,767.55	-	-	-	-	-	-	4.00%	6,112,429,767.55	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pembangunan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	100%	-	-	-	-	100%	15,399,881,813.00	100%	4,900,000,000.00	100%	5,390,000,000.00	100%	25,689,881,813	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penyediaan informasi data perdagangan	80%	-	-	-	-	80%	38,688,818.00	-	-	-	-	80%	38,688,818	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Pertumbuhan omset usaha mikro	9.35%							9.35%	981,890,000.00	9.35%	981,890,000.00	9.35%	1,963,780,000	
Program pengembangan industri kecil dan menengah	Prosentase meningkatnya Jumlah Produk IKM dan Pendapatan Pengrajin	47%	47%	157,952,350	6.00%	306,419,554	-	-	-	-	-	-	53.00%	464,371,904	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan omzet penjualan para IKM Kota Mojokerto	15%	-	-	-	-	18%	475,544,000.00	18%	2,675,000,000.00	18%	2,942,500,000.00	18%	6,093,044,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
<b>S.2. Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</b>	<b>Laju Inflasi</b>	<b>1,97</b>	<b>1.83</b>		<b>1.93</b>		<b>1.9-2.1</b>		<b>1.9-2.1</b>		<b>1.9-2.1</b>		<b>1.9-2.1</b>		
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok	100%	-	-	-	-	100%	395,734,414.00	100%	200,200,000.00	100%	217,800,000.00	100%	813,734,414	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
<b>S.3. Meningkatnya industri pariwisata</b>	<b>Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata</b>	<b>n/a</b>	<b>7.78%</b>		<b>- 8.16%</b>		<b>1.50%</b>		<b>2.00%</b>		<b>2.50%</b>		<b>2.50%</b>		
Program pengembangan pemasaran pariwisata	Prosentase Meningkatnya Kualitas Pengembangan Pemasaran Pariwisata	100%	100%	1,188,797,200	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1,188,797,200	DISPORABUDPAR
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Kunjungan wisata	0%	-	-	40%	304,149,050	-	-	-	-	-	-	40%	304,149,050	DISPORABUDPAR
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah pengunjung even wisata	n/a	-	-	-	-	-	-	12.000	760,000,000.00	12.500	685,000,000	12.500	1,445,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kontribusi jasa usaha pariwisata	n/a	-	-	-	-	Rp. 10.000.000.000	1,113,004,921.00	Rp.11.000.000.000	750,000,000.00	Rp.11.500.000.000	750,000,000	Rp.11.500.000.000	2,613,004,921	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
T.2. Menyediakan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi dengan memperhatikan lingkungan hidup	Indeks Infrastruktur	68.81	80,96		84,56		85.19		86.06		86.93		86.93		
S.1. Meningkatnya Aksesibilitas Ekonomi Masyarakat Yang Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Pekerja Umum	75	77.93		85.56		87.56		89.56		91.56		91.56		
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase rencana pembangunan jalan yang diimplementasikan	100%	89%	12,407,531,731	-	-	-	-	-	-	-	-	89%	12,407,531,731	Dinas PUPR
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase Rencana Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Yang Diimplementasikan	80%	80%	6,135,325,748	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	6,135,325,748	Dinas PUPR
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan ang direhab/dipelihara	10%	10%	8,773,105,861	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	8,773,105,861	Dinas PUPR
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase jalan dan saluran lingkungan yang baik	100%	100%	7,489,493,427	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	7,489,493,427	Dinas PUPR
Program Pengembangan Wilayah Strateis dan Cepat Tumbuh	Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibangun di Kawasan Strategis	0%	0%	14,221,477,700	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	14,221,477,700	Dinas PUPR

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
Program Pengendalian Banjir	Persentase area bebas genangan air (tidak lebih dari 2 jam)	40%	40%	5,715,574,152	-	-	-	-	-	-	-	-	40%	5,715,574,152	Dinas PUPR
	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	70,01%	0%		75%	5,499,767,848	-	-	-	-	-	-	80%	5,499,767,848	Dinas PUPR
	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	43,57%	50%		55%		-		-		-		60%		
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	38,13%	42%		45%		-		-		-		50%		
	Rasio Jaringan Irigasi	70%	72%		74%		-		-		-		75%		
Program Pembangunan serta Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	65%	-	-	71%	10,093,950,217	-	-	-	-	-	-	78%	10,093,950,217	Dinas PUPR
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,76	-		0,71		-		-		-		0,78		
	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,96	-		0,96		-		-		-		0,96		
	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	33%	-		27%		-		-		-		25%		

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam)	76%	-		71%		-		-		-		78%		
	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	48.30%	-		51.20 %		-		-		-		52.70 %		
	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	5,48%	-		4,5%		-		-		-		3%		
	Persentase rumah tinggal bersantasi	98,04%	-		100%		-		-		-		100%		
	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	1,27%	-		1,1%		-		-		-		1%		
	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	94,68%	-		96%		-		-		-		97%		
Pengembangan wilayah dan fasilitas publik strategis	Ruang publik yang berubah peruntukannya	0.00	-	-	3	32,958,300,287.64	-	-	-	-	-	-	3	32,958,300,288	Dinas PUPR

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Drainase	84%	-	-	-	-	84%	39,933,125,955.0 0	85%	40,887,897,514.0 0	86%	42,887,897,514.0 0	86%	123,708,920,983	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Prosentase bangunan pengaman SDA dalam kondisi baik	100%	-	-	-	-	-	-	100%	400,000,000.00	100%	408,000,000.00	100%	808,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase fasilitas publik dalam kondisibaik.	n/a	-	-	-	-	86.67 %	37,508,929,700.0 0	86.90 %	38,521,615,796.0 0	86.95 %	39,292,048,112.0 0	86.95 %	115,322,593,608	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN	Persentase jalan kondisi mantap.	90%	-	-	-	-	91.50 %	42,917,955,201.0 0	91.60 %	45,452,694,616	91.70 %	45,659,407,729	91.70 %	134,030,057,546	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
<b>S.2. Meningkatnya akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi layak</b>	<b>Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman</b>	<b>75</b>	<b>94.61</b>		<b>95.96</b>		<b>96.46</b>		<b>96.96</b>		<b>97.46</b>		<b>97.46</b>		

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
Program Pengembangan Perumahan	Prosentase perumahan kumuh yang tertangani	71,50%	75%	1,205,362,200	81%	4,705,741,041	-	-	-	-	-	-	81%	5,911,103,241	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	96.36%	97.36 %		100%		-		-		-		100%		
	Persentase penduduk berakses air minum	97.82%	99.00 %		100%		-		-		-		100%		
	Rasio rumah layak huni	89.00%	99.50 %		100%		-		-		-		100%		
	Rasio permukiman layak huni	96.00%	97.00 %		98.00 %		-		-		-		98%		
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	94.00%	95.00 %		96.00 %		-		-		-		96%		
	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	93.00%	94.00 %		95.00 %		-		-		-		95%		
	Persentase permukiman yang tertata	97.00%	98.00 %		99.00 %		-		-		-		99%		
	Persentase lingkungan permukiman kumuh	4.60%	4.00%		3.00%		-		-		-		3%		
	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	96.36%	97.00 %		98.00 %		-		-		-		98%		



Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	n/a	5.00%		3.00%		-		-		-		3%		
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	96.68%	96.68 %		96.68 %		-		-		-		97%		
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk berakses air minum	96%	96%	3,309,368,605	97%	7,567,306,999	-	-	-	-	-	-	98%	7,567,306,999	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Presentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum	80%	-	-	-	-	80%	1,264,411,345.00	80%	1,625,000,000.00	80%	1,939,350,000.00	80%	4,828,761,345	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Presentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Air Limbah	80%	-	-	-	-	80%	2,052,677,794.00	90%	4,973,750,500.00	90%	4,973,750,500.00	90%	12,000,178,794	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Presentase perumahan dan kawasan pemukiman kumuh yang tertangani	80%	-	-	-	-	80%	2,577,016,671.00	100%	3,275,000,000	100%	3,500,000,000	100%	9,352,016,671	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Presentase peningkatan prasarana,sarana dan utilitas umum	100%	-	-	-	-	100%	5,151,529,000.00	100%	3,800,000,000	100%	4,025,000,000	100%	12,976,529,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
<b>S.3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)</b>	<b>63.02</b>	<b>65.23</b>		<b>57.72</b>		<b>57.79</b>		<b>57.86</b>		<b>57.92</b>		<b>57.93</b>		
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Lingkungan Hidup	63.02	64.02	497,815,425	-	-	-	-	-	-	-	-	64.02	497,815,425	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Upaya Peningkatan Ketercukupan RTH Publik	0.22%	0.26%	2,117,370,800	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26%	2,117,370,800	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Luas Area Bersih Sampah	62%	64%	4,504,185,620.0 0	66%	4,688,124,255	-	-	-	-	-	-	64%	9,192,309,875	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase Sampah Yang Di Kelola	66%	67%		68%		-	-	-	-	-	-	67%	4,234,183,600	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Luas Taman terhadap Luas Wilayah	0.26%	-	-	0.34%	1,784,255,194	-	-	-	-	-	-	0.30%	1,784,255,194	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase Lampu PJU Yang Berfungsi Baik	76%	-		78%		-	-	-	-	-	-	77%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara	50 81,46	-	-	-	-	50,06 81,55	300,750,519	50,12 81,64	255,403,050	50,18 81,73	252,596,423	50,18 81,73	808,749,992	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Lahan	27,11	-	-	-	-	27,13	6,346,750,865	27,16	2,482,204,191	27,17	2,482,204,191	27,17	11,311,159,247	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase sampah yang dikelola	97,04%	-	-	-	-	97,45 %	4,512,269,732	97,85 %	4,683,792,349	97,96 %	4,683,792,349	97,96 %	13,879,854,429	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
<b>S.4. Meningkatkan kualitas pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>	<b>Indeks infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>	<b>59.52</b>	<b>87.32</b>		<b>91.60</b>		<b>92.10</b>		<b>92.60</b>		<b>93.10</b>		<b>93.10</b>		
Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan	Persentase permasalahan terkait ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang mendapat rekomendasi	100%	100%	2,250,474,398	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	2,250,474,398	DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase titik parkir yang penataannya tidak melebihi lahan parkir yang disediakan	97%	100%		-		-		-		-		100%		DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase penurunan angka pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	20%	20%		-		-		-		-		20%		DINAS PERHUBUNGAN

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase fasilitas dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik (layak fungsi)	85%	85%	715,217,119	-	-	-	-	-	-	-	-	85%	715,217,119	DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase alat uji kendaraan bermotor yang berfungsi dan akurat (sesuai dengan standard Kementerian Perhubungan)	100%	100%		-	--	-	--	-		-		100%		DINAS PERHUBUNGAN
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase keterisian/ faktor muat/ load factor angkutan sekolah gratis	100%	100%	1,072,442,124	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1,072,442,124	DINAS PERHUBUNGAN
Program Peningkatan Pengendalian LLAJ	Persentase Angka Pelanggaran LLAJ	12,00%	--	--	28,72 %	485,347,620	-	-	-	-	-	-	35,85 %	485,347,620	DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase penurunan angka pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)				30%		-		-				30%		
Program Peningkatan Kelancaran Lalu Lintas	Persentase ruas jalan dengan tingkat layanan jalan minimal "C"	42.86%	--	--	53.57 %	2,614,540,053	-	-	-	-	-	-	64.29 %	2,614,540,053	DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penurunan angka pelanggaran pengguna jalan	35.00%	-	-	-	-	35.00 %	6,580,583,995.00	38.00	570,331,998	40.00	546,740,695	40.00	7,697,656,688	DINAS PERHUBUNGAN

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase penurunan angka pelanggaran angkutan jalan	35.00%	-	-	-	-	35.00 %		38.00	339,350,977	40.00	353,510,862	40.00	692,861,839	
	Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor	88.00%	-	-	-	-	88.00 %		88.00	448,001,008	88.00	535,385,907	88.00	983,386,915	
	Load Faktor Angkutan Sekolah Gratis	100.00 %	-	-	-	-	100.00 %		100.00	1,706,250,000	100.00	1,740,000,000	100.00	3,446,250,000	
	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	11.70%	-	-	-	-	11.70 %		11.70	-	11.70	-	11.70		
	Persentase layanan angkutan darat	6.62%	-	-	-	-	6.62%		6.62	-	6.62	-	6.62		
	Rasio ijin trayek	0.00037	-	-	-	-	0.00037		0.00037	-	0.00037	-	0.00037		
	Persentase Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan	93.13%	-	-	-	-	93.13 %		98.31	2,225,730,780	100	2,221,330,980	100	4,447,061,760	
	Persentase Ruas jalan dengan tingkat layanan jalan minimal "C" pada jam sibuk	92.86%	-	-	-	-	92.86 %		96.43	1,981,011,487	100	1,924,036,059	100	3,905,047,546	

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab			
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0.0014	-		-		0.0014	-		0.0004 9	-		0.0004 9	-		0.0004 9	
<b>MISI 5 : Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila</b>																	
T.1. Meningkatkan Kesalehan Sosial	Indeks Kesalehan Sosial	n/a	76.16		76.20		76.23		76.25		76.27		76.27				
S.1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas seni budaya lokal	Jumlah apresiasi seni dan budaya	13	8		0		6		8		10		10				
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Presentase Meningkatnya kualitas pengelolaan kekayaan budaya	100%	100%	767,459,900	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	767,459,900			DISPORABUDPA R
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Presentase Meningkatnya kualitas pengelolaan keragaman budaya	100%	100%	167,337,250	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	167,337,250			DISPORABUDPA R
Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Jumlah seni budaya yang dilestarikan (seni budaya)	10	-	-	10	3,650,000	-	-	-	-	-	-	10	3,650,000			DISPORABUDPA R
ROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase even/kegiatan pelestarian budaya	4	-	-	-	-	4 kegiatan	320,173,563.00	46 kegiatan	1,745,000,000	46 kegiatan	1,762,450,000	46 kegiatan	3,827,623,563			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	14					15						15				
	Penyelenggaraan Festival/even seni dan budaya	4							4		5		5				

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
	Jumlah Karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	8							10		15		15		
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs dan Kawan Cagar Budaya yang dilestarikan	16 unit	-	-	-	-	-	-	16 unit	134,225,000	20 unit	192,780,000	20 unit	327,005,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	1 unit							1 unit		1 unit		1 unit		
<b>S.2. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama</b>	<b>Jumlah konflik SARA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		-		-		-		-		
	<b>Persentase konflik SARA yang terselesaikan</b>	n/a	-		-		100%		100%		100%		100%		
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	611,474,666	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	611,474,666	BAKESBANGPOL
Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Presentase Peningkatan Peserta yang Mendapatkan / Mengikuti Kegiatan Wawasan Kebangsaan	100%	100%	696,740,850	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	696,740,850	BAKESBANGPOL

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase masyarakat yang telah menerima pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan	100%	-	-	100%	165,570,000	-	-	-	-	-	-	100%	165,570,000	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase masyarakat yang mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan dan pembinaan ideologi	4.90%	-	-	-	-	4.90%	1,128,929,767.00	5.04%	833,413,083.36	5.18%	833,413,083.36	5.18%	2,795,755,934	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase konflik SARA yang ditangani	100%	-	-	-	-	100%	622,089,810.00	100%	562,277,145.76	100%	582,500,013.30	100%	1,766,866,969	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Keagamaan	Prosentase proposal hibah dan bantuan sosial yang diverifikasi dan divalidasi secara benar dan tepat waktu	50%	50%	3,282,038,575	80%	3,433,258,950	-	-	-	-	-	-	80%	3,282,038,575	Sekretariat Daerah
	Prosentase kegiatan hari besar keagamaan difasilitasi	100%		--	100%		-	-	-	-	-	-	100%		
	Jumlah prestasi lomba di bidang keagamaan	n/a			15								15%		



Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase kegiatan Kesejahteraan Rakyat	100%	-	-	-	-	100%	11,578,989,707.0 0	100%	9,554,035,315.80	100%	9,998,828,139.67	100%	31,131,853,162	Bagian Kesejahteraan Rakyat
<b>MISI 6 : Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan</b>															
T.1. Meningkatnya kesetaraan hasil pembangunan dan ekonomi	Indeks Gini	0.341	0.309		0.355		0.353		0.350		0.348		0.348		
S.1. Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2.45	2.65		6.74		6,1-6,4		5,6-6,0		5,0-5,5		5,0-5,5		
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase kompetensi angkatan kerja	72%	72%	476,930,700	-	-	-	-	-	-	-	-	72%	476,930,700	Diskouminaker
Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	39,22%	-	-	43,24 %	177,229,400	-	-	-	-	-	-	43,24 %	177,229,400	Diskouminaker
	Pertumbuhan wira usaha baru	27,27%	-	-	32,40 %		-		-		-		32,40 %		
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pelatihan tenaga kerja yang produktif	30%	-	-	-	-	33%	549,377,782.00	45%	528,476,538.20	30%	544,330,834	30%	1,622,185,155	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	72%	-	-	-	-	93.72 %	112,299,036.00	97.95 %	93,812,368.92	98.35 %	95,564,907	98.35 %	301,676,312	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
<b>S.2. Menurunnya angka kemiskinan</b>	<b>Angka Kemiskinan</b>	<b>5.379</b>	<b>5.15</b>		<b>6.24</b>		<b>5,84 - 6,04</b>		<b>5,63 - 5,83</b>		<b>5,42 - 5,62</b>		<b>5,42 - 5,62</b>		
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & PMKS Lainnya	Persentase jumlah PMKS yang diberi bantuan	95%	100%	592,071,350	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	592,071,350	Dinas Sosial
Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang terlayani dan direhabilitasi	95%	100%	729,301,250	100%	1,120,152,220	-	-	-	-	-	-	100%	1,849,453,470	Dinas Sosial
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial	95%	-	-	100%	524,852,050	-	-	-	-	-	-	100%	524,852,050	Dinas Sosial
Program Bina Pemberdayaan PMKS & PSKS	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lain	2%	-	-	12%	402,375,750	-	-	-	-	-	-	12%	402,375,750	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Presentase PMKS yang terlayani sesuai SOP	100%	-	-	-	-	100%	2,942,590,100.00	100%	2,815,166,991.00	100%	2,865,800,000.00	100%	8,623,557,091	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	2. Presentasi PMKS yang direhabilitasi	100%					100%		100%		100%		100%		
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pelaksanaan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	100%	-	-	-	-	100%	5,375,127,000.00	100%	5,375,127,000.00	100%	5,375,127,000.00	100%	16,125,381,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100%	-	-	-	-	100%	10,583,104,673.0 0	100%	10,906,494,137.0 0	100%	10,906,494,137.0 0	100%	32,396,092,947	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
T.1. Meningkatnya kesetaraan hasil pembangunan dan ekonomi	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93.40	93.18		93.26		93.28		93.30		93.32		93.32		
S.1. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	82.00	83.74		90.59		91.00		91.50		92.00		92.00		
Program Penguatan Kelembagaan Pengarus-utamaan Gender dan Anak	Persentase perangkat daerah memiliki focal point aktif	100%	100%	264,100,600	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	264,100,600	DP3AKB
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase keterlibatan perempuan dalam pembangunan	10%	25%	428,077,155	-	-	-	-	-	-	-	-	25%	428,077,155	DP3AKB

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	3.50%	--	--	3.60%	561,651,260	-	-	-	-	-	-	3.60%	561,651,260	DP3AKB
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	24%	32%		32%		-		-		-		32%		
	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	28.57%			28.7%		-		-		-		28.7%		
	Partisipasi angkatan kerja perempuan	32.07%			32.9%		-		-		-		32.9%		
	Rasio KDRT	10%			10%		-		-		-		10%		
	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0%	0%		0%		-		-		-		0%		
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%		100%		-		-		-		100%		

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KIP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%	100%		100%		-		-		-		100%		
	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	100%	100%		100%		-		-		-		100%		
	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%		100%		-		-		-		100%		

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%		100%		-		-		-		100%		
	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%		100%		-		-		-		100%		
	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%		100%		-		-		-		100%		
	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	n/a	93.45		93.5		-		-		-		93.5		
	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	n/a	93.45		93.5		-		-		-		93.5		
	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	n/a	93.45		93.5		-		-		-		93.5		
	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	n/a	93.45		93.5		-		-		-		93.5		
	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	n/a	93.45		93.5		-		-		-		93.5		

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENGARUSUTAMA AN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pelaksanaan Pengarutamaa m Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	100%	-	-	-	-	100%	599,302,809.00	100%	675,176,320.00	100%	609,100,935.30	100%	1,883,580,064	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase pelaksanaan perlindungan perempuan	100%	-	-	-	-	100%	303,097,329.00	100%	295,750,000.00	100%	278,389,114.20	100%	877,236,443	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100%	-	-	-	-	100%	356,149,455.00	100%	364,000,000.00	100%	397,230,525.00	100%	1,117,379,980	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Prosentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100%	100%	7,943,159,099	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	7,943,159,099	Kec.Prajurit-kulon
Program pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat	Cakupan sarana prasarana pemerintah kelurahan yang baik	5%	-	-	5%	10,468,960,677	-	-	-	-	-	-	5%	10,468,960,677	Kec.Prajurit-kulon
	rata rata jumlah kelompok binaan lembaga pembnerdayaan masyarakat ( LPM )	2%	-		4%		-		-		-		4%		
	Rata2 jumlah kelompok binaan PKK	6%	-		6%		-		-		-		6%		
	Persentase LPM aktif	100%	-		100%		-		-		-		100%		

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
	Persentase LPM berprestasi	16.66 %	-		16.66 %		-		-		-		16.66 %		
	Persentase PKK aktif	100%	-		100%		-		-		-		100%		
	Persentase posyandu aktif	100%	-		100%		-		-		-		100%		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	100%	-	-	-	-	100%	11,673,655,369.00	100%	10,155,242,547.04	100%	10,155,242,547.04	100%	31,984,140,463	KECAMATAN PRAJURIT KULON
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Prosentase Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	96.5	100%	11,786,904,099.45	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	11,786,904,099.45	Kecamatan Magersari
Program pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat	Cakupan sarana prasarana pemerintah kelurahan yang baik	50%	--	--	83%	7,377,516,748	-	-	-	-	-	-	83%	7,377,516,748	Kecamatan Magersari
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1.16	--	--	1.5		-		-		-		1.5		
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	1.8	--	--	2.16		-		-		-		2.16		
	Persentase LPM aktif	100%	--	--	100%		-		-		-		100%		



Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
	Persentase LPM Berprestasi	0%	--	--	16%		-		-		-		16%		
	Persentase PKK aktif	100%	--	--	100%		-		-		-		100%		
	Persentase Posyandu aktif	100%	--	--	100%		-		-		-		100%		
	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	0	--	--	1.5%		-		-		-		1.5%		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	100%	-	-	-	-	100%	13,511,895,405.00	100%	13,118,393,522.73	100%	13,118,393,522.73	100%	39,748,682,450	KECAMATAN MAGERSARI
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	80%	80%	9,699,176,147.10	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	9,699,176,147.10	Kecamatan Kranggan
Program pembangunan, sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat	Presentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	80%	--	--	100%	3,206,597,314	-	-	-	-	-	-	100%	3,206,597,314	Kecamatan Kranggan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%	-	-	-	-	100%	9,444,670,546	100%	8,809,515,549.11	100%	8,809,515,549.11	100%	27,063,701,644	KECAMATAN KRANGGAN

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
<b>MISI 7 : Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat</b>															
T.1. Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0.824	0.787		0.780		-		-		-		-		
	Kapasitas Fiskal Daerah	n/a	-		-		384.00 0.000. 000		386.00 0.000. 000		389.00 0.000. 000		389.00 0.000. 000		
S.1. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	23.72	27.795		35.610		30.415		30.777		31.145		31.145		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	5,586,260,988	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	5,586,260,988	BPPKA
Program Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pajak Daerah	18.9	15	--	15	438,845,200	-	-	-	-	-	-	15	438,845,200	BPPKA
	Pertumbuhan Retribusi Daerah	4.43	5		5		-		-		-		5		
	Pertumbuhan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	7.35	5		5		-		-		-		5		
	Pertumbuhan Lain-lain PAD yang sah	36.34	10		10		-		-		-		10		
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase meningkatnya pendapatan asli daerah	1.05	15		15	448,402,550	-	-	-	-	-	-	15	448,402,550	BPPKA

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja											PD Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
Program Penyusunan APBD dan P-APBD Kota Mojokerto	Penetapan APBD	TEPAT	TEPAT		TEPAT	1,286,830,927	-	-	-	-	-	-	TEPAT	1,286,830,927	BPPKA
	Persentase SILPA	7.63	7		7		-		-		-		7		
	Persentase belanja pendidikan	20.25	20.23		20		-		-		-		20		
	Persentase belanja kesehatan	28.64	20.84		15		-		-		-		15		
	Persentase belanja infrastruktur	18.7	25		25		-		-		-		25		
	Persentase belanja kelurahan	2.45	5		5		-		-		-		5		
	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	61/39	61/39		62/38		-		-		-		62/38		
	Bagi hasil kab/kota dan desa	5.76	7		7		-		-		-		7		
Program Pengelolaan Aset Daerah	Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik	90	--	--	90	887,954,919	-	-	-	-	-	-	90	887,954,919	BPPKA
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik	90%	-	-	-	-	90%	2,135,832,571.00	90%	1,592,266,763.36	90%	1,959,042,016	90%	5,687,141,350	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja akhir periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah	100%	-	-	-	-	100%	1,396,347,108.00	100.00 %	1,225,032,398.00	100%	1,267,184,372	100%	3,888,563,878	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Pada tahun 2019 dan 2020, nomenklatur Program berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan nomenklatur Perangkat Daerah berpedoman pada Perda Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto. Namun pada tahun 2020 terdapat kebijakan penyederhanaan program, sehingga nomenklatur program tahun 2020 berbeda dengan tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2021-2023, nomenklatur program berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta nomenklatur Perangkat Daerah berpedoman pada Perda Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto.



## BAB VII

# KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

---

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017, bahwa hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah secara eksplisit dituangkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah serta target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Dalam hal suatu urusan atau program bersifat strategis, maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Demikian juga karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala PD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau dilerantarkan.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kota Mojokerto berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah (PD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, serta mengakomodir program unggulan dari Kepala Daerah Terpilih. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi PD dalam penyusunan Renstra PD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, perhitungan pagu indikatif masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk program prioritas yang berhubungan dengan program pembangunan daerah (strategis) dan pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan kerangka Prioritas I dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat, serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Program Prioritas II merupakan program dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan Walikota terpilih yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar. Berikut disajikan program pembangunan beserta kerangka pendanaan Kota Mojokerto yang disajikan berdasarkan prioritas program.

Pada tahun 2019 dan 2020, nomenklatur Program berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan nomenklatur Perangkat Daerah berpedoman pada Perda Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto. Namun pada tahun 2020 terdapat kebijakan penyederhanaan program, sehingga nomenklatur program tahun 2020 berbeda dengan tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2021-2023, nomenklatur program berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta nomenklatur Perangkat Daerah berpedoman pada Perda Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto.

**Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019-2023**

Kode	Kapasitas Riil / Belanja	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
	<b>KAPASITAS RIIL KEUANGAN</b>	<b>520,908,410,204.44</b>	<b>446,723,645,296.28</b>	<b>1,042,609,617,966.00</b>	<b>935,180,122,502.14</b>	<b>943,765,919,396.19</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>852,084,096,739.42</b>	<b>804,407,017,101.88</b>	<b>1,042,609,617,966.00</b>	<b>935,180,122,502.14</b>	<b>943,765,919,396.19</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>716,512,782,717.00</b>	<b>648,143,238,556.21</b>	<b>823,346,381,961.00</b>	<b>740,063,304,775.69</b>	<b>748,660,664,206.61</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	315,490,327,345.50	298,618,767,966.05	356,441,867,789.00	331,384,076,451.97	335,081,877,700.07
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	365,598,513,871.50	331,643,642,696.07	418,469,944,785.00	379,148,003,973.72	383,378,786,506.54
2.1.3	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	Belanja Hibah	28,765,841,500.00	14,260,497,894.09	16,481,656,800.00	14,500,000,000.00	15,200,000,000.00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	6,658,100,000.00	3,620,330,000.00	31,952,912,587.00	15,031,224,350.00	15,000,000,000.00
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>134,616,621,172.42</b>	<b>113,437,780,600.21</b>	<b>218,263,236,005.00</b>	<b>194,116,817,726.45</b>	<b>194,105,255,189.58</b>
<b>2.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>0.00</b>	<b>42,825,997,945.46</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>1,000,000,000.00</b>
<b>2.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>954,692,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Tabel 7.2: Rencana Kinerja Program Prioritas I dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
<b>PENDIDIKAN</b>																
101.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	% APK PAUD	97%	97%	3,059,186,446	--	--	--	--	--	--	--	--	97%	3,059,186,446	Dinas Pendidikan
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase APM peserta wajib belajar sembilan tahun	122.05%	121.55%	28,244,846,823	--	--	--	--	--	--	--	--	121.55%	28,244,846,823	Dinas Pendidikan
		APK SD/MI/Paket A	122.05%	-		121%	29,212,289,940	-	-	-	-	-	-	121%	29,212,289,940	
		APK SMP/MTs/Paket B	127.51%	125.51%		126%		-	-	-	-	-	-	127%		
		APM SD/MI/Paket A	112.85%	113.35%		114%		-	-	-	-	-	-	114%		
		APM SMP/MTs/Paket B	95.36%	95.66%		95.96%		-	-	-	-	-	-	96%		
		APS SD/MI/Paket A	122.89%	122.39%		122%		-	-	-	-	-	-	121%		
		APS SMP/MTs/Paket B	103.69%	103.89%		104%		-	-	-	-	-	-	104%		
		Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%		100%		-	-	-	-	-	-	100%		
		Angka Kelulusan SMP/MTs	100%	100%		100%		-	-	-	-	-	-	100%		
		Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	97.33%	97.53%		97.73%		-	-	-	-	-	-	98%		
		Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	122.89%	122.39%		122%		-	-	-	-	-	-	121%		
		Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	103.69%	103.89%		104%		-	-	-	-	-	-	104%		
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.01%	0.01%		0.01		-	-	-	-	-	-	0.01		
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.09%	0.08%		0.07%		-	-	-	-	-	-	0.06%		
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%		100%		-	-	-	-	-	-	100%		
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	100%		100%		-	-	-	-	-	-	100%		
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	97.33%	97.53%		97.73%		-	-	-	-	-	-	98%		
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	31.88%	36.00%		45.00%		-	-	-	-	-	-	54%		
		Sekolah pendidikan SMP/MTs	63.00%	65.00%		70.00%		-	-	-	-	-	-	75%		
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	50/10.000	50/10.000		50/10.000		-	-	-	-	-	-	50/10.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	27/10.000	30/10.000		30/10.000		-		-		-		30/10.000		
		Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	118.81%	118.83%		119%		-		-		-		119%		
		Persentase Capaian SPM Pendidikan Dasar	100%	100%		100%		-		-		-		100%		
101.18	Program Pendidikan Non Formal	Persentase pendidikan non formal yang berkualitas untuk semua jenjang pendidikan	80%	80%	1,344,044,070	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	1,344,044,070	Dinas Pendidikan
101.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai standart kualifikasi	5%	20%	758,779,546	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	758,779,546	Dinas Pendidikan
		Persentase Pendidik lulus UKG nilai diatas 60/80	5%	-	-	20%	15,525,480,000		-	-	-	-	-	20%	15,525,480,000	
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	94.02%	94.52%		95.0%			-	-		-		95.0%		
		Rasio guru/murid sekolah dasar ( SD )	1 : 18	1 : 18		1 : 17			-	-		-		1 : 17		
		Rasio guru/murid sekolah menengah pertama ( SMP )	1 : 15	1 : 15		1 : 15			-	-		-		1 : 15		
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar ( SD )	1.01	1.01		1.01			-	-		-		1.01		
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar (SMP)	2.29	2.29		2.28			-	-		-		2.28		
101.22	Program Manajemen Pelayanan menggunakan informasi manajemen pendidikan	% Sekolah yang menggunakan informasi manajemen pendidikan	80%	80%	1,180,232,906	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	1,180,232,906	Dinas Pendidikan
101.31	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	APK PAUD	97%	-	-	95.28%	1,263,320,828		-	-		-	-	96.28%	1,263,320,828	Dinas Pendidikan
		Angka Kelulusan PNF	100%	-		100%			-	-		-		100%		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase lembaga PAUD & PNF yang terakreditasi	21%	-		24%		-		-		-		27%		
		Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	0%	-		0%		-		-		-		0%		
		Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	97.76%	-		98.06%		-		-		-		98%		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase capaian kinerja Dinas Pendidikan	-	-	-	-	-	100%	107,949,607,462.00	100%	72,623,018,131.80	100%	73,089,328,185	100%	253,661,953,779	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI/Paket A	118.91%	-	-	-	-	100.00%	89,867,706,098.00	100.00%	61,740,430,209	100.00%	62,357,834,511.29	100.00%	213,965,970,818	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APK SMP/MTs/Paket B	133.00%	-	-	-	-	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
		APM SD/MI/Paket A	115.25%	-	-	-	-	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
		APM SMP/MTs/Paket B	123.70%	-	-	-	-	96.26%		96.56%		96.86%		96.86%		
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	116.16%	-	-	-	-	100%		100%		100%		100%		
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	121.84%	-	-	-	-	100%		100%		100%		100%		
		Angka Kelulusan SD/MI	100.00%	-	-	-	-	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
		Angka Kelulusan SMP/MTs	100.00%	-	-	-	-	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
		Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	102.00%	-	-	-	-	97.93%		98.13%		98.33%		98.33%		
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.00%	-	-	-	-	0.01%		0.01%		0.01%		0.01%		
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.01%	-	-	-	-	0.06%		0.05%		0.04%		0.04%		
		Prosentase capaian SPM pendidikan dasar	100.00%	-	-	-	-	100%		100%		100%		100%		
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	60.56%	-	-	-	-	54%		66.56%		71%		71%		
		Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	72.73%	-	-	-	-	75%		80%		85%		85%		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
102.15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) puskesmas pada 20 item obat esensial	90%	90%	3,448,527,131	-	-	-	-	-	-	-	-	90%	3,448,527,131	Dinas Kesehatan	
102.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Perentase Puskesmas dan jaringannya sesuai standar SPM	100%	100%	1,316,089,690	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1,316,089,690	Dinas Kesehatan	
102.39	Program Penguatan Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	93.8	-	-	Kurang dari 47,3 (1 Ibu)	-	-	-	-	-	-	-	Kurang dari 47,3 (1 Ibu)	6,160,049,630	Dinas Kesehatan	
		Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	3.75	-	-	Kurang dari 10	-	-	-	-	-	-	-	Kurang dari 9	6,160,049,630		
		Prevalensi Balita Gizi Buruk	0.76	-	-	Kurang dari 1,65	-	-	-	-	-	-	-	Kurang dari 1,6			
		Prevalensi Stunting Balita	Kurang dari 20%	-	-	Kurang dari 19,5%	-	-	-	-	-	-	-	Kurang dari 19%			
		Persentase Lansia usia 60 thn keatas mendapat Skrening Kesehatan sesuai Standart	0.6	-	-	65%	-	-	-	-	-	-	-	-			70%
		Presentase kelurahan memenuhi tatanan Kota Sehat ke 8 (Kawasan dengan tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri)	77% (14 Kel)	-	-	83% (15 Kel)	-	-	-	-	-	-	-	-			88% (16 Kel)
		Cakupan kelurahan siaga aktif PURI (Purnama Mandiri)	80%	-	-	85%	-	-	-	-	-	-	-	-			85%
1.02.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase sarana obat dan makanan terinspeksi dan dibina untuk memenuhi standar kesehatan	80%	80%	90,744,100	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	90,744,100	Dinas Kesehatan	
102.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan kelurahan siaga aktif PURI (Purnama Mandiri)	90%	90%	1,621,363,855	-	-	-	-	-	-	-	-	90%	1,621,363,855	Dinas Kesehatan	
102.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	1,169,222,902	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1,169,222,902	Dinas Kesehatan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
102.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase KK yang akses Open Defecation Free (ODF)	98%	98%	512,035,550	-	-	-	-	-	-	-	-	98%	512,035,550	Dinas Kesehatan
102.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	90%	90%	1,189,418,360	-	-	-	-	-	-	-	-	90%	1,189,418,360	Dinas Kesehatan
		Persentase orang beresiko HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	80%	80%										80%		
102.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas menerapkan sistem Manajemen mutu pelayanan kesehatan menuju standar akreditasi paripurna berkelanjutan	5 Puskesmas	5 Puskesmas	637,185,571	-	-	-	-	-	-	-	-	5 Puskesmas	637,185,571	Dinas Kesehatan
102.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	6 dokumen	6 dokumen	1,342,539,365	-	-	-	-	-	-	-	-	6 dokumen	1,342,539,365	Dinas Kesehatan
102.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Jumlah Puskesmas memberikan pelayanan kemitraan spesialisik dan dokter umum (Puskesmas)	6 Puskesmas	6 Puskesmas	1,138,277,040	-	-	-	-	-	-	-	-	6 Puskesmas	1,138,277,040	Dinas Kesehatan
102.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan kunjungan lansia baru di Posyandu Lansia	80%	80%	61,136,000	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	61,136,000	Dinas Kesehatan
102.31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Persentase PIRT memiliki sertifikat PKP (penyuluh Keamanan Pangan) dan lauk sehat	65%	65%	72,584,900	-	-	-	-	-	-	-	-	65%	72,584,900	Dinas Kesehatan
102.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4)	98%	98%	3,186,952,087	-	-	-	-	-	-	-	-	98%	824,480,377	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
102.34	Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Persentase dokumen kesehatan yang dimanfaatkan untuk bahan penentu kebijakan bidang kesehatan	100%	100%	500,013,783	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	500,013,783	Dinas Kesehatan
102.35	Program Pengelolaan/ Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Jumlah penduduk yang dapat mengakses layanan kesehatan gratis (total coverage) dan terlindungi asuransi kesehatan (jiwa)	60.000 orang	60.000 orang	2,964,631,868	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000 orang	2,964,631,868	Dinas Kesehatan
102.40	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Presentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	-	-	100%	2,159,753,074	-	-	-	-	-	-	100%	2,159,753,074	Dinas Kesehatan
		Cakupan desa/ kelurahan UCI	83,33%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	-		
		Persentase penderita hipertensi mendapatkan yankes sesuai standart	51,05%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	-		
102.41	Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan	Persentase kompetensi Tenaga Kesehatan JFU/JFT pada Jajaran Dinas Kesehatan	50%	-	0	64%	11,031,368,798	-	-	-	-	-	-	71%	11,031,368,798	Dinas Kesehatan
		Presentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 20 item obat Esensial	97,3%	-	-	87%	-	-	-	-	-	-	-	90%		
		Persentase puskesmas melaksanakan Kalibrasi Alat Kesehatan	0%	-	-	80%	-	-	-	-	-	-	-	100%		
102.37	Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas mendukung BLUD dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat	5 Puskesmas	5 Puskesmas	11,895,569,004	5 Puskesmas	12,691,719,545	-	-	-	-	-	-	5 Puskesmas	24,587,288,549	Dinas Kesehatan
102.42	Program Pembinaan Mutu Pelayanan Kesehatan	Presentase penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan saat dibutuhkan	97%	-	-	97,2%	8,456,027,517	-	-	-	-	-	-	97,3%	8,456,027,517	Dinas Kesehatan
		Persentase kesehatan Tradisional (HATTRA) yang berijin/terdaftar STPT (Surat Terdaftar Pengobat Tradisional)	13%	14%	16%	-	-	-	-	-	-	-	18%			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Jumlah dokumen Evaluasi Program Indonesia Sehat dgn Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	5	5		5		-		-		-		5		
102.38	Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)	Jumlah kegiatan penyediaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak rokok	1 Kegiatan	1 Kegiatan	11,831,495,300	1 Kegiatan	7,993,561,313	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	19,825,056,613	Dinas Kesehatan
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	100%	-	-	-	-	100%	51,697,756,763					100%	51,697,756,763	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi								100%	48,148,876,205.43	100%	48,148,876,205.43	100%	96,297,752,411	
		Jumlah puskesmas / UPT mendukung BLUD dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat	5 puskesmas	-	-	-	-	5 puskesmas		5 puskesmas		5 puskesmas		5 puskesmas		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	AKI per 100.000 KH (target : kurang dari)	189.39 per 100.000 KH		-	-	-	94.6	52,927,688,555.00	94.6	34,910,001,202.44	94.6	36,006,711,649.61	94.6	123,844,401,407	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari)	4.26 per 1.000 KH					4.22		4.22		4.22		4.22		
		Prevalensi stunting balita	7.71%		-	-	-	19.5		18.4		16		16		
		Persentase kelurahan memenuhi tatanan Kota Sehat ke 8 (Kawasan dengan tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri)	88.53%		-	-	-	88		-		-		88		
		Jumlah indikator Tatanan Kota Sehat yang terverifikasi	-		-	-	-	-		3		4		4		
		Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk	238.66 per 100.000 penduduk		-	-	-	183.5		183.5		183.5		183.5		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Mellitus per 1.000 penduduk ≥ 15 tahun	-	-	-	-	-	-	-	183.5	-	183.5	-	183.5	-	
		Persentase kelurahan UC1	0.7222	-	-	-	95	-	≥ 95	-	≥ 96	-	≥ 96	-		
		Persentase penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan saat dibutuhkan	0.989	-	-	-	97.3	-	-	-	-	-	-	97.3	-	
		Persentase kesehatan Tradisional (HATTRA) yang berijin/terdaftar STPT (Surat Terdaftar Pengobat Tradisional)	9.09%	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	18	-	
		Persentase Fasilitas Kesehatan dan Penunjang sesuai standar atau terakreditasi minimal Madya dan berkelanjutan	100%	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	
		Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	-	-	-	-	-	-	6	-	6	-	6	-	-	
		Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	-	-	-	-	-	-	6	-	6	-	6	-	-	
		Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	100.00%	-	-	-	90	-	90	-	90	-	90	-	-	
		Persentase puskesmas melaksanakan Kalibrasi Alat Kesehatan	100.00%	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase kompetensi Tenaga Kesehatan JFU/JFT pada Jajaran Dinas Kesehatan	53.27%	-	-	-	100%	661,040,159.00	100%	568,716,132	100%	568,716,132	71%	1,798,472,422	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase fasyankes yang memenuhi standar SDM kesehatan	100%	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 20 item obat Esensial	90%	-	-	-	-	90%	711,807,572.00	0%	-	0%	-	90%	711,807,572	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Prosentase sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman yang memenuhi standar	50%	-	-	-	-	-	-	60%	344,397,111	60%	344,397,111	60%	688,794,222	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase indikator SPM yang dilakukan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat		-	-	-	-	66.67%	836,458,488.00	75%	701,220,818	83%	701,220,818	Kurang dari 94,6 (2 Ibu)	2,238,900,123	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					42,977,786,506.00		48,492,479,877.00		106,834,751,537.00		84,673,211,468.30		85,769,921,915.47		368,748,151,303.77	
102.102.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pemenuhan media promosi dan Informasi di Rumah Sakit	100%	100%	92,049,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	92,049,000	RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo
102.102.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Persentase pemenuhan alat kesehatan sesuai Permenkes	46%	51%	8,610,663,663	-	-	-	-	-	-	-	-	51%	8,610,663,663	RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo
102.102.37	Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung BLUD	100	100	136,513,525,000	100	127,348,494,000	-	-	-	-	-	-	100	263,862,019,000	RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo
000.102.10	Pogram Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase Lingkungan Sosial(dampak Rokok) Yang mendapat Pelayanan Kesehatan	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab			
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
102.102.43	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur serta Pengembangan Media Promosi	Perentase pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan minimal 20jam/thn	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo			
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100%	-	-	-	-	100%	153,937,678,522.00	100%	152,509,477,389.36	100%	155,825,589,359.90	100%	462,272,745,271	RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo			
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN DAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar rumah sakit tipe B	46%	-	-	-	-	76%	5,268,552,000.00	0	-	0	-	76%	5,268,552,000	RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo			
									145,216,237,663.00		127,348,494,000.00		159,206,230,522.00		152,509,477,389.36		155,825,589,359.90		740,106,028,934.26
	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>																		
103.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase rencana pembangunan jalan yang diimplementasikan	100%	89%	12,407,531,731	-	-	-	-	-	-	-	-	89%	12,407,531,731	Dinas PUPR			
103.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase Rencana Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Yang Diimplementasikan	80%	80%	6,135,325,748	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	6,135,325,748	Dinas PUPR			
103.18	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan ang direhab/dipelihara	10%	10%	8,773,105,861	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	8,773,105,861	Dinas PUPR			
103.23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	22%	22%	109,966,300	-	-	-	-	-	-	-	-	22%	109,966,300	Dinas PUPR			
103.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase Luas Area Sawah Yang Terlayani Jaringan Irigasi Yang Sudah Ada	40%	40%	2,875,252,371	-	-	-	-	-	-	-	-	40%	2,875,252,371	Dinas PUPR			
103.28	Program Pengendalian Banjir	Persentase area bebas genangan air (tidak lebih dari 2 jam)	40%	40%	5,715,574,152	-	-	-	-	-	-	-	-	40%	5,715,574,152	Dinas PUPR			
		Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	70,01%	0%		75%	5,499,767,848	-	-	-	-	-	-	80%	5,499,767,848	Dinas PUPR			
		Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran	43,57%	50%		55%		-	-	-	-	-	-	60%					

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	38,13%	42%		45%		-		-		-		50%		
		Rasio Jaringan Irigasi	70%	72%		74%		-		-		-		75%		
103.29	Program Pengembangan Wilayah Strateis dan Cepat Tumbuh	Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibangun di Kawasan Strategis	0%	0%	14,221,477,700	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	14,221,477,700	Dinas PUPR
103.30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase jalan dan saluran lingkungan yang baik	100%	100%	7,489,493,427	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	7,489,493,427	Dinas PUPR
103.33	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase rencana tata ruang yang diimplementasikan	100%	100%	1,135,555,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1,135,555,000.00	Dinas PUPR
103.36	Program Pembangunan serta Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	65%	-	-	71%	10,093,950,217	-	-	-	-	-	-	78%	10,093,950,217	Dinas PUPR
		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,76	-		0,71		-		-		-		0,78		
		Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,96	-		0,96		-		-		-		0,96		
		Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	33%	-		27%		-		-		-		25%		
		Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	76%	-		71%		-		-		-		78%		
		Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	48.30%	-		51.20%		-		-		-		52.70%		
		Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	5,48%	-		4,5%		-		-		-		3%		
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	98,04%	-		100%		-		-		-		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	1,27%	-		1,1%		-		-		-		1%		
		Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	94,68%	-		96%		-		-		-		97%		
103.37	Pengembangan wilayah dan fasilitas publik strategis	Ruang publik yang berubah peruntukannya	0.00	-	-	3	32,958,300,287.64	-	-	-	-	-	-	3	32,958,300,288	Dinas PUPR
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi	100%	-	-	-	-	100%	9,248,256,697.00	100%	9,307,295,282.74	100%	9,307,295,282.74	100%	27,862,847,262	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistik Penyediaan Air Minum	80%	-	-	-	-	80%	1,264,411,345.00	80%	1,625,000,000.00	80%	1,939,350,000.00	80%	4,828,761,345	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistik Air Limbah	80%	-	-	-	-	80%	2,052,677,794.00	90%	4,973,750,500.00	90%	4,973,750,500.00	90%	12,000,178,794	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistik Drainase	84%	-	-	-	-	84%	39,933,125,955.00	85%	40,887,897,514.00	86%	42,887,897,514.00	86%	123,708,920,983	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Prosentase bangunan pengaman SDA dalam kondisi baik	100%	-	-	-	-	-	-	100%	400,000,000.00	100%	408,000,000.00	100%	808,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase fasilitas publik dalam kondisibaik.	n/a	-	-	-	-	86.67%	37,508,929,700.00	86.90%	38,521,615,796.00	86.95%	39,292,048,112.00	86.95%	115,322,593,608	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kondisi mantap.	90%	-	-	-	-	91,50%	42,917,955,201.00	91.60%	45,452,694,616	91,70%	45,659,407,729	91,70%	134,030,057,546	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Prosentase terselesainya pembinaan pelatihan tenaga trampil konstruksi	100%	-	-	-	-	100%	391,278,900.00	100%	409,500,000	100%	409,500,000	100%	1,210,278,900	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	80%	-	-	-	-	80%	728,410,600.00	80%	750,750,000	80%	750,750,000	80%	2,229,910,600	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
									<b>58,863,282,290.31</b>		<b>48,552,018,352.64</b>		<b>134,045,046,192.00</b>		<b>142,328,503,708.74</b>	<b>529,416,849,681.43</b>	
	<b>PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>																
104.15	Program Pengembangan Perumahan	Prosentase perumahan kumuh yang tertangani	71,50%	75%	1,205,362,200	81%	4,705,741,041	-	-	-	-	-	-	81%	5,911,103,241	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	96.36%	97.36%		100%		-		-		-		100%			
		Persentase penduduk berakses air minum	97.82%	99.00%		100%		-		-		-		100%			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Rasio rumah layak huni	89.00%	99.50%		100%		-		-		-		100%		
		Rasio permukiman layak huni	96.00%	97.00%		98.00%		-		-		-		98%		
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	94.00%	95.00%		96.00%		-		-		-		96%		
		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	93.00%	94.00%		95.00%		-		-		-		95%		
		Persentase permukiman yang tertata	97.00%	98.00%		99.00%		-		-		-		99%		
		Persentase lingkungan permukiman kumuh	4.60%	4.00%		3.00%		-		-		-		3%		
		Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	96.36%	97.00%		98.00%		-		-		-		98%		
		Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	n/a	5.00%		3.00%		-		-		-		3%		
		Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	96.68%	96.68%		96.68%		-		-		-		97%		
104.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Prosentase penyehatan lingkungan yang diimplementasikan	96.34%	96.50%	5,663,081,840	-	-	-	-	-	-	-	-	96.50%	5,663,081,840	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase usulan Musrenbang dan POKIR DPRD yang diverifikasi dan divalidasi	100%	100%		100%		-		-		-		100%		
		Persentase usulan Musrenbang dan POKIR DPRD hasil verifikasi dan validasi yang dilaksanakan	100%	100%		100%		-		-		-		100%		
104.26	Program Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Persentase ketersediaan data perumahan	75%	75%	75,115,629	-	-	-	-	-	-	-	-	75%	75,115,629	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
104.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk berakses air minum	96%	96%	3,309,368,605	97%	7,567,306,999	-	-	-	-	-	-	98%	7,567,306,999	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
104.28	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase penduduk berakses air	96%	-	-	100%	2,877,564,550	-	-	-	-	-	-	100%	2,877,564,550	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase perumahan yg terbangun	80%	-	-	-	-	80%	578,931,863.00	-	-	-	-	80%	578,931,863	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		Prosentase pengembangan perumahan	80%	-	-	-	-	-	-	100%	546,000,000	100%	643,500,000	100%	1,189,500,000		
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Presentase perumahan dan kawasan pemukiman kumuh yang tertangani	80%	-	-	-	-	80%	2,577,016,671.00	100%	3,275,000,000	100%	3,500,000,000	100%	9,352,016,671	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum	100%	-	-	-	-	100%	5,151,529,000.00	100%	3,800,000,000	100%	4,025,000,000	100%	12,976,529,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
									10,252,928,274.00		15,150,612,590.00		8,307,477,534.00		7,621,000,000.00	8,168,500,000.00	49,500,518,398.00
									<b>KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>								
105.02.15	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Penegakan Perda dan Perwali yang ditangani	16%	35%	2,968,175,500	-	-	-	-	-	-	-	-	16%	2,968,175,500	SATPOL PP	
105.02.16	Program pemeliharaan Kanrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Permasalahan Ketertiban dan Keamanan yang ditangani	100%	100%	1,613,655,500	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1,613,655,500	SATPOL PP	
105.02.20	Program peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular (PEKAT)	Persentase Kasus Pelanggaran Pekat yang ditangani	100%	100%	405,580,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	405,580,000	SATPOL PP	
105.02.22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Penanganan Bencana	100%	100%	1,112,542,350	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1,112,542,350	SATPOL PP	
105.02.25	Program Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Per-UU Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	100	-	-	100	4,711,202,000	-	-	-	-	-	-	100	4,711,202,000	SATPOL PP	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
105.02.24	Program Pembinaan dan Pengendalian Bencana dan Perlindungan Masyarakat	cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	100	-	-	100	891,620,000	-	-	-	-	-	-	100	891,620,000	SATPOL PP	
		tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	< 15 menit	-	-	< 15 menit	-	-	-	-	-	-	-	< 15 menit	-		
105.02.26	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Jumlah penemuan indikasi adanya hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu atau tidak dilekati pita cukai	0	-	-	0	449,700	-	-	-	-	-	-	0	449,700	SATPOL PP	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Kecukupan Administrasi Perkantoran	100%	-	-	-	-	100%	12,288,245,400.00	100%	11,316,213,090.00	100%	11,316,213,090.00	100%	34,920,671,580	SATPOL PP	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Penegakan Perda/Perkada yang ditangani	100%	-	-	-	-	100%	1,132,008,182.00	100%	1,156,643,000.00	100%	1,179,775,860.00	100%	3,468,427,042	SATPOL PP	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana yang ditangani	100%	-	-	-	-	100%	309,657,277.00	100%	428,467,130.00	100%	432,233,874.00	100%	1,170,358,281	SATPOL PP	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani	100%	-	-	-	-	100%	495,265,920.00	100%	366,511,600.00	100%	369,733,680.00	100%	1,231,511,200	SATPOL PP	
							<b>6,099,953,350.00</b>		<b>5,603,271,700.00</b>		<b>14,225,176,779.00</b>		<b>13,267,834,820.00</b>		<b>13,297,956,504.00</b>		<b>52,494,193,153.00</b>
	<b>SOSIAL</b>																
106.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & PMKS Lainnya	Persentase jumlah PMKS yang diberi bantuan	95%	100%	592,071,350	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	592,071,350	Dinas Sosial	
106.16	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang terlayani dan direhabilitasi	95%	100%	729,301,250	100%	1,120,152,220	-	-	-	-	-	-	100%	1,849,453,470	Dinas Sosial	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
106.18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase tersedianya pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas dan eks trauma	5 %	10%	227,643,750	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	227,643,750	Dinas Sosial
106.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Persentase tersedianya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana PAY dan rumah jompo	15%	20%	642,179,395	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	642,179,395	Dinas Sosial
106.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	15%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0	Dinas Sosial
106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang tertangani	15%	20%	1,022,755,600	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	1,022,755,600	Dinas Sosial
106.23	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial	95%	-	-	100%	524,852,050	-	-	-	-	-	-	100%	524,852,050	Dinas Sosial
106.24	Program Bina Pemberdayaan PMKS & PSKS	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lain	2%	-	-	12%	402,375,750	-	-	-	-	-	-	12%	402,375,750	Dinas Sosial
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyediaan Keuangan Daerah	100%	-	-	-	-	100%	6,492,863,326.00	100%	6,486,460,112.86	100%	6,486,460,112.86	100%	19,465,783,552	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial	100%	-	-	-	-	100%	702,724,469.00	100%	557,629,800.00	100%	638,752,025.70	100%	1,899,106,295	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Presentase PMKS yang terlayani sesuai SOP	100%	-	-	-	-	100%	2,942,590,100.00	100%	2,815,166,991.00	100%	2,865,800,000.00	100%	8,623,557,091	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		2. Presentasi PMKS yang direhabilitasi	100%					100%		100%		100%		100%		
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pelaksanaan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	100%	-	-	-	-	100%	5,375,127,000.00	100%	5,375,127,000.00	100%	5,375,127,000.00	100%	16,125,381,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100%	-	-	-	-	100%	10,583,104,673.00	100%	10,906,494,137.00	100%	10,906,494,137.00	100%	32,396,092,947	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100%	-	-	-	-	100%	499,980,224.00	100%	454,982,003.84	100%	497,007,463.18	100%	1,451,969,691	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					3,213,951,345		2,047,380,020		26,596,389,792		26,595,860,045		26,769,640,739		85,223,221,940	
					301,211,229,219		293,195,347,308		647,032,385,916		561,359,335,772		570,906,770,352		2,373,705,068,567	

Tabel 7.3: Rencana Kinerja Program Prioritas II dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
	<b>TENAGA KERJA</b>																
201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase kompetensi angkatan kerja	72%	72%	476,930,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72%	476,930,700	Diskouminaker
201.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase besarnya pekerja/ buruh yang menjadi peserta program JAMSOSTEK aktif	73%	73%	95,192,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73%	95,192,000	Diskouminaker
211.10	Program pembinaan lingkungan sosial	Persentase tenaga kerja dan masyarakat yang terlatih	75%	75%	139,988,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75%	139,988,250	Diskouminaker
201.18	Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	39,22%	-	-	43,24%	177,229,400	-	-	-	-	-	-	-	43,24%	177,229,400	Diskouminaker
		Pertumbuhan wira usaha baru	27,27%	-	-	32,40%	-	-	-	-	-	-	-	-	32,40%	-	-
201.19	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase angkatan kerja yang ditempatkan				40%	372,037,500	-	-	-	-	-	-	-	40%	372,037,500	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pelatihan tenaga kerja yang produktif	30%	-	-	-	-	33%	549,377,782.00	45%	528,476,538.20	30%	544,330,834	30%	1,622,185,155	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	72%	-	-	-	-	93.72%	112,299,036.00	97.95%	93,812,368.92	98.35%	95,564,907	98.35%	301,676,312	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus yang tertangani	80%	-	-	-	-	100%	148,063,500.00	80%	123,837,441.00	80%	126,150,888	80%	398,051,829	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
					712,110,950		549,266,900		809,740,318		746,126,348		766,046,629		3,583,291,145		
	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>																

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
202.15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	4 kali	4 kali	15,282,050	-	-	-	-	-	-	-	-	4 kali	15,282,050	DP3AKB
202.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarus-utamaan Gender dan Anak	Persentase perangkat daerah memiliki focal point aktif	100%	100%	264,100,600	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	264,100,600	DP3AKB
202.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah sosialisas tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	100%	100%	157,114,100	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	157,114,100	DP3AKB
202.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase keterlibatan perempuan dalam pembangunan	10%	25%	428,077,155	-	-	-	-	-	-	-	-	25%	428,077,155	DP3AKB
207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Prosentase meningkatnya kualitas keberdayaan masyarakat perdesaan	100%	100%	61,162,300	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	61,162,300	DP3AKB
207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Prosentase Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100%	100%	44,448,400	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	44,448,400	DP3AKB
202.20	Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	3.50%	--	--	3.60%	561,651,260	-	-	-	-	-	-	3.60%	561,651,260	DP3AKB
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	24%	32%		32%		-	-	-	-	-	-	32%		
		Partisipasi perempuan di lembaga swasta	28.57%			28.7%		-	-	-	-	-	-	28.7%		
		Partisipasi angkatan kerja perempuan	32.07%			32.9%		-	-	-	-	-	-	32.9%		
		Rasio KDRT	10%			10%		-	-	-	-	-	-	10%		
		Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0%	0%		0%		-	-	-	-	-	-	0%		
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%		100%		-	-	-	-	-	-	100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%	100%		100%		-		-		-		100%		
		Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	100%	100%		100%		-		-		-		100%		
		Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%		100%		-		-		-		100%		
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%		100%		-		-		-		100%		
		Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%		100%		-		-		-		100%		
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%		100%		-		-		-		100%		
		Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	n/a	93.45		93.5		-		-		-		93.5		
		Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	n/a	93.45		93.5		-		-		-		93.5		
		Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	n/a	93.45		93.5		-		-		-		93.5		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	n/a	93.45		93.5		-		-		-		93.5		
		Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	n/a	93.45		93.5		-		-		-		93.5		
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	100%	-	-	-	-	100%	599,302,809.00	100%	675,176,320.00	100%	609,100,935.30	100%	1,883,580,064	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase pelaksanaan perlindungan perempuan	100%	-	-	-	-	100%	303,097,329.00	100%	295,750,000.00	100%	278,389,114.20	100%	877,236,443	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	100%	-	-	-	-	100%	148,766,426.00	100%	159,250,000.00	100%	139,298,926.50	100%	447,315,353	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100%	-	-	-	-	100%	356,149,455.00	100%	364,000,000.00	100%	397,230,525.00	100%	1,117,379,980	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					<b>970,184,605.00</b>		<b>561,651,260.00</b>		<b>1,407,316,019.00</b>		<b>1,494,176,320.00</b>		<b>1,424,019,501.00</b>		<b>5,857,347,705.00</b>	
	<b>PANGAN</b>															
203.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase mutu dan keamanan pangan yang diawasi	100%	100%	526,940,650	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	526,940,650	Dinas KP & Pertanian
203.17	Program pengembangan dan pengendalian ketahanan pangan	Ketersediaan pangan utama	49 Kg/Th	-	-	55 Kg/Th	268,179,499	-	-	-	-	-	-	55 Kg/Th	268,179,499	Dinas KP & Pertanian
		Ketersediaan energi dan protein perkapita	90%			90%		-		-		-		90%		
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang dipelihara/dimanfaatkan dengan baik	100%	-	-	-	-	100%	6,486,426,083.00	100%	5,890,930,500.00	100%	5,890,930,500.00	100%	18,268,287,083	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan konsumsi pangan yang beragam (B2SA)	80%	-	-	-	-	80%	1,008,280,028.00	80%	222,950,000.00	80%	222,950,000.00	80%	1,454,180,028	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Kebutuhan Pangan Utama	60.5 Kg/Kpt/Th	-	-	-	-	60.5 Kg/Kpt/Th	78,605,726.00	-	-	-	-	-	78,605,726	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Ketersediaan Data Informasi Pangan	85%	-	-	-	-	-	-	85%	72,800,000.00	85%	72,800,000.00	85%	145,600,000	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase sampel aman pangan	64%	-	-	-	-	66%	46,773,864.00	68%	72,800,000.00	70%	72,800,000.00	70%	192,373,864	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
					526,940,650.00		268,179,499.00		7,620,085,701.00		6,259,480,500.00		6,259,480,500.00		20,934,166,850.00	
	<b>PERTANAHAN</b>															
204.18	Program Pengembangan sistem Informasi Pertanahan	Persentase dokumen informasi pertanahan yang tersedia	10%	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
204.17	Program Penyelesaian Konflik Pertanahan	Prosentase meningkatnya tertib administrasi dan cakupan penyelesaian kasus tanah milik Pemerintah Kota Mojokerto	73%	76%	63,316,928	-	-	-	-	-	-	-	-	76%	63,316,928	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Prosentase pelayanan administrasi pertanahan	76%	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	0%	0	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa pertanahan yang difasilitasi penyelesaiannya	100%	-	-	-	-	100%	60,486,999.00	100%	73,032,050.00	100%	83,250,000.00	100%	216,769,049	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Prosentase penatagunaan tanah	50%	-	-	-	-	50%	69,779,573.00	50%	77,350,000.00	0.50	81,000,000.00	0.50	228,129,573	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					63,316,928.00		0.00		130,266,572.00		150,382,050.00		164,250,000.00		508,215,550.00	
	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>															
205.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Luas Area Bersih Sampah	62%	64%	4,504,185,620.00	66%	4,688,124,255	-	-	-	-	-	-	64%	9,192,309,875	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase Sampah Yang Di Kelola	66%	67%	-	68%	-	-	-	-	-	-	-	67%	4,234,183,600	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
205.26	Program Penataan dan Pentaatan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan Yang Taat Peraturan LH	45%	-	-	55%	380,262,130	-	-	-	-	-	-	50%	380,262,130	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Sekolah Yang Memenuhi Kriteria ADIWIYATA	18%	-		24%		-		-		-		21%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
205.27	Program Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Luas Taman terhadap Luas Wilayah	0.26%	-	-	0.34%	1,784,255,194	-	-	-	-	-	-	0.30%	1,784,255,194	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase Lampu PJU Yang Berfungsi Baik	76%	-		78%		-	-	-	-	-	-	77%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
205.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Lingkungan Hidup	63.02	64.02	497,815,425	-	-	-	-	-	-	-	-	64.02	497,815,425	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
205.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Prosentase Sumber daya alam yang berkualitas	63.02	64.02	91,203,500	-	-	-	-	-	-	-	-	64.02	91,203,500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
205.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan database lingkungan	63.02	64.02	484,334,484	-	-	-	-	-	-	-	-	64.02	484,334,484	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
205.20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Prosentase titik pantau pengujian	63.02	64.02	171,386,900	-	-	-	-	-	-	-	-	64.02	171,386,900	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
205.24	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Upaya Peningkatan Ketercukupan RTH Publik	0.22%	0.26%	2,117,370,800	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26%	2,117,370,800	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
205.25	Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Persentase meningkatnya kualitas Lampu PJU	75%	76%	1,276,390,300	-	-	-	-	-	-	-	-	76%	1,276,390,300	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
205.28	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase infrastruktur pendukung lingkungan hidup yang tersedia	20%			20%	3,559,188,000.00	-	-	-	-	-	-	20%	3,559,188,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	prosentase administrasi keuangan dan kepegawaian yang tercukupi	100%	-	-	-	-	100%	14,122,541,844	100%	12,417,259,458	100%	12,417,259,458	100%	38,957,060,760	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara	50 81,46	-	-	-	-	50,06 81,55	300,750,519	50,12 81,64	255,403,050	50,18 81,73	252,596,423	50,18 81,73	808,749,992	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Lahan	27,11	-	-	-	-	27,13	6,346,750,865	27,16	2,482,204,191	27,17	2,482,204,191	27,17	11,311,159,247	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Prosentase Dokumen Lingkungan Yang Tersedia	n/a					100%	115,385,964	100%	140,001,061	100%	53,847,368	100%	309,234,393	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah yg memenuhi kriteria Adiwiyata	100%	-	-	-	-	100%	316,778,555	100%	270,270,000	100%	267,300,000	100%	854,348,555	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase pengaduan yang tertangani	100%	-	-	-	-	100%	49,814,828	100%	40,796,319	100%	40,348,008	100%	130,959,155	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase sampah yang dikelola	97,04%	-	-	-	-	97,45%	4,512,269,732	97,85%	4,683,792,349	97,96%	4,683,792,349	97,96%	13,879,854,429	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang tersusun	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					9,142,687,029.00		10,411,829,579.00		25,764,292,307.00		20,289,726,428.05		20,247,347,796.33		85,855,883,139.38	
	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>															
206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi	100%	100%	1,855,996,050	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1,855,996,050	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	0,98	-	-	0,98	992,390,582	-	-	-	-	-	-	0,98	992,390,582	
		Rasio Bayi berakte kelahiran	0,98	0,99	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		Rasio pasangan berakte nikah	0,83	0,85	-	0,89	-	-	-	-	-	-	-	0,89	-	
		Penerapan KTP nasional berbasis NIK	sudah	sudah	-	sudah	-	-	-	-	-	-	-	sudah	-	
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98%	98%	-	98%	-	-	-	-	-	-	-	98%	-	
		Cakupan penerbitan akte kelahiran	99%	99%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	
206.16	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN PEMANFAATAN DATA	Jumlah Perjanjian Kerjasama dan Pemanfaatan Data	1 OPD	--	--	1 OPD	14,972,200	-	-	-	-	-	-	1 OPD	14,972,200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penggunaan data konsolidasi bersih	0	40%	-	50%	-	-	-	-	-	-	-	65%	-	
		Jumlah Inovasi Pelayanan adminduk	ada	ada	-	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	-	
		Cakupan penyediaan hak akses kependudukan	0%	40%	-	50%	-	-	-	-	-	-	-	75%	-	
		Ketersediaan database kependudukan skala propinsi	tdk	tdk	-	tdk	-	-	-	-	-	-	-	tdk	-	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase ketersediaan administrasi perkantoran	85%	-	-	-	-	85%	4,120,428,996.00	90%	3,584,805,568	100%	3,584,805,568	100%	11,290,040,132	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	0.98	-	-	-	-	0.98	1,445,431,487	0.98	556,606,510	0.98	605,538,950	0.98	2,607,576,947	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98%					98%		98%		98%		98%	-	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio Bayi berakte kelahiran	1	-	-	-	-	1	213,330,636	1	178,212,147	1	199,754,274	1	591,297,057	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Rasio pasangan berakte nikah	0.9					0.9		0.91		0.91		0.91		
		Cakupan penerbitan akte kelahiran	100%					100%		100%		100%		100%		
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penggunaan data konsolidasi bersih	50%	-	-	-	-	50%	194,237,864	-	-	-	-	50%	194,237,864	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Jumlah Inovasi Pelayanan adminduk	1	-	-	-	-	1		-		-		1	-	
		Cakupan penyediaan hak akses kependudukan	50%	-	-	-	-	50%		-		-		50%	-	
		Prosentase OPD yang melakukan kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	70%	-	-	-	-	-	-	70%	148,372,743	70%	174,027,960	70%	322,400,703	
		Cakupan penyediaan hak akses kependudukan	100%	-	-	-	-	-	-	100%		100%		100%	-	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah Inovasi Pelayanan Adminduk	1	-	-	-	-	1	171,325,700	-	-	-	-	1	171,325,700	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Cakupan Penyediaan Hak Akses kependudukan	50%	-	-	-	-	50%		-		-		50%	-	
		Prosentase Profil Data Kependudukan	100%	-	-	-	-	-	-	100%	315,750,886	100%	375,983,553	100%	691,734,439	
					1,855,996,050.00		1,007,362,782.00		6,144,754,683.00		4,783,747,853.43		4,940,110,305.40		18,731,971,673.84	
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
208.15	Program Keluarga Berencana	Jumlah paket pelayanan KB pada masyarakat	18 paket	18 paket	984,315,729.92	-	-	-	-	-	-	-	-	18 paket	984,315,729.92	DP3AKB
208.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Prosentase Advokasi dan KIE Kesehatan Re-produksi Remaja (KRR)	100%	100%	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	6,000,000	DP3AKB
208.17	Program pelayanan kontrasepsi	Jumlah bulan untuk pelayanan MOP & MOW	12 bulan	12 bulan	198,814,850	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	198,814,850	DP3AKB
208.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Jumlah masyarakat peduli KB	18 kelurahan	18 kelurahan	252,805,850	-	-	-	-	-	-	-	-	18 kelurahan	252,805,850	DP3AKB
208.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Jumlah Wadah Konseling KRR terpenuhi		12 bulan	133,263,850	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	133,263,850	DP3AKB
208.22	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Jumlah kegiatan kelompok bina keluarga balita yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan	247,837,200	-	-	-	-	-	-	-	-	2 kegiatan	247,837,200	DP3AKB
208.23	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	Jumlah kegiatan kelompok BKB yang terpadu dengan posyandu dan PADU (Holistik Integratif)	170 kelompok	170 kelompok	140,647,300	-	-	-	-	-	-	-	-	170 kelompok	140,647,300	DP3AKB
208.24	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Jumlah kegiatan kelompok BKB yang terpadu dengan Posyandu dan PADU	2 kali	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	DP3AKB
208.25	Program PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	LPP, TFR	80%			85%	1,055,392,200	-	-	-	-	-	-	85%	1,055,392,200	DP3AKB
		Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	25	25		40		-	-	-	-	-	-	40		
		Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	10	10		25		-	-	-	-	-	-	25		
		Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1	1		1		-	-	-	-	-	-	1		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	2	2		2		-		-		-		2		
		Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	3	3		3		-		-		-		3		
		Rata-rata jumlah anak per keluarga Ratio Akseptor KB	2	2		2		-		-		-		2		
		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	69.81	69.81		69.88		-		-		-		69.88		
		Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	21.47	21.47		21.25		-		-		-		21.25		
		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	15.96	15.96		15.71		-		-		-		15.71		
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	10.14	10.14		9.99		-		-		-		9.99		
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	38.56	38.56		38.75		-		-		-		38.75		
		Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	8.74	8.74		8.52		-		-		-		8.52		
		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	89.05	89.05		89.36		-		-		-		89.36		
		Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	88.59	88.59		89.05		-		-		-		89.05		
		Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	77.45	77.45		79.52		-		-		-		79.52		
		Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	1	1		1		-		-		-		1		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	5,25	5,25		6.75		-		-		-		6.75		
		Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100	100		100		-		-		-		100		
		Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	78.65	78.65		80.53		-		-		-		80.53		
		Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100		100		-		-		-		100		
		Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100	100		100		-		-		-		100		
		Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100	100		100		-		-		-		100		
		Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100	100		100		-		-		-		100		
		Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)						-		-		-				
		Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100	100		100		-		-		-		100		
		Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	60.47	60.47		63.45		-		-		-		63.45		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Rata-rata usia kawin pertama wanita	20	20		20		-		-		-		20			
		Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	0.40	0.40		0.38		-		-		-		0.38			
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fatality Rate (TFR)	1.86%	-	-	-	-	1.86%	313,833,313.00					1.86%	313,833,313	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah implementasi pendidikan kependudukan baik formal, non formal, maupun informal untuk membangun kesadaran tentang kependudukan	5 sekolah							5 sekolah	145,567,615	8 sekolah	294,208,773.02	8 sekolah	439,776,388		
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan peserta KB aktif	70%	-	-	-	-	70.56%	2,225,444,636.00					70.56%	2,225,444,636	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Prosentase Peningkatan Akses dan kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana	75%							50%	768,763,702.98	50%	782,598,296.83	50%			
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase anggota kelompok kegiatan dalam kesertaan KB	70%	-	-	-	-	70%	440,494,852.00					70%	440,494,852	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Prosentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang berperan dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	100%							100%	510,556,941.44	100%	412,461,759.62	100%	923,018,701		
	<b>PERHUBUNGAN</b>								<b>1,963,684,779.92</b>		<b>1,055,392,200.00</b>		<b>2,979,772,801.00</b>		<b>1,424,888,259.34</b>	<b>1,489,268,829.47</b>	<b>8,913,006,869.73</b>

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
209.15	Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan	Persentase permasalahan terkait ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang mendapat rekomendasi	100%	100%	2,250,474,398	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	2,250,474,398	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase titik parkir yang penataannya tidak melebihi lahan parkir yang disediakan	97%	100%		-	-	-	-	-	-	-	-	100%		DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase penurunan angka pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	20%	20%		-	-	-	-	-	-	-	-	20%		DINAS PERHUBUNGAN
209.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase fasilitas dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik (layak fungsi)	85%	85%	715,217,119	-	-	-	-	-	-	-	85%	715,217,119	DINAS PERHUBUNGAN	
		Persentase alat uji kendaraan bermotor yang berfungsi dan akurat (sesuai dengan standard Kementerian Perhubungan)	100%	100%		-	--	-	--	-	-	-	100%		DINAS PERHUBUNGAN	
209.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase keterisian/ faktor muat/ load factor angkutan sekolah gratis	100%	100%	1,072,442,124	-	-	-	-	-	-	-	100%	1,072,442,124	DINAS PERHUBUNGAN	
209.19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase pemenuhan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan	87%	95%	613,416,081.90	-	-	-	-	-	-	-	95%	613,416,081.90	DINAS PERHUBUNGAN	
209.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase angkutan orang dan angkutan barang yang laik jalan		0%		-	--	-	--	-	-	-	0%		DINAS PERHUBUNGAN	
209.21	Program Peningkatan Pengendalian LLAJ	Persentase Angka Pelanggaran LLAJ	12,00%	--	--	28,72 %	485,347,620	-	-	-	-	-	35,85 %	485,347,620	DINAS PERHUBUNGAN	
		Persentase penurunan angka pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)				30%								30%		
209.22	Program Peningkatan Kelancaran Lalu Lintas	Persentase ruas jalan dengan tingkat layanan jalan minimal "C"	42.86%	--	--	53.57%	2,614,540,053	-	-	-	-	-	64.29%	2,614,540,053	DINAS PERHUBUNGAN	
209.23	Program Peningkatan Kelaikan Angkutan Jalan	Persentase angkutan orang dan barang yang laik jalan	86%	--	--	90%	787,424,810	-	-	-	-	-	92%	11,575,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi anggaran belanja perangkat daerah	96.00%	-	-	-		96.00%	7,254,633,913.00	97.00%	7,223,369,106	97.00%	7,359,277,606	97.00%	21,837,280,624	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan pelaporan	100.00%	-	-	-		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100.00%					100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penurunan angka pelanggaran pengguna jalan	35.00%	-	-	-	-	35.00%	6,580,583,995.00	38.00	570,331,998	40.00	546,740,695	40.00	7,697,656,688	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase penurunan angka pelanggaran angkutan jalan	35.00%	-	-	-	-	35.00%		38.00	339,350,977	40.00	353,510,862	40.00	692,861,839	
		Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor	88.00%	-	-	-	-	88.00%		88.00	448,001,008	88.00	535,385,907	88.00	983,386,915	
		Load Faktor Angkutan Sekolah Gratis	100.00%	-	-	-	-	100.00%		100.00	1,706,250,000	100.00	1,740,000,000	100.00	3,446,250,000	
		Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	11.70%	-	-	-	-	11.70%		11.70	-	11.70	-	11.70		
		Persentase layanan angkutan darat	6.62%	-	-	-	-	6.62%		6.62	-	6.62	-	6.62		
		Rasio ijin trayek	0.00037	-	-	-	-	0.00037		0.00037	-	0.00037	-	0.00037		
		Persentase Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan	93.13%	-	-	-	-	93.13%		98.31	2,225,730,780	100	2,221,330,980	100	4,447,061,760	
		Persentase Ruas jalan dengan tingkat layanan jalan minimal "C" pada jam sibuk	92.86%	-	-	-	-	92.86%		96.43	1,981,011,487	100	1,924,036,059	100	3,905,047,546	
		Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0.0014	-	-	-	-	0.0014		0.00049	-	0.00049	-	0.00049		
									<b>4,651,549,722.90</b>		<b>3,887,312,483.00</b>		<b>13,835,217,908.00</b>		<b>14,494,045,355.79</b>	
															<b>14,680,282,109.03</b>	
															<b>51,548,407,578.72</b>	
		<b>2.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>														
210.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Cakupan layanan komunikasi dan informatika kepada masyarakat	80%	100%	2,795,528,939	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	2,795,528,939	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
210.17	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Presentase masyarakat yang puas dengan kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan melalui media cetak, elektronik, luar ruang, tatap muka dan mobile	80%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
210.18	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA	Persentase informasi pembangunan yang disampaikan melalui media luar ruang	80%	100%	793,468,181	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	793,468,181	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
214.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Persentase masyarakat yang puas dengan penyediaan layanan data statistik sektoral	80%	100%	378,561,714	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	378,561,714	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
401.36	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Persentase peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang ketentuan perundang undangan di bidang cukai	80%	80%	69,662,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	69,662,700	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
210.19	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1. Persentase masyarakat yang mengetahui program pembangunan,	n/a	-	-	80%	878,138,689	-	-	-	-	-	-	-	80%	878,138,689	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2. Persentase masyarakat yang mengakses layanan komunikasi dan informasi	n/a	-	-	80%		-	-	-	-	-	-	-	80%		
		3. Persentase Informasi publik yang telah dapat diakses	n/a	-	-	80%		-	-	-	-	-	-	-	80%		
210.20	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1. Persentase ketersediaan layanan TIK sesuai kebutuhan, 2. Persentase layanan TIK yang berfungsi baik	n/a	-	-	80%	2,084,404,430	-	-	-	-	-	-	-	80%	2,084,404,430	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
214.16	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan standarisasi data	n/a	-	-	70%	53,212,699	-	-	-	-	-	-	-	75%	53,212,699	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
210.21	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH	1. Persentase pengamanan informasi dan jaringan	n/a	-	-	70%	450,057,900	-	-	-	-	-	-	-	75%	450,057,900	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	-	-	-	-	100%	7,086,223,153.00	100%	7,813,773,169.93	100%	7,813,773,169.93	100%	22,713,769,493	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,6	-	-	-	-	85	4,241,788,216	87.00	4,424,588,152.53	89.00	4,705,220,631.76	89.00	13,371,597,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE )	3,36	-	-	-	-	3.3	3,116,458,033.00	3,4	3,119,574,491.67	3,5	3,318,128,000.00	3,5	9,554,160,525	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
					4,037,221,534.00		3,465,813,718.00		14,444,469,402.00		15,357,935,814.13		15,837,121,801.69		53,142,562,269.82		
	<b>KOPERASI, USHA KECIL DAN MENENGAH</b>																



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
211.15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	Persentase UMKM yang mandiri dan berdaya saing	59%	59%	123,729,680	-	-	-	-	-	-	-	-	59%	123,729,680	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
211.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan wira usaha baru	80%	80%	327,231,850	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	327,231,850	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
211.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Prosentase meningkatnya sistem sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	81%	81%	335,705,850	-	-	-	-	-	-	-	-	81%	335,705,850	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Terwujudnya Profesionalisme dan Pertumbuhan Koperasi yang Didukung Pengelolaan Kelembagaan dan Usaha Serta Partisipasi Anggota yang Berkualitas	78%	78%	405,436,500	-	-	-	-	-	-	-	-	78%	405,436,500	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
211.19	Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi	Persentase koperasi aktif	80%	80%	368,630,000	80%	539,200,400.00	-	-	-	-	-	-	80%	907,830,400	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
211.21	Program Peningkatan Kapasitas Usaha koperasi	% pertumbuhan omzet koperasi	12,38%	-	-	13,65%	394,587,850	-	-	-	-	-	-	13,65%	394,587,850	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
211.20	Program Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro	% Pertumbuhan omzet usaha mikro	7,25%	-	-	8,15%	129,145,171	-	-	-	-	-	-	8,15%	129,145,171	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang melaksanakan ketentuan perundang-undangan	73%	-	-	-	-	73%	230,663,948.00	73%	216,200,530.00	75%	235,170,000.00	75%	682,034,478	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan omzet koperasi	17.5%	-	-	-	-	17.5%	917,358,890.00	17.5%	894,570,950.00	17.5%	951,456,000.00	17.5%	2,763,385,840	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan omzet usaha koperasi	17.5%	-	-	-	-	17.5%	177,831,772.00	17.5%	496,556,060.00	17.5%	540,180,000.00	17.5%	1,214,567,832	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan produktivitas usaha mikro	3%	-	-	-	-	-	-	3%	935,000,000.00	3%	1,028,500,000.00	3%	1,963,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro	12%	-	-	-	-	12%	405,321,708.00	12%	1,350,000,000.00	12%	1,485,000,000.00	12%	3,240,321,708	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	80.0%	-	-	-	-	-	-	80.0%	91,000,000.00	80%	99,000,000.00	80%	190,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					1,560,733,880.00		1,062,933,421.00		1,731,176,318.00		3,983,327,540.00		4,339,306,000.00		12,677,477,159.00	
	<b>PENANAMAN MODAL</b>															
212.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Cakupan Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	100%	100%	406,952,690	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	406,952,690	DPMPTSP
212.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Cakupan Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	100%	100%	416,698,176	50%	82,732,765	-	-	-	-	-	-	50%	499,430,941	DPMPTSP
		Persentase perusahaan yang tertib melaporkan LKPM		50%	--	--	--			-	-	-	-	50%		
401.20	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase OPD yang melaporkan kegiatan tepat waktu	100%	100%	67,691,850	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	67,691,850	DPMPTSP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
401.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi	Persentase Peningkatan Aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan pajak daerah	100%	100%	347,678,230	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	347,678,230	DPMPTSP
401.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang ditetapkan	1 dokumen	1 dokumen	82,933,500	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	82,933,500	DPMPTSP
212.18	Program Optimalisasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase indeks kepuasan masyarakat	80,50	-	-	83	194,734,020	-	-	-	-	-	-	83	194,734,020	DPMPTSP
212.19	Program Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	Persentase Jumlah Pemohon Perizinan Usaha yg Diverifikasi	100%	-	-	100%	116,940,400	-	-	-	-	-	-	100%	116,940,400	DPMPTSP
		Persentase penyelesaian kasus pengaduan pelayanan perijinan	100%			100%		-	-	-	-	-	-	100%		
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	-	-	-	-	100%	8,943,164,608.00					100%	8,943,164,608	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
		Nilai SAKIP	B							BB	9,372,198,196.54	A	9,372,198,197	A	18,744,396,393	
		Maturitas SPIP	Memadai							Memadai		Memadai		Memadai		
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal	n/a	-	-	-	-	2	96,843,216.00	2	153,700,885.52	2	293,912,221	2	544,456,322	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase kenaikan jumlah investor	n/a	-	-	-	-	5%	266,053,953.00					5%	266,053,953	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
		Persentase peningkatan jumlah investor	n/a							10%	266,175,000.00	15%	271,147,500	15%	537,322,500	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,37%	-	-	-	-	83	493,168,400.00	84.5	499,708,591.20	85	514,699,849	85	1,507,576,840	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota	n/a	-	-	-	-	360 Milyar	683,892,193.00	365 Milyar	211,120,000.00	370 Milyar	215,064,000	370 Milyar	1,110,076,193	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	100%	-	-	-	-	100%	67,170,837.00	100%	56,113,173.48	100%	57,161,442	100%	180,445,452	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
					1,321,954,446.00		394,407,185.00		10,550,293,207.00		10,559,015,846.74		10,724,183,207.78		33,549,853,892.52	
<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>																
213.15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase pemuda yang berperan	100%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	DISPORABUDP AR
213.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase Tingkat keaktifan pemuda (%)	5%	100%	483,248,500	15%	174,191,200	-	-	-	-	-	-	15%	657,439,700	DISPORABUDP AR
213.20	Program Pembinaan dan Permasayarakatan Olahraga	Persentase sarana dan prasarana olah raga yang memadai	14%	100%	550,954,600	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	550,954,600	DISPORABUDP AR
		Persentase atlit/cabor yang berprestasi (%)	14%	-	-	20%	509,231,100	-	-	-	-	-	-	20%	509,231,100	DISPORABUDP AR
213.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase sarana dan prasarana olah raga yang memadai	100%	100%	564,602,202.62	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	564,602,202.62	DISPORABUDP AR
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan Prasarana Perangkat daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	100%	-	-	-	-	100%	4,503,112,413.00	100%	4,993,462,069.05	100%	4,993,462,069	100%	14,490,036,551	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase OKP yang aktif	44%	-	-	-	-	75%	1,309,374,283.00	77%	1,319,318,000.00	79%	1,454,400,000	79%	4,083,092,283	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga	17%	-	-	-	-	88%	10,102,944,584.00	92%	8,763,300,000.00	100%	8,842,500,000	100%	27,708,744,584	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
					1,598,805,302.62		683,422,300.00		15,915,431,280.00		15,076,080,069.05		15,290,362,069.05		48,564,101,020.72	
<b>STATISTIK</b>																
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,6	-	-	-	-	85	330,569,806.00	87.00	417,055,081.17	89.00	453,645,000.00	89.00	1,201,269,887	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					0.00		0.00		330,569,806.00		417,055,081.17		453,645,000.00		1,201,269,887.17	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	<b>PERSANDIAN</b>															
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE )	3,36	-	-	-	-	3,3	191,256,715.00	3,4	191,447,972.17	3,5	208,305,000.00	3,5	591,009,687.17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					0.00		0.00		191,256,715.00		191,447,972.17		208,305,000.00		591,009,687.17	
	<b>KEBUDAYAAN</b>															
216.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Presentase Meningkatkan kualitas pengelolaan kekayaan budaya	100%	100%	767,459,900	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	767,459,900	DISPORABUDPAR
216.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Prosentase Meningkatkan kualitas pengelolaan keragaman budaya	100%	100%	167,337,250	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	167,337,250	DISPORABUDPAR
	Program pengembangan nilai budaya	Persentase Dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	80%	80%	114,262,150	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	114,262,150	DISPORABUDPAR
216.19	Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Jumlah seni budaya yang dilestarikan (seni budaya)	10	-	-	10	3,650,000	-	-	-	-	-	-	10	3,650,000	DISPORABUDPAR
2.22.02	ROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase even/kegiatan pelestarian budaya	4	-	-	-	-	4 kegiatan	320,173,563.00	46 kegiatan	1,745,000,000	46 kegiatan	1,762,450,000	46 kegiatan	3,827,623,563	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	14					15		-		-		15		
		Penyelenggaraan Festival/even seni dan budaya	4							4		5		5		
		Jumlah Karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	8							10		15		15		
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	16 unit	-	-	-	-	-	-	16 unit	134,225,000	20 unit	192,780,000	20 unit	327,005,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	1 unit							1 unit		1 unit		1 unit		
					1,049,059,300.00		3,650,000.00		320,173,563.00		1,879,225,000.00		1,955,230,000.00		5,207,337,863.00	
	<b>PERPUSTAKAAN</b>															
101.21	Program Pengembangan Budaya Baca masyarakat dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan (%)	15	15	1,039,195,468	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1,039,195,468	Dinas Perpustakaan dan Arsip
101.21	Program Peningkatan minat Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan	167			167	863,298,415	-	-	-	-	-	-	167	863,298,415	Dinas Perpustakaan dan Arsip

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab			
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	102.288			34,731			-		-			-		34,731			
		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	43.921			45,438					-			-		45,438			
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana perangkat daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	100%	-	-	-	-	100%	4,181,749,581.00	100%	4,431,226,237.62	100%	4,431,226,238	100%	13,044,202,056	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah perpustakaan (unit)	167	-	-	-	-	167	832,699,271.00	167	774,748,772.98	167	842,858,555	167	2,450,306,599	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
		Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	34,731					40000		45000		50000		50000					
		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eksemplar)	45,438					46438		47438		48438		42					
		Jumlah Pustakawan	4							4		4		4					
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno yang terselamatkan dan dilestarikan dengan baik	100%	-	-	-	-	100%	48,389,050.00	100%	43,593,695.60	100%	47,426,108	100%	139,408,854	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
									<b>1,039,195,468.00</b>		<b>863,298,415.00</b>		<b>5,062,837,902.00</b>		<b>5,249,568,706.20</b>		<b>5,321,510,901.42</b>		<b>17,536,411,392.62</b>
	<b>KEARSIPAN</b>																		
218.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase instansi pemerintah yang mengelola arsip secara baku (%)	75%	56%	113,889,100	-	-	-	-	-	-	-	-	56%	113,889,100	Dinas Perpustakaan dan Arsip			
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase instansi pemerintah yang mengelola arsip secara baku (%)	75%	56%	213,270,960	-	-	-	-	-	-	-	-	56%	213,270,960	Dinas Perpustakaan dan Arsip			
218.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase instansi pemerintah yang mengelola arsip secara baku (%)	75%	56%	213,706,550	-	-	-	-	-	-	-	-	56%	213,706,550	Dinas Perpustakaan dan Arsip			
218.18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase instansi pemerintah yang mengelola arsip secara baku (%)	75%	56%	77,780,100	-	-	-	-	-	-	-	-	56%	77,780,100	Dinas Perpustakaan dan Arsip			
218.19	Program Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	56%	-	-	56%	31,728,900	-	-	-	-	-	-	56%	31,728,900	Dinas Perpustakaan dan Arsip			
		Jumlah arsiparis	4			4								4					
		Jumlah diklat kearsipan yang diikuti	1			1								1					

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
218.20	Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip yang terselamatkan yang dikelola dengan baik	100%	-	-	100%	216,682,800	-	-	-	-	-	-	100%	216,682,800	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1) Persentase jumlah arsip yang dikelola dengan baik, 2) Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku.	1) 100% 2) 50%	-	-	-	-	1) 100% 2) 60%	361,339,530	-	-	-	-	1) 100% 2) 60%	361,339,530	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		1) Persentase jumlah arsip yang diselamatkan dan dikelola dengan baik, 2) Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku, 3) Jumlah arsiparis, 4) Jumlah diklat kearsipan yang diikuti	1) 100% 2) 60% 3) 4 orang 4) 1 Kali	-	-	-	-	-	-	1) 100% 2) 65% 3) 4 orang 4) 1 Kali	337,428,805.35	1) 100% 2) 70% 3) 4 orang 4) 1 Kali	367,092,876	1) 100% 2) 70% 3) 4 orang 4) 2 Kali	704,521,681	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase naskah sumber arsip yang disediakan dengan baik	100%	-	-	-	-	100%	24,713,000.00	100%	20,239,947.00	100%	22,019,283	100%	66,972,230	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
							618,646,710.00				248,411,700.00				386,052,530.00	
																357,668,752.35
																389,112,158.70
																1,999,891,851.05
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>															
	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>															
303.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Persentase Hasil Produksi sektor perikanan budidaya	5%	5%	862,558,850	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	862,558,850	Dinas KP & Pertanian
301.25	Program Peningkatan Produksi Peternakan dan Perikanan	Jumlah Produksi Ikan	348.000 kg/Th	348.000 kg/Th	--	348.000 kg/Th	57,655,737	-	-	-	-	-	-	348.000 kg/Th	57,655,737	
		Cakupan Bina POKDAKAN	100%	100%		100%		-	-	-	-	-	-	100%		
		Jumlah Populasi kambing	1230 Ekor	1230 Ekor		1280 Ekor		-	-	-	-	-	-	1280 Ekor		
		Cakupan penanganan kasus penyakit hewan	100%	100%		100%		-	-	-	-	-	-	100%		
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi ikan	3%	-	-	-	-	3%	319,302,136.00	3%	145,600,000	3%	180,000,000	9%	644,902,136	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		Persentase peningkatan jumlah anggota Pokdakan	3%	-	-	-	-	3%	-	3%	-	3%	-	9%	-	
							862,558,850.00									57,655,737.00
																319,302,136.00
																145,600,000.00
																180,000,000.00
																1,565,116,723.00
	<b>PARIWISATA</b>															
304.15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Prosentase Meningkatnya Kualitas Pengembangan Pemasaran Pariwisata	100%	100%	1,188,797,200	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1,188,797,200	DISPORABUDPAR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
304.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Kunjungan wisata	0%	-	-	40%	304,149,050	-	-	-	-	-	-	40%	304,149,050	DISPORABU DP AR
304.17	Program pengembangan Kemitraan	Persentase Pengembangan Kemitraan Baru	100%	100%	86,258,500	-	-	-	-	-	-	-	100%	86,258,500	DISPORABU DP AR	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah pengunjung even wisata	n/a	-	-	-	-	-	-	12.000	760,000,000.00	12.500	685,000,000	12.500	1,445,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kontribusi jasa usaha pariwisata	n/a	-	-	-	-	Rp. 10.000.000.000	1,113,004,921.00	Rp.11.000.000.000	750,000,000.00	Rp.11.500.000.000	750,000,000	Rp.11.500.000.000	2,613,004,921	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang bina	n/a	-	-	-	-	70%	254,999,054.00	80%	380,000,000.00	90%	460,000,000	90%	1,094,999,054	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
					1,275,055,700.00		304,149,050.00		1,368,003,975.00		1,890,000,000.00		1,895,000,000.00			
	<b>PERTANIAN</b>															
305.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Persentase mutu dan keamanan pangan yang diawasi dan dipantau	40%	40%	1,537,688,900	-	-	-	-	-	-	-	-	40%	1,537,688,900	Dinas KP & Pertanian
305.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Persentase luas lahan yang teraliri irigasi	100%	100%	386,497,800	100%	-	-	-	-	-	-	100%	386,497,800	Dinas KP & Pertanian	
		Persentase kelompok tani menggunakan bibit unggul	100%	100%	--	100%	218,712,650	-	-	-	-	-	100%	218,712,650		
		Persentase kelompok tani yang menggunakan pupuk tepat ukur	100%	100%		100%		-	-	-	-	-	100%			
		Jumlah Poktan yang menggunakan cara bertani metode intensifikasi	26 Poktan	26 Poktan		26 Poktan		-	-	-	-	-	26 Poktan			
		Jumlah penyuluh yang berkompeten	13 Penyuluh	13 Penyuluh		13 Penyuluh		-	-	-	-	-	13 Penyuluh			
305.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase kasus penyakit hewan menular terhadap populasi ternak	0.32%	0.32%	129,435,765	-	-	-	-	-	-	-	0.32%	129,435,765	Dinas KP & Pertanian	
305.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Usaha Peternakan	100	100	57,530,600	-	-	-	-	-	-	-	100	57,530,600	Dinas KP & Pertanian	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase luas lahan yang teraliri irigasi	100%	-	-	-	-	100%	424,999,908.00	-	-	-	100%	424,999,908	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		Persentase kelompok tani menggunakan bibit unggul	100%	-	-	-	-	100%		-	-	-	100%			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase kelompok tani yang menggunakan pupuk tepat ukur	100%	-		-		100%		-		-		100%		
		Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	90%	-	-	-	-	-	90%	503,685,000	90%	498,150,000	90%	1,001,835,000		
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah gapoktan yang menggunakan cara bertani metode intensifikasi	26 Poktan	-	-	-	-	26 Poktan	1,392,492,637.00	-	-	-	-	26 Poktan	1,392,492,637	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		Jumlah penyuluh yang berkompeten	13 Penyuluh	-	-	-	-	13 Penyuluh		-	-	-	-	13 Penyuluh		
		Persentase prasarana yang digunakan	90%	-	-	-	-	-	90%	46,410,000	90%	45,000,000	90%	91,410,000		
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase kasus penyakit hewan yang ditangani	80%	-	-	-	-	80%	220,027,528.00	80%	218,400,000	80%	216,000,000	80%	654,427,528	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		Persentase peningkatan produksi daging dari 8 jenis	3%	-	-	-	-	3%		3%		3%		9%		
					2,111,153,065.00		218,712,650.00		2,037,520,073.00		768,495,000.00		759,150,000.00		5,895,030,788.00	
	<b>PERDAGANGAN</b>															
306.15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase pengaduan masyarakat terkait perdagangan	5%	5%	679,685,676	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	679,685,676	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
306.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Cakupan efisiensi mekanisme perdagangan daerah	5%	5%	5,850,271,615	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	5,850,271,615	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
306.19	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Prosentase Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Dapat Terlaksana	5%	5%	171,501,900	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	171,501,900	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
306.21	Program Pengembangan Usaha Perdagangan	Persentase tingkat Inflasi tahun berjalan	4.00%		-	4.00%	6,112,429,767.55	-	-	-	-	-	-	4.00%	6,112,429,767.55	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi anggaran dan capaian kinerja	100%	-	-	-	-	100%	11,275,139,372.00	100%	15,712,126,976.00	100%	15,712,126,976.00	100%	42,699,393,324	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab			
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pembangunan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	100%	-	-	-	-	100%	15,399,881,813.00	100%	4,900,000,000.00	100%	5,390,000,000.00	100%	25,689,881,813	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok	100%	-	-	-	-	100%	395,734,414.00	100%	200,200,000.00	100%	217,800,000.00	100%	813,734,414	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan omzet penjualan para pedagang/perusahaan Kota Mojokerto	15%	-	-	-	-	15%	286,058,573.00	15%	91,000,000.00	15%	99,000,000.00	45%	476,058,573	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga	85%	-	-	-	-	85%	102,887,500.00	85%	1,110,702,502.00	85%	1,110,702,502.00	85%	2,324,292,504	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penyediaan informasi data perdagangan	80%	-	-	-	-	80%	38,688,818.00	-	-	-	-	80%	38,688,818	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
		Pertumbuhan omzet usaha mikro	9.35%							9.35%	981,890,000.00	9.35%	981,890,000.00	9.35%	1,963,780,000				
									<b>6,701,459,191.00</b>		<b>6,112,429,767.55</b>		<b>27,498,390,490.00</b>		<b>22,995,919,478.00</b>		<b>23,511,519,478.00</b>		<b>86,819,718,404.55</b>
	<b>PERINDUSTRIAN</b>																		
307.16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase meningkatnya Jumlah Produk IKM dan Pendapatan Pengrajin	47%	47%	157,952,350	6.00%	306,419,554	-	-	-	-	-	-	53.00%	464,371,904	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
307.17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Prosentase Meningkatkan Kemampuan Pengusaha Dalam Mengelola Usahanya, Meningkatkan Standar Produk dan Daya Saing Produk IKM	35%	35%	184,414,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35%	184,414,700	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
307.18	Program penataan struktur industri	Cakupan Penataan Struktur Industri Hulu-Hilir	60%	60%	19,940,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60%	19,940,050	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
307.19	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Persentase Sentra Industri Potensial Difasilitasi	80%	80%	143,230,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	143,230,150	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
307.20	Program Peningkatan Daya Saing Produk IKM	Persentase peningkatan Nilai Tambah Produksi tahun berjalan	6.00%	-	-	6.00%	30,133,300	-	-	-	-	-	-	-	6.00%	30,133,300	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
306.10	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase lingkungan sosial yang dibangun/ dipelihara	10%	10%	1,356,922,649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	1,356,922,649	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
306.21	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase tingkat kepuasan IKM yang difasilitasi	25%	--	--	25%	1,608,885,175	-	-	-	-	-	-	-	25%	1,608,885,175	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
306.11	Program Pembinaan Industri (Cukai)	Persentase produk IKM yang memiliki HAKI	5%	5%	224,485,976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	224,485,976	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
307.21	Program Pembinaan Industri (Cukai)	Persentase peningkatan jumlah produk IKM yang memiliki HAKI	18%	-	-	18%	97,354,750	-	-	-	-	-	-	-	18%	97,354,750	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi anggaran dan capaian kinerja	100%	-	-	-	-	100%	270,405,661.00	-	-	-	-	-	100%	270,405,661	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan omzet penjualan para IKM Kota Mojokerto	15%	-	-	-	-	18%	475,544,000.00	18%	2,675,000,000.00	18%	2,942,500,000.00	18%	6,093,044,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM yang telah menerapkan standarisasi produk	80%	-	-	-	-	80%	65,664,000.00	80%	341,250,000.00	80%	341,250,000.00	80%	748,164,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase peningkatan omzet IKM Kota Mojokerto	15%	-	-	-	-	15%	811,220,464.00	-	-	-	-	15%	811,220,464	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang difasilitasi dalam e-commerce	83%	-	-	-	-	83%	165,788,500.00	83%	318,500,000.00	83%	346,500,000.00	83%	830,788,500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					2,086,945,875.00		2,042,792,779.00		1,788,622,625.00		3,334,750,000.00		3,630,250,000.00		12,883,361,279.00	
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>																
401.15	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Prosentase meningkatnya kualitas keberdayaan masyarakat perdesaan	18 kelurahan	18 kelurahan	172,151,983	-	-	-	-	-	-	-	-	3 Kel. Sangat berkembang	172,151,983	Sekretariat Daerah
401.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rangking prestasi Pemerintah Daerah dalam (LPPD dan LKPJ)	Nilai sangat tinggi (ranking 34 Nasional)	Nilai sangat tinggi (ranking 30 besar Nasional)	313,466,992	-	-	-	-	-	-	-	-	Nilai sangat tinggi (ranking 30 besar Nasional)	313,466,992	Sekretariat Daerah
401.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Prosentase PNS/ASN mengikuti upacara Hari Otoda dan Hari Jadi Prov Jatim	600 ASN	800 ASN	65,924,600	-	-	-	-	-	-	-	-	800 ASN	65,924,600	Sekretariat Daerah
301.17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Jumlah laporan terhadap penggunaan listrik dan air, BBM bersubsidi dan distribusi gas LPG	2 dok	2 dok	202,271,400	-	-	-	-	-	-	-	-	2 dok	202,271,400	Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
401.26	Program penataan peraturan perundang-undangan	Persentase produk hukum daerah yang harmonis tidak tumpang tindih, penyelesaian permasalahan hukum dan pemahaman peraturan perundang-undangan di masyarakat	80%	100%	1,081,211,965	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1,081,211,965	Sekretariat Daerah
		Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi	80%	--	--	100%	696,990,206	-	-	-	-	-	-	100%	696,990,206	
		Persentase penanganan permasalahan hukum yang difasilitasi	100%	100%		100%		-	-	-	-	-	-	100%		
401.18	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rumusan kebijakan terkait bidang perekonomian	4 dok	4 dok	827,873,252	-	-	-	-	-	-	-	-	4 dokumen	827,873,252	Sekretariat Daerah
401.31	Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Prosentase OPD yang tepat ukuran (rightsizing), % OPD pelanana yang mempunyai SKM dengan nilai baik dan % LKJIP yang tepat waktu dan sesuai aturan	37%	37%	992,165,124	40%	709,126,580	-	-	-	-	-	-	45%	1,701,291,704	Sekretariat Daerah
401.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah	100%	100%	986,860,570	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	986,860,570	Sekretariat Daerah
401.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Prosentase pelayanan kehumasan, dokumentasi, dan keprotokolan.	90%	90%	4,104,638,141	-	-	-	-	-	-	-	-	90%	4,104,638,141	Sekretariat Daerah
401.38	Program Optimalisasi Fungsi Kehumasan, Dokumentasi, dan Keprotokolan	Presentase kegiatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekda yang didokumentasikan	100%	--	--	100%	3,818,309,514	-	-	-	-	-	-	100%	3,818,309,514	Sekretariat Daerah
401.29	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Prosentase Meningkatnya kualitas pengamalan ajaran agama	100%	100%	1,245,207,899	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1,245,207,899	Sekretariat Daerah
401.30	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Keagamaan	Prosentase proposal hibah dan bantuan sosial yang diverifikasi dan divalidasi secara benar dan tepat waktu	50%	50%	3,282,038,575	80%	3,433,258,950	-	-	-	-	-	-	80%	3,282,038,575	Sekretariat Daerah
		Prosentase kegiatan hari besar keagamaan difasilitasi	100%		--	100%		-	-	-	-	-	-	100%		
		Jumlah prestasi lomba di bidang keagamaan	n/a			15								15%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
401.25	Program Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Persentase antar Pemerintah Daerah yang Mencapai Sasaran	6 kerjasama	6 kerjasama	462,639,551	-	-	-	-	-	-	-	-	6 kerjasama	462,639,551	Sekretariat Daerah
401.36	Program Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai	Persentase masyarakat yang tertib dan mematuhi ketentuan di bidang cukai	100%	100%	155,134,600	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	155,134,600	Sekretariat Daerah
		Persentase peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang ketentuan perundang undangan di bidang cukai	100%	--	--	100%	299,263,500.00	-	-	-	-	-	-	100%	299,263,500	Sekretariat Daerah
401.37	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Persentase menurunnya peredaran rokok ilegal	100%	100%	33,936,400	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	33,936,400	Sekretariat Daerah
401.39	Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Persentase Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD dan LKPJ) yang disusun tepat waktu	100%			100%	314,058,272	-	-	-	-	-	-	100%	314,058,272	Sekretariat Daerah
401.40	Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan	Presentase Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD dan LKPJ) yang disusun tepat waktu	100%			100%	374,953,981	-	-	-	-	-	-	100%	1,212,806,150	Sekretariat Daerah
		Persentase kerjasama antar Pemerintah, lembaga pemerintah dan Non pemerintah yang difasilitasi	100%			100%									100%	
301.19	Program Koordinasi, Fasilitasi, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Perekonomian	Tingkat kepatuhan BUMD terhadap regulasi Good Corporate Governance Kota Mojokerto	100%			100%	691,383,640	-	-	-	-	-	-	100%	1,298,764,200	Sekretariat Daerah
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	80%	-	-	-	-	80%	2,090,068,479.00	81%	1,901,849,891	82%	1,929,212,586	82%	5,921,130,956	Bagian Pemerintahan
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	-	-	-	-	100%	1,703,648,430.00	100%	1,656,326,714	100%	1,656,326,714	100%	5,016,301,858	Bagian Hukum
		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	90%	-	-	-	-	90%	1,640,321,180.00	100%	1,336,411,058	100%	1,336,411,058	100%	4,313,143,296	Bagian Perekonomian
		Persentase administrasi Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	-	-	-	-	100%	2,538,181,742.00	100%	2,547,035,066	100%	2,745,968,354	100%	7,831,185,162	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pembangunan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	-	-	-	-	100%	2,617,502,534.00	100%	2,519,289,580	100%	2,519,289,580	100%	7,656,081,694	Bagian Organisasi
		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	90%	-	-	-	-	90%	17,988,080,830.00	100%	15,256,501,423	100%	15,256,501,423	100%	48,501,083,676	Bagian Umum
		Persentase sarana dan prasarana Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	90%	-	-	-	-	90%	4,758,760,120.00	95%	4,183,903,695	95%	4,267,581,768	95%	13,210,245,582	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	90%	-	-	-	-	90%	1,280,727,878.00	100%	1,188,211,056	100%	1,211,975,277	100%	3,680,914,212	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,16	-	-	-	-	3,45	1,066,833,495.00	3,5	891,211,366	3,55	899,046,192	3,55	2,857,091,052	Bagian Pemerintahan
		Persentase Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	100%	-	-	-	-	100%	599,427,363	100%	434,352,924	100%	429,579,815	100%	1,463,360,101	Bagian Hukum
		Prosentase kegiatan Kesejahteraan Rakyat	100%	-	-	-	-	100%	11,578,989,707.00	100%	9,554,035,315.80	100%	9,998,828,139.67	100%	31,131,853,162	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase kebijakan perekonomian yang dilaksanakan	100%	-	-	-	-	100%	1,176,395,860.00	100%	2,393,752,135	100%	2,393,752,135	100%	5,963,900,130	Bagian Perekonomian
		Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang diproses secara tender	100%	-	-	-	-	100%	612,152,205.00	100%	619,710,000	100%	612,900,000	100%	1,844,762,205	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pembangunan
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tingkat penyerapan anggaran DBHCHT Kota Mojokerto	100%	-	-	-	-	100%	239,970,182					100%	239,970,182	Bagian Perekonomian
									13,925,521,052.00						103,337,344,643.00	
									49,891,060,005.00						44,482,590,222.41	
															45,257,373,041.12	
															163,893,888,963.53	
		<b>SEKRETARIAT DPRD</b>														
401.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Kualitas Layanan Fasilitasi Peningkatan Lembaga Perwakilan Rakyat sesuai dengan Fungsinya	90%	90%	16,794,428,846.00	90%	13,731,696,335.00	-	-	-	-	-	-	80%	30,526,125,181	Sekretariat DPRD
401.42	Program Pelayanan Penganggaran dan Pengawasan	Kualitas Layanan Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD sesuai dengan fungsinya	80%	--	--	90%	651,846,000	-	-	-	-	-	-	80%	651,846,000	Sekretariat DPRD
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	90%	-	-	-	-	90%	21,834,028,270	100%	24,473,030,219	100%	20,231,851,099	100%	66,538,909,588	Sekretariat DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terpenuhi	90%	-	-	-	-	90%	17,351,443,816	100%	20,564,265,116	100%	20,638,137,116	100%	58,553,846,048	Sekretariat DPRD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					16,794,428,846.00		14,383,542,335.00		39,185,472,086.00		45,037,295,335.25		40,869,988,214.59		156,270,726,816.84	
	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
	<b>PERENCANAAN</b>															
403.15	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase antara ketersediaan data terhadap kebutuhan data	90%	90%	489,392,282	-	-	-	-	-	-	-	-	90%	489,392,282	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
		Persentase permasalahan program dan kegiatan yang didanai oleh APBN dan APBD	90%	90%		-	--	-	--	-	-	-	-	90%		
403.16	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase rencana kerjasama yang diimplementasikan	100%	100%	49,199,350	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	49,199,350	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
403.18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh	Persentase rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang diimplementasikan	100%	100%	1,090,228,850	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1,090,228,850	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
403.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan	100%	100%	1,655,060,768	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1,655,060,768	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
		Persentase ketersediaan dokumen rencana pembangunan jangka menengah bidang keciptakaryaan	100%	100%										100%		
403.22	Program Perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase rencana pembangunan ekonomi yang diimplementasikan	100%	100%	142,673,800	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	142,673,800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
403.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase rencana Sosial dan Budaya yang diimplementasikan	100%	100%	1,134,981,926			-	-	-	-	-	-	100%	1,134,981,926	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
		Persentase keselarasan Renja terhadap RKPD pada PD mitra bidang II	100%			100%	702,458,599							100%	702,458,599	
		Persentase keselarasan Renstra terhadap RPJMD pada PD mitra bidang II	100%			100%								100%		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti pada PD mitra bidang II	100%			100%									100%		
		Jumlah dokumen perencanaan bidang II yang diintegrasikan dalam RKPd dan RPJMD	4 dok			4 dok									4 dok		
403.28	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 dokumen			2 dokumen	1,082,653,438								2 dokumen	1,082,653,438	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
		Persentase hasil musrenbang yang menindaklanjuti	100%			100%									100%		
		Persentase POKIR DPRD terverifikasi dan dilaksanakan oleh PD	100%			100%									100%		
		Persentase ketersediaan data pembangunan	90%			90%									90%		
		Persentase PD mengisi aplikasi perencanaan tepat waktu	100%			100%									100%		
		Persentase PD mengisi aplikasi perencanaan tepat waktu	100%			100%									100%		
		Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100%			100%									100%		
403.29	Program Perencanaan Bidang Infrastruktur SDA dan Ekonomi	Persentase keselarasan Renja terhadap RKPd pada PD mitra bidang III	100%	-	-	100%	1,098,816,105	-	-	-	-	-	-	-	100%	1,098,816,105	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
		Persentase keselarasan Renstra terhadap RPJMD pada PD mitra bidang III	100%			100%									100%		
		Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti pada PD mitra bidang III	90%			90%									90%		
		Jumlah dokumen perencanaan bidang III yang diintegrasikan dalam RKPd dan RPJMD	7 dok	-	-	7 dok		-	-	-	-	-	-	-	7 dok		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	-	-	-	-	100%	7,620,773,474.00	100%	9,414,920,788	100%	9,414,920,788	100%	26,450,615,050	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	100%	-	-	-	-	100%	1,351,109,750.00	100%	540,000,000	100%	640,300,000	100%	2,531,409,750	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Persentase ketersediaan data pembangunan	100%	-	-	-	-	100%	-	100%	360,000,000	100%	370,000,000	100%	730,000,000	
		Persentase Perangkat Daerah yang tertib pelaporan kegiatan	100%	-	-	-	-	100%	-	100%	387,583,500	100%	390,462,675	100%	778,046,175	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai	90.00%	-	-	-	-	90.00%	967,337,164.00	90%	1,083,851,000	90%	1,132,605,250	50%	3,183,793,414	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Perekonomian dan SDA yang tercapai	90.00%	-	-	-	-	90.00%	695,292,190.00	90%	759,533,540	90%	762,059,608	90%	2,216,885,338	
		Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai	90.00%	-	-	-	-	90.00%	458,244,780.00	90%	523,859,500	90%	538,936,000	90%	1,521,040,280	
					4,561,536,976.00		2,883,928,142.00		11,092,757,358.00		13,069,748,328.00		13,249,284,320.50		44,857,255,124.50	
	<b>4.04. KEUANGAN</b>															
404.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	5,586,260,988	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	5,586,260,988	BPPKA
404.20	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Presentase tindak lanjut temuan, persentase pelanggaran pegawai dan jumlah temuan BPK	100%	100%	310,540,200	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	310,540,200	BPPKA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
404.21	Program Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pajak Daerah	18.9	15	--	15	438,845,200	-	-	-	-	-	-	15	438,845,200	BPPKA
		Pertumbuhan Retribusi Daerah	4.43	5		5		-	-	-	-	-	-	5		
		Pertumbuhan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	7.35	5		5		-	-	-	-	-	-	5		
		Pertumbuhan Lain-lain PAD yang sah	36.34	10		10		-	-	-	-	-	-	10		
404.22	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase meningkatnya pendapatan asli daerah	1.05	15		15	448,402,550	-	-	-	-	-	-	15	448,402,550	BPPKA
404.23	Program Penyusunan APBD dan P-APBD Kota Mojokerto	Penetapan APBD	TEPAT	TEPAT		TEPAT	1,286,830,927	-	-	-	-	-	-	TEPAT	1,286,830,927	BPPKA
		Persentase SILPA	7.63	7		7		-	-	-	-	-	-	7		
		Persentase belanja pendidikan	20.25	20.23		20		-	-	-	-	-	-	20		
		Persentase belanja kesehatan	28.64	20.84		15		-	-	-	-	-	-	15		
		Persentase belanja infrastruktur	18.7	25		25		-	-	-	-	-	-	25		
		Persentase belanja kelurahan	2.45	5		5		-	-	-	-	-	-	5		
		Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	61/39	61/39		62/38		-	-	-	-	-	-	62/38		
		Bagi hasil kab/kota dan desa	5.76	7		7		-	-	-	-	-	-	7		
404.24	Program Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	--	--	WTP	745,365,650	-	-	-	-	-	-	WTP	745,365,650	BPPKA
		Persentase LKPD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP	100			100		-	-	-	-	-	-	100		
404.25	Program Pengelolaan Aset Daerah	Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik	90	--	--	90	887,954,919	-	-	-	-	-	-	90	887,954,919	BPPKA
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana perangkat daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	100%	-	-	-	-	100%	29,989,525,140.00	100%	28,331,427,205.84	100%	28,784,479,863	100%	87,105,432,209	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	-	-	-	-	WTP	2,841,610,295.00	WTP	2,444,458,453.71	WTP	2,595,818,889	WTP	7,881,887,638	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Jumlah sarana prasarana pendukung Ruang Terbuka Hijau yang dibangun/ dipelihara /dikelola/ /ditata	n/a	-	-	-	-	1 paket	3,014,999,328.00		-		-	1 paket	3,014,999,328	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik	90%	-	-	-	-	90%	2,135,832,571.00	90%	1,592,266,763.36	90%	1,959,042,016	90%	5,687,141,350	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah	100%	-	-	-	-	100%	1,396,347,108.00	100.00%	1,225,032,398.00	100%	1,267,184,372	100%	3,888,563,878	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
					<b>5,896,801,188.00</b>		<b>3,807,399,246.00</b>		<b>39,378,314,442.00</b>		<b>33,593,184,820.91</b>		<b>34,606,525,139.95</b>		<b>117,282,224,836.86</b>	
	<b>4.05. KEPEGAWAIAN</b>															
000.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase menurunnya pelanggaran disiplin aparatur	40%	40%	14,080,000	-	-	-	-	-	-	-	-	40%	14,080,000	Badan Kepegawaian
000.04	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase PNS yang diproses Pensiun/Mutasi	0%	95%	187,958,600	-	-	-	-	-	-	-	-	95%	187,958,600	Badan Kepegawaian
000.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Tugas dan Fungsi	4%	4%	701,025,567	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	701,025,567	Badan Kepegawaian
000.08	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Persentase PNS yang memperoleh Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi	4%	4%	1,541,725,552	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	1,541,725,552	Badan Kepegawaian
000.07	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase Aparatur yang Telah mengikuti Pendidikan Kedinasan	100%	79.6%	833,237,602	-	-	-	-	-	-	-	-	79.6%	833,237,602	Badan Kepegawaian
405.15	Program Penyelenggaraan Penataan Aparatur	Indeks Penerapan Sistem Merit	n/a	--	--	63	1,040,037,445	-	-	-	-	-	-	15%	1,040,037,445	Badan Kepegawaian
405.16	Program Pengembangan, Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	60%	--	--	60%	3,195,332,887	-	-	-	-	-	-	19.50%	3,195,332,887	Badan Kepegawaian
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	90%	-	-	-	-	90%	13,534,408,913.00	95%	12,989,079,553.45	98%	11,507,879,687.04	98%	38,031,368,153	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Nilai SAKIP	A					A		A		A		A		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Penerapan Sistem Merit	Penerapan Sistem Merit Kategori II (buruk)	-	-	-	-	Penerapan Sistem Merit Kategori II (kurang)	2,666,766,914.00	Penerapan Sistem Merit Kategori III (baik)	2,422,192,500.00	Penerapan Sistem Merit Kategori III (baik)	2,478,840,000.00	Penerapan Sistem Merit Kategori III (baik)	7,567,799,414	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
					3,278,027,321.00		4,235,370,332.00		16,201,175,827.00		15,411,272,053.45		13,986,719,687.04		7,513,397,653.00	
<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>																
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi minimal 20 JP dalam satu tahun	10%	-	-	-	-	10%	2,444,229,234.00	10%	2,017,389,530.52	10%	2,056,500,000.00	10%	6,518,118,765	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
					0.00		0.00		2,444,229,234.00		2,017,389,530.52		2,056,500,000.00		6,518,118,764.52	
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>																
407.28	Program Penelitian dan Pengembangan	Prosentase jumlah penelitian yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	15%	100%	1,833,819,950	15%	936,739,650	-	-	-	-	-	-	15%	2,770,559,600	BALITBANG
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Prosentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti dengan kebijakan		-	-	-	-	100%	1,231,178,886.00	100%	1,606,563,504	100%	1,620,686,430	100%	4,458,428,820	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
					1,833,819,950.00		936,739,650.00		1,231,178,886.00		1,606,563,504.00		1,620,686,430.00		2,770,559,600.00	
<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>																
<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>																
402.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Presentase meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	100%	100%	947,680,350	100%	439,270,686	-	-	-	-	-	-	100%	1,386,951,036	Inspektorat
402.21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur Pengawasan	Presentase meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Internal Pemerintah (%)	100%	100%	448,334,236.00	100%	197,380,941.00	-	-	-	-	-	-	100%	645,715,177	Inspektorat
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu (%)	100%	-	-	-	-	100%	7,297,242,641.00	-	-	-	-	100%	7,297,242,641	INSPEKTORAT
		Nilai SAKIP Inspektorat	B							A	6,671,212,402.40	A	6,831,738,904.54	A	13,502,951,307	
		Kapabilitas APIP (level)	Level 3							Level 3		Level 3		Level 3		
		Indeks Manajemen Resiko	n/a							Level 1		Level 2		Level 2		
		IKM Inspektorat	80.68							82,9%		83,4%		83,4%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase pengawasan internal yang sesuai standar audit dan tepat waktu (%)	100%	-	-	-	-	100%	303,867,273.00	-	-	-	-	100%	303,867,273	INSPEKTORAT
		Persentase PD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal BB	68,97%	-	-	-	-	-	-	88%	275,150,894	100%	275,326,661	100%	550,477,555	
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	84,22%	-	-	-	-	-	-	88%	-	89%	-	89%	-	
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	75%	-	-	-	-	-	-	95%	-	95%	-	95%	-	
		Maturitas SPIP	level 2							level 3		level 3		level 3		
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah unit kerja yang mendapatkan WBK	1	-	-	-	-	2	322,563,636.00	3	264,179,634	4	264,179,634	4	850,922,904	INSPEKTORAT
					<b>1,396,014,586.00</b>				<b>7,923,673,550.00</b>		<b>7,210,542,930.50</b>		<b>7,371,245,199.14</b>		<b>24,538,127,892.64</b>	
	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
	<b>KECAMATAN</b>															
207.17	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Prosentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100%	100%	7,943,159,099	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	7,943,159,099	Kec.Prajurit-kulon
207.20	Program pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat	Cakupan sarana prasarana pemerintah kelurahan yang baik	5%	-	-	5%	10,468,960,677	-	-	-	-	-	-	5%	10,468,960,677	Kec.Prajurit-kulon
		rata rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat ( LPM )	2%	-	-	4%	-	-	-	-	-	-	-	4%	-	
		Rata2 jumlah kelompok binaan PKK	6%	-	-	6%	-	-	-	-	-	-	-	6%	-	
		Persentase LPM aktif	100%	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	
		Persentase LPM berprestasi	16.66 %	-	-	16.66 %	-	-	-	-	-	-	-	16.66 %	-	
		Persentase PKK aktif	100%	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	
		Persentase posyandu aktif	100%	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan	100%	-	-	-	-	100%	12,072,335,115.00	100%	12,277,656,389.59	100%	12,277,656,389.59	100%	36,627,647,894	KECAMATAN PRAJURIT KULON
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	100%	-	-	-	-	100%	11,673,655,369.00	100%	10,155,242,547.04	100%	10,155,242,547.04	100%	31,984,140,463	KECAMATAN PRAJURIT KULON

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	-	-	-	-	100%	279,861,034.00	100%	130,061,377.81	100%	131,204,774.54	100%	541,127,186	KECAMATAN PRAJURIT KULON
					7,943,159,099.41		10,468,960,677.04		24,025,851,518.00		22,562,960,314.44		22,564,103,711.17		87,565,035,320.06	
207.17	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Prosentase Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	96.5	100%	11,786,904,099.45	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	11,786,904,099.45	Kecamatan Magersari
207.20	Program pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat	Cakupan sarana prasarana pemerintah kelurahan yang baik	50%	--	--	83%	7,377,516,748	-	-	-	-	-	-	83%	7,377,516,748	Kecamatan Magersari
		Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1.16	--	--	1.5	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	1.8	--	--	2.16	-	-	-	-	-	-	-	2.16	-	
		Persentase LPM aktif	100%	--	--	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	
		Persentase LPM Berprestasi	0%	--	--	16%	-	-	-	-	-	-	-	16%	-	
		Persentase PKK aktif	100%	--	--	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	
		Persentase Posyandu aktif	100%	--	--	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	
		Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	0	--	--	1.5%	-	-	-	-	-	-	-	1.5%	-	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	-	-	-	-	100%	13,124,666,638.00	100%	14,677,120,347.79	100%	14,677,120,347.79	100%	42,478,907,334	KECAMATAN MAGERSARI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	100%	-	-	-	-	100%	13,511,895,405.00	100%	13,118,393,522.73	100%	13,118,393,522.73	100%	39,748,682,450	KECAMATAN MAGERSARI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	-	-	-	-	100%	120,674,301.00	100%	182,532,350	100%	198,579,150	100%	501,785,801	KECAMATAN MAGERSARI
					11,786,904,099.45		7,377,516,748.15		26,757,236,344.00		27,978,046,220.52		27,994,093,020.52		101,893,796,432.65	
207.17	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	80%	80%	9,699,176,147.10	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	9,699,176,147.10	Kecamatan Kranggan
207.20	Program pembangunan, sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat	Prosentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	80%	--	--	100%	3,206,597,314	-	-	-	-	-	-	100%	3,206,597,314	Kecamatan Kranggan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.01	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	-	-	-	-	100%	17,310,654,743	100%	11,716,613,891	100%	11,470,277,338	100%	40,497,545,971	KECAMATAN KRANGGAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%	-	-	-	-	100%	9,444,670,546	100%	8,809,515,549.11	100%	8,809,515,549.11	100%	27,063,701,644	KECAMATAN KRANGGAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	-	-	-	-	100%	55,304,001	100%	132,292,656.86	100%	152,955,000	100%	340,551,658	KECAMATAN KRANGGAN
					9,699,176,147.10		3,206,597,314.00		26,810,629,290.00		20,658,422,096.77		20,432,747,886.71		80,807,572,734.58	
<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>																
<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>																
105.01.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	611,474,666	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	611,474,666	BAKESBANGPOL
105.17	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Presentase Peningkatan Peserta yang Mendapatkan / Mengikuti Kegiatan Wawasan Kebangsaan	100%	100%	696,740,850	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	696,740,850	BAKESBANGPOL
		Persentase masyarakat yang telah menerima pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan	100%	-	-	100%	165,570,000	-	-	-	-	-	-	100%	165,570,000	
105.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Presentase Terjalannya Kemitraan antara Pemerintah Daerah dan ORMAS/LSM	100%	100%	464,447,250	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	464,447,250	BAKESBANGPOL
105.21	Program Pendidikan politik masyarakat	Presentase Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	100%	100%	452,852,900	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	452,852,900.00	BAKESBANGPOL
		Persentase ORMAS/LSM/PARPOL yang telah memenuhi persyaratan	100%	-	-	100%	103,614,400	-	-	-	-	-	-	100%	103,614,400	BAKESBANGPOL
105.23	Program Pembinaan dan pengembangan kewaspadaan nasional	Presentase Meningkatnya Peserta Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional	100%	100%	845,202,700	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	845,202,700.00	BAKESBANGPOL
		Persentase masyarakat yg telah menerima pembinaan serta keamanan & ketentraman.	100%	-	-	100%	1,015,813,575	-	-	-	-	-	-	100%	1,015,813,575	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja akhir periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	-	-	-	-	100%	4,482,840,983.00	100%	4,021,462,328.40	100%	4,021,462,328.40	100%	12,525,765,640	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase masyarakat yang mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan dan pembinaan ideologi	4.90%	-	-	-	-	4.90%	1,128,929,767.00	5.04%	833,413,083.36	5.18%	833,413,083.36	5.18%	2,795,755,934	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase LSM/Ormas/Parpol yang aktif	68.55%	-	-	-	-	68.55%	880,967,526.00	69.49%	772,173,685.36	70.44%	772,173,685.36	70.44%	2,425,314,897	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase LSM/Ormas yang aktif	68.55%	-	-	-	-	68.55%	304,124,292.00	69.49%	264,720,581.84	70.44%	284,769,822.06	70.44%	853,614,696	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase konflik SARA yang ditangani	100%	-	-	-	-	100%	622,089,810.00	100%	562,277,145.76	100%	582,500,013.30	100%	1,766,866,969	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik Ipoleksosbud yang ditangani	100%	-	-	-	-	100%	2,581,154,801.00	100%	1,890,062,174.00	100%	1,890,062,174.00	100%	6,361,279,149	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					3,070,718,366.00		1,284,997,975.00		10,000,107,179.00		8,344,108,998.72		8,384,381,106.48		31,084,313,625.20	
<b>JUMLAH TOTAL PRIORITAS 2</b>					124,335,367,667.40		92,757,720,114.74		395,577,232,050.00		373,820,786,730.04		372,859,149,044.13		1,302,560,450,493.82	

Tabel 7.4: Rencana Kinerja Program Prioritas III dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
				target	Anggaran	target	Anggaran	target	Anggaran	target	Anggaran	target	Anggaran	target	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
00000001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	95%	100%	73,230,887,125.87	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	73,230,887,125.87	Seluruh PD
00000002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	95%	100%	19,075,294,250.85	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	19,075,294,250.85	Seluruh PD
00000003	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Pegawai yang memakai seragam sesuai dengan aturan	100%	100%	1,405,668,028.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1,405,668,028.00	Seluruh PD
00000005	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Fasilitasi peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	572,426,599.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	572,426,599.00	Seluruh PD
00000006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD yang Diselesaikan	100%	100%	997,864,314.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	997,864,314.00	Seluruh PD
00000012	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	-	-	-	100%	60,770,577,873.90	-	-	-	-	-	-	100%	60,770,577,874.90	Seluruh PD
<b>JUMLAH TOTAL PRIORITAS 3</b>					<b>95,361,813,317.72</b>	<b>60,770,577,873.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,132,391,191.62</b>					



## BAB VIII

# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

---

### 8.1. Indikator Kinerja Utama

Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2018-2023 tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif diharapkan akan terus berlangsung dalam proses pembangunan di Kota Mojokerto selama 5 (lima) tahun ke depan. Pemerataan pendapatan dan pemerataan hasil - hasil pembangunan diupayakan dapat menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tersedia, sehingga dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan. Muara dari seluruh pelaksanaan pembangunan tersebut adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Guna mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama lima tahun ke depan sebagaimana disajikan dalam Tabel 8.1.

**Tabel 8. 1**  
**Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019-2023**

NO	Indikator	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai maksimum dan minimum komponen : 1. AHH 2. Harapan Lama Sekolah 3. Rata-rata Lama Sekolah 4. Pengeluaran per kapita	77,14	Awal	77,03	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00
				Perubahan	77,96	78,04	78,20	78,40	78,60	78,60
2	Persentase pelanggaran Perda yang terselesaikan	<i>Jumlah pelanggaran perda yang ditangani dibagi Jumlah pelanggaran perda dikali 100%</i>	30%	Awal	30%	30%	30%	30%	30%	30%
				Perubahan	82,66%	87,62%	-	-	-	87,62%
	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	<i>Persentase pelanggaran perda yang ditangani + Persentase konflik sosial yang terselesaikan dibagi 2</i>	n/a	Awal	-	-	-	-	-	-
3	Indeks Reformasi Birokrasi	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	CC	Awal	B	BB	A	A	A	A
				Perubahan	62,31 (B)	62,45 (B)	63-70 (B)	>70-80 (BB)	>80-90 (A)	>80-90 (A)
4	Pertumbuhan Ekonomi	$R_{(t-1,t)} = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$	5,80	Awal	5,6-6,0	5,6-6,0	5,6-6,0	5,6-6,0	5,6-6,0	5,6-6,0
				Perubahan	5,75	-3,69	2,5-3,5	3,6-4,4	4,5-5,0	4,5-5,0
5	Indeks Kesalehan Sosial	survey	n/a	Awal	> 60	63	65	68	70	70
				Perubahan	76,16	76,20	76,23	76,25	76,27	76,27
6	Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$	0,341	Awal	0,36	0,36	0,34	0,32	0,29	0,29
				Perubahan	0,309	0,355	0,353	0,350	0,348	0,348
7	Indeks	$IPG = 1/3[(X_{ede(1)} + X_{ede(2)} + I_{inc-ade})]$	93,05	Awal	93,45	93,50	93,55	93,60	93,65	93,65

NO	Indikator	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pembangunan Gender (IPG)			Perubahan	93,18	93,26	93,28	93,30	93,32	93,32
8	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	<i>Kapasitas Fiskal (KF) masing-masing Daerah Kab/Kota dibagi dengan rata-rata Kapasitas Fiskal seluruh Kab/Kota dalam Propinsi</i>  $KF = \frac{(PAD + TBU + LP) - BP}{\text{Jumlah penduduk miskin}}$	0,824	Awal	0,918	1,20	1,60	2,00	2,40	2,40
				Perubahan	0,787	0,780	-	-	-	-
	Kapasitas Fiskal Daerah	<i>KFD = pendapatan - (pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu)</i>	n/a	Awal	-	-	-	-	-	-
				Perubahan	-	-	384.000.000.000	386.000.000.000	389.000.000.000	389.000.000.000
9	Indeks Infrastruktur	<i>30% x Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum + 30% x Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman + 20% x Indeks Infrastruktur LLAJ + 20% x IKLHD</i>	68,81	Awal	74,12	78,80	82,24	86,92	91,60	91,60
				Perubahan	80,96	84,56	85,19	86,06	86,93	86,93

## 8.2. Indikator Kinerja Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2018-2023 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kota Mojokerto tersebut secara rinci disajikan pada Tabel 8.2.

**Tabel 8. 2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran**  
**Kota Mojokerto Tahun 2019-2023**

NO	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>										
<b>1 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI</b>										
1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai maksimum dan minimum komponen : 1. AHH 2. Harapan Lama Sekolah 3. Rata-rata Lama Sekolah 4. Pengeluaran per kapita	77,14	Awal	77,03	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00
				Perubahan	77,96	78,04	78,20	78,40	78,60	78,60
1.2	Indeks Reformasi Birokrasi	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	CC	Awal	B	BB	A	A	A	A
				Perubahan	62,31 (B)	62,45 (B)	63-70 (B)	>70-80 (BB)	>80-90 (A)	>80-90 (A)
1.3	Pertumbuhan Ekonomi (%)	$R_{(t-1,t)} = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$	5,80	Awal	5,6-6,0	5,6-6,0	5,6-6,0	5,6-6,0	5,6-6,0	5,6-6,0
				Perubahan	5,75	-3,69	2,5-3,5	3,6-4,4	4,5-5,0	4,5-5,0
1.4	Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$	0,341	Awal	0,36	0,36	0,34	0,32	0,29	0,29
				Perubahan	0,309	0,355	0,353	0,350	0,348	0,348
1.5	Kapasitas Fiskal Daerah (Rp)	<i>KFD = pendapatan - (pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu)</i>	n/a	Awal	-	-	-	-	-	-
				Perubahan	-	-	384.000.000.000	386.000.000.000	389.000.000.000	389.000.000.000
<b>2 FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>										
2.2	Indeks Kesalehan Sosial	survey	n/a	Awal	> 60	63	65	68	70	70
				Perubahan	76,16	76,20	76,23	76,25	76,27	76,27
2.3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$IPG = 1/3[(X_{ede(1)} + X_{ede(2)} + I_{inc-dis})]$	93,05	Awal	93,45	93,50	93,55	93,60	93,65	93,65
				Perubahan	93,18	93,26	93,28	93,30	93,32	93,32

NO	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar</b>										
<b>1.1 Pendidikan</b>										
1.1.1	Indeks pendidikan	$I_{pendidikan} = \frac{I_{RLS} + I_{HLS}}{2}$	0,717	Awal	0,727	0,732	0,738	0,744	0,749	0,749
				Perubahan	0,725	0,730	0,732	0,735	0,737	0,737
<b>1.2 Kesehatan</b>										
1.2.1	Indeks Kesehatan	$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$	0,816	Awal	0,816	0,818	0,819	0,821	0,822	0,822
				Perubahan	0,818	0,820	0,821	0,822	0,823	0,823
<b>1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>										
1.3.1	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	<i>(Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap + Persentase Penurunan Luas Wilayah Rawan Genangan + Persentase Fasilitas Publik Dalam Kondisi Baik) dibagi 3</i>	75%	Awal	75%	80%	82%	84%	86%	86%
				Perubahan	77,93%	85,56%	87,56%	89,56%	91,56%	91,56%
<b>1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>										
1.4.1	Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman	<i>(Prosentase penurunan kawasan kumuh + Prosentase rumah dengan akses sanitasi yang layak + Prosentase rumah yang mendapat akses air minum yang layak) dibagi 3</i>	75%	Awal	76%	81%	84%	86%	88%	88%
				Perubahan	94,61%	95,96%	96,46%	96,96%	97,46%	97,46%
<b>1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>										
1.5.1	Persentase pelanggaran Perda yang terselesaikan	<i>Jumlah pelanggaran perda yang ditangani dibagi jumlah pelanggaran perda dikali 100%</i>	30%	Awal	30%	30%	30%	30%	30%	30%
				Perubahan	82,66%	87,62%	88%	89%	90%	90%
1.5.2	Jumlah konflik SARA		0	Awal	0	0	0	0	0	0
				Perubahan	0	0	-	-	-	-
	Persentase konflik SARA yang terselesaikan	<i>Jumlah konflik SARA yang ditangani dibagi jumlah konflik SARA yang terjadi dikali 100%</i>	n/a	Awal	-	-	-	-	-	-
				Perubahan	-	-	100%	100%	100%	100%



NO	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5.3	Jumlah konflik sosial		0	Awal	0	0	0	0	0	0
				Perubahan	3	5	-	-	-	-
	Persentase konflik sosial yang terselesaikan	<i>Jumlah konflik sosial yang ditangani dibagi Jumlah konflik sosial yang terjadi dikali 100%</i>	n/a	Awal	-	-	-	-	-	-
				Perubahan	-	-	100%	100%	100%	100%
<b>1.6</b>	<b>Sosial</b>									
1.6.1	Angka Kemiskinan (%)	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$	5,50	Awal	5,25 – 5,70	5,25 – 5,70	5,25 – 5,70	5,25 – 5,70	5,25 – 5,70	5,25 – 5,70
				Perubahan	5,15	6,24	5,84 - 6,04	5,63 - 5,83	5,42 - 5,62	5,42 - 5,62
<b>2</b>	<b>Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar</b>									
<b>2.1</b>	<b>Tenaga Kerja</b>									
2.1.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	<i>Jumlah pengangguran dibagi Jumlah Angkatan Kerja dikali 100%</i>	2,45	Awal	2,4-3,5	2,4-3,5	2,4-3,5	2,4-3,5	2,4-3,5	2,4-3,5
				Perubahan	2,65	6,74	6,1-6,4	5,6-6,0	5,0-5,5	5,0-5,5
<b>2.2</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>									
2.2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	<i>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</i>	82,00	Awal	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50	84,50
				Perubahan	83,74	90,59	91,00	91,50	92,00	92,00
<b>2.3</b>	<b>Pangan</b>									
3.2.2	Indeks Pengeluaran Per Kapita	$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(PPP) - \ln(PPP_{min})}{\ln(PPP_{maks}) - \ln(PPP_{min})}$	0,78	Awal	0,79	0,80	0,81	0,82	0,83	0,83
				Perubahan	0,797	0,793	0,794	0,796	0,797	0,797
<b>2.4</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>									
2.4.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	63,02	Awal	65,23	66,45	67,37	68,59	68,59	68,59
				Perubahan	65,24	57,72	57,79	57,86	57,92	57,92
<b>2.5</b>	<b>Perhubungan</b>									
2.5.1	Indeks Infrastruktur Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	<i>Indeks Infrastruktur Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	59,52	Awal	72,81	76,99	82,61	91,30	100	100
				Perubahan	87,32	91,60	92,10	92,60	93,10	93,10

NO	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>									
2.6.1	Indeks SPBE		3,22	Awal	-	-	-	-	-	-
				Perubahan	-	-	3,30	3,40	3,50	3,50
<b>2.6</b>	<b>Penanaman Modal</b>									
2.6.1	Pertumbuhan PDRB Sektor Lainnya (%)	<i>Rata-rata pertumbuhan PDRB selain sektor perdagangan, perindustrian dan pariwisata</i>	4,3	Awal	5,3-5,4	5,3-5,4	5,3-5,4	5,3-5,4	5,3-5,4	5,3-5,4
				Perubahan	5,29	-0,27	1,6-2,5	2,6-3,2	3,2-3,7	3,2-3,7
<b>2.7</b>	<b>Kebudayaan</b>									
2.7.1	Jumlah apresiasi seni dan budaya		13	Awal	13	13	13	13	13	13
				Perubahan	8	0	6	8	10	10
<b>3</b>	<b>Fokus Layanan Urusan Pilihan</b>									
<b>3.1</b>	<b>Pariwisata</b>									
3.1.1	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	<i>Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata dibagi jumlah PDRB dikali 100%</i>	n/a	Awal	0,5%	1%	1,5%	2%	2,5%	2,5%
				Perubahan	7,78%	-8,16%	1,5%	2,0%	2,5%	2,5%
<b>3.2</b>	<b>Perdagangan</b>									
3.2.1	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (%)	<i>Jumlah kontribusi PDRB dari Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dibagi jumlah PDRB dikali 100%</i>	6,16	Awal	5,8-6,5	5,8-6,5	5,8-6,5	5,8-6,5	5,8-6,5	5,8-6,5
				Perubahan	5,89	-9,20	1,5-2,4	2,5-3,4	3,5-4,4	3,5-4,4
3.2.2	Laju Inflasi (%)	$\{[(1 + \Delta Inf1)(1 + \Delta Inf2)(1 + \Delta Inf3)]^{1/t} - 1\}$	1,97	Awal	2,5-4,5	2,5-4,5	2,5-4,5	2,5-4,5	2,5-4,5	2,5-4,5
				Perubahan	1,83	1,93	1,9-2,1	1,9-2,1	1,9-2,1	1,9-2,1
<b>3.3</b>	<b>Perindustrian</b>									
3.3.1	Pertumbuhan PDRB sektor Industri (%)	<i>Jumlah kontribusi PDRB dari Kategori Industri Pengolahan dibagi jumlah PDRB dikali 100%</i>	6,16	Awal	5,7-6,1	5,7-6,1	5,7-6,1	5,7-6,1	5,7-6,1	5,7-6,1
				Perubahan	3,72	-3,55	0,7-1,4	1,5-1,9	2,0-2,5	2,0-2,5

NO	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>4</b>	<b>Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan</b>									
<b>4.1</b>	<b>Keuangan</b>									
4.1.1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	<i>Pendapatan Asli Daerah dibagi (Bantuan Pusat, + Bantuan Provinsi + Pinjaman)</i>	23,72	Awal	24,999	25,898	26,797	27,8	27,9	27,9
				Perubahan	27,795	35,610	30,415	30,777	31,145	31,145
<b>4.2</b>	<b>Kepegawaian</b>									
4.2.1	Indeks profesionalitas ASN		Rendah	Awal	-	-	-	-	-	-
				Perubahan	-	63 (Rendah)	71-80 (Sedang)	81-90 (Tinggi)	81-90 (Tinggi)	81-90 (Tinggi)
4.2.2	Sistem Merit		Buruk	Awal	-	-	-	-	-	-
				Perubahan	-	163 (Buruk)	175-249 (Kurang)	250-285 (Baik)	286-324 (Baik)	286-324 (Baik)
<b>4.3</b>	<b>Pengawasan</b>									
4.3.1	Opini BPK	<i>Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah</i>	WTP	Awal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Perubahan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.3.2	Jumlah unit yang mendapatkan predikat WBK/WBBM		0	Awal	1	1	1	1	1	5
				Perubahan	1	0	1	1	1	4
4.3.3	Indeks Manajemen Resiko		1	Awal	-	-	-	-	-	-
				Perubahan	-	-	1	2	2	2
<b>4.4</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>									
4.4.1	Nilai SAKIP	<i>Nilai SAKIP</i>	B	Awal	B	BB	BB	A	A	A
				Perubahan	66,50 (B)	67,42 (B)	70-75 (BB)	76-80 (BB)	80-85 (A)	80-85 (A)
4.4.3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<i>Nilai IKM seluruh PD dibagi Jumlah PD</i>	76,61- 88,30	Awal	76,61- 88,30	76,61- 88,30	76,61- 88,30	76,61- 88,30	76,61- 88,30	76,61- 88,30
				Perubahan	83,87	84,85	81,26- 88,30	81,26- 88,30	81,26- 88,30	81,26- 88,30

NO	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>C</b>	<b>ASPEK DAYA SAING</b>									
<b>1</b>	<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>									
<b>1.1</b>	<b>Penanaman Modal</b>									
1.1.1	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) (Rp)		285.898. 021.000	Awal	333.521 .000.00 0	381.145.0 00.000	428.769. 000.000	476.393 .000.00 0	524.01 7.000.0 00	524.01 7.000.0 00
				Perubahan	333.521 .000.00 0	352.530.0 00.000	360.000. 000.000	365.000 .000.00 0	370.000. 000.000	370.000. 000.000
<b>2</b>	<b>Fokus Iklim Berinvestasi</b>									
<b>2.1</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>									
2.1.1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	<i>Persentase pelanggaran perda yang ditangani + Persentase konflik sosial yang terselesaikan dibagi 2</i>	n/a	Awal	-	-	-	-	-	-
				Perubahan	-	-	94	94,5	95	95
<b>2.2</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>									
2.2.1	Indeks Infrastruktur	<i>30% x Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum + 30% x Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman + 20% x Indeks Infrastruktur LLAJ + 20% x IKLHD</i>	68,81	Awal	74,12	78,80	82,24	86,92	91,60	91,60
				Perubahan	80,96	84,56	85,19	86,06	86,93	86,93



## BAB IX PENUTUP

---

Perubahan dinamika global seperti dampak pandemi Covid-19, melambatnya ekonomi dunia, perubahan asumsi makro ekonomi dan sosial, serta adanya perubahan kebijakan nasional menjadi landasan utama dilakukannya perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023. RPJMD dimaksud merupakan dokumen strategis bagi pembangunan Kota Mojokerto lima tahun ke depan dan merupakan dokumen yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah Terpilih yang dielaborasi dalam visi dan misi. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini.

### 9.1. Pedoman Transisi

Dokumen RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2018 hingga tahun 2023. Setelah berakhirnya RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023, perlu disusun RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2024-2028 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2024. Acuan penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2024 akan mendasarkan pada RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2005-2025, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.

### 9.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Mojokerto serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Walikota Mojokerto berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 kepada masyarakat;

- b. Penyusunan RKPD Kota Mojokerto Tahun 2019 dan 2020 berpedoman pada RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023. Sedangkan Penyusunan RKPD Kota Mojokerto Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023;
- c. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kota Mojokerto dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Perubahan RPJMD Kota Mojokerto tahun 2018-2023;
- d. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kota Mojokerto dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 dengan sebaik-baiknya;
- e. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kota Mojokerto agar segera menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) PD dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 paska penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 ini;
- f. Penyusunan Perubahan RPJMD ini telah dilakukan melalui konsultasi publik, dengan harapan program-program yang tertuang dalam Perubahan RPJMD sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penjaringan aspirasi melalui konsultasi publik tersebut dapat meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, bertugas untuk melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap PD di lingkup Pemerintah Kota Mojokerto.
- g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023;
- h. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kota Mojokerto yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan Perubahan RPJMD ini, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kota Mojokerto untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.
- i. DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Walikota dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD”.

- j. Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah penanggungjawab program dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah yang baru;
- k. Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan PD yang dianggap tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.

### **9.3. Pembiayaan PEMILUKADA Serentak Tahun 2024**

Pembiayaan untuk pelaksanaan PEMILUKADA Serentak tahun 2024 akan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni sesuai dengan tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **9.4. Pengembangan Pembiayaan Pembangunan**

Terhadap program / kegiatan dalam prioritas, namun pemerintah tidak mampu mendanainya seperti penyediaan fasilitas / infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha melalui pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*) maupun melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang tersebar di berbagai daerah di Kota Mojokerto serta mengupayakan dengan memanfaatkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bersumber dari sumber dana yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*public private partnership*) diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah.
- b. Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan.
- c. Kemitraan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta lembaga non Pemerintah baik di dalam negeri maupun Lembaga Internasional

yang sah, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat.

## 9.5. Penutup

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 memuat perencanaan pembangunan yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah Terpilih yang dituangkan dalam visi dan misi. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen Perubahan RPJMD ini. Dokumen Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penetapan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 yang berisi tujuan, sasaran dan pogram pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya Perubahan Renstra Perangkat daerah menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

